

Tuhan itu Baik kepada Semua Orang

TUHAN ITU BAIK KEPADA SEMUA ORANG

Sub-Tema:

*Bersama-sama Seluruh Komponen Bangsa, Mewujudkan
Masyarakat Majemuk Indonesia yang Berkeadaban,
Inklusif, Adil, Damai, dan Demokratis*

Hasil Konferensi Gereja dan Masyarakat VIII

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia

17 – 21 November 2008

di Grand Jaya Raya Hotel,

Cipayung – Bogor

Penyunting:

1. Pdt. Dr. Jan S. Aritonang
2. Pdt. Gomar Gultom, M.Th.

Editor:

Jan Sihar Aritonang

Gomar Gultom

Diterbitkan oleh:

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia

Jakarta, 2009

Kata Sambutan MPH PGI

Katalog dalam terbitan (KDT)

Aritonang, Jan S. & Gomar Gultom (penyunting)

TUHAN ITU BAIK KEPADA SEMUA ORANG

Hasil Konferensi Gereja dan Masyarakat VIII - PGI

17 – 21 November 2008 di Cipayung – Bogor

ISBN 978-979-8558-04-7

© Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Cetakan ke-1: 2009

Dicetak oleh

Isi di luar tanggung jawab pencetak.

Setelah “masa jeda” selama kurang lebih 10 tahun, maka Konperensi Gereja dan Masyarakat (KGM) VIII kembali diselenggarakan pada tanggal 17-21 November 2008 di Cipayung. Inilah KGM II yang dilaksanakan di era Reformasi. Dengan demikian, sedikit banyaknya KGM ini berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan bangsa kita selama 10 tahun terakhir ini. Sekaligus juga menilai bagaimana persisnya interaksi dan relasi gereja terhadap masyarakat selama ini. KGM ini ditempatkan di bawah tema: “*Tuhan Itu Baik Kepada Semua Orang*” (Mzm.145: 9a). Inilah pula tema dari Sidang Raya XV PGI yang rencananya akan diselenggarakan di Mamasa-Sulawesi Barat pada akhir tahun 2009. Sebagai demikian, KGM VIII inipun berfungsi sebagai persiapan bagi Sidang Raya tersebut. Hasil-hasil percakapan, diskusi-diskusi, dan sebagainya yang dihasilkan oleh KGM ini menjadi masukan berharga bagi penyusunan “Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama” (PTPB), sebuah dokumen ekumenis yang bakal mengarahkan perjalanan gereja-gereja dalam lima tahun mendatang.

Sebagaimana kita ketahui, masyarakat kita, baik pada aras nasional maupun dunia masih terus bergumul dengan berbagai krisis yang melandanya. Yang terakhir dan sangat spektakuler, dan yang dampak-dampaknya diramalkan akan mengenai seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, adalah krisis keuangan di Amerika Serikat. Kita masih belum tahu bagaimana persisnya dampak krisis ini bagi bangsa kita nanti. Namun sudah bisa dipastikan, bahwa PHK akan (bahkan sudah) terjadi di mana-mana, yang pada gilirannya bakal makin menambah barisan pengangguran yang selama ini memang sudah panjang. Ujung-ujungnya adalah makin bertambahnya angka kemiskinan (mutlak) di negeri kita. Tentu saja dampak di bidang ekonomi ini akan sangat mempengaruhi berbagai bidang-bidang lainnya (sosial, politik, dan seterusnya).

Dalam KGM tersebut, persoalan-persoalan itu dibicarakan dengan sangat serius dan mendalam. Dipertanyakan misalnya, tidakkah selama ini kita (lebih tepat: Pemerintah) agak mengabaikan pendekatan dari “bawah” (ekonomi kerakyatan/mikro) dan hanya

mementingkan pendekatan ekonomi makro? Kalau saja pendekatan mikro ini tidak diabaikan, maka kendati negeri kita terancam krisis, namun fundamental ekonominya tetap kokoh. Ini salah satu pertanyaan mendasar di samping pertanyaan-pertanyaan lainnya. Bagaimana seyogianya jemaat-jemaat kita bersiap (atau dipersiapkan) menghadapi kemungkinana-kemungkinan terburuk, dicoba untuk dirumuskan. Tetapi pada hakikatnya, bukan hanya jemaat-jemaat kita yang diminta waspada. Seluruh bangsa ini pun diajak untuk mampu mengantisipasi dampak-dampak buruk tersebut. Inilah konkretisasi dari pengakuan bahwa Tuhan Allah bukan saja Tuhan dari suatu golongan agama tertentu, melainkan juga Tuhan atas semua manusia, siapapun mereka. Maka Allah tidak bisa diklaim oleh suatu golongan agama seakan-akan Dia “steril” terhadap golongan-golongan lainnya.

Buku yang ada di tangan Anda ini adalah kompilasi dari hasil-hasil KGM tersebut. Kami mengharapkan buku ini tidak saja menambah koleksi perpustakaan pembaca, tetapi benar-benar disimak dan dipelajari dengan teliti guna memperoleh inspirasi dan semangat untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan dan kesaksian gereja di tengah-tengah masyarakat majemuk Indonesia yang sedang bergumul untuk keluar dari berbagai krisis yang mengelilinginya.

Tidak lupa kami menghaturkan banyak terimakasih, baik kepada Panitia Penyelenggara KGM tersebut, maupun kepada Tim Perencana dan Penyusun buku ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.

Jakarta, 20 Januari 2009

a/n MPH-PGI
Ketua Umum

Dr.A.A.Yewangoe

Daftar Isi

Sambutan MPH PGI	4
Pendahuluan , Pdt. Dr. Jan S. Aritonang	9
Bagian Pertama: Bahan Kajian	
1. Tuhan itu Baik kepada Semua Orang (Kajian Tema), Pdt. Dr. A.A. Yewangoe.....	13
2. Mewujudkan Masyarakat Majemuk Indonesia yang Inklusif, Adil dan Sejahtera (Ceramah Sub-Tema), Dr. Sri Adiningsih.....	25
3. Materi Penelaahan Alkitab:	
a. Jender dan Politik: Belajar dari Wasti dan Ester (Ester 1 dan 2), Pdt. Agustin Kapahang-Kaunang, MTh.....	30
b. Siapkah Gereja dan PGI Menghadapi Masa Depan? (Pengkhotbah 11:1-6), Pdt. Timotius Adi Dharma, M.Si.....	36
c. Gereja sebagai Ranting Tanaman Anggur dalam Realitas Pluralisme dan Kehancuran Ekologi, Pdt. Dr. Eben Haiser Nuban Timo	44
4. Bidang Politik & Ideologi	
a. <i>Position Paper</i>	52
b. Ideologi Politik dan Masa Depan Gerakan Demokrasi di Indonesia, Prof. Dr. Hotman Siahaan.....	55
c. Catatan Pergumulan Konsultasi Nasional Institut Leimena, Drs. Jacob Tobing, MPA	70
5. Bidang Hukum dan HAM	
a. <i>Position Paper</i>	80
b. Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia, Martin Hutabarat, SH	83
c. Realitas Penegakan HAM di Indonesia, Ifdhal Kasim	86

6. Bidang Sosial-Ekonomi	
a. Solusi Krisis dengan Ekonomi Holistik, Prof. Dr. Roy Sembel.....	89
b. AGAPE; Globalisasi Alternatif Mengutamakan Rakyat dan Bumi, Pdt. Dr. Margaretha Hendriks-Ririmasse.....	93
c. MDGs: Reorientasi Pelayanan & Kesaksian Gereja di Indonesia, Chris Wangkay.....	100
7. Bidang Pendidikan	
a. <i>Position Paper</i>	110
b. Gereja dan Pendidikan, Prof. Dr. Jonathan Parapak, M.Eng.....	113
8. Bidang Kesetaraan Jender dan Pemuda	
a. <i>Position Paper</i>	117
b. Kesetaraan Jender, Pinky Saptandari.....	120
c. Keadilan dan Kesetaraan Jender, Pdt Rosmalia Barus	125
d. Tantangan Pemuda Gereja Masa Kini, Frangky Mocodompis	136
9. Bidang Sumber Daya Alam & Lingkungan	
a. <i>Position Paper</i>	142
b. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Prof. Dr. John FoEh.....	145
10. Bidang Pluralisme	
a. <i>Position Paper</i>	173
b. Gerakan Oikoumene dalam Dinamika Pluralisme Agama di dalam Negara Republik Indonesia, Elga J. Sarapung	177
c. Pluralisme dari Perspektif Katolik, Romo Benny Susetyo..	187
d. Pluralisme dari Perspektif Islam, Gus Nuril Arifin.....	191
e. Pluralisme dari Perspektif Hindu, Saras Dewi.....	193
11. Masalah Papua	
a. <i>Position Paper</i>	195
b. Pembangunan Papua Dewasa Ini, Barnabas Suebu, SH	198

12. Bidang Gereja dan Teologi	
a. <i>Position Paper</i>	205
b. Menghidupi Realisme Harapan Kristen dalam Masyarakat Indonesia; Berteologi dan Bergereja Bersama “Semua Orang”, Pdt. Dr. Martin L. Sinaga	209

Bagian Kedua: Rekomendasi KGM VIII

1. Bidang Politik & Ideologi	223
2. Bidang Hukum dan HAM	226
3. Bidang Sosial Ekonomi	231
4. Bidang Pendidikan	234
5. Bidang Kesetaraan Jender.....	238
6. Bidang SDA & Lingkungan Hidup	241
7. Bidang Pluralisme.....	245
8. Masalah Papua	247
9. Bidang Gereja dan Teologi.....	249

Bagian Ketiga: Lampiran-lampiran

1. Laporan Pelaksanaan KGM VIII - 2008.....	258
2. Kerangka Acuan KGM VIII - 2008.....	260
3. Jadwal Acara KGM VIII - 2008	265
4. Daftar Peserta KGM VIII - 2008	267
5. Susunan Panitia Pelaksana KGM VIII - 2008	272
6. Tata Ibadah Pembukaan KGM VIII - 2008	275
7. Tata Ibadah Penutupan KGM VIII - 2008.....	282
8. Menjadi Gereja bagi Orang Lain di Kancan Krisis Global (Catatan Reflektif Menyambut KGM VIII), Weinata Sairin ..	289
9. Dokumen AGAPE (<i>Alternative Globalization Addressing People and Earth</i>)	297
10. Suara2 ‘Nabi’ dari Konferensi Gereja & Masyarakat PGI di Cipayung: Selamatkan Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, dr. Bert Adriaan Supit.....	304

PENDAHULUAN

Pdt. Jan S. Aritonang, Ph.D.¹

Kalau PGI (sebelumnya: DGI) menyelenggarakan Konsultasi (kemudian Konferensi) Gereja dan Masyarakat (KGM) sejak tahun 1962, tujuannya bukanlah sekadar untuk meniru Dewan Gereja-gereja se-Dunia (DGD) yang sebelumnya juga telah menyelenggarakan *Conference on Church and Society*. Sejak awal berdirinya DGI, ia telah memperlihatkan perhatian dan kepeduliannya terhadap berbagai masalah di tengah kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia.²

Karena satu dan lain hal, pada sekitar tahun 2003/04 (menjelang Sidang Raya XIV) PGI tidak menyelenggarakan KGM, dan baru kembali menyelenggarakannya pada akhir 2008. Tujuan KGM VIII ini tentu bukan hanya sekadar menyelenggarakan konferensi ini sebagai suatu rutinitas, sama seperti Sidang Raya yang memang harus diadakan sekali lima tahun. Tujuan utamanya adalah – sebagaimana telah juga dikemukakan pada Kerangka Acuan KGM VIII ini pada Bagian Ketiga buku ini – untuk mengingatkan [kembali] gereja-gereja di Indonesia, khususnya gereja-gereja anggota PGI – bahwa pada saat ini bangsa dan negara kita sedang menghadapi banyak masalah dan tantangan di berbagai bidang kehidupan. Gereja – yang Tuhan utus dan hadirkan di dunia ini – tidak bisa menutup mata terhadap semua itu, melainkan harus mengkaji dan memahaminya, serta menyatakan sikap dan pandangannya, dan memperdengarkan suara kenabiannya.

Kalau Gereja atau gereja-gereja, bersama berbagai lembaga dan organisasi Kristen di Indonesia, melakukan kajian secara terus menerus, maksudnya bukanlah sekadar mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, atau juga oleh gereja-gereja

sendiri, melainkan untuk memikirkan, menemukan, dan menawarkan jalan keluar (solusi) atas berbagai masalah dan tantangan itu.

Ini bukanlah pekerjaan yang sederhana, mengingat bahwa berbagai masalah yang muncul di tengah kehidupan bangsa kita sebagai bagian dari kehidupan umat manusia secara global, sangatlah kompleks. Karena itulah di dalam KGM VIII ini – sama seperti pada KGM-KGM sebelumnya – PGI mengundang sejumlah pakar dari berbagai bidang kehidupan. Bahkan sebelum menyelenggarakan KGM ini PGI – melalui sejumlah Komisi yang ada di dalamnya (Komisi Gereja dan Masyarakat, Komisi Hukum & HAM, dan Komisi Teologi) – telah lebih dulu melakukan studi pendahuluan, agar kajian yang dilakukan di dalam KGM VIII ini menjadi cukup komprehensif.

Kini hasil dari KGM VIII ini telah selesai dirangkum dan disajikan dalam buku ini. Yang direkam di dalam buku ini tentu belum semua hal yang digumuli pada studi pendahuluan maupun pada KGM ini sendiri. Ada banyak cetusan pergumulan, refleksi dan buah pemikiran yang bernas serta cerdas (di luar tulisan-tulisan yang dipresentasikan, lihat Bagian Pertama) yang dikemukakan di sepanjang lima hari KGM ini, yang tidak sempat direkam di dalam buku yang sederhana ini. Itu hanya direkam di dalam Notulen KGM VIII, yang tidak ikut dimuat dalam buku ini. Intisarinyalah yang dapat disajikan, berupa Kesimpulan dan Rekomendasi (lihat Bagian Kedua).

Jumlah peserta KGM kali ini cukup menurun dibandingkan dengan KGM-KGM sebelumnya, a.l. karena banyak yang sebelumnya sudah mendaftar tetapi kemudian tidak jadi datang. Tak sedikit pula yang sudah menghilang sebelum konferensi selesai. Ini mengakibatkan pemborosan yang besar. Apakah ini mencerminkan kurang-seriusan gereja-gereja terhadap berbagai isu dan tantangan yang dihadapi Gereja maupun bangsa dan negara kita? Semoga tidak demikian.

Hasil dari KGM ini tentu tidak boleh diukur hanya dengan telah selesainya KGM VIII dan telah diterbitkannya buku ini. Kita baru bisa berkata bahwa KGM ini berhasil apabila gagasan, pemikiran dan solusi yang ditawarkan di dalamnya diperhatikan dan diimplementasikan oleh semua pihak yang disapa dan yang menjadi alamat dari KGM ini: pemerintah, masyarakat, dan gereja-gereja sendiri. Itu berarti bahwa kita masih harus menunggu sambil terus berjuang mengupayakannya.

¹ Ketua PGI 2004-2009, Ketua Sekolah Tinggi Teologi Jakarta 2007-2011, Pendeta Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI).

² Rangkuman data yang cukup rinci tentang hal ini lihat dalam Jan S. Aritonang & Robert P. Borrang, “Wawasan dan Kiprah Sosial-Ekonomi-Politik”, dalam Jan S. Aritonang (ed.), *50 Tahun PGI – Gereja di Abad 21* (Jakarta: Litbang PGI, 2000), h. 87-138.

Bagian Pertama:
BAHAN KAJIAN

TUHAN ITU BAIK KEPADA SEMUA ORANG

(Kajian Tema)

Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe³

KGM Kedua di Era Reformasi

Konferensi Gereja dan Masyarakat VIII PGI ini adalah yang kedua diselenggarakan di dalam era Reformasi. Yang pertama dilaksanakan pada 29 September – 4 Oktober 1998 dengan tema: “*Carilah Tuhan, Maka Kamu Akan Hidup*”, dan sub-tema: “*Panggilan Kita untuk Bersama-sama Mengatasi Krisis Masyarakat dan Bangsa.*” Pada waktu itu kita baru saja mengalami masa transisi ketika Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengakhiri masa pemerintahannya selama 32 tahun. Maka reformasi dimaknai secara positif sebagai menjalankan perubahan dan pembaruan untuk mencapai kebaikan. Reformasi, dengan demikian, dilihat secara konstruktif, bukan destruktif. Bahkan reformasi adalah upaya re-humanisasi (pemanusiaan ulang), yaitu tatkala hak-hak asasinya dihormati, kebebasan berpikir dan berkarya difungsikan ulang, sendi-sendi dasar demokrasi dikembalikan, kekuasaan-kekuasaan yang memenjarakan manusia dibatasi, struktur-struktur yang menindas diubah dan diperbaiki.⁴

Tema yang dipilih pada waktu itu, yang sekaligus merupakan tema Sidang Raya PGI di Palangkaraya (2000) hendak menegaskan bahwa ada kait-mengait antara “mencari Tuhan” dengan “hidup”. Artinya, kehidupan sejati hanya bisa terjadi apabila kita mencari Tuhan. Maka orientasi kita harus terarah kepada Tuhan. Konsekuensinya bagi gereja-gereja adalah, gereja-gereja harus bertobat. Sedangkan sub-tema memperlihatkan adanya *sense of urgency*, *sense of crisis* di berbagai bidang

³ Ketua Umum PGI.

⁴ Sularso Sopater, “Sambutan MPH-PGI Pada Pembukaan Konferensi Gereja dan Masyarakat 1998”, dalam J.Garang et al. (eds), *Carilah Tuhan, Maka Kamu Akan Hidup, Laporan KGM VII PGI*, (Jakarta: Akademi Leimena, 1999), h. xv.

(ekonomi, lingkungan hidup, pendidikan, iptek, dan seterusnya) yang kait-mengait.⁵ Pendeknya, para “pejuang” reformasi menghendaki diwujudkan suatu *civil society* (masyarakat berkeadaban), suatu masyarakat yang tidak terabsorpsi ke dalam kemahakuasaan negara, tetapi yang benar-benar memperlihatkan kedewasaan di dalam menegakkan hukum yang berkeadilan, hak-hak asasi manusia, juga untuk hidup layak, demokrasi, dan seterusnya.

Setelah 10 tahun reformasi, dan penyelenggaraan KGM VII, sekarang kita melaksanakan KGM VIII. Maka inilah saat yang tepat bagi kita untuk mengevaluasi berbagai “perkembangan” yang dicapai di dalam era ini. Capaian-capaian apakah yang dihasilkan? Benarkah kita makin memanusiakan (re-humanisasi), atau sebaliknya kita sedang mengalami de-humanisasi? Benarkah kita telah keluar dari berbagai krisis, sehingga penyelenggaraan KGM VIII ini misalnya tidak perlu lagi mencantumkan *sense of urgency* dan *sense of crisis* sebagai pemicu? Benarkah perjuangan menegakkan *civil society* (masyarakat berkeadaban) sedang berlangsung, atau kita sedang menuju kepada keruntuhan peradaban?

Sidang Raya XIV PGI yang diselenggarakan di Kinasih-Bogor (2004) merumuskan sub-temanya: “*Bersama-sama dengan Seluruh Elemen Bangsa Mewujudkan Masyarakat Sipil yang Kuat dan Demokratis untuk Menegakkan Kebenaran, Hukum yang Berkeadilan, serta Memelihara Perdamaian.*” Di dalam sub-tema ini, yang kemudian dijabarkan di dalam “Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama” (PTPB), terkandung harapan-harapan bahwa sebuah *civil society* yang kuat akan terwujud.⁶ Tetapi kita juga menyadari bahwa masyarakat berkeadaban itu belum nyata, atau setidaknya kita masih berada dalam proses menjadi. Proses demokratisasi berlangsung, kendati sering kita memahaminya hanya sebagai kemampuan mayoritas mempengaruhi keputusan-keputusan dengan suara terbanyak, dan belum menitik kepada nilai-nilai yang menyertai proses itu, seperti penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, kemampuan untuk berbeda pendapat, dan seterusnya. KKN diperangi, tetapi korupsi berjamaah juga makin

⁵ J.Garang, et al. (eds.), *Carilah Tuhan...*, h. xxiii

⁶ PGI, *Dokumen Keesaan Gereja (DKG)*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia & PGI, 2007).

marak. Berbagai upaya-upaya untuk memperlihatkan keunggulan di bidang ekonomi dilakukan, tetapi kemiskinan juga makin memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. Dan seterusnya. Di bidang kehidupan keberagamaan kita makin saleh, tetapi tidak mampu melihat dan menerima perbedaan-perbedaan pandangan. Kita mengklaim Allah seakan-akan hanya berpihak kepada kita. Kita minta Allah untuk hanya membenarkan apa yang kita lakukan, dan penolakan kita terhadap pihak lain, kita juga menuntut agar Allah melakukannya.

Dalam keadaan masyarakat dan bangsa kita yang seperti ini, kita menyelenggarakan KGM dengan tema, “*Tuhan Itu Baik kepada Semua Orang*” (Mzm. 145:9^a). Tema ini sekaligus akan menjadi tema Sidang Raya XV PGI di Mamasa-Sulawesi Barat pada tahun 2009 nanti.

Retrospeksi Tema SR XIV PGI

SR XIV PGI merumuskan temanya, “*Berubablah oleh Pembaruan Budimu...*”, yang diambil dari Roma 12:2^b. Intinya adalah bahwa budi (*nous*)lah yang pertama-tama mengalami pembaruan, sehingga memungkinkan adanya perubahan. Pembaruan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Hanya dengan pembaruan budi yang membawa perubahan, maka tercipta kemungkinan bagi adanya perubahan dan transformasi di bidang-bidang lainnya. Perubahan dan transformasi di dalam lingkungan gereja, misalnya, tidak dapat terjadi apabila budi tidak diterangi oleh Roh Kudus. Perubahan dan transformasi di dalam masyarakat pun demikian. Tidaklah cukup dengan menciptakan sekian banyak aturan-aturan, UU, dan hukum apabila di dalam diri (yang terdalam dari) manusia tidak terjadi perubahan-perubahan.

Pertanyaannya adalah: apakah selama ini telah terjadi perubahan-perubahan? Tentu saja tidak mudah kita mengukurnya. Apalagi kita masih harus menciptakan alat untuk melakukan pengukuran itu. Tetapi setidaknya-tidaknya ada indikasi-indikasi yang bisa diacu bahwa kita memang sedang bergerak ke depan. Di dalam gereja-gereja kita perubahan-perubahan macam manakah yang sedang terjadi? Kita mengakui bahwa di dalam kebanyakan gereja-gereja ada penambahan jumlah anggota, baik secara alamiah maupun dengan cara-cara lain, seperti baptisan baru, misalnya. Alhasil, gedung-gedung gereja yang

ada dianggap sudah terlalu kecil, dan karena itu dirasa perlu untuk membangun yang baru. Ini tidak selalu mudah direalisasikan di daerah-daerah tertentu, seperti di Jawa Barat dan Banten. Ada juga gereja-gereja yang makin memberikan perhatian kepada sesama yang berada dalam kesulitan-kesulitan dengan melipat-gandakan anggaran belanjanya di bidang diakonia. Ini adalah suatu diakonia karitatif, yang kendati perlu namun masih harus dilanjutkan dengan diakonia transformatif. Dan seterusnya.

Pada pihak lain, kita masih mengalami kesulitan dengan persoalan kesatuan gereja-gereja sendiri. Apa persisnya yang kita maksudkan dengan kesatuan gereja? Apakah kesatuan diusahakan agar dunia percaya, atau agar dunia “yakin” bahwa kita ada? Yang disebut terakhir ini kadang-kadang tercampur-baur dengan pemahaman politik praktis. Visi mengenai keberadaan di dalam sebuah masyarakat majemuk misalnya tidak selalu sama. Ada yang melihat kehadiran gereja sebagai “ada bersama masyarakat”, solider dengan nasib masyarakat di mana gereja berada, sebuah presensia di dalamnya. Tetapi ada juga yang melihatnya sebagai semacam “penaklukan” terhadap masyarakat yang belum mengenal Kristus. “Menangkan Indonesia bagi Kristus”, misalnya, adalah salah satu slogan yang mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan transformasi adalah setidaknya-tidaknya menjadikan Indonesia mengenal Kristus dalam pengertian “konvensional”. Maka tidak heran, kalau pemahaman macam ini lalu memarakan isu kristenisasi di negeri ini. Maraknya penutupan gedung-gedung gereja secara paksa antara lain disebabkan oleh isu ini. Keberadaan gedung-gedung gereja tersebut dilihat sebagai strategi bagi kristenisasi itu.

Apakah semua itu adalah indikasi perubahan oleh pembaruan budi? Sidang Raya XIV memang memperkenalkan slogan, “Gereja bagi Orang Lain”. Yang dimaksud adalah gereja yang terbuka, yang solider dengan nasib bangsa, yang tidak serta merta mengungkapkan diri sebagai *ecclesia triumphant* (gereja yang menang!), melainkan *ecclesia servant* (gereja yang melayani). Tentu tidak mudah merealisasikan ini, apalagi di tengah berbagai tekanan-tekanan yang diarahkan kepada gereja-gereja sekarang ini. Bahkan maksud baik pun bisa diinterpretasi sebagai mempunyai maksud-maksud sampingan. Namun semua itu tidak boleh menyurutkan tujuan gereja untuk melayani masyarakatnya. Tujuan bergereja adalah untuk melayani. Berusaha agar dunia yang kita

tempat layak didiami. Itulah makna gerakan oikoumene, agar *oikos* (rumah) kita sungguh-sungguh menjadi rumah bagi semua.

Retrospeksi Sub-Tema SR XIV PGI 2004

Sub-tema itu berbunyi: *“Bersama-sama dengan Seluruh Elemen Bangsa Mewujudkan Masyarakat Sipil yang Kuat dan Demokratis untuk Menegakkan Kebenaran, Hukum yang Berkeadilan, serta Memelihara Perdamaian.”* PTPB 2004-2009 menegaskan, apabila kita sungguh-sungguh hendak melayani Kristus dan meneruskan Injil-Nya kepada bangsa ini, maka kita harus memberi perhatian serius terhadap persoalan-persoalan di atas.⁷ Apakah masyarakat berkeadaban yang kuat dan demokratis telah terwujud? Kita telah mensinyalir sebelumnya, bahwa proses berdemokrasi memang sedang berjalan di negeri kita. Namun tidak semua kita mempunyai pemahaman yang sama terhadap proses itu. Indonesia memang merupakan negara demokrasi ketiga terbesar sesudah Amerika Serikat dan India, tetapi hal itu baru terlihat di dalam pemilu-pemilu. Perilaku dan keadaban demokratis, seperti misalnya mengakui kemenangan orang lain dan mengakui kekalahan sendiri secara ksatria masih sangat jauh. Berbagai kekacauan di daerah-daerah setelah berlangsungnya pilkada adalah indikator bahwa kita masih belum memahami nilai-nilai demokrasi yang berada di dalamnya, bahwa demokrasi adalah pula perwujudan dari keberadaban. Kalau kita berbicara mengenai kebenaran, adakah kebenaran yang objektif? Kita cenderung berbicara tentang kebenaran menurut versi tertentu. Adakah ukuran untuk itu? Tidak mudah.

Hukum yang berkeadilan. Adakah hukum yang tidak berkeadilan? Tentu saja ada, yaitu ketika hukum-hukum diciptakan bagi kepentingan kekuasaan, dan atau kepentingan golongan tertentu, dan bukan bagi kesejahteraan bangsa. Kasus perda-perda bersyariat di daerah-daerah, misalnya, adalah contoh. UU Anti Pornografi yang kontroversial itu adalah contoh telanjang, di mana bukan kepentingan seluruh bangsa yang diprihatinkan, melainkan kepentingan-kepentingan tertentu. Di sini juga terlihat dengan jelas ketidakmampuan kita melihat dan menghormati kemajemukan. Maka tidak heran bila mereka yang

⁷ DKG, h. 55.

berpendapat atau berpandangan lain, dianggap sebagai musuh yang harus ditaklukkan, seperti dalam kasus Ahmadiyah.

Memelihara perdamaian adalah pula tugas lain yang tidak mudah diwujudkan ketika kecenderungan ketidakadilan marak di mana-mana. Bagaimana mungkin perdamaian dipelihara apabila rakyat Papua belum diberikan hak-hak mereka sebagaimana ditetapkan di dalam UU Otsus? Bagaimana mungkin perdamaian bisa dipelihara, apabila sebagian besar masyarakat masih miskin, sementara sebagian kecil sangat kaya? Perdamaian tidak bisa dipelihara apabila sebagian besar penduduk masih belum mempunyai akses yang cukup ke pendidikan dan kesehatan. Jelaslah bahwa memelihara perdamaian mempunyai sangkut-paut erat dengan perwujudan keadilan di segala bidang. Pemeliharaan perdamaian juga sangat berkaitan dengan rasa kebangsaan. Kebangsaan sejati adalah, ketika setiap orang merasa terikat secara emosional dengan bangsa ini, bukan karena dipaksakan dengan kekuatan senjata.

Tema KGM VIII (SR XV PGI) adalah Lanjutan dari Tema SR XIV

“Tuhan itu baik kepada semua orang” adalah akar guna memahami bahwa gereja ada bagi orang lain. Yesus Kristus, demikian dikatakan dalam PTPB 2004, adalah “Manusia bagi Orang Lain”. “Orang lain”, atau “semua orang” adalah siapa saja yang hidup dan bertetangga dengan kita, yang sama-sama menghirup udara yang sama, meminum air yang sama, yang menikmati matahari pagi yang sama, dan seterusnya. Di dalam interaksi kita dengan sesama, pemahaman ini mencakupi semua bidang kehidupan. Tetapi di Indonesia, relasi antar-umat beragama masih merupakan persoalan akut. Relasi antar-umat beragama sering bisa sangat sensitif. Menyadari hal itu, maka Sidang Raya XIV secara khusus merumuskan sifat relasi itu di dalam PTPB 2004-2009 Bab VIII sebagai berikut: *“Sesungguhnya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan citra-Nya (bnd. Kej.1:26). Allah adalah Allah bangsa-bangsa (bnd. Mzm. 47:9-10). Ia tidak saja mengasihi Israel, tetapi juga Edom, Mesir, dan seterusnya. Yesus Kristus memerintahkan agar kita mengasihi sesama sama seperti diri kita sendiri (bnd. Mat.22:39). Itulah hakikat inkarnasi Ilahi di dalam Yesus Kristus yang adalah Manusia bagi Orang Lain.*

Atas dasar ini, maka kita menjalin relasi dengan sesama tanpa memandang suku, ras, dan golongan.”

Rumusan ini sekaligus menegaskan bahwa dasar kita menjalin relasi dengan orang lain bukanlah sekadar sesuatu yang praktis saja, melainkan alkitabiah. Allah memang adalah Allah Israel, tetapi Israel tidak dapat mengklaimnya sebagai Allah suku. Ia adalah Allah yang bebas, yang mengasihi siapa saja yang dikehendaki-Nya. Maka tidak ada alasan bagi Israel untuk merasa diri lebih hebat dari bangsa-bangsa lainnya. Bahkan kepada Israel diperintahkan untuk juga mengasihi bangsa-bangsa lain, sebagaimana misalnya terungkap dalam kisah Yunus. Di dalam Perjanjian Lama kita membaca bahwa bangsa-bangsa lain mempunyai “andil” di dalam pembentukan bangsa itu, sebagaimana diungkapkan di dalam cerita tentang Rut. Yesus Kristus yang menurut tradisi Injil-Injil bernenekmoyangkan “orang asing”, diyakini bukan saja sebagai Mesias Israel (kendati mereka tidak mengakuinya!), tetapi Juruselamat manusia. “Manusia bagi Orang Lain” berarti: Ia terbuka untuk dimasuki oleh berbagai persoalan-persoalan bangsa-bangsa lain itu.

Berbagai peristiwa-peristiwa di Tanah Air yang cenderung saling mengklaim Allah sebagai allahnya sendiri, baik di dalam kekristenan maupun di dalam agama-agama lainnya, akan menghantarkan masyarakat kita kepada sikap-sikap fanatisme yang tidak perlu. Demikian juga, bisa saja diterapkan sikap kekudusan semu yang lalu menganggap keberadaan “pihak lain” sebagai mengganggu kekudusan itu. Dalam pemahaman teologi Kristen, kita percaya bahwa justru Allah “mencemarkan” diri-Nya guna menyelamatkan mereka yang tercemar itu. Sikap menjadi “Manusia bagi Orang Lain” merupakan amanat yang mesti diteruskan oleh gereja, sehingga gereja tidak menjadi arogan menghadapi pihak-pihak lainnya.

“Tuhan Itu Baik kepada Semua Orang...”

Kalimat ini diambil dari penggalan Mazmur 145. Inilah sebuah mazmur puji-pujian yang diklaim berasal dari Daud. Intinya adalah, Daud hendak mengagungkan kemurahan Tuhan yang telah dialaminya selama ini. Secara struktural Mazmur ini terdiri atas: a. pembukaan puji-pujian (1-4); b. perayaan dan peringatan terhadap perbuatan-

perbuatan Allah yang baik (5-9); puji-pujian terhadap Allah sebagai Raja, Penopang alam-semesta, dan Juruselamat (10-20); d. Kesimpulan (21).

Kita melihat bagaimana kemuliaan dan kebesaran Tuhan diagungkan. Kemuliaan dan kebesaran itu tampak dalam berbagai perbuatan-perbuatan-Nya dan yang disaksikan oleh manusia dari angkatan ke angkatan. Itulah pula alasannya mengapa manusia, dari angkatan yang satu ke angkatan yang lainnya, memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Nya. Dalam ayat 8-13 kita melihat penekanan kepada sifat Allah yang mengasihi dan menyayangi. Keagungan dan kemuliaan-Nya tidak bertindih-tepat dengan kekuasaan yang sewenang-wenang (*potentia absoluta*), tetapi dengan kemurahan-Nya (*potentia ordinata*). Bahkan Ia sabar dan besar kasih setia-Nya. Kalau manusia membicarakan keperkasaan-Nya, bukan dalam arti kesewenang-wenangan itu, tetapi dalam arti kemurahan-Nya. Tuhan bahkan setia dalam segala perkataan-Nya, dan penuh kasih-setia dalam segala perbuatan-Nya. Dalam beberapa bagian dari ayat-ayat 14-20 lebih jelas lagi kita melihat sifat Allah ini yang tidak membiarkan yang lemah jatuh oleh kelemahannya. Bahkan Ia merupakan Penopang bagi semua orang yang jatuh, dan Penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ia digambarkan sebagai Yang memberi makan mereka pada waktunya. Dalam ayat 20 memang secara jelas dikemukakan mengenai “imbalan” yang dikehendaki Allah, yaitu, *“Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi-Nya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan-Nya.”* Ini berarti bahwa tawaran pengasihannya Allah tidak bisa hanya bersifat sepihak. Tawaran harus direspons, agar dengan demikian ia mempunyai makna. Anugerah bukan anugerah yang murah, kata Dietrich Bonhoeffer. Ia adalah anugerah yang ditandai dengan pengorbanan.

Ayat tema ini berada di dalam bagian kedua Mazmur ini yang mengajak untuk merayakan perbuatan-perbuatan Allah yang baik. *“Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya”* (ay.9). Menarik bahwa ayat ini didahului oleh ayat 8 yang menegaskan Tuhan sebagai Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan besar kasih-setia-Nya. Rahmani dan rahimi. Pemahaman seperti ini sangat jelas juga di dalam Islam. Setiap orang Muslim selalu mengucapkan kerahmanian dan kerahiman Allah di dalam melakukan segala sesuatu. Inti ajaran Kristus adalah Allah yang mengasihi.

Bahkan Kristus lebih jauh lagi menerapkan ajaran kasih, yaitu bahwa musuh pun harus dikasihi dan kita berdoa bagi mereka.

Siapakah yang dimaksud dengan “semua orang” di sini? Itulah orang-orang yang berada di luar Israel. Kalau kita memperhatikan makna pemilihan Israel sebagai umat terpilih, yang dikuduskan, diasingkan bagi Tuhan, kadang-kadang kita terkejut bahwa berkat juga disediakan bagi mereka yang berada di luar lingkaran itu. Tetapi sesungguhnya jelas bahwa makna pemilihan itu sendiri tidak untuk diri mereka saja. Gerhard von Rad, seorang ahli Studi Perjanjian Lama misalnya menegaskan, bahwa pemilihan itu adalah untuk pelayanan (*election for service*). Melalui pemilihan Abraham (yang belakangan dikenal sebagai “Bapa Orang-orang Beriman”), semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat (Kej.12:3). Pembentukan (atau lebih tepat: penciptaan) Israel sebagai bangsa (sebagaimana secara luas dikisahkan dalam kitab Keluaran), tidak menempatkan mereka sebagai bangsa yang eksklusif, melainkan justru sebagai yang membuka diri terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya. “*Tuhan itu baik pada semua orang.*” Penggalan kedua dari ayat ini mengacu kepada “rahmat”, suatu istilah Arab yang diindonesiakan dan yang mempunyai sangkut-paut dengan kata-kata rahmani dan rahimi. Rahim mengacu kepada rahim sebagai tempat “asal-usul” manusia, tempat dimulainya kehidupan, tempat dipeliharanya kehidupan. Itulah yang diperlihatkan Allah terhadap segala yang dijadikan-Nya. Segala yang dijadikan mengacu kepada seluruh ciptaan, bukan hanya manusia. Seluruh ciptaan inilah yang merupakan sasaran rahmat Allah. Kalau kita berpegang kepada pandangan ini, maka sangatlah jelas dasar keprihatinan kita kepada keutuhan ciptaan sebagai yang mempunyai dasar kuat di sini.

Semua yang diuraikan mengenai Israel dan sikapnya terhadap bangsa-bangsa sekitar memperoleh aktualisasi di dalam peristiwa Kristus. Di dalam Dia dan seluruh perbuatan-perbuatan-Nya seluruh umat manusia diberkati. Paulus menegaskan: “*Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya.*” (Rm. 10:12).

Di dalam Kenyataannya

Bahwa Tuhan itu baik bagi semua orang, rasanya tidak ada yang menolaknya. Namun di dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Berbagai ketegangan, bahkan konflik-konflik (berdarah) yang mengatasnamakan agama telah memakan korban begitu besar. Di dalam sejarah kita mengenal pertempuran-pertempuran atas nama Tuhan (lihat misalnya buku Karen Armstrong, *Perang Demi Tuhan*), di mana secara jelas Tuhan diklaim berada di pihak masing-masing. Perang-perang salib yang dilancarkan pada Abad-abad Pertengahan masih menimbulkan perasaan traumatis yang tidak habis-habisnya hingga kini. Ketika peristiwa 11 September 2001 terjadi, dunia Islam goncang ketika Presiden George W. Bush Jr. mempergunakan istilah *crusade*, istilah yang mengingatkan kepada perang-perang salib. Apakah umat manusia akan terjatuh lagi ke dalam kancah perang atas nama Tuhan ini? Rasanya kita tidak menghendaki ini. Kita telah merasakan akibatnya yang pahit ketika terjadi konflik-konflik berdarah bernuansa agama di Maluku, Maluku Utara, dan Poso.

Pada aras dunia telah terjadi aksi-reaksi. Tuduhan kepada pemerintah Amerika Serikat yang telah menerapkan kebijakan yang tidak adil (*global injustice*) di bidang ekonomi, dan berdampak ke bidang-bidang lainnya, diungkapkan melalui aksi-aksi teror di mana-mana. Siapakah teroris sesungguhnya, lalu menjadi pertanyaan menarik. Di mata Amerika Serikat kelompok-kelompok ekstrem di dunia Islam adalah teroris, sedangkan bagi kelompok ini, justru Amerika-lah yang teroris. Tidak dapat disangkal bahwa di Amerika memang muncul sikap fundamentalis di dalam beragama, yang dikenal sebagai *neo-fundamentalism*. Mantan Presiden Jimmy Carter mensinyalir itu di dalam bukunya berjudul *Our Endangered Values*. Menurut dia, nilai-nilai yang disebarkan oleh Amerika yang diwarnai oleh *neo-fundamentalism* ke seluruh dunia sangat berbahaya justru bagi keamanan dunia apabila aspek keadilan tidak diperhatikan. Menurut Carter, justru orang-orang seperti inilah yang berada di Gedung Putih sekarang yang mengelilingi Si Pengambil Keputusan, Presiden George W. Bush Jr. Bagi mereka hanya ada “hitam” dan “putih”, *axis of evil* yang harus dibinasakan. Pandangan seperti ini, apalagi kalau didasarkan atas pandangan-pandangan Alkitab (yang sempit!) seperti dituliskan oleh Craig Unger, *The Fall of the House of Bush*, (New York, 2008) sangat

berbahaya. Dunia kita akan terbagi dalam dua kubu yang saling bertentangan: *putih* (yang “percaya” kepada Tuhan), dan *hitam* (yang tidak “percaya”). Lalu yang hitam itu harus diputihkan, atau kalau tidak, dibinasakan.

Untunglah dunia kita tidak separah itu. Selalu ada orang-orang yang berpikiran jernih. Kendati orang-orang ini minoritas di dalam jumlah, yang oleh Arnold J. Toynbee (pendekar sejarah) disebut “*creative minority*”, namun mereka telah memberikan sinar pengharapan. Kita sebut misalnya sepucuk surat panjang yang dikirim oleh 138 tokoh Islam sedunia kepada para pemimpin gereja-gereja di seluruh dunia. Surat terbuka ini menegaskan bahwa ada persamaan di antara kami dan kamu. Ada “*Common Word*” yang seharusnya dihayati bersama. Common Word itu adalah kasih. Surat yang ditulis pada 13 Oktober 2006 itu telah mendapat tanggapan positif dari 300 tokoh-tokoh Kristen di seluruh dunia (lihat buku *Common Word*, Australia: Halal Books, 2008). Baru-baru ini kita juga melihat prakarsa Raja Abdullah dari Arab Saudi yang memprakarsai pertemuan-pertemuan di antara tokoh-tokoh Islam dan Kristen (bahkan Yahudi) sedunia. Tentu saja di dunia Kristen pertemuan-pertemuan seperti itu bukan hal baru. Tetapi bahwa prakarsa sekarang diambil oleh Raja Saudi, tentu perlu mendapat perhatian istimewa. Demikian juga, dua minggu lalu diselenggarakan dialog untuk kali pertama antara Katolik dan Islam di Vatikan.

Inikah pengesahan bahwa Tuhan memang sungguh-sungguh baik bagi semua orang? Semoga demikianlah. Tetapi bagi gereja (dan orang-orang Kristen) semua ini mesti ditempatkan di dalam kerangka imannya yang percaya kepada anugerah Allah yang disampaikan kepada semua orang. “Allah menerbitkan matahari-Nya, baik bagi orang baik, maupun bagi orang fasik”, demikian Yesus.

Tentu percakapan-percakapan seperti ini akan mereduksikan (bahkan menghilangkan) rasa kecurigaan di mana-mana sekarang. Hans Küng, seorang teolog Katolik terkenal, berkata bahwa perdamaian sejati di antara umat manusia tidak akan tercapai kalau tidak ada perdamaian di antara para penganut agama-agama yang berbeda itu. Sang teolog ini bukan sedang bermimpi. Ia mendasarkan pernyataannya atas penelitian sejarah yang saksama. Tidak ada konflik

lintas agama yang menguntungkan. Semuanya mengarah kepada kebinasaan bersama.

KGM VIII

KGM ini akan mengarahkan perhatian terhadap berbagai bidang: Gereja dan Teologi; Papua; Hukum & HAM; Pendidikan; Pluralisme; Kesetaraan Jender; Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup; Politik & Ideologi. Semua pembicara tentu secara spesifik akan membahas pokok-pokok ini dari titik berangkat dan perspektif masing-masing. Namun semuanya berfokus pada “Kebaikan Allah” yang telah diperlihatkan kepada semua orang. Semua pembahasan ini pada akhirnya akan memperlihatkan bahwa Allah sungguh menyatakan kemurahan-Nya kepada semua makhluk. Itulah Kabar Baik. Itulah Injil. Itulah juga yang ingin diterjemahkan melalui sub-tema: “*Bersama-sama Seluruh Komponen Bangsa, Mewujudkan Masyarakat Majemuk Indonesia yang Berkeadaban, Inklusif, Adil, Damai, dan Demokratis.*”

2

Mewujudkan Masyarakat Majemuk Indonesia yang Inklusif, Adil, dan Sejahtera

(Ceramah Sub-Tema)

Dr. Sri Adiningsih, M.Sc.

Sebagai ekonom, maka hal yang akan saya sampaikan adalah seputar kondisi ekonomi Indonesia dalam kaitannya dengan mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif, adil, dan sejahtera. Hal ini sangat menarik, karena berkaitan dengan konteks Indonesia saat ini, meskipun tidak mudah.

Ekonomi global semakin dinamis dan kompetitif, dengan tingkat volatilitas yang meningkat, tengah menghadapi krisis keuangan dan ekonomi. Kondisi krisis ekonomi global, secara pasti, banyak yang pernah mengalaminya, misalnya dana pensiun yang merugi karena investasi di reksadana atau saham. Kita pasti mengikuti dengan cermat di lingkungan ekonomi Indonesia saat ini. Kondisi ekonomi global ini serius sekali, karena perekonomian global 10 tahun terakhir menghadapi dinamika yang luar biasa. Biasanya hanya 4-5 negara di Asia yang terkena dampak dan di Amerika hanya ada berapa negara yang terkena. Tetapi sekarang semua terkena sakit karena yang terkena adalah negara Amerika sebagai negara terbesar di dunia. Sebab hampir 40% ekonomi dunia dikuasai Amerika.

Para ekonom pemenang hadiah Nobel mengatakan bahwa krisis global ini tidak akan mudah dan tidak akan pendek, melainkan akan semakin memburuk, semakin luas, dan lama. Dan dampaknya yang lebih besar bukan di negara maju, melainkan di negara-negara berkembang. Sumbernya memang di negara maju, tetapi ledakannya ada di negara yang sedang berkembang. Tanggapan optimis datang dari ekonom Paul Kruffman, pemenang Nobel ekonomi tahun 2008, yang mengatakan bahwa krisis ekonomi ini akan memburuk dulu sebelum membaik. Jelasnya, krisis ekonomi global ini akan lebih parah dibandingkan dengan krisis yang terjadi tahun 1929. Ketika itu ada

negara yang bisa langsung pulih di tahun 1930, tetapi ada juga yang baru pulih tahun 1940. Bagi kita, krisis ini juga tidak sesederhana yang kita pernah alami di tahun 1997.

Jalur Transmisi Krisis Global

Jalur transmisi krisis ekonomi global itu biasanya adalah: perdagangan internasional, kredit atau aliran dana, dan mata uang. Ketiga jalur transmisi ini akan makin kelihatan dampaknya di Indonesia, kalau kita tidak membuat kebijakan-kebijakan ekonomi dengan cepat dan cermat. Sudah lebih dari satu dekade reformasi ekonomi, secara umum ekonomi meski *on track*, namun ekonomi belum bangkit, bahkan krisis keuangan & ekonomi global mulai tertransmisikan ke Indonesia. Maka, muncul kekuatiran: akankah krisis keuangan & ekonomi menghantam kita lagi?

Stabilitas ekonomi makro mulai tergoncang (besarnya dana jangka pendek internasional), padahal pasar keuangan global yang semakin tinggi volatilitasnya tengah menghadapi krisis yang serius. Ekonomi semakin terbuka dan liberal, sehingga keterkaitan ekonomi dan pasar semakin meningkat. Oleh karena itu, krisis keuangan dan ekonomi global dengan cepat menyebar dan masuk Indonesia. Integrasi ekonomi membuat persaingan semakin tajam, namun daya saing internasional masih rendah meski sempat membaik, tetapi kemudian cenderung menurun.

Sebenarnya kalau kita ikuti dengan dekat penjelasan Pemerintah, kita tidak perlu takut dengan ekonomi Indonesia. Sebab, pasar keuangan kita tergolong *simple*, seperti Reksadana dan Obligasi. Tetapi ada beberapa kelemahan yang membuat kita mengalami krisis yang dalam dan panjang tadi. Kelemahan besar itu antara lain:

1. Stabilitas ekonomi kita tergantung pada dana jangka pendek internasional. Dana tersebut milik manajer investasi global yang tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh pasar yang terus bergerak dan berkembang. Mengandalkan dana jangka pendek untuk cadangan devisa cukup merugikan, karena berlangsung secara cepat dan rentan terhadap krisis. Inilah yang menjadi masalah kita. Kondisi memprihatinkan dialami Indonesia, seperti Dana Pensiun. Hal inilah yang membuat Presiden Indonesia

bersemangat ke Amerika untuk minta supaya ada mekanisme keuangan di luar IMF. Ini merupakan usaha mendapatkan bantuan dana luar negeri tanpa melalui IMF lagi. Indonesia berusaha untuk tidak masuk ke IMF lagi, sebab sudah tiga kali keluar masuk lembaga keuangan internasional itu.

2. Industrialisasi. Hal ini dikarenakan industrialisasi Indonesia sangat tinggi komponen impornya, sehingga membuat Indonesia semakin sulit untuk bersaing. Ini adalah deindustrialisasi yang merupakan kelemahan kita. Dalam situasi ekonomi berat, terkadang kita berharap pada konsumsi masyarakat. Tetapi jangan lupa, kandungan impor untuk konsumsi Indonesia sangat tinggi, seperti: bahan makanan dan peralatan elektronika.
3. Kebijakan fiskal jangka pendek lebih dominan. Di daerah, provinsi dan kotamadya, yang namanya politisi cenderung berorientasi pada yang bisa memberikan keuntungan secara cepat. Tetapi masalahnya adalah infrastruktur tidak digarap. Listrik misalnya. Bandingkan dengan Malaysia dan China, mereka jauh lebih baik. Point pentingnya adalah bahwa infrastruktur Indonesia belum baik. Permasalahan selanjutnya adalah defisit APBN semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Solusi yang diambil pemerintah adalah menerbitkan obligasi yang bunganya bisa mencapai 20%. Tetapi *financing* dengan menerbitkan obligasi semakin sulit dilakukan sehingga utang Luar Negeri akan meningkat. Untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri, Indonesia sudah enggan masuk ke IMF lagi. Itulah sebabnya Presiden kita mengusulkan supaya ada lembaga baru, selain IMF.

Bagaimana Ekonomi Indonesia ke Depan?

Krisis keuangan dan ekonomi global akan berlangsung lama dan dalam. Diperkirakan akan mulai membaik pada tahun 2010. Krisis keuangan dan ekonomi global yang dalam dan panjang ini, jika tidak ditangani dengan cermat dan hati-hati, akan memicu krisis keuangan & ekonomi di negara sedang berkembang yang lebih dalam dan lama, seperti Indonesia. Maka instabilitas ekonomi makro akan memburuk. Pertumbuhan ekonomi kita akan turun (5%?). Sektor modern dan

resource-based akan terpukul. Dampaknya adalah: kemiskinan dan pengangguran akan naik.

Kantong kemiskinan selama ini banyak terdapat di Indonesia Timur dan daerah yang semakin jauh dari Jakarta. Tetapi akibat keterpurukan ekonomi sekarang, maka kemiskinan akan tersebar lebih merata di seluruh Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa. Sekarang ini jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 34 juta lebih. Jumlah ini bisa lebih besar jika memakai tolok ukur World Bank. Yang jelas, angka kemiskinan kita masih sangat tinggi.

Usaha mengurangi kemiskinan dan pengangguran ini tidaklah mudah, karena kualitas SDM kita yang masih rendah dan terbelakang, masih di bawah Vietnam. Ini juga yang membuat kemampuan menahan dampak krisis semakin tidak mudah, sehingga kehidupan akan semakin berat. Jika Kualitas SDM bagus maka ia dapat dengan mudah pindah dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain.

Saya berharap, krisis yang bermula dari Amerika Serikat ini tidak seburuk yang diperkirakan. Tetapi, sekali lagi, krisis ini harus ditangani secara hati-hati. Salah satu yang menarik perhatian kita di tengah krisis ekonomi seperti ini adalah Pilar Ekonomi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Hal ini penting karena: a). dominan dalam perekonomian, b). semakin berkembang, dan c). pemberi lapangan kerja terbesar

Peran Gereja

Peran Gereja dan umat Kristiani di tengah masyarakat yang semakin berat kehidupannya ada banyak, antara lain adalah: ikut memerangi keterbelakangan dan kemiskinan. Gereja harus inklusif, seperti ditekankan dalam Matius 22:39. Ayat ini jelas sudah inklusif, di mana kita harus membangun masyarakat seluruhnya karena kita harus mengasihi seluruh manusia seperti diri kita sendiri. Itu wajib kita lakukan, untuk memerangi keterbelakangan dan kemiskinan.

Gereja juga bisa menjadi pilar penting dalam gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui usaha-usaha kecil (*small is beautiful*). Ini bisa kita lakukan melalui Yayasan-yayasan yang banyak kita miliki, supaya mengambil bagian dan berperan lebih banyak.

Selain ini, kita juga bisa berperan dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Saya kira, bahasa Inggris itu sangat penting, seperti yang pernah dilakukan PM Mahatir Mohammad di Malaysia, yang memasukkan program Bahasa Inggris di seluruh sekolah-sekolah. Kalau kita bisa bahasa Inggris kita bisa lebih berperan dengan baik.

Semoga KGM ini bisa lebih membantu kita selaku gereja agar lebih berperan, sehingga kita mampu untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera.

3 Materi Penelaahan Alkitab

3a Jender dan Politik; Belajar dari Wasti dan Ester (Bahan PA: Ester 1 dan 2)

Pdt. Augustin Kapahang-Kaunang, M.Th.⁸

Pendahuluan

Tema Penelaahan Alkitab ini bersentuhan dengan tiga dari delapan isu dalam Konferensi Gereja dan Masyarakat VIII ini, yaitu Kesetaraan Jender, Politik dan Pendidikan. Menurut hemat saya, pada kesempatan yang istimewa ini, sangatlah perlu pemahaman bersama tentang apa itu Jender. Sebab, ada banyak pendapat tentang apa itu jender. Sebagai contoh, sangat sering kita mendengar orang berkata tentang jender yang berarti bicara tentang peran perempuan saja, dan sangat jarang bahkan mungkin tidak pernah orang bicara tentang peran laki-laki sebagai peran jender juga. Selama ini laki-laki menjadi tolok ukur kemanusiaan/kebudayaan (*patriakbi* = bapak sebagai asal mula yang menentukan, laki-laki berkuasa; *androcentris* = laki-laki sebagai inti, yang menentukan budaya, segala peristiwa dilihat dari sudut laki-laki). Bila ada perempuan yang 'mulai' terlibat aktif dalam ranah publik, seperti menjadi kepala desa dan kepala daerah (kabupaten/kota) atau ketua DPRD atau kepala dinas/lembaga, maka kita mendengar ucapan seperti : 'nah itu baru namanya jender', atau: 'nah jender sedang menunjukkan perannya'. Ucapan ini tidak pernah ditujukan bagi laki-laki yang sedang berperan penting, sebab seolah-olah memang itu tempatnya laki-laki.

Jender berarti jenis kelamin manusia: laki-laki dan atau perempuan. Ada banyak definisi tentang jender. Namun substansinya sama, yaitu jender adalah jenis kelamin yang dikonstruksi oleh masyarakat. Masyarakatlah yang menetapkan bahwa perempuan

⁸ Dosen Fakultas Teologi UKIT, Tomohon: tienkaunang@yahoo.com

mempunyai sifat, peran, dan statusnya begini dan begitu; dan laki-laki mempunyai sifat, peran dan statusnya begini dan begitu. Kita menyadari bahwa masyarakat kita sangat beragam dari segi suku/bangsa dan budaya. Budaya-budaya ini terus berkembang dan saling berinteraksi, apalagi dengan kenyataan bahwa dalam satu kampung/desa/kota berdiam orang dari berbagai suku/bangsa. Jender sebagai konstruksi masyarakat berbeda dalam setiap suku/tempat dan berbeda dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, konstruksi masyarakat ini tidaklah mutlak, karena terus berubah dan berkembang. Sifat, peran, dan status jender bukanlah ditentukan oleh sang Pencipta.

Jender berbeda dengan seks, meskipun keduanya diterjemahkan sama yaitu jenis kelamin. Seks berarti jenis kelamin yang mengacu pada ciri organ biologis : ada yang terlahir sebagai perempuan dan ada yang terlahir sebagai laki-laki. Seks dalam pengertian inilah yang dikategorikan sebagai kodrat. Kodrat (dari kata Arab *qudrat*) berarti ditentukan Tuhan, yang terberi, yang tidak dapat diubah. Jadi, pekerjaan mencuci pakaian, memasak, menyeterika, dan segala urusan domestik lainnya, bukanlah kodrat perempuan, juga bukan kodrat laki-laki, melainkan pekerjaan manusia. Tidak ada pekerjaan yang berjenis kelamin.

Mudah-mudahan dengan uraian singkat di atas kita sudah mempunyai persepsi yang sama tentang hal jender. Untuk itu, saya mengajak kita untuk membicarakan topik PA kita ini dengan bertitik tolak dari kaum perempuan. Mengapa ? Berbicara tentang perempuan pastilah juga akan menyentuh laki-laki. Meskipun belum tentu berbicara tentang laki-laki lalu juga menyentuh perempuan. Maksud saya ialah, terlalu sering dalam diskusi dan praktik kehidupan, laki-laki mendominasi dan perempuan membiarkan atau dibiarkan berdiam diri, yang berakibat pada memandang rendah hak dan martabat perempuan. Berbicara tentang jender perempuan di sini merupakan pintu masuk untuk berbicara tentang manusia sebagai Gambar Allah. Kejadian 1 dan 2 jelas menyaksikan bahwa manusia: perempuan dan laki-laki, sama-sama mempunyai tugas untuk mengelola bumi, menata bumi/kota/negara (arti kata Yunani 'polis' kemudian menjadi politik). Keduanya sama mengemban dan mengembangkan amanat Tuhan ini. Keduanya setara dan semartabat di hadapan Tuhan dan dengan demikian juga di antara manusia. Namun sayang sekali, landasan

teologis alkitabiah tentang penciptaan manusia ini telah ditafsirkan dengan 'sebelah mata' saja. Tafsiran dengan cara inilah yang melahirkan berbagai ajaran dan praktik gereja-gereja dan bermasyarakat yang bias jender. Tafsiran ini telah turut melegitimasi peran jender menjadi 'mutlak'. Akibatnya, perempuan didiskriminasikan, disubordinasikan, dan dimarjinalkan.

Saya mengajak kita bersama menelaah-bersama dua tokoh perempuan yang berada bersama dengan seorang laki-laki yang berkuasa, seorang raja bernama Ahasyweros.

Pemahaman Teks

1. Dalam susunan Perjanjian Lama (PL) Ibrani, kitab Ester termasuk ke dalam kelompok *Ketubim* atau Kitab-kitab, lebih khusus lagi termasuk dalam Lima *Megilot* (Gulungan-gulungan). Menurut susunan PL dalam bahasa Indonesia, kitab Ester termasuk kelompok Buku-buku Sejarah. Dalam tradisi Yahudi, kitab Ester dibaca pada hari raya Purim, yaitu pesta memperingati keselamatan orang Yahudi dari rencana jahat Haman. Dengan kata lain, kitab ini berisi cerita tentang kenyataan riil kehidupan umat Israel yang mau tidak mau berhadapan, bahkan hidup bersama, dengan umat/bangsa lain. Hal istimewa dari kitab ini ialah: di dalamnya tidak pernah tertulis kata Allah atau Tuhan.
2. Umat Israel yang berada dalam pembuangan di Babel berhasil dibebaskan oleh seorang raja yang tidak 'seiman', yaitu raja negeri Persia bernama Koresy atau Cyrus (tahun 539 s.M). Tuhan Allah berkenan memakai bangsa lain untuk menjadi penolong/pembebas umat-Nya. Salah seorang raja Persia adalah raja Ahasyweros. Raja inilah yang diceritakan dalam pasal 1 dan 2.
3. Ahasyweros atau Xerxes (485-465 s.M) beristerikan Wasti nan cantik dan elok rupanya. Sangat jelas dalam pasal 1 diceritakan bahwa raja dan ratu masing-masing mengadakan perjamuan atau pesta. Raja mengadakan perjamuan atau pesta bagi semua pejabat, pegawai, dan bangsawan. Tidaklah meleset kalau dikatakan bahwa Raja berpesta dengan sesama lelaki saja. Ratu mengadakan pesta bagi semua perempuan di dalam istananya. Dalam suasana pesta (pora) yang terpisah satu dengan yang lain, raja pun teringat pada

isterinya. Ia ingat isterinya dalam suasana hati yang riang gembira karena minum anggur. Sudah dapat ditebak, raja lagi mabuk. Iapun memerintahkan pegawai/sida-sida (laki-laki yang tidak mampu menjadi bapak – orang kebiri) agar membawa Wasti menghadapnya untuk kemudian memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar.

4. Perintah raja ditolak oleh ratu. Sudah pasti raja pun menjadi geram dan murka. Atas pertimbangan para ahli undang-undang dan hukum, maka keratuan Wasti dicabut (1:19). Ia diceraikan. Menurut para ahli ini, Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang berada dalam wilayah raja (1:16). Ada ketakutan kalau nanti kelakuan ratu ini dicontoh oleh semua perempuan. Laki-laki/suami takut kalau-kalau perempuan/isteri tidak lagi menghiraukan mereka.
5. Mari kita mencari tahu tentang sikap penolakan Wasti ini. Telusuran saya ialah, baginya kecantikan adalah harga diri. Kecantikan atau keelokan-parasnya adalah sesuatu yang alamiah. Tentu ia sangat bersyukur karena boleh menjadi ratu yang cantik. Namun ia tidak setuju bila kecantikannya dipertontonkan kepada khalayak ramai layaknya sebuah kontes ratu kecantikan, sekalipun diminta oleh suaminya (raja). Kecantikannya bukan untuk dieksploitasi. Apalagi permintaan suaminya datang karena sedang minum anggur, artinya tingkat kesadarannya kurang. Mungkin raja sedang mabuk. Permintaan orang mabuk tak perlu ditanggapi. Kecantikannya bukanlah untuk kesenangan suami yang sedang dalam keadaan mabuk. Wasti adalah tipe orang (perempuan) yang tidak mau memamerkan diri. Kecantikannya bukan untuk kepujian diri sendiri, apalagi kepujian orang lain, termasuk suaminya sekalipun.
6. Ester adalah seorang Yahudi. Ia berada bersama orang sebangsanya yang sedang berada di daerah kekuasaan Ahasyweros. Ester terpilih menjadi seorang ratu/isteri raja dari sekian banyak perempuan yang cantik. Raja memilihnya bukan hanya karena ia cantik, melainkan “gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya...” (2:9). “Maka Ester dikasihi

oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak dara lain ...” (2:17). Ester bukan hanya berparas elok, melainkan memiliki ‘*inner beauty*’ atau kecantikan yang muncul dari dalam dirinya, atau sesuatu hal yang menunjukkan kepribadiannya yang sesungguhnya, sejalan dengan apa yang tampak dari luar, bukan dibuat-buat.

7. Baginda raja tidak salah memilih Ester. Sebagai seorang isteri raja, Ester berperan aktif positif dari dalam lingkungan istana untuk keselamatan banyak orang yaitu bangsa Persia dan bangsa Yahudi. Ester melakukan dua hal yaitu: pertama, ‘menyelamatkan’ raja dari rencana pembunuhan oleh Bigtan dan Teresy (2:21-23). Menyelamatkan raja berarti menyelamatkan bangsa Persia. Kedua, ‘menyelamatkan’ orang sebangsanya yaitu orang Yahudi dari upaya pembunuhan Haman (3:1-15). Ia menjadi ratu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi terutama untuk bangsanya. Dari paras yang elok disertai kepribadian yang cantik, Ester menjadi ‘penyelamat’ bagi suaminya/bangsa Persia dan bagi bangsanya.

Bahan Diskusi

1. Antara konsepsi/kebudayaan dengan praktik hidup sering berbeda, bahkan bertentangan. Padahal konsepsi/kebudayaan sejatinya bertumbuh dan mencerminkan kenyataan riil. Dalam kaitan dengan peran Wasti dan Ester, bagaimanakah tanggapan saudara tentang peran keduanya dan apa relevansinya dengan peran kita (perempuan dan laki-laki) dalam masyarakat ?
2. Pembelajaran apa yang saudara peroleh dari peran Wasti ?
3. Bagi saya, Ester sedang berpolitik. Bagaimana tanggapan saudara?
4. Bagaimana pendapat saudara tentang cerita berikut ini:
Seorang ibu yang suaminya bertugas sebagai Hukum Tua di salah satu desa di Minahasa bercerita tentang penyaluran ‘raskin’ (beras untuk orang miskin) di desanya. Ia ‘terpaksa’ membantu (atau lebih tepat mengambil peran aktif) dalam penentuan, penyaluran dan penyusunan pertanggungjawaban raskin tersebut. Hal ini dilakukannya, sebab dari segi tingkat pendidikan, ia lebih

dari suaminya. Ia lebih berani menghadapi sang pengawas (Banwas) yang datang memeriksa penyaluran raskin yang meminta uang jalan. Ia ‘mempengaruhi’ hukum tua untuk tidak memberi uang jalan seperti yang diminta oleh sang pengawas tersebut. Tentang penyaluran raskin ada kesulitan. Jatah setiap kepala keluarga 15 kg. Padahal satu karung beras 20 kg yang tiba di desanya tidak lagi seberat 20 kg. Untuk itu, penyalur harus dapat membuat mengatur dengan baik, yaitu tetap membagikan per kk 15 kg. Konsekuensinya, ada keluarga yang tidak dapat jatahnya, dan ada sekian kg yang tersisa di tangan penyalur. Kemudian, pengaturan (kebijakan) diubah lagi yaitu memberi satu karung (tercatat 20 kg) per kk. Kebijakan ini berakibat makin banyak kk yang tidak dapat menerima jatahnya. Untuk itu, diaturlah secara bergiliran. Pergumulannya ialah: apakah ini kebijakan yang betul? Apakah di sini ada indikasi korupsi? Siapa yang salah di sini? (Cerita ini *disbare* sang pelaku dalam FGD dan Workshop Hasil Penelitian tentang Perempuan dalam Gerakan Anti Korupsi yang berlangsung di Manado pada 11 Agustus 2008)

3b Siapakah Gereja dan PGI Menghadapi Masa Depan?

(Bahan PA: Pengkhotbah 11:1-6)

Pdt. Timotius Adhi Dharma, M.Si.⁹

Pendahuluan

Perkembangan yang luar biasa telah terjadi di kehidupan yang ultra modern ini. Ada tiga hal yang melatarbelakangi perkembangan yang begitu cepat ini. *Yang pertama*, perkembangan ilmu untuk ilmu. Perkembangan ilmu ini terjadi karena dikembangkan oleh kelompok idealis atau “secara alamiah” berkembang dengan sendirinya (dikembangkan oleh masyarakat penggunanya). *Yang kedua*, karena faktor politik. Ilmu dikembangkan untuk kepentingan politik tertentu (jangan dipahami hanya untuk kepentingan yang negatif). Dalam perjuangan untuk *survive*, dengan memperhatikan konteks yang berkembang, maka ilmu bisa menjadi alat politik dan kekuasaan (*conquer*) yang maha hebat. *Yang ketiga*, karena faktor ekonomi. Ekonomi sejak revolusi industri berkembang dengan sangat cepat meninggalkan ilmu-ilmu yang lain. Pada dasarnya prinsip ekonomi ini sangat sederhana, tetapi ketika ia dijadikan motif dan tujuan dari kehidupan maka semua ilmu ditundukkan untuk menjadi kereta dan alat bagi kepentingan-kepentingan ekonomi. Strategi banyak dikembangkan, ilmu dilipat-gandakan dengan satu tujuan, yakni tercapainya peningkatan yang besar di bidang ekonomi. **Tech Writer Society**, organisasi penulis teknologi, memantau kecenderungan perkembangan teknologi yang bakal berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia di masa datang. Yang dimaksud dengan perkembangan teknologi yang banyak dilirik oleh para ilmuwan adalah perkembangan di bidang teknologi informasi (komputer), khususnya *e-commerce*. **Charles Finnie**, seorang analis perdagangan, menamakan *e-commerce* sebagai *infomediaries*, perantara penjual dan pembeli di pasar informasi. Dunia akan dikuasai oleh teknologi yang berorientasi pada peningkatan daya jangkau ekonomi.

⁹ Sekretaris Umum Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI).

Bagaima gereja memainkan peran dalam perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat dan bahkan ultra cepat ini? Kita harus akui bahwa uang dan mamon sangat memegang peranan penting di kehidupan kita sekarang dan di masa mendatang. Geliat mamon tentulah pada satu sisi menjanjikan masa depan yang cerah (tentu saja bila ada kestabilan), namun pada sisi yang lain sangat rentan dengan perubahan dan bahkan akan banyak memakan korban. Menyimak perkataan dari Mensius saat dia menghadapi Raja Hui dari Liang, kita bisa manarik pelajaran penting. Raja Hui berkata kepada Mensius:

“Guru yang mulia, karena Anda datang dari jauh, saya kira Anda punya nasehat yang hebat yang akan menguntungkan kerajaan saya.”

“Mengapa Yang mulia berbicara tentang keuntungan? Orang seharusnya hanya berbicara tentang kebaikan dan kejujuran. Jika seorang raja berkata: ‘Bagaimana kerajaanku bisa memperoleh keuntungan?’, seorang terhormat akan berkata: ‘Bagaimana keluargaku bisa mendapat keuntungan?’, orang biasa juga berkata: ‘Bagaimana aku bisa mendapat keuntungan?’. Maka setiap orang dari kalangan atas hingga bawah akan saling berkata demi keuntungan, dan negara akan terancam. Seperti seorang adipati dengan seribu kereta perang membunuh raja dengan sepuluh ribu kereta perang. Dan raja dengan seratus kereta perang membunuh adipati dengan seribu kereta perang. Seseorang bisa puas memiliki seribu dari sepuluh ribu, atau seratus dari seribu, atau satu dari sepuluh. Tetapi bila ia mengutamakan keuntungan daripada kebenaran, ia takkan pernah puas sebelum mendapatkan segalanya.”

Merefleksikan penjelasan Mensius, kita bisa setuju dan tahu betul bahaya ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi segera kita akan berkata: “Habis, bagaimana lagi? Semua orang saat ini mengejar keuntungan, jika saya tidak mengejar keuntungan maka saya akan mati.” Perkataan seperti itu bisa dipahami, mengingat sistem kompetisi yang dimotori oleh kepentingan ekonomi telah merambah ke semua bidang kehidupan. **Prof. Dr. Paul Ormerod**, dalam bukunya *The Dead of Economics*, berkata bahwa seluruh dunia akan dilanda oleh krisis ekonomi, dan ilmu ekonomi ortodoks gagal

meramalkannya (atau lebih tepat: menyembunyikan fakta tersebut dan menggantikannya dengan istilah kemakmuran).

Dalam perkembangannya ilmu ekonomi ortodoks bukan berpihak kepada hukum ekonomi lagi, tetapi pada kepentingan politik, agar ia mempunyai *power* untuk menentukan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Sekali lagi, globalisasi akan membawa kehidupan manusia ke satu padang gurun krisis dan resesi yang besar. Saat ini orang sadar, tetapi tidak mau melihat atau meramalkan masa depan. Baru nanti, bila titik keseimbangan (*equilibrium*) patah oleh waktu, orang akan menyadari bahwa krisis itu telah menyentuh dirinya, tetapi semua telah terlambat.

Tantangan Masa Depan

Yang menjadikan orang mengalami kesukaran untuk melihat ke depan (*future*) adalah karena orang masih memakai kantong yang lama untuk diisi dengan anggur yang baru. **Rowan Gibson** (*Rethinking the Future*, p. 6) berkata bahwa tak seorang pun bisa meramalkan masa depan, karena masa depan sangatlah kompleks, tidaklah seperti garis linier, tidak berkesinambungan dan tak bisa diramalkan (*non-linear, discontinuous and unpredictable*). Apa yang terjadi di masa depan akan lebih hebat dari yang diharapkan, dalam artian positif (perkembangan) ataupun negatif (kehancuran). Data saat ini akan segera menjadi absurd untuk melihat dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. **Charles Handy** (*Rethinking the Future*, p. 18) menyebutnya sebagai gejala paradoks, “*life is full of contradictions and surprises, that it is, in fact, full of paradoxes*”. Pada satu sisi terjadi perkembangan yang luar biasa pada sisi yang lain kehancuran yang mengerikan. Ada kemakmuran di satu sisi, ada pemiskinan di sisi lain. Organisasi menjadi sangat sentralistik, sementara pada saat yang sama juga desentralistik. Ada kecenderungan untuk menjadi organisasi yang besar dengan sarana dan prasarana yang hebat, pada saat yang sama muncul kecenderungan untuk menjadi semakin ramping dan fleksibel.

Masa depan ekonomi (kapitalisme) akan dipenuhi dengan ketidakpastian sementara pada sisi yang lain visi dari ekonomi adalah kemakmuran. Dua sisi yang bertentangan inilah yang membuat prediksi ekonomi tak pernah tepat (kecuali untuk sekelompok kecil

orang saja). Ide globalisasi ekonomi yang mengandaikan keuntungan di semua pihak hanyalah “tipuan” dari kelompok kecil (pemegang modal) untuk makin makmur dalam proses pemiskinan global.

Jika demikian apa yang harus kita lakukan?

Tentulah kita tidak boleh berpikir sedemikian skeptis dan negatif akan masa depan, akan ilmu ekonomi atau pun perkembangan teknologi. Jangan buang anggur jika kantongnya bocor, jangan buang bayi jika pakaiannya kotor. Demikian pula kita tak perlu membuang dan menjauhi kehidupan (modern) hanya oleh karena berbagai macam noda warna yang melekat di dalamnya. **Stephen Covey** mengatakan (memberi harapan): “*Tomorrow’s succesful leaders will value principles more than they value their companies*”.

Dalam era kompetisi yang sangat ketat di bidang bisnis muncul keyakinan bahwa kesuksesan dalam kompetisi ditentukan oleh kualitas yang baik dengan harga (pengeluaran) yang rendah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kedisiplinan yang tinggi dan komitmen pada prinsip-prinsip yang jelas. Prinsip-prinsip yang dipegang teguh ini tentulah prinsip-prinsip yang universal yang mengacu pada prinsip iman yang mengedepankan nilai-nilai hubungan pribadi antar manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan tentu saja antara manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip itu antara lain: kasih, kebenaran, kejujuran, keadilan, kedamaian, integritas, kedisiplinan dan kepercayaan. Semua prinsip-prinsip yang universal itu kemudian dirangkum dan dijadikan visi dan acuan strategi kebijakan yang diambil untuk tercapainya sebuah perkembangan sesuai dengan yang diharapkan. Ketegasan dan kejelasan visi ini akan membantu membentuk citra. Jika prinsip-prinsip tersebut dipegang dan dijadikan acuan maka gerak progresif dari sebuah organisasi akan terasakan.

Mungkin dilihat dari kepentingan ekonomi (kapitalis) gerakan ini tidak mendatangkan keuntungan, bahkan mungkin juga terkesan tidak populer. Tetapi jika dilihat dari kesetiaan dan upaya penjabaran prinsip-prinsip maka progresivitas dan hasil yang dicapai akan terasakan, sebab prinsip-prinsip universal tersebut akan senantiasa mengatasi perubahan superfisial dan fenomenal dari gerakan ekonomi yang *unpredictable* tadi. Jika arus perkembangan ekonomi itu seperti air

yang turun mengatasi celah-celah batu sampai ke lembah keuntungan (jika sudah sampai ke lembah ia akan menciptakan ledakan besar untuk menciptakan lembah keuntungan yang baru agar bisa terus mengalir). Akibatnya perjuangan dan perkembangan prinsip-prinsip (Kerajaan Allah) itu malah naik ke bukit, menentang arus untuk sampai kepada puncak spiritualitas hidup yang sesungguhnya.

Sebagai gereja (dan PGI) kita kerap kali melupakan prinsip-prinsip tersebut, atau bahkan tidak siap untuk berbicara secara terbuka tentang prinsip-prinsip (Kerajaan Allah) dan menjabarkannya dalam kebijakan-kebijakan organisasional, baik dalam skala kecil atau besar, jangka pendek ataupun panjang. Ini terbukti dari realita gereja yang senantiasa dihadapkan pada kelangkaan SDM (baik di gereja lokal maupun di aras Sinodal) yang sungguh berprinsip dan profesional di bidangnya. SDM yang berpotensi cenderung untuk mencari jalan dan prinsipnya sendiri, dan terlibat dalam arus pencarian kesuksesan serta berpacu ke lembah keuntungan. Fenomena ini dimungkinkan terjadi karena *old mind set* tentang figur hamba Tuhan (pemimpin) yang berupa “anugerah”, yang muncul tiba-tiba (hamba Tuhan *tiban*) tanpa dipersiapkan dengan baik (seperti Samuel, Yusuf, Musa, Timotius dan lain-lain). Ini membuat gereja dan sinode kedodoran bila dihadapkan pada kebutuhan SDM yang berintegritas dan berprinsip (tentu saja juga yang berwawasan luas). Di sisi lain pola kompetisi di dunia bisnis (dengan *reward* yang jelas) memacu para SDM yang potensial untuk lebih menfokuskan diri pada pekerjaan dan pelayanan yang seperti itu. Dunia bisnis atau lembaga sosial kemasyarakatan tampak lebih jelas visinya, tantangannya dan strateginya.

Hal lain yang perlu dipikirkan adalah struktur dan bentuk organisasi yang lebih pas dengan perkembangan zaman. Mempunyai dan memegang prinsip tidaklah sama dengan memegang status quo, mempercayai pola lama dan struktur yang lama sebagai satu satunya model yang terbaik untuk sampai kepada prinsip. Prinsip boleh lama (karena ia bersifat universal) tetapi strategi & kebijakan, struktur & pola kerja harus bisa fleksibel dan membuka diri senantiasa pada inovasi dan evolusi. Dalam perubahan (bentuk) yang ultra cepat pastilah yang tidak berubah akan mati (ditinggalkan). Banyak perusahaan dan gereja (atau organisasi lain) yang 50 tahun lalu (bahkan

5 tahun lalu) sangat berjaya tapi kini telah mati, bangkrut dan ditinggalkan orang.

Persoalannya bukan terletak pada managemennya, tetapi pada kepuasan diri dan ketidakmampuan menciptakan alternatif-alternatif perubahan sebelum gerakan perubahan itu sendiri terjadi. **Michael Porter** berkata: “*The important thing is to try to shape the nature of competition, to take control over your own destiny*” (*Rethinking the Future*, p. 48). Yang penting menurut Porter bukan sekedar berupaya untuk menjadi yang lebih baik, tetapi juga berusaha untuk menjadi berbeda dengan apa yang sekarang ini sedang dikerjakan. Artinya, kreativitas dan inovasi terus dipikirkan dan diupayakan. Mencipta dan meletakkan dasar ke depan akan apa yang belum terjadi adalah cara yang terbaik untuk memprediksi masa depan. Atau meminjam ungkapan **CK Prahalad**: “*Competing for the future means maintaining continuity by constantly creating new sources of profit.*” Pengkhotbah yang seolah memandang masa depan manusia sebagai lingkaran kesia-siaan juga berkata: “Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur; dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik” (Pkh. 11:1-6).

Tak seorangpun bisa memprediksi masa depan dengan baik, atau mengetahui pekerjaan Allah yang mengerjakan (merencanakan) segala sesuatu, tetapi ada satu hal yang kita tahu, yaitu kalau kita berbuat sesuatu pada masa kini untuk masa depan, pastilah kita akan memetik hasilnya. Karena itu masa depan lebih berupa pilihan dan penciptaan ketimbang pemberian. Manusia (organisasi) yang siap menghadapi masa depan adalah mereka yang tahu akan tantangan dan kebutuhan:

- Diskontinuitas dan kontinuitas masa lalu – sekarang – masa depan.
- Paradoks yang sukar dicerna dengan akal sehat.
- Perubahan yang ultra cepat dari bentuk-bentuk dan kebijakan.

- Perlunya standarisasi nilai yang baru dan keberanian untuk menetapkan prinsip-prinsip universal tanpa mengabaikan bentuk-bentuk yang strategis dan inovatif.
- Globalisasi dan kebutuhan *networking* atau sinergi.
- Penyiapan SDM dengan pemberian tanggungjawab dan kebebasan berkreasi.
- Menyeimbangkan dependensi dan independensi dengan interdependensi.
- Lebih mengutamakan prinsip ketimbang kotak-kotak kelompok (denominasi atau ras).
- Percaya pada kekuatan visi dan lobby.

Gereja-gereja di Indonesia dan Kesiapannya Menghadapi Masa Depan

Uraian umum di atas menggiring kita pada kesadaran akan peran PGI (sebagai persekutuan dan pengambil kebijakan bagi gereja-gereja di Indonesia) dalam menghadapi dan mempersiapkan diri memasuki tantangan dan kesempatan masa depan. Dilihat dari perbandingan waktu – SDM – perkembangan, secara jujur harus diakui bahwa perkembangan PGI masih jauh dari apa yang diharapkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Persoalannya ada pada dua hal :

1. Kekurangsiapan dan kurangseriusan untuk mempersiapkan diri memasuki tantangan masa depan. Hal ini tampak dari persoalan jatidiri yang berkepanjangan, persoalan struktur dan mekanisme kerja yang berubah-ubah, visi yang berbeda antara satu pemimpin dengan yang lain (penggantinya). Kurang dianggapnya PGI sebagai (dan memainkan peran) pemersatu dan penentu kebijakan yang jelas.
2. Berkait dengan persoalan pertama, tentu saja itu dikarenakan dan mengakibatkan kelemahan pada persiapan SDM yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan strategi kebijakan yang diambil. Jika SDM Gereja dilihat secara personal, ada banyak yang menonjol pada aras nasional maupun internasional, tetapi secara *team* dan sistem masih lemah dan cenderung jalan sendiri-sendiri.

Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka proses pelumpuhan PGI di mata gereja-gereja akan makin dirasakan, kewibawaan makin

merosot, dan tentu saja kebijakan yang bersifat nasional ditanggapi dengan suam-suam kuku.

Hal yang perlu dilakukan oleh PGI adalah :

1. Menentukan Visi dan Strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima oleh gereja-gereja di Indonesia.
2. Menelurkan sistem dan *team* yang memanfaatkan jalur lobby dan jaringan kerja dengan gereja-gereja.
3. Mencetak dan mengkoordinasi SDM-SDM yang potensial dan punya pengaruh di gereja lokal ataupun di masyarakat. Kepemimpinan informal yang secara potensial masih sangat berpengaruh diberi tempat dan dilibatkan dalam jaringan kerja yang bersifat Nasional, Regional, dan Internasional.
4. Membuat atau menjadikan PGI sebagai pusat informasi dan kebijakan yang dirasa mambantu kebutuhan gereja-gereja lokal.
5. Membangun/menciptakan pusat penelitian, pengkaderan, pembinaan dan pengembangan spiritualitas, yang bertujuan memperlengkapi gereja-gereja dalam persoalan SDM gereja.
6. Memberdayakan jemaat (gereja) dengan menciptakan jaringan kerja sama dengan gereja-gereja lain atau mitra dari luar negeri. Misalnya dalam mengatasi krisis ekonomi atau persoalan-persoalan keajaatan lainnya.
7. Membuat program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada dengan mengupayakan pelaksanaannya secara desentralistis.

Penutup

Apa yang saya sampaikan di atas barulah berupa butir-butir pemikiran yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Inilah saatnya di mana dalam KGM kita berdiskusi secara serius untuk melihat wajah kita sebagai gereja dan PGI. Apakah kita memang siap menghadapi masa depan?

3c

Gereja sebagai Ranting Tanaman Anggur dalam Realitas Pluralisme dan Kehancuran Ekologi

Pdt. Dr. Eben Haiser Nuban Timo¹⁰

Pengantar

Suatu waktu, ketika istri saya menjadi pendeta di desa, saya menghadiri sebuah acara peminangan adat. Kedua keluarga bertukar kado, diselingi oleh tuturan pantun-pantun adat yang maknanya sangat dalam. Dari sekian banyak pantun, saya ingat satu yang sangat berkesan: “Biarlah rumah tanggamu berumpun-rumpun seperti pisang dan anak-anakmu berangkai-rangkai ibarat pinang.”

Orang NTT memiliki banyak tanaman yang bernilai ekonomis, seperti: pisang dan pinang, jagung dan ubi, mangga dan jambu, kemiri serta avokad. Dari antara tanaman-tanaman itu, pinang merupakan yang paling sering dipakai sebagai metafora untuk menggambarkan kerekatan hubungan keluarga dan kelimpahan berkat dalam rumah tangga. Tidak heran jika dalam setiap acara peminangan, pinang selalu merupakan salah satu barang yang dipersembahkan pihak keluarga penerima istri kepada keluarga pemberi istri. *Oko mama, kenoto* merupakan simbol-simbol yang menunjuk pada kehidupan bersama yang akrab dan ramah.

Orang Israel juga memiliki tanaman-tanaman berharga seperti itu, yang memiliki nilai ekonomis, sosial dan religius yang sangat tinggi. Kita sebut misalnya pohon Ara, Kurma dan Zaitun. Bersama dengan tanaman Anggur, ketiga tanaman ini sering disebut sebagai yang terkemuka di antara tumbuh-tumbuhan di hutan (Hak. 9:7-15). Pohon Ara dan Kurma terkenal karena buahnya yang sedap, sedangkan nilai pohon Zaitun adalah pada minyaknya.

Survei Teks Alkitab

¹⁰ Ketua Sinode Gereja Masehi Injili Timor (GMIT).

Kalau kita melakukan survei yang mendalam terhadap kesusastaan hikmat orang Israel, di mana pohon-pohon tadi digunakan sebagai metafora untuk nilai-nilai yang dijunjung tinggi, kita pasti menemukan sebuah data yang menarik. Dalam bertutur tentang berkat yang disediakan Allah bagi orang yang berkenan kepada-Nya dan hidup sesuai dengan perintah dan hukum-hukum Tuhan, pohon Anggurlah yang sering dipakai untuk itu.

Kita mencatat misalnya Mazmur 128. Gambaran tentang berkat yang diperoleh dari Tuhan oleh seorang suami yang hidup berkenan kepada Allah dan setia melakukan ketetapan Tuhan diambil dari tanaman Anggur dan Zaitun. Kita membaca di situ gambaran berikut:

“Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu; anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu! Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan TUHAN” (ay. 3-4).

Tanaman anggur muncul sebagai metafora bagi kehidupan rumah tangga ideal. Gambaran yang sama, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan anggur, tetapi bahasa deskriptif yang dipakai di situ berasosiasi sangat dekat dengan tanaman anggur, dipakai oleh Yakub dalam rumusan berkatnya kepada Yusuf. Yakub berkata:

“Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanah dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal liat, oleh pertolongan Yang Mahakuat pelindung Yakub” (Kej. 49 : 22-24).

Tanaman anggur juga dipakai secara khusus untuk menggambarkan hubungan orang Israel dengan Tuhan. Kita temukan metafora itu, yakni Israel sebagai tanaman anggur kesayangan Allah dalam Mazmur 80 dan Yesaya 5. Dalam Mazmur 80 dikatakan bahwa - sebagai sebuah tanaman anggur - Allah mengambil Israel dari Mesir. Tanaman itu kemudian ditempatkan di Kanaan. Allah menggali lubang sebagai tempat tanaman kesayangan-Nya berakar. Ia membangun para-para supaya ranting-ranting dari tanaman anggur-Nya menjulur sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Tanaman anggur

kesayangan Tuhan yang bernama Israel itu sangat dimanja dan dilindungi.

Dalam Yesaya 5, Israel sekali lagi disebut-sebut sebagai tanaman anggur kesayangan Tuhan. Karena cinta yang besar kepada tanaman anggur itu, Tuhan mencangkul dan menggemburkan tanah. Membuat pagar, menghalau hama, Ia bahkan membangun sebuah menara jaga di tengah-tengah kebun anggur miliknya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Cinta Tuhan terhadap Israel sangat besar dan ajaib. Sayangnya yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam.

Dalam Perjanjian baru kita menemukan dua metafora yang menarik tentang anggur yang dipakai untuk menggambarkan hubungan antara Yesus dan jemaat, serta cinta kasih yang ajaib di antara mereka. Metafora yang pertama muncul dalam Yohanes 15. Yesus memperkenalkan diri sebagai Pokok Anggur yang benar dan para pengikut atau murid-Nya adalah ranting-ranting dari Pokok Anggur itu. Sebagaimana ranting-ranting tidak bisa dilepaskan dari Pokok Anggur, begitulah hubungan antara Yesus dan Gereja. Supaya ranting-ranting dari Pokok Anggur itu berbuah lebat, ada dua hal yang mengemuka dalam gambaran ini. Pertama, ranting itu harus tetap melekat pada pokoknya. Kedua, ranting itu harus selalu dikerat, dipotong atau dibersihkan.

Metafora kedua mengenai tanaman anggur diucapkan Yesus dalam peristiwa perjamuan Paskah. Sehari sebelum ia menjalani penderitaan dan kematian, Yesus mengumpulkan murid-murid untuk makan Paskah bersama. Pada saat cawan perjamuan yang di dalamnya terdapat air buah anggur diedarkan, Yesus mengatakan satu kalimat yang mengejutkan: “Inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa” (Mat. 26:28).

Bahan Perenungan 1

Orang Israel memiliki banyak pohon serta tanaman kesukaan dan kebanggaan, seperti: pohon Ara, Kurma, Zaitun dan Anggur. Ketiga tanaman pertama merupakan pohon yang kuat dan kokoh batangnya. Sedangkan tanaman Anggur hanyalah sejenis tanaman merayap. Tetapi waktu orang Israel merangkai puisi dan menciptakan pantun untuk

menggambarkan berkat Allah atas rumah tangga, dan relasi yang harmonis dari Tuhan dengan umat-Nya, bukan Pohon Ara, Kurma, dan Zaitun yang dipakai, melainkan pohon Anggur. Apakah ada sesuatu yang menarik dan bermakna dari tanaman Anggur sehingga ia sering dipakai di dalam Alkitab sebagai gambaran bagi kehidupan orang yang diberkati Tuhan?

Ada empat referensi Alkitab yang dapat kita pakai sebagai rujukan untuk menggali keistimewaan tanaman anggur di antara tanaman lain. Ayat-ayat Alkitab itu adalah: Mazmur 104:14-15; Lukas 10:34; dan I Timotius 5:23, dan Yohanes 15.

Anggur merupakan sebuah tanaman melata. Ia dapat hidup di tempat dengan temperatur berkisar 25-35° Celcius. Alkitab menyebut tiga manfaat khusus dari tanaman itu. Pertama, anggur bermanfaat untuk membuat hidup menjadi segar, muka berseri, dan hati penuh sukacita. Itulah yang kita baca dalam Mazmur 104: 14-15: “Engkau yang menumbuhkan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyaknya, dan makanan yang menyegarkan hati manusia.

Kedua, anggur juga berfungsi sebagai obat bagi luka dan penawar rasa sakit. Dikatakan bahwa, ketika melihat seseorang yang menjadi korban perampokan tergeletak tak berdaya di tepi jalan, orang Samaria itu turun dari keledainya, ia pergi kepada korban, membalut lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur (Luk. 10:34). Anggur memiliki khasiat untuk meringankan penderitaan, bahkan juga sebagai obat yang memberikan kesembuhan untuk penyakit.

Manfaat yang terakhir muncul dalam anjuran kepada Timotius yang menderita satu penyakit di pencernaannya. Paulus menasehati dia untuk melakukan hal ini: “Janganlah lagi minum air saja. Tambahkan anggur sedikit, berhubungan pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah” (1 Tim. 5:23).

Anggur menjadi tanaman yang disebut-sebut dalam Alkitab sebagai metafora dari hidup orang-orang yang diberkati Tuhan, justru karena dua hal ini: anggur memberi sukacita dan kesegaran, anggur berkhasiat menyembuhkan dan memulihkan luka atau penyakit.

Israel adalah tanaman anggur kesayangan Tuhan. Gereja dan orang-orang percaya digambarkan sebagai ranting-ranting dari Pokok Anggur Yang Benar, Yesus Kristus. Kalau tanaman anggur dalam Alkitab memang memiliki khasiat seperti yang sudah kita catat di atas, maka kehadiran Israel dan Gereja di dalam dunia harus menjadi kehadiran yang membawa sukacita sekaligus mejadi penawar sakit serta penyembuh luka. Secara khusus tentang gereja, kita harus ada di dalam dunia sebagai pembawa kehidupan yang penuh sukacita dan kesegaran, serta menjadi kekuatan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Fungsi ini sangat cocok dengan gambaran Gereja sebagai *garam* dan *terang* di dalam dunia.

Sayangnya, banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, dipenuhi dengan Roh dari Allah, tetapi kehadiran dan praktik doa serta ibadah mereka justru membuat orang lain bingung, bahkan menderita. Mereka menetapkan syarat-syarat yang sangat banyak dan berat untuk memperoleh keselamatan. Mereka juga menjanjikan pahala-pahala yang menggiurkan. Agama mereka berlabel persyaratan-persyaratan dan pahala-pahala. Padahal Allah yang menjadi sesembahan dalam agama itu adalah rahmani dan rahimi. Sungguh sangat kontras dengan Allah yang diperkenalkan Kristus sebagai Bapa yang berbelas rasa dan penuh cinta-kasih.

Diskusikanlah dengan saksama bagaimana kehadiran Gereja sebagai pembawa sukacita dan penyembuh dalam masyarakat dapat kita wujud-nyatakan dalam situasi dunia masa kini di konteks bergereja kita masing-masing, juga dalam relasi antar-agama yang mempersonifikasikan Allah sebagai pribadi yang pengasih dan pemurah, tetapi suka menggunakan kekerasan dan pedang dalam mewartakan Allah itu.

Bahan Perenungan 2

Yesus menyebut dirinya tanaman anggur kesayangan Allah. Yesus berkata: “Akulah Pokok Anggur yang Benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya (Yoh. 15:1). Gereja bukan Pokok Anggur kesayangan Tuhan. Ia hanyalah ranting-ranting yang melekat pada Pokok Anggur itu. Tanpa Yesus yang adalah Pokok Anggur itu, Gereja tidak bisa menghasilkan buah, tidak bisa menjadi persekutuan yang

menghadirkan kehidupan yang penuh sukacita dan kesegaran, serta menjadi kekuatan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan. Gereja sebagai ranting membutuhkan Yesus Kristus sebagai Pokok Anggur untuk menghasilkan buah.

Dalam Perjanjian Lama Israel digambarkan sebagai pohon anggur kesayangan Allah. Israel adalah Pohon Anggur Tuhan (Yes. 5 dan Mzm. 80:9). Gambaran itu oleh PB kemudian diterapkan kepada Yesus. Yesus adalah Pokok Anggur yang Benar. Keduanya tidak bertentangan, tetapi identik. Peran Israel sekarang digenapkan di dalam Yesus. Berbicara tentang Israel berarti juga tentang Yesus, dan sebaliknya. Kalau memang begitu adanya, maka kerekatan Gereja sebagai ranting kepada Yesus supaya menghasilkan buah juga berarti bahwa Gereja harus merekatkan diri kepada Israel. Orang yang percaya kepada Yesus berarti ambil bagian dalam persekutuan dengan Israel. Adalah sebuah kekhilafan teologis apabila Gereja merekatkan diri kepada Yesus Kristus sebagai Pokok Anggur, tetapi pada saat yang sama menolak dan memusuhi Israel, atau menggeser bahkan menganggap diri sebagai pengganti Israel.

Tidak! Gereja bukan Israel baru dalam arti *pengganti* Israel (*teori substitusi*). Ungkapan *Israel baru* untuk gereja lebih menunjuk pada *pembabaran* atau *perluasan* perjanjian Allah dengan Israel. Janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tidak berhenti. Janji itu diterapkan secara baru, mengalami berbagai modifikasi.

Coba kita daftarkan gambaran-gambaran yang biasa dipakai sebagai pembenaran keberadaan Gereja sebagai pengganti Israel, sambil mendiskusikan secara kritis kontribusi - baik positif maupun negatif - dari gambaran-gambaran itu bagi pemulihan relasi Israel dan Gereja, serta kemitraan Gereja dengan agama-agama non-Kristen.

Bahan Perenungan 3

Salah satu ciri tanaman anggur berhubungan dengan musim berbuah. Para petani anggur bercerita bahwa setelah berumur satu tahun tanaman anggur bisa berbuah di sembarang waktu. Dan yang unik ialah: supaya berbuah, tanaman itu harus lebih dahulu dibersihkan. Daun-daun dan ranting-rantingnya harus dipotong sampai pohon anggur itu benar-benar telanjang. Yesus juga

mengisyaratkan hal ini. Dia berkata: “Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah” (Yoh. 15:2).

Supaya berbuah, anggur harus dibersihkan. Daun-daun dan rantingnya dipotong. Ini adalah suatu proses yang menyakitkan. Israel digambarkan sebagai tanaman anggur milik Allah. Sejarah Israel penuh dengan halaman di mana bangsa itu menjalani masa pembuangan: di Mesir, dibuang ke Babel, pembunuhan massal di Jerman, dst. Orang Kristen membaca peristiwa-peristiwa itu sebagai hukuman dan penolakan Allah. Orang Yahudi sendiri memandang momen-momen itu sebagai saat di mana mereka dipersiapkan untuk memberi buah bagi Allah dan dunia.

Rentetan peristiwa pembuangan dan saat-saat kesesakan merupakan masa untuk berbuah. Itu adalah berkat dari Allah. Israel disakiti supaya berbuah. Hal ini juga ditegaskan secara implisit oleh Paulus. Dalam Filipi 2:29 ia berbicara tentang dua buah karunia: percaya kepada Kristus dan menderita untuk Dia.

Menderita demi Kristus adalah karunia yang disebutkan bersamaan dengan percaya kepada Kristus. Sayangnya, banyak orang pada masa kini lebih suka meminta karunia percaya. Mereka berkata bahwa orang yang percaya kepada Kristus akan terlepas dari segala bentuk penderitaan. Mereka datang kepada Kristus supaya luput dari berbagai kesulitan. Itu memang baik, tetapi dengan itu mereka jadinya tidak menghasilkan buah. Hidup mereka menjadi sangat kerdil. Tidak ada buah yang dihasilkan bagi Allah dan dunia. Mereka hanya ingin menerima kelimpahan dan enggan untuk membagi-bagikan kelimpahan itu kepada orang lain.

Itu bisa kita lihat dalam konstruksi gedung gereja dan rumah jabatan gubernur, bupati, walikota yang megah, mewah, dan mentereng. Padahal hanya beberapa meter di sampingnya berdiri rumah warga masyarakat yang kumuh, reot, dan rapuh. Coba perhatikan penampilan banyak pemimpin umat dan pejabat negara yang bonafid, gagah, dan mengesankan, sementara banyak warga masyarakat yang terlunta-lunta dan terus berhadapan dengan risiko.

Ini bercerita bahwa banyak dari kita yang hanya mau menerima kelimpahan dari Tuhan, tetapi enggan berbuah bagi Tuhan. Belum

banyak ada orang yang meniru Yesus: “Memecah-mecahkan tubuh-Nya, dan menumpahkan darah-Nya untuk banyak orang.” Tetapi ada banyak orang yang tega memecah-mecahkan tubuh dan menumpahkan darah sesama untuk dirinya. Metafora gereja sebagai tanaman anggur yang harus dikerat supaya berbuah mengartikulasikan satu pesan sosial yang penuh makna! Roh Kudus menguatkan kita untuk mewujudkan hal itu.

Menurut pendapat Anda apa penyebab orang Kristen lebih cenderung melihat sukses sebagai karunia, sedangkan menderita untuk Kristus justru dianggap sebagai kemalangan? Lalu apa nilai positif dari pemahaman baru bahwa menderita bagi Kristus merupakan karunia, bagi hubungan Gereja dengan agama-agama dan bagi kelestarian lingkungan?

4 Bidang Politik dan Ideologi

4a *Position Paper*

Sepuluh tahun sudah Indonesia menjalani reformasi di bidang politik, sejak diturunkannya rezim Orde Baru. Tidaklah mudah untuk menanggalkan sistem politik hegemonik yang telah lebih dari 30 tahun mencengkeram budaya politik Indonesia. Apalagi ternyata, bangunan politik yang diteruskan pasca reformasi sebagian besar juga masih diisi oleh pelaku-pelaku politik dari rezim Orde Baru itu. Maka tidaklah mengherankan kalau hingga kini Indonesia masih belum mampu keluar dari dampak buruk yang disisakan oleh krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak akhir dekade 1990-an lalu.

Terus bermunculannya berbagai persoalan yang menimpa bangsa Indonesia sepuluh tahun terakhir ini segera menghenyakkan batin dan memunculkan tanya: masihkah Indonesia akan bertahan sebagai sebuah bangsa? Itulah pertanyaan yang kini menghantui benak banyak orang, sesudah 62 tahun merdeka. Berbagai permasalahan mengemuka dari waktu ke waktu, yang mengancam sendi-sendi kebangsaan.

Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai sekarang belum pulih seperti Korea Selatan, Thailand dan negara lain yang mengalami krisis moneter serupa? Mengapa jumlah orang miskin bertambah dan jumlah pengangguran masih besar? Mengapa angka buta huruf masih tinggi? Mengapa pendapatan per kapita masih rendah? Mengapa infrastruktur begitu buruk? Mengapa korupsi masih juga merajalela dan bahkan meningkat? Mengapa berbagai bencana dan kerusakan lingkungan terjadi susul-menyusul? Hal ini masih diperpelik lagi oleh rupa-rupa tingkah elite politik yang sepertinya tidak menunjukkan adanya “*sense of crisis*”.

Penyebab utamanya adalah fondasi Indonesia sebagai bangsa sedang goyang atau sedang digoyang. Fondasi yang dimaksud adalah “ideologi” Indonesia sebagai kekuatan pengikat bangsa Indonesia kini sedang dihantam oleh badai politik. Selama sepuluh tahun bangsa ini menderita akibat berbagai konflik: konflik etnis, konflik agama,

konflik pusat-daerah (Aceh dan Papua) yang menelan korban nyawa dan harta tak terperiikan dan yang masih menyisakan trauma besar dan masih berpotensi muncul kembali. Akar utama semua konflik yang terjadi itu adalah distorsi ideologi yang sedang dialami bangsa ini.

Para pendiri bangsa dengan sangat arif dan matang telah menyepakati bahwa Indonesia yang dimerdekakan dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah sebuah negara yang dibangun di atas fondasi (ideologi) yang bernama Pancasila. Bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara yang mengambil jalan ketiga. Bung Karno, sebagai bapak bangsa, pastilah bekerja keras, berpikir keras untuk mencari, menggali sampai akhirnya menemukan solusi terhadap jalan buntu politik pada saat itu. Bung Karno dkk. merumuskan Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Inilah perjanjian luhur para pendiri bangsa yang diwariskan kepada kita. Kita mencatat dalam perjalanan kita sebagai bangsa, bahwa setiap perjanjian luhur ini dihinati maka Indonesia menghadapi malapetaka.

Bahkan jauh sebelumnya, pergerakan Budi Utomo pada Mei 1908 telah meletakkan sendi-sendi kebangsaan ini. Tonggak sejarah tersebut telah menjadi titik awal bagi Kebangkitan Nasional, dengan ditanggalkannya sekat-sekat kedaerahan dan keagamaan bagi perjuangan bersama menuju bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan, kemiskinan dan kebodohan. Menyambut 100 tahun Kebangkitan Nasional tersebut, seluruh elemen bangsa Indonesia dituntut untuk memaknai-ulang pergerakan kebangsaan kita di tengah realitas kebangsaan yang kita hadapi kini.

Saat ini Indonesia sedang menghadapi krisis ideologi. Pancasila, yang adalah fondasi bangsa, yang mempersatukan seluruh warganya, sedang dipertanyakan kesaktiannya. Ada kecenderungan yang sangat kuat untuk mengubah dasar Pancasila dengan ideologi salah satu agama. Walaupun Presiden SBY pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2006 yang lalu menegaskan bahwa pancasila sudah final, kenyataan dalam realitas politik kita sungguh berbeda. Pertanyaan kita adalah, kalau Pancasila sudah final, bagaimana dengan kelompok yang

terang-terangan ingin mengubah dasar Indonesia dari Pancasila dengan yang lain? Kalau Pancasila sudah final, mengapa Presiden membiarkan Perda-perda bernuansa agama di beberapa kabupaten dan kota, yang merupakan bahaya terhadap masa depan bangsa, mencederai kebebasan beragama, dan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945? Bangsa yang belum selesai dengan masalah ideologinya sesungguhnya adalah bangsa yang belum siap untuk membangun dirinya. Inilah yang dialami bangsa kita yang selama 62 tahun jatuh bangun. Indonesia adalah sebuah bangsa yang belum selesai, kata Max Lane.

Era reformasi ini memang menjanjikan kebebasan, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan demokrasi. Tetapi demokrasi, kalau salah dimaknai, yaitu hanya sebagai adu kekuatan, tanpa penghargaan terhadap hak-hak setiap individu, bukanlah demokrasi. Reformasi dan demokratisasi pasca 1998 makin terbukti tidak membawa perubahan berarti bagi sebagian besar masyarakat lapis bawah. Kecuali menyenangkan para elite dan politisi, demokrasi makin mendekati kenyataan sebagai pembawa sengsara bagi rakyat. Demokrasi yang diasumsikan membawa maju republik nyatanya menjadi beban publik. Alih-alih menyejahterakan rakyat, sekian banyak lembaga demokrasi yang lahir sejak 1998 hanya mengurus kantong rakyat yang sudah meradang. Demokrasi telah memiskinkan rakyat dan menguntungkan pelaku 'industri' demokrasi. Masyarakat 'dipaksa' harus mengongkosi *cost* demokrasi yang ironisnya justru hasilnya jauh dari harapan mereka. Demokrasi juga telah dimaknai sebagai adu kekuatan mayoritas terhadap minoritas, sehingga kaum minoritas semakin merasa terpinggirkan dan tercabik hak-haknya. Demokrasi yang tidak mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat patutlah disangsikan keampuhannya.

Dalam terang inilah, KGM perlu menyelenggarakan satu studi mendalam tentang Politik & Ideologi, agar gereja-gereja di Indonesia dapat merumuskan dengan jelas dan tepat tugas panggilannya di tengah-tengah proses-proses politik yang terjadi di Indonesia

Gomar Gultom

4b
**IDEOLOGI POLITIK DAN
MASA DEPAN GERAKAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

Prof. Dr. Hotman Siahaan¹¹

Setidaknya ada tiga paradigma yang sangat mewarnai keberagaman respons para pemikir politik Islam kontemporer dalam menanggapi sistem politik demokratis yang datang dari Barat. Pertama, mereka yang menganut paradigma yang menyatakan bahwa hubungan antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Asumsinya ditegakkan di atas pemahaman bahwa Islam adalah agama sempurna yang mempunyai kelengkapan ajaran di semua segmen kehidupan manusia, termasuk di bidang praktik kenegaraan. Karenanya umat Islam berkewajiban melaksanakan sistem politik Islami sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan empat Al-Khulafa' al-Rasyidin. Pandangan ini menghendaki agar negara menjalankan dwifungsi secara bersamaan: fungsi lembaga politik dan keagamaan. Menurut paradigma ini, penyelenggaraan suatu pemerintahan bukan berdasarkan kedaulatan rakyat, melainkan merujuk kepada kedaulatan ilahi (*divine sovereignty*), sebab penyandang kedaulatan paling hakiki adalah Tuhan. Pandangan ini mengilhami gerakan fundamentalisme.

Paradigma kedua berpendirian bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, di antara keduanya terjalin hubungan timbal-balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara. Paradigma ini berusaha keluar dari belenggu dua sisi pandangan berseberangan: integralistik dan sekularistik. Selanjutnya paradigma ini melahirkan gerakan modernisme dan neo-modernisme.

Paradigma ketiga merefleksikan pandangan sekularistik. Menurut paradigma ini, agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda,

¹¹ Guru Besar Sosiologi dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya.

sehingga tidak dapat dikaitkan secara timbal balik. Islam dimaknai menurut pengertian Barat yang berpendapat bahwa wilayah agama adalah sebatas mengatur hubungan individu dan Tuhan. Sehingga mendasarkan agama kepada Islam atau upaya untuk melakukan determinasi Islam terhadap bentuk tertentu dari negara akan senantiasa disangkal.¹²

Dengan ketiga paradigma tersebut kita bisa menelusuri bagaimana kiprah gerakan politik Islam dalam konteks demokrasi di Indonesia dewasa ini. Perkaranya menyangkut apakah Islamisasi Negara demi Islamisasi Masyarakat, atau Islamisasi Masyarakat dalam negara nasional. Iklim demokrasi yang berkembang hingga saat ini adalah: kehadiran partai politik begitu marak, termasuk partai politik yang berazaskan Islam dan juga partai politik yang berazaskan non- Islam. Selain dapat menyimak kiprah partai politik apakah masuk dalam upaya Islamisasi Negara atau Islamisasi Masyarakat dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia dewasa ini, juga dapat disimak bagaimanakah gerakan politik umat Islam dalam memahami konsep *civil society* sebagai pilar demokrasi.

Khusus menyangkut Islam dan *civil society*, perdebatan agak rumit pernah terjadi di kalangan cendekiawan Islam, khususnya ketika fenomena ICMI muncul, ketika membahas bagaimanakah selayaknya Islam menghadapi demokratisasi, khususnya memahami konsep *civil society* sebagai alternatif terbaik di masa depan demi demokratisasi. Sebagian tokoh utama cendekiawan Muslim ketika itu bahkan menyatakan bahwa konsep *civil society* berasal dari Barat, dan tradisi kita belum mengenal apa yang disebut dengan *civic culture*, dan oleh karena itu pembicaraan tentang *civil society* tampaknya lebih bersifat teoritis dan data empirisnya tidak ada. Lalu kalau tidak ada data empirisnya, apakah pembicaraan tentang *civil society* di kalangan umat Islam Indonesia hanya berlangsung pada tataran wacana, bukan pada tataran empiris? Tampaknya meskipun secara empiris sangat miskin, kesadaran akan keberadaan *civil society* sebagai motor penggerak demokratisasi tetap kuat di tubuh umat Islam seiring dengan gencarnya masing-masing komponen bangsa mengidentikkan dirinya

¹² Zainal Abidin Amir: **Peta Islam Politik Pasca Soeharto**; Jakarta: LP3ES 2003, h. 15.

sebagai kelompok pro-demokrasi.

Civil society bercirikan tegaknya *rule of law* secara mantap di satu pihak dan berkembangnya sektor antara (*intermediate*) institusi-institusi otonom di lain pihak, yakni institusi-institusi yang tidak dikuasai negara, atau yang diatur secara sentral oleh otoritas kekuasaan, tetapi merupakan organisasi-organisasi yang bekerja sebagai agen kemauan rakyat. *Civil society* hanya dapat tumbuh dalam suatu masyarakat yang terbuka (*open society*). Masyarakat terbuka pada hakikatnya bukanlah suatu sistem, melainkan suatu oportunitas. Dalam suatu masyarakat terbuka, institusi-institusi di atas diciptakan berdasarkan asumsi bahwa tidak ada satu pun kelompok yang boleh memonopoli kebenaran dan berhak menentukan arah perkembangan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat diberi kesempatan untuk bergerak dalam suatu *fair competition* dan masing-masing boleh mengajukan gagasan-gagasan tentang pembangunan.

Di Indonesia, perbincangan mengenai masyarakat sipil tidak berhadapan dengan konsep-konsep *civil society* yang liberal, yang kapitalis, yang rasional, yang individualis, yang humanis, dan yang sekuler. Para eksponen masyarakat sipil memperkenalkan civil society bukan sebagai konsep rasional, sebagai humanisasi, sebagai sekularisasi, sebagai konsep liberal, apalagi sebagai kritik budaya, melainkan sebagai konsep politik yang diarahkan pada "pemberdayaan masyarakat dalam berhadapan dengan negara". Dalam kerangka pretensi pemberdayaan itu, kita mengosongkan fakta-fakta historis yang melatarbelakangi dan yang membuat padat makna *civil society*. Lalu kita mengisinya dengan harapan-harapan dan keinginan-keinginan kita; singkatnya: dengan ideologi kita sendiri. Kita pun mengerti kemudian mengapa warna ideologi itu lebih banyak mematkan kreativitas berfikir dan bernalar ketika penulis-penulis *civil society* terlibat dalam perdebatan antara "masyarakat madani" dan "masyarakat sipil", termasuk hubungannya dengan Islam. Karena lebih bersifat ideologis, maka perdebatan dan pertarungan yang muncul antara "masyarakat madani" dengan "masyarakat sipil" tampak sebagai pertarungan simbolik, yakni pertarungan memperebutkan simbol-simbol agama. Kita harus akui, dalam sebuah masyarakat di mana tidak berkembang pemikiran spekulatif dan filsafat rasional, di mana kritik dan kegiatan berfikir bebas tidak dihargai, agama memainkan peran penting dalam

mengisi simbol-simbol pemaknaan dan legitimasi bukan hanya dalam kerangka kekuasaan, melainkan juga dalam rangka menjaga konservatisme. Apalagi iklim keberagamaan di sini adalah iklim yang penuh dengan "irrasionalisme" dan "takhayul", serta terlebih lagi terjerat dalam sekat-sekat identitas kelompok yang tidak pernah berubah hingga kini. Akibatnya, ketika kita mengekspresikan sebuah harapan, keinginan, dan nostalgia tentang *civil society* atau "masyarakat madani", agama dijadikan sebagai faktor simbolik yang ikut memadamkan unsur-unsurnya. Kitapun kemudian tidak mengenal *civil society* yang mencerahkan, liberal, dan berbau transformasi. Sebab yang ditampilkan justru *civil society* yang "transendental", islami, profetik, beradab, non-liberal, dan anti intelektualisme. Dalam kerangka simbolisme inilah, apa yang dipersoalkan Hegel, yakni bagaimana menerjemahkan bahasa agama ke dalam bahasa pemikiran, tidak berlaku samasekali. Yang justru dominan adalah bagaimana menerjemahkan bahasa pemikiran menjadi bahasa agama, dibungkus dengan wama-wama agama. Fenomena semacam ini bukan hanya kita temukan pada "masyarakat madani", tapi juga pada "masyarakat sipil". Yang terakhir ini juga menjustifikasi tema-tema *civil society*-nya dengan wama-wama agama, seperti NU dengan khittah dan *al-kulliyat al-kebansab*-nya dijadikan model sebagai pemberdayaan *civil society*.

Bisa dipahami kemudian kalau sebagian kalangan masyarakat sipil merasa kecewa bahwa konsep *civil society*-nya telah diakomodasi dan dijinakkan oleh negara, sehingga mirip dengan proyek "inpres" dan "keppres". Inilah konsekuensi yang harus diterima kalangan masyarakat sipil ketika memperkenalkan sebuah konsep yang tidak utuh, yang sebenarnya lebih mirip serpihan-serpihan yang berserakan, tanpa ada satu kesatuan yang mempersemukannya. Dalam wacana *civil society* yang diangkat, mereka tidak pernah membuka perdebatan tentang liberalisme, sekularisme, kapitalisme, individualisme, sosialisme, humanisme, rasionalisme, dan sekian tema lainnya yang berkaitan dengan *civil society*. Paling banter yang diangkat hanyalah persoalan hubungan *civil society* dengan demokrasi - itupun tidak maksimal dan tidak sinkron. Misalnya mereka mengatakan bahwa *civil society* merupakan prasyarat tumbuhnya demokrasi. Akan tetapi di sisi lain, mereka juga mengatakan bahwa demokrasi merupakan wahana bagi tumbuhnya *civil society*. Terlebih lagi, demokrasi yang dipahaminya

pun tidak jauh berbeda dari *civil society* yang penuh deformasi dan deprestasi. Soalnya akan menjadi lain kalau mereka mengangkat bukan hanya tema demokratisasi, tetapi juga liberalisasi dan sekularisasi, yaitu bahwa *civil society* adalah konsep liberal dan konsep sekuler, agar dari sana selanjutnya diarahkan kepada upaya membuka perdebatan yang lebih komprehensif tentang *civil society*, bukan sekedar perdebatan tentang konsep-konsep baku dalam *civil society*, seperti soal *citizenship, free public sphere*, kemandirian dan otonomi, dan sebagainya. Penekannya harus pada proses, bukan produk jadi. yang namanya *civil society*. Sayangnya, dalam berbicara tentang proses ini, kalangan masyarakat sipil lebih suka mengadopsi pendekatan-pendekatan yang siap-saji dan siap-pakai, tanpa terlebih dulu mengikuti segenap aliran yang mengikuti dan menyertai pergerakan *civil society*, sehingga bisa terbentuk seperti yang kita kenal sekarang ini. Pendekatan-pendekatan siap-saji inilah yang disebut-sebut sebagai hakikat dan makna *civil society*.

Selain itu, ketika berbicara tentang kondisi kekinian kita, sejumlah eksponen *civil society* lebih suka berbicara tentang situasi-situasi yang dilihatnya timpang: negara kuat dan masyarakat yang lemah, dan aparat birokrasi dan militer mengabaikan hak-hak rakyat. Mereka juga berbicara tentang *social formation* yang menguntungkan negara. Tentang menjamurnya partai-partai yang dianggap berorientasi kekuasaan dan kursi, tentang kelas menengah dan buruh, dan juga tentang tingkat kesadaran politik dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Hampir semua pembacaan dalam teks-teks masyarakat sipil lebih bersifat monolitik, dalam arti: membatasi persoalan *civil society* pada masalah politik. Kami tegaskan di sini bahwa *civil society* tidak punya relevansi apa-apa dalam konteks keindonesiaan, kalau belum ada kritik atas situasi kita sendiri, baik dari faktor agama, sosial-ekonomi, kultur dan intelektualisme atau sistem bernalar. Apa yang perlu kami pertanyakan di sini adalah cara kita memperlakukan *civil society* sebagai solusi bagi gerakan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dan juga sebagai paradigma dalam melihat persoalan-persoalan sosial politik. Di sinilah letak persoalannya: kalangan masyarakat sipil telah mematok Barat sebagai rujukan dan model, sebagai paradigma dan solusi, sehingga kehilangan detail-detail perkembangan persoalan yang justru terjadi di lingkungan mereka sendiri, yang sebenarnya bukan

cuma persoalan politik.¹³

Kalau kita ikuti laporan survei nasional Demos 2005-2006 yang masih dalam proses finalisasi laporan, maka dalam draft sementara laporan yang ditulis oleh AE Priyono, dapat kita baca laporan sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Gejala politisasi atau repolitisasi di kalangan masyarakat sipil saat ini seolah tak terhindarkan. Gerakan dari berbagai organisasi sosial atau asosiasi sipil untuk masuk kembali ke wilayah politik formal mulai muncul di banyak tempat, terutama di aras lokal, sebagai eksperimen untuk berhubungan kembali (rekoneksi) dengan - dan/ atau bertransformasi menjadi - kekuatan politik. Dalam hubungannya dengan pilihan gerakan, Olle Tornquist menyebutkan sepuluh kemungkinan pilihan *go politics*. *Pertama*, menyediakan ruang untuk interaksi (*space for others*). *Kedua*, membuat front dari bawah (*front from below*). *Ketiga*, pembaharuan dari dalam (*reform from within*). *Keempat*, penggalangan kepentingan tertentu yang bersifat spesifik (*specific [class] interest*). *Kelima*, mengedepankan calon independen (*independent candidate*). *Keenam*, pengorganisasian melalui kontrak politik (*political contract*). *Ketujuh*, melembagakan ruang dan arena politik lokal (*institutionalise space/arena*). *Kedelapan*, menawarkan *platform* politik (*political platform*). *Kesembilan*, memanfaatkan momentum tertentu (*specific momentum*). *Kesepuluh*, menciptakan forum di tingkat lokal (*local forum*).

Dilihat dari sisi defisit demokrasi Indonesia, yakni fenomena yang diamati dalam studi Demos (2003-2006), upaya repolitisasi kegiatan sipil dan gerakan sosial dengan dua dimensinya itu pada dasarnya bisa dianggap sebagai bagian dari penguatan kembali kapasitas mereka untuk terlibat secara lebih substantif dalam proses-proses politik demokrasi. Selain itu, dengan mempertimbangkan pula kenyataan tentang adanya monopoli lembaga-lembaga dan instrumen-instrumen demokrasi oleh kalangan elite oligarkis, gerakan mereka juga bisa dipahami sebagai upaya demonopolisasi sekaligus perebutan kembali instrumen-instrumen demokrasi yang dikuasai oleh elite. Penguatan

¹³ Ahmad Baso: **Civil Society versus Masyarakat Madani**; Pustaka Hidayah, Bandung, 1999, h. 322-325.

kapasitas gerakan pro-demokrasi serta demonopolisasi elite itulah yang bisa kita definisikan sebagai politisasi demokrasi.

Tujuan politisasi demokrasi mengingatkan kita kembali pada kenyataan dasar demokratisasi, bahwa demokrasi tidaklah bisa bekerja dengan sendirinya secara otomatis begitu lembaga-lembaga demokrasi diperkenalkan. Demokratisasi mensyaratkan agar masyarakat memiliki kekuatan yang cukup untuk eksis dan berperan dalam isu-isu vital sistem politik, mampu mempolitisasi kepentingan-kepentingan dasar mereka, dan mampu pula memobilisasi dukungan publik yang luas. Ini merupakan definisi lain dari konsep-konsep tentang partisipasi, artikulasi, dan agregasi. Tornquist menyebutkan bahwa demokratisasi dan demokrasi tidak akan cukup substansial dan berfungsi secara bermakna bagi masyarakat sebagai cara untuk menyelesaikan problem-problem mereka dan membangun kehidupan yang lebih baik, jika mereka tidak memiliki akses, peluang, dan kapasitas untuk memanfaatkan instrumen-instrumen demokrasi, seperti kebebasan berpendapat dan pemilu.

Kesimpulan umum lainnya adalah bahwa hanya kelompok-kelompok berpengaruh yang menguasai lembaga-lembaga demokrasi yang baru tumbuh itu. Untuk sebagian, ini disebabkan oleh alasan-alasan yang bersifat struktural; juga karena lemahnya kapasitas masyarakat - khususnya kelompok-kelompok pro-demokrasi - untuk memanfaatkan demokrasi guna mencapai tujuan-tujuan mereka sendiri. Di luar itu, masih ada gejala di mana praktik elitisme politik yang sangat kuat menyebabkan pula munculnya demokrasi oligarkis, dan karena itu hanya menciptakan representasi politik yang elitis, semu, rapuh, dan tidak memiliki basis sosial. Dalam suasana demokrasi oligarkis, instrumen-instrumen demokrasi cenderung hanya dimanfaatkan (dan selanjutnya dimanipulasi) oleh mereka yang memiliki akses politik dan ekonomi yang luas pada sumber-sumber kekuasaan demi kepentingan mereka sendiri. Mereka ini sebagian besar berasal dari kalangan elite, baik lama maupun baru.

Di tengah-tengah situasi itu, aktivis gerakan pro-demokrasi yang berbasis masyarakat sipil terus mengalami fragmentasi di kalangan mereka sendiri, mengambang secara sosial, dengan peranan yang sangat marjinal secara politik. Pada kenyataannya mereka juga tidak

pemah dengan kuat membangun basis massa yang luas. Praktis, dengan peranan mereka yang terbatas seperti itu, pengaruh mereka hampir-hampir tidak begitu dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Mereka menjadi semacam kelompok-kelompok aktivis kelas menengah dengan agenda yang tidak begitu relevan dengan situasi riil yang dihadapi masyarakat kebanyakan. Inilah yang menjelaskan mengapa mereka disebut sebagai para demokrat mengambang

Gambaran mengenai peta baru hubungan-hubungan kekuasaan di Indonesia yang dijelaskan Tornquist berikut ini kiranya bisa menjawab pertanyaan pertama. Di puncak tertinggi hubungan kekuasaan, Indonesia pasca Orde Baru tidak lagi memiliki sebuah negara yang kuat, walaupun tetap saja masih besar. Negara telah terbelenggu, "terpenggal kepalanya" (*decapitated*) oleh dua bilah pedang yang dihunuskan dua kekuatan besar lain yang merongrong. Negara yang melemah, kekuatan komunal-komunitarian berbasis agama, serta kekuatan pasar yang disokong oleh globalisasi neoliberalisme, pada kenyataannya merupakan tiga pusat kekuasaan utama yang menjadi sumber dinamika politik paling berpengaruh di Indonesia pasca Orde Baru. Dalam relasinya dengan negara, kelompok-kelompok komunitarian yang sebagian menjadi basis sosial partai-partai politik di satu pihak, dan organisasi-organisasi bisnis yang banyak berhubungan dengan kekuatan modal global di pihak lain, tak jarang melakukan kontrol informal yang bersifat destruktif terhadap negara. Pada saat yang bersamaan mereka juga sering memediasikan hubungan antara negara dan rakyat. Menurut Tornquist, sementara kelompok-kelompok komunitarian cenderung mereduksi wilayah publik sekadar menjadi domain di bawah kendali legal-moral agama atau nilai-nilai komunal, kelompok-kelompok modal memprivatisasi sumberdaya publik demi kepentingan pasar dan/atau perusahaan bisnis.

Dalam konfigurasi hubungan-hubungan kekuasaan yang seperti itu, gerakan demokrasi sungguh-sungguh berada dalam keadaan terpuruk. Kelompok-kelompok kekuatan yang memiliki pengaruh besar malah cenderung memperkuat aliansi segitiga antara negara, pasar, dan kekuatan komunal. Tidak ada kekuatan alternatif yang berusaha membangun hubungan langsung antara rakyat dan negara melalui kekuatan-kekuatan sipil-politik yang independen. Karena sebagian besar hubungan antara negara dan rakyat dilakukan melalui

perantara kelompok-kelompok yang amat berkaitan dengan pasar dan kekuatan komunal maka yang terjadi adalah: hubungan-hubungan tersebut justru hanya memperkuat jaringan klientelisme dan korupsi. Sementara itu, karena sudah lama gerakan kerakyatan sekuat yang pernah dimiliki kekuatan politik radikal seperti PKI di masa lalu terus menerus ditekan dan dipunahkan, maka kekuatan alternatif dari bawah yang benar-benar bisa diperhitungkan belum juga muncul.

Demikianlah Tornquist akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa untuk mengubah secara signifikan hubungan-hubungan kekuasaan yang cenderung memarjinalisasi politik demokrasi populer, perhatian harus diberikan pada masalah representasi dan bahwa gerakan demokrasi harus memanfaatkan kemajuan yang sejauh ini dicapai dalam penguatan masyarakat sipil untuk merebut kembali pengaruh politiknya yang semakin pudar. Menantang pandangan pluralis-liberal yang menganggap bahwa gerakan masyarakat sipil akan mengalami risiko terpecah-belah karena masuk ke dalam politik radikal - yang dirujuk Edward Aspinall sebagai pernah terjadi pada tahun 1950-an/1960-an - Tornquist justru mengambil posisi agar dewasa ini gerakan masyarakat sipil mencurahkan diri pada agenda politisasi dan agregasinya: kekuatan komunal dan kekuatan pasar. Negara yang berada dalam keadaan tersandera itu bukan saja makin melemah karena ancaman fundamentalisme-komunitarianisme dan kapitalisme-neoliberalisme, tapi ia juga mengalami fragmentasi-dari-dalam, serta lokalisasi akibat desentralisasi.¹⁴

Demokrasi adalah keniscayaan politik dalam kehidupan kita berbangsa dan bemegara dewasa ini. Reformasi telah melahirkan kenyataan politik yang mendesak terjadinya reintroduksi demokrasi, sekaligus mendorong munculnya kebebasan sipil dan politik yang meluas. Inilah era dimana ruang politik tidak lagi tertutup, namun terbuka untuk partisipasi politik bagi siapapun, meskipun kita menyadari perluasan koridor kebebasan dan partisipasi politik tersebut belum sepenuhnya ditunjang secara maksimal oleh berfungsinya berbagai instrumen demokrasi secara substansial, termasuk instrumen penegakan hukum yang kondusif demi mengadaptasi terbukanya

¹⁴ dikutip secara bebas dari draft laporan Demos 20052006, sebagaimana yang ditulis AE Priyono.

ruang demokrasi itu. Kita menyadari betapa demokratisasi yang merasuki ruang sipil dan politik ternyata tidak serta-merta menghasilkan perbaikan yang substansial untuk reformasi hukum, reformasi birokrasi pemerintahan, dan representasi politik. Bahkan, beriringan dengan itu, juga muncul berbagai kendala struktural yang mengakibatkan transformasi demokrasi belum cukup memadai untuk kemajuan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, demi peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Itulah barangkali sebabnya, banyak ahli berpendapat bahwa memahami demokrasi secara substansial, selayaknya lebih ditekankan pada nilai-nilainya daripada hanya mengenai sistem pemerintahan. Menurut paham ini, demokrasi lebih dilihat sebagai seperangkat gagasan dan prinsip kebebasan, serta pelembagaan kebebasan daripada sekadar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional yang menentukan bagaimana suatu pemerintah berfungsi. Demokratisasi - sebagai proses menuju ke arah demokrasi - yang bermula dari suatu upaya merealisasi atau menyempumakan kehidupan demokrasi, muncul sebagai kebutuhan dan masalah bila kehidupan bemegara demokratis yang dicita-citakan ternyata belum terwujud sebagaimana diharapkan. Demokratisasi pada dasarnya merupakan proses meniadakan kesenjangan, yakni antara mereka yang terlalu digdaya kekuasaannya dan mereka yang terlalu tidak berkeberdayaan, antara mereka yang memiliki sumberdaya sosial, ekonomi dan politik berkelebihan dengan mereka yang nyaris tidak memiliki apapun.

Adalah suatu kearifan apabila kita menyadari kenyataan dasar dalam demokratisasi, bahwa demokrasi tidaklah bisa bekerja dengan sendirinya secara otomatis begitu lembaga-lembaga demokrasi diperkenalkan. Demokratisasi mensyaratkan agar masyarakat memiliki kekuatan yang cukup berdaya untuk eksis dan berperan dalam isu-isu utama sistem politik, berkemampuan untuk mempolitisasi kepentingan-kepentingan dasar mereka, dan berkeberdayaan pula untuk memobilisasi dukungan publik yang luas. Demokratisasi dan demokrasi tidak akan cukup substansial dan berfungsi secara bermakna bagi masyarakat miskin, sebagai cara untuk menyelesaikan problem-problem mereka dalam membangun kehidupan yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan mereka, jika masyarakat miskin itu tidak memiliki akses, tidak punya peluang, dan tidak memiliki

kapasitas untuk memanfaatkan instrumen-instrumen demokrasi, sekalipun itu merupakan kebebasan berpendapat ataupun kebebasan berserikat. Dalam wacana akademis kita memahami adanya konseptualisasi elemen dasar demokrasi politik, termasuk struktur mekanis formal dan prasyarat prinsip yang melandasinya. Setidaknya terdapat beberapa indikator yang layak kita pahami, yaitu: Pertama, kompetisi ekstensif dan bermakna di antara individu dan kelompok-kelompok terorganisasi, terutama partai politik untuk semua posisi kekuasaan pemerintah yang efektif dengan interval reguler, tanpa penggunaan kekerasan. Kedua, partisipasi politik yang sangat inklusif dalam seleksi pemimpin dan kebijakan, setidaknya melalui pemilihan yang fair dan bersifat reguler. Ketiga, kebebasan sipil dan politik - kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta kebebasan membentuk dan menjadi anggota organisasi - yang cukup untuk menjamin integritas kompetisi politik dan partisipasi.

Partisipasi aktif rakyat merupakan inti tindakan demokratis. Tanpa itu, demokrasi akan layu dan menjadi cagar bagi sejumlah kecil kelompok atau organisasi terpilih. Namun - sekali lagi - demokrasi bukan mesin otomatis begitu prinsip-prinsip dan prosedurnya disiapkan. Suatu masyarakat demokratis juga membutuhkan komitmen warganya yang menerima, bahwa pada dasarnya konflik tak dapat dihindarkan dan toleransi diperlukan. Banyak konflik dalam suatu masyarakat demokratis bukan antara pihak yang jelas-jelas salah atau benar, tapi antara berbagai penafsiran yang berbeda atas hak-hak demokratis dan prioritas sosial. Itulah sebabnya pada dasarnya demokrasi merupakan perangkat aturan untuk mengelola konflik. Pada waktu yang sama, konflik ini harus dikelola dalam batas-batas tertentu dan menghasilkan konsensus ataupun pengaturan lain yang diterima semua pihak sebagai sah. Dalam konteks masyarakat kita dewasa ini, demokrasi tidak bisa didukung dengan menghindarkan masyarakat warga dari politik dan dari konflik menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan. Tidak semua politik dan semua konflik bersifat kontra-produktif. Yang lebih penting dilakukan agar demokrasi berkembang secara substansial dan benar-benar bisa menjadi bermakna bagi masyarakat adalah menumbuhkan nilai-nilai demokrasi di dalam masyarakat warga, meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola konflik dan memperbarui politik, mengembangkan agenda

inklusif yang luas untuk mengubah hubungan-hubungan kekuasaan, serta memajukan kebijakan-kebijakan alternatif. Semua ini hanya bisa dilakukan jika kita mampu membangun kekuatan melalui organisasi-organisasi yang berbasis pada representasi kerakyatan.

Namun jika masyarakat warga memandang demokrasi sebagai tak lebih dari suatu forum di mana mereka dapat mendesak tuntutan mereka, maka masyarakat dapat hancur dari dalam. Sebaliknya, jika pemerintah menjalankan tekanan berlebihan untuk mencapai konsensus dengan membungkam suara rakyat, masyarakat akan hancur dari atas. Untuk itulah budaya demokrasi menjadi penting dikembangkan. Masyarakat harus bersedia menerima perbedaan satu sama lain, mengakui pihak lain mempunyai hak yang sah dan sudut pandang yang sah pula. Mengutip pendapat yang dikemukakan Abdullah Alamudi dalam buku *Apakah Demokrasi itu?* (1991): Semua demokrasi adalah sistem di mana warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Dalam masyarakat demokratis, kekuasaan mayoritas harus digandengkan dengan jaminan atas hak asasi manusia, yakni melindungi hak-hak minoritas - baik etnis, agama maupun politik. Hak-hak minoritas tak tergantung pada itikad baik mayoritas, dan tak dapat dihapus oleh suara mayoritas. Hak-hak minoritas dilindungi oleh hukum dan melalui pelembagaan hukum. Lembaga demokratis melindungi hak semua warga. Karena demokrasi bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tapi juga pada dasarnya merupakan pelembagaan kebebasan, dan oleh karena itu hak asasi dan persamaan di depan hukum harus dimiliki setiap masyarakat untuk bisa secara pantas disebut demokratis.

Di lain pihak, demokrasi juga lebih dari sekadar seperangkat aturan dan prosedur konstitusional yang menentukan bagaimana suatu pemerintahan berfungsi. Dalam demokrasi, pemerintah hanya salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari berbagai lembaga, partai politik, organisasi dan asosiasi. Keanekaragaman ini disebut pluralisme, yang berasumsi, kelompok terorganisasi dan lembaga dalam masyarakat demokratis tak tergantung pada legitimasi dan kekuasaan pemerintah. Pemerintah demokratis diciptakan untuk melindungi kebebasan individu berdasarkan eksistensi individu. Ada hak-hak alamiah yang tak dapat

dicabut siapa pun, yakni kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berserikat, dan hak mendapatkan perlindungan yang sarna di depan hukum. Hak-hak ini ini harus dijunjung tinggi setiap pemerintah demokratis. Kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan darah hidup setiap demokrasi. Demokrasi pada dasarnya adalah komunikasi. Orang berbicara satu sama lain tentang masalah bersama dan membentuk suatu nasib bersama. Warga suatu masyarakat demokratis hidup dengan keyakinan, melalui pertukaran gagasan dan pendapat yang terbuka, kebenaran akhirnya akan menang atas kepalsuan, nilai-nilai orang lain akan lebih dipahami, bidang-bidang mufakat akan dirinci lebih jelas, dan jalan ke arah kemajuan pun terbuka (Alamudi, 1991).

Demokrasi selayaknya harus bersifat emansipatoris, sebab semua bentuk emansipasi sebenarnya berhakikat sebagai proses demokratisasi, apakah itu emansipasi kaum perempuan dari kungkungan para patriark, ataupun emansipasi masyarakat dari alam kebodohan akibat kekurangan informasi dan pengetahuan yang benar, hingga emansipasi masyarakat miskin dari sumber daya produksi dan permodalan, dan lainnya. Apabila nilai demokrasi yang kita kembangkan tidak tumbuh di ranah emansipatoris, bukan mustahil akan muncul tanda-tanda zaman meruaknya kebangkrutan atau setidak-tidaknya defisit politik demokrasi di dalam masyarakat kita, dan apabila kenyataan sedemikian itu yang terjadi, sulit bagi kita untuk mengingkari betapa kuat kecenderungan munculnya fenomena demokrasi yang bersifat elitis, di mana hanya kelompok-kelompok berpengaruh yang menguasai lembaga-lembaga demokrasi. Bukan mustahil gejala ini menyeruak diakibatkan faktor-faktor yang bersifat struktural, seperti misalnya kecenderungan yang kuat dari regulasi demokrasi yang cenderung prosedural. Namun boleh jadi hal itu juga diakibatkan lemahnya kapasitas masyarakat, khususnya kelompok-kelompok masyarakat miskin, dalam memanfaatkan instrumen demokrasi untuk menggapai tujuan peningkatan kesejahteraan mereka.

Kita harus mencegah terjadinya praktik isme politik yang akan menumbuhkan demokrasi oligarkis, sebab demoelektisasi sedemikian itu hanya akan menciptakan representasi politik yang elitis, semu, rapuh, dan tidak memiliki keberpihakan pada orang-orang miskin.

Sudah saatnya kita mengeliminasi instrumen-instrumen demokrasi yang berkecenderungan dimanfaatkan atau bahkan cenderung dimanipulasi oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses politik dan ekonomi yang luas pada sumber-sumber kekuasaan demi kepentingan mereka sendiri.

Menumbuhkan gerakan demokrasi berbasis masyarakat selayaknya menjadi keniscayaan, terutama dengan mengagendakan pemetaan untuk memahami berbagai kendala yang dihadapi rakyat miskin dan gerakan-gerakan sosial kerakyatan di tingkat lokal dan akar rumput, untuk mendorong mereka agar berbagai jenis gerakan sosial kerakyatan itu mentransformasikan diri menjadi gerakan sosial politik demi peningkatan kesejahteraan mereka. Menumbuhkan berbagai asosiasi dan organisasi gerakan sosial di tingkat akar rumput sangatlah penting, karena mereka mencerminkan respons yang otentik dan berhubungan dengan kepentingan-kepentingan langsung masyarakat miskin. Di dalam konteks ini, betapa perlu bagi kita mengarahkan perhatian untuk melihat berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian pandangan yang sarna untuk merevitalisasi demokrasi melalui peningkatan partisipasi rakyat dalam berbagai ranah publik di tingkat lokal dan di akar rumput, yaitu lembaga-lembaga dan praktik-praktik sosial politik yang menjaga kepentingan publik yang terbuka untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam merespons fenomena otonomi dan demokratisasi lokal, sebagai bagian dari penguatan kembali kapasitas rakyat untuk terlibat secara lebih substantif dalam proses demokrasi.

Sudah saatnya kita mendorong proses demokratisasi sebagai gerakan sosial baru, mengembangkan politik aktivisme masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah, khususnya dalam latar politik lokal dalam ruang otonomi, di mana berbagai macam entitas masyarakat di akar rumput, para pelaku pasar, dan birokrasi pemerintah daerah, terlibat dalam gerakan yang saling memperkuat satu sarna lain, untuk memproduksi semua hal yang baik bagi semua orang. Dalam perspektif seperti ini, semua wacana dan praktik pembangunan selayaknya bersifat polisentris dengan membangun kepercayaan bahwa kegiatan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal dan akar rumput memiliki kemampuan untuk menyelesaikan daftar masalah-masalah yang terus berkembang, yang

mereka hadapi. Kita selayaknya berasumsi bahwa wacana peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sistem yang demokratis akan memberi ruang yang kondusif bagi kerjasama lokal dalam bingkai *good governance* antara birokrasi, institusi publik, dan masyarakat; sekaligus membangun relasi yang saling memperkuat antara lembaga-lembaga pemerintah daerah otonomi, institusi publik lokal, dan asosiasi-asosiasi masyarakat di akar rumput yang kondusif demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesadaran membangun demokrasi partisipatoris sedemikian itulah selayaknya berkolaborasi dengan kesadaran bahwa demokrasi selayaknya merupakan peluang terbesar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik, dan menghapus marjinalisasi. Konsolidasi demokrasi dewasa ini setidaknya sedang menghadapi tiga masalah, yaitu: pertama, *political trust* yang menyangkut kepercayaan rakyat terhadap komponen-komponen sistem politik yang berlaku dalam proses demokrasi saat ini; kedua, apa yang oleh para ahli teori politik disebut sebagai *political efficacy*, yaitu tingkat kepercayaan bahwa rakyat akan berkemampuan berperan untuk dapat mempengaruhi sistem politik. Mereka yang merasa mampu mempengaruhi sistem politik akan potensial berpartisipasi. Ketiga, *subjective dissatisfaction*, yaitu adanya perasaan dimarjinalkan, disingkirkan, merasa diperlakukan tidak adil dalam proses demokrasi. Makin tinggi ketidak-puasan subjektif, makin tinggi pula ketidak-percayaan rakyat terhadap proses demokrasi, maka makin potensial pula gerakan sosial politik rakyat akan menolak berpartisipasi.

4c
**CATATAN PERGUMULAN KONSULTASI NASIONAL
INSTITUT LEIMENA**

Drs. Jakob Tobing, MPA¹⁵

Institut Leimena, bersama dengan PGI, PGLII, dan PGPI menyelenggarakan Konsultasi Nasional (Konas) pada tanggal 19-21 September 2008. Dihadiri sekitar 150 peserta dari sinode-sinode gereja, para pemimpin gereja dan para tokoh serta saudara-saudara yang melayani di berbagai bidang kehidupan, wakil-wakil Lembaga-lembaga Pelayanan Kristen, mereka berkumpul dan bersama-sama membahas perkembangan bangsa dan tanah air kita tercinta Indonesia, sekarang dan ke depan.

Di tengah perubahan dan perkembangan yang amat cepat dan bermakna, yang sedang terjadi di tengah bangsa Indonesia, dan bahkan di tengah dunia, kita merasa perlu untuk bertemu, duduk bersama, saling berbagi pemikiran dan pengalaman, saling memperkaya, saling berbagi, saling mendukung dan saling mendoakan, sehingga kita masing-masing dan bersama-sama tidak terombang-ambing di tengah arus perubahan, tetapi bahkan dapat memberikan yang terbaik bagi perkembangan dan perjalanan bangsa dan negara ini ke depan.

Kegiatan Konas ini pada hakikatnya adalah kegiatan kita bersama, oleh karena kerinduan kita untuk bertemu dan bersekutu, dan Institut Leimena hanyalah sekedar pengambil inisiatif. Dalam hubungan itu acara Konas ini kiranya dilihat dalam rangkaian tidak terpisahkan dan saling mengisi dengan kegiatan pertemuan gerejawi lainnya, seperti *Konferensi Gereja dan Masyarakat 2008* yang diselenggarakan oleh PGI, *Konsultasi Nasional Bless Indonesia 2020* yang diadakan tahun 2008 bersama PGLII & PGPI, *Musyawarah Besar VI PGPI 2008*, dan berbagai kegiatan lainnya.

¹⁵ Direktur Eksekutif *Institut Leimena*; mantan Duta Besar RI di Korea Selatan.

Perubahan yang terjadi selama 10 tahun terakhir di tengah bangsa Indonesia sangat mendasar. Dari sebuah negara dengan pemerintahan non-demokratik terbesar ke-2 di dunia setelah Cina, kita sekarang tergolong negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Bila sebelumnya peran negara dan pemerintah dalam menentukan kehidupan sehari-hari amat dominan dibanding peran masyarakat, sekarang masyarakat diharapkan mengambil peran jauh lebih besar daripada sebelumnya.

Negara kita sekarang telah menegaskan keberadaannya sebagai negara hukum yang berusaha menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia, menerapkan sistem *check and balance*, kebebasan pers dan berpendapat dijamin, pasangan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, otonomi daerah dilaksanakan, dan sebagainya.

Tetapi di lain pihak, kehidupan sehari-hari pada era demokrasi belum seperti yang diharapkan dan terkadang bahkan terlihat lebih buruk daripada sebelumnya. Hak berpendapat dan berbeda pendapat masih sering dinyatakan dalam kekerasan. Konflik horisontal meledak di berbagai daerah. Fundamentalisme beragama merebak, baik di kalangan Islam maupun juga di tengah-tengah kita orang Kristen.

Ada yang diekspresikan secara positif konstruktif, dalam keinginan untuk bekerjasama lintas agama, membangun saling pengertian dan saling menghormati, seraya mencari ruang untuk kerja bersama mengatasi masalah kemanusiaan, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan. Tetapi ada yang terekspresikan dalam bentuk ketakutan dan kebencian pada yang lain, dan sering juga dalam bentuk pengrusakan atau pembakaran rumah ibadah. Ada juga yang diekspresikan dalam rupa upaya menempatkan otoritas agama di atas otoritas negara. Ada pula dalam bentuk pengunduran diri dari lingkungan besar bersama dan masuk ke dalam sebuah lingkungan kecil yang eksklusif, yang dirasa nyaman, baik dalam kehidupan politik, ekonomi maupun kehidupan budaya, karena berada bersama dengan rekan se-suku, atau se-agama, atau se-ras, atau se-daerah asal, seraya dibayangi dan dipersatukan oleh rasa takut dan cemas menghadapi kelompok yang lain adalah wajah lain dari ekspresi negatif.

Sementara itu harga-harga keperluan pokok terus melonjak naik dan kesulitan ekonomi terus menekan. Sepertinya demokrasi dan keterbukaan telah lebih banyak membawa persoalan dan kesulitan daripada manfaat. Berbagai perubahan itu membuat sebagian kita gamang dan bertanya-tanya. Perasaan itu sah saja dan beralasan, karena beberapa negara maju, bahkan *superpower* seperti Uni Soviet, tidak mampu menjalani masa perubahan seperti yang telah kita jalani itu dengan selamat. Uni Soviet sekarang lenyap dari peta bumi dan tinggal kenangan, demikian pula Cekoslovakia dan Yugoslavia.

Negara-negara itu tidak mampu mempertahankan kohesi masyarakatnya, lalu mengalami fragmentasi berdasarkan ras dan asal-usul dan terpecah belah ke dalam beberapa entitas etno-politik. Kita jauh lebih beruntung dari mereka. Di bawah tekanan perubahan yang amat luas dan besar yang kita lewati, bangsa Indonesia yang amat majemuk dan berdiam di rangkaian 17,000 kepulauan ini tidak pecah.

Tetapi, karena mengalami berbagai permasalahan seperti disebutkan sebelumnya, sekarang ada yang mulai lelah mengalami semua keadaan yang baru dan asing ini, dan rindu kembali ke era Orde Baru yang dirasa lebih aman dan lebih tenteram walaupun harus hidup dalam tatanan otoriter yang mengutamakan pendekatan keamanan.

Di tengah perkembangan demikian, Konas Institut Leimena menggumuli dua isu dari sekian banyak isu yang dianggap sentral, yaitu isu keretakan (fragmentasi) sosial dalam masyarakat kita yang amat majemuk ini dan isu kemiskinan yang meluas dengan segala akibatnya, di mana kemiskinan itu sangat sering mengikuti pengelompokan SARA di suatu wilayah tertentu, sehingga pada gilirannya juga mendorong proses alienasi kelompok dan mempertajam proses keretakan sosial di tengah masyarakat kita.

Pertama-tama kita perlu mencatat bahwa di tengah tekanan perubahan besar itu, kita semua sepakat untuk mempertahankan dasar negara kita Pancasila, baik sebagai dasar dan ideologi negara, maupun sebagai cita-cita Indonesia merdeka. Kita sepakat mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan bangsa yang paling majemuk di dunia ini, dengan 300-an suku bangsa dan 17,000 pulau di sepanjang katulistiwa, tidak terpecah-belah. Bahkan pada hakikatnya kita sepakat bahwa perubahan yang fundamental yang telah terjadi itu,

dari semi-otoriter menjadi demokratis, adalah justru agar dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita lebih kokoh dan agar tujuan berbangsa dan bernegara kita dapat diwujudkan di tengah perubahan yang melanda bangsa dan melanda dunia.

Dengan kesepakatan itu berarti kita juga sepakat untuk terus membangun dan merawat masyarakat kita sebagai sebuah masyarakat majemuk dengan kualifikasi masyarakat yang setara-simetrik, tanpa diskriminasi, yang bekerjasama, lebih dari sekedar saling menghargai dan toleransi, dan yang inklusif, menyadari bahwa dalam kepelbagaian itu kita adalah satu.

Jalan demokrasi adalah jalan yang perlu tegas menjadi pilihan kita. Inilah jalan yang berpokok-mula dari prinsip mulia menghargai sesama manusia, sebuah prinsip yang bersesuaian dengan iman percaya kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan menurut rupa-Nya sendiri.

Pengalaman panjang kita sebagai bagian dari masyarakat tertutup pada masa lalu telah memberi pelajaran bahwa keamanan dan ketenteraman semu yang kita alami pada masa itu tidaklah sepadan dengan dicerainya harkat kemanusiaan kita sebagai manusia merdeka yang diciptakan Tuhan menurut rupa-Nya.

Namun jalan demokrasi bukanlah jalan yang bisa dibangun sekali jadi. Ia memerlukan konsistensi dan ketekunan membangunnya dan adalah jalan yang terus-menerus memerlukan tindak konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi demokrasi sekarang ini sebenarnya tanggung jawab dan peran terbesar ada di pundak pemerintah, dalam hal ini utamanya eksekutif. Tetapi tentu saja langkah mengkonsolidasikan demokrasi juga merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya membangun dirinya menjadi sebuah *civil-society* yang kokoh.

Setelah gerakan reformasi didorongkan oleh para mahasiswa dan kaum intelektual, pada masa berikutnya tuntutan reformasi telah diserap masuk ke dalam agenda kerja kelembagaan negara yang kemudian menghasilkan reformasi di berbagai bidang kehidupan, termasuk perubahan UUD 1945 melalui rangkaian amandemen dari tahun 1999 sampai 2002. Setelah itu, selanjutnya adalah pemerintah yang seharusnya memimpin penerapan prinsip-prinsip reformasi dengan dukungan masyarakat. Namun pengamatan kita mengatakan

bahwa pemerintah sering tidak mengambil posisi memimpin dan memberi solusi terhadap suatu perkembangan, seperti pada kasus Ahmadiyah, gamang dalam menegakkan wibawa negara berhadapan dengan aksi sepihak kekerasan segelintir orang yang mengatas-namakan agama terhadap agama lain atau terhadap orang lain. Diperhadapkan dengan berbagai permasalahan, seharusnya pemerintah - karena Presiden menjalankan kekuasaannya berdasarkan UUD 1945 dan bersumpah untuk menegakkan konstitusi - tegas menunjukkan posisi atau keberpihakannya kepada prinsip-prinsip luhur demokrasi dan HAM. Dengan demikian kekuasaan akan menjadi kekuatan yang mendidik dan mengarahkan rakyat, bukan sekedar menjadikannya sebagai penyeimbang.

Di lain pihak, berbagai kebijakan untuk mengatasi kesulitan ekonomi-keuangan yang ada dampaknya terhadap rakyat miskin, seperti kenaikan harga BBM, masih sering dirancang dengan asumsi seolah-olah rakyat telah cukup kuat, seolah-olah rakyat pada umumnya telah hidup di atas garis kemiskinan, dan bahwa di tengah masyarakat dan pasar ada dan bekerja mekanisme yang memadai untuk mengatasi atau melunakkan berbagai dampak negatif kebijakan itu. Berbagai hal itu memperlemah posisi dan kredibilitas pemerintah sebagai pemimpin perubahan dimata rakyat yang pada gilirannya mempersulit upaya konsolidasi demokrasi.

Jika tanggung jawab memperkokoh demokrasi itu tidak dilakukan, negara ini bisa kehilangan kesempatan emas untuk tumbuh maju adil dan sejahtera serta demokratis dan tidak tertutup kemungkinan kita akan kembali kedalam alam otoriter. Karena itu, sekarang ini adalah masa di mana masyarakat, termasuk kita, harus lebih aktif mengambil bagian, untuk mengkonsolidasikan demokrasi, untuk membangun masyarakat sipil (*civil society*) yang tumbuh kuat.

Dalam hubungan itu kita harus berani, baik dalam sikap mental maupun dalam tindakan, untuk keluar dari lingkungan *comfort zone* kita sebagai mereka yang minta dilindungi, masuk ke dalam masyarakat untuk bersama-sama mencegah kemunduran proses demokrasi dan membangun *comfort zone* bagi semua. Kalau selama ini kita sering memposisikan diri sebagai pihak minoritas yang meminta perlindungan dari penguasa, sudah waktunya sekarang kita masuk

berbaur di tengah masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, untuk menegakkan dan menghargai hak-hak asasi manusia, untuk mendorong penegakan hukum. Kita tak lagi memosisikan diri sebagai peminta perlindungan dari kekuasaan, tetapi sebagai pihak yang turut memperjuangkan tegaknya prinsip-prinsip yang memungkinkan semua pihak terlindungi secara adil oleh hukum, bukan oleh kekuasaan. Kita harus bekerja sebagai pihak yang bersama-sama dengan mereka yang sepaham untuk membangun masyarakat yang menghargai kesetaraan, membina kerjasama, menghilangkan diskriminasi di tengah masyarakat, dan bersifat inklusif.

Sejalan dengan itu, di tengah kebersamaan itu kita turut mendorong masyarakat agar aktif dan partisipatif dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan tidak lagi membiarkan masyarakat tetap menjadi pihak yang pasif dan nrimo dalam hubungan antara negara dengan rakyat. Dengan perkataan lain, kita harus keluar dari bayang-bayang sindrom minoritas dan dengan percaya diri masuk ke kancah pergaulan sebangsa yang saling menghormati dan saling kerjasama untuk membangun bangsa. Sikap yang demikian perlu dikembangkan sebagai upaya untuk mencegah dan menghentikan proses fragmentasi sosial yang sedang terjadi. Paling tidak dengan sikap itu kita bukan pihak yang membuat fragmentasi terus memburuk.

Jumlah orang miskin di negeri ini masih cukup banyak. Kemiskinan dan sekaligus keterbelakangan terdapat di daerah perkotaan maupun di daerah terpencil. Pada kondisi tertentu, kurangnya akses kepada faktor-faktor pengembangan dan kemajuan telah menumbuhkan kemiskinan struktural di banyak tempat. Dan perlu memperoleh perhatian adanya kantong-kantong kemiskinan yang berciri kelompok suku atau agama tertentu, khususnya agama Kristen, seperti di beberapa tempat di bagian Timur Indonesia. Mereka miskin dan terbelakang. Keadaan mereka menyebabkan mereka rentan terhadap alienasi dan juga konversi.

Kondisi ini merupakan hambatan bagi upaya membangun kemajemukan yang berkualitas, yang setara dan bisa bekerjasama. Mereka tidak akan bisa mengemban perannya sebagai bagian masyarakat yang berkedudukan setara dengan yang lain. Di lain pihak,

persentuhan mereka dengan masyarakat lain yang lebih mapan dan berbeda agama dapat memperhadapkan mereka dengan cobaan yang dalam, bahkan terhadap iman percaya mereka.

Kita perlu memberi perhatian dan menolong keadaan mereka, bukan untuk bersikap eksklusif dan tertutup, bukan untuk mementingkan diri dan kelompok sendiri, tetapi justru agar kita konsisten dengan upaya membangun masyarakat Indonesia yang setara dan inklusif dalam kemajemukannya. Bila kesejahteraan mereka terangkat, mereka akan lebih mampu untuk turut dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat majemuk yang setara dan inklusif.

Sejalan dengan itu, marilah kita kembali menaruh perhatian besar kepada tersedianya fasilitas pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan bagi mereka pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan pada dua atau tiga generasi yang lalu telah membuahkan hasilnya yang positif sampai sekarang. Kita perlu mengulangi kembali pelayanan itu, terutama di daerah kantong kemiskinan.

Secara khusus kita perlu mengantisipasi masalah kesulitan ekonomi, terutama masalah kelangkaan dan mahalnnya harga pangan menjelang akhir tahun dan dampak kehancuran sistem keuangan dunia yang tidak lama lagi akan menerpa kita dengan hebat. Beberapa pakar memperkirakan bahwa menjelang akhir tahun akan terjadi kekurangan pangan yang serius di tingkat global dan tentu berdampak besar ke dalam negeri dan mulai awal tahun depan akan ditandai dengan PHK dan pengangguran. Gereja-gereja dan lembaga pelayanan dan kita semua perlu mencari jalan untuk mengurangi dampak kelangkaan dan seretnya ekonomi itu. Bila perlu mempersiapkan bantuan dalam bentuk natura bagi mereka yang membutuhkan dan turut menghindari PHK sejauh mungkin. Bila mungkin malah berkreasi mencari peluang membentuk kesempatan kerja baru.

Sebentar lagi guliran pemilihan umum akan dimulai lagi dengan pemilu legislatif pada bulan April 2009 dan diikuti oleh pilpres langsung pada bulan Juli 2009 yang mungkin dilanjutkan dengan pilpres putaran ke-2 beberapa bulan kemudian. Selain itu ratusan pilkada kabupaten/kota dan provinsi akan berlangsung. Di tengah segala kekurangannya, pemilihan umum telah memberi kesempatan

kepada rakyat untuk menentukan corak kehidupannya. Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memberikan kepercayaan kepada atau untuk menarik kepercayaan dari elite politik atau figur tertentu.

Karena kita perlu dan harus keluar dari *comfort zone* lingkungan eksklusif untuk aktif berpartisipasi bersama sesama warga negara, kita perlu memikirkan dengan cermat bagaimana sebaiknya berbagai pemilu itu disikapi. Pertama, perlu dengan sungguh-sungguh diyakini bahwa kita perlu dan harus menggunakan hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih, dengan sebaik-baiknya. Kita jangan menjadi golput. Kedua, agar kita bersifat positif aktif dan rasional turut menentukan siapa yang akan memenangkan pemilu. Jangan sampai sikap dan pilihan yang kita tentukan didasarkan pada rasa takut dan bersifat emosional-reaktif yang tidak lain adalah cetusan dari sindroma minoritas.

Kita perlu memilih kelompok politik atau figur yang telah membuktikan dirinya menghargai kemajemukan. Tetapi kemajemukan yang dimaksud bukan asal kemajemukan. Banyak pihak dan kelompok sekarang yang menggunakan kemajemukan hanya sebagai kulit luar dalam upaya memperoleh dukungan yang lebih luas, seolah-olah inklusif terhadap pihak lain, namun sebenarnya tidak. Kita pilih yang mengusung ide kemajemukan yang berciri kesetaraan, dan karenanya inklusif dan tidak diskriminatif. Kita bisa mengetahuinya dari catatan selama ini. Kalau baru muncul, ya tentu belum bisa diukur. Oleh karena itu tidak mungkin ada kelompok politik atau figur yang keberadaannya atau pergerakannya berdasarkan suku, atau agama, atau ras, atau asal-usul, akan benar-benar menjunjung tinggi kemajemukan yang menghargai kesetaraan dan bersifat inklusif.

Selain bersifat majemuk-setara, ada tidaknya *network* yang luas dan berdimensi nasional yang dimiliki oleh kelompok atau figur yang akan dipilih, perlu dipertimbangkan. Apabila kelompok atau figur itu hanya bagus dalam tampilan, mempesona, walau menawarkan program yang baik, tetapi bila tidak memiliki jaringan yang luas yang berskala nasional maka kelompok atau figur itu nantinya tidak akan bisa berbuat banyak dan akan terombang-ambing oleh berbagai tarikan dan tekanan politik lingkungannya, seperti yang pernah kita alami sekarang.

Apabila kedua hal itu telah dipenuhi, selanjutnya perlu diperhitungkan apakah kelompok atau figur itu bisa menang. Pilihlah yang bisa menang agar suara tidak hilang percuma. Kekeliruan dalam mempertimbangkan hal-hal di atas dapat menyebabkan terjadinya alienasi terhadap kita dalam lingkungan tempat kita berada.

Kita perlu mencermati bahwa pada kenyataannya mungkin saja kita tanpa sadar telah mulai menarik diri dan masuk ke dalam lingkungan kecil eksklusif yang kita rasa aman, baik dari sisi suku, maupun dari sisi agama, ras dan asal usul, baik dalam kehidupan politik, maupun ekonomi dan sosial budaya.

Seperti dikemukakan sebelumnya, kita justru perlu keluar dari lingkungan *comfort zone* kita, berbaur dengan masyarakat kita yang majemuk. Langkah inilah yang akan memungkinkan kita efektif membangun masyarakat majemuk kita.

Sementara kita berharap keluar dari lingkungan dan masuk menggarami masyarakat, kita perlu membina lingkungan jemaat dengan baik dan sungguh-sungguh. Di lingkungan inilah nilai-nilai iman Kristiani disemaikan dan dipupuk. Dalam hubungan itu gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan perlu meningkatkan kualitas pembinaan jemaat. Inilah basis tempat warga memperoleh penyegaran motivasi dalam kiprahnya di tengah masyarakat luas.

Atas dasar pertimbangan itu kiranya basis itu jangan atau tidak diganggu oleh kepentingan politik praktis partai politik atau kelompok politik manapun. Marilah kita jaga agar gereja dan lembaga pelayanan tidak menjadi panggung politik siapapun, tidak menjadi tertutup, eksklusif dan sektarian.

Kita juga perlu meningkatkan pembinaan kesadaran berkeyakinan yang sehat di tengah perkembangan sekarang. Sering umat merasa waswas melihat perkembangan kesadaran keagamaan umat lain. Tidak jarang perasaan was-was itu malah dipertajam oleh orang tertentu yang gemar menakut-nakuti umat kita dengan cerita-cerita dramatis.

Kegiatan semacam itu, yaitu menakut-nakuti warga, perlu dikendalikan karena akan menimbulkan jurang bahkan ketakutan dan kebencian yang satu terhadap yang lain dan pada gilirannya mengganggu keutuhan masyarakat majemuk kita.

Sebagai negara yang berdasar Pancasila, kita harus siap melihat penganut agama berusaha untuk lebih bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita tidak perlu takut melihat perkembangan itu. Kita tidak perlu takut, malah harus mempunyai empati, melihat semakin maraknya simbol-simbol kekhusukan keagamaan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu kita jaga bersama adalah jangan sampai otoritas negara dipergunakan untuk mewajibkan pengamalan ajaran agama, termasuk penggunaan simbol-simbol agama, untuk penganutnya atau untuk siapapun.

Dalam kenyataan sehari-hari kita melihat eksekusi dari antusiasme beragama, sehingga terjadi friksi atau konflik. Kita perlu mengambil posisi yang tepat untuk pro-aktif mengatasinya dan tidak menjadikan dan menggeneralisasikan permasalahan itu sebagai friksi atau konflik antara, misalnya, orang Kristen versus orang Islam. Sesuai dengan semangat agar kita keluar dari eksklusivisme dan berbaur bersama yang lain, masalah friksi atau konflik seperti itu hendaknya didudukkan sebagai masalah pelanggaran terhadap hukum atau terhadap HAM. Dengan demikian friksi atau konflik itu tidak akan menimbulkan fragmentasi dalam masyarakat atas dasar Kristen dan non-Kristen.

Konsultasi nasional Institut Leimena ini telah berusaha membicarakan berbagai masalah itu dengan terbuka dan mendalam. Perlu ditegaskan bahwa Konas itu bukanlah bertujuan untuk menggalang kekuatan dan membuat front Kristen, tetapi untuk membangun komunikasi di antara kita yang aktif dalam berbagai bidang kehidupan, dan diharapkan berguna untuk saling memperkaya dan meningkatkan pelayanan masing-masing.

Semoga Tuhan Yesus memberkati.

5 Bidang Hukum dan HAM

5a *Position Paper*

Secara normatif, penegakan HAM di Indonesia telah diamanatkan sejak Indonesia merdeka, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Didirikannya Komisi Nasional (Komnas) HAM melalui Keputusan Presiden No. 50 tahun 1993 menjadi tonggak baru bagi perjuangan perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia. Berdirinya Komisi ini telah mendorong masyarakat Indonesia, terutama kelompok yang tertindas, baik petani, buruh, kaum miskin, kelompok-kelompok agama dan politik, untuk berani menyuarkan penderitaan atau kepeduliannya akan proses penindasan di seluruh tanah air. Dengan kata lain, berdirinya Komnas HAM sebagai satu lembaga resmi negara yang secara khusus menangani masalah-masalah HAM telah memberikan kesempatan bagi masyarakat dari segala kelompok, lapisan dari penjurur tanah air untuk menyalurkan aspirasinya tentang masalah-masalah HAM di Indonesia. Dengan dikeluarkannya TAP MPR RI No. XVII/MPR/RI 1998 tentang Hak Asasi Manusia, diundangkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta ditambahkannya satu bab tentang HAM di dalam UUD 1945 yang diamandemen (yaitu bab XA, Pasal 28A s.d. 28J), masyarakat semakin menaruh harapan akan semakin terlindunginya hak-hak asasi di tengah-tengah Bangsa, Negara dan Masyarakat Indonesia.

Namun demikian, implementasi penegakan HAM di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Dalam konteks Indonesia yang tengah bertransisi menjadi negara yang lebih demokratis selama sepuluh tahun terakhir, timbul euphoria dari arus kebebasan yang lahir dari gerakan reformasi. Arus kebebasan yang semestinya menjadi kekuatan konstruktif pembangunan bangsa, dalam kenyataannya malah menjadi persoalan baru. Sebagian masyarakat merasa berhak melakukan apa saja atas nama kebebasan, memerangi kelompok lainnya yang tidak sepaham, bahkan melalui cara-cara kekerasan dengan dalih memerangi ketidakbenaran menurut ukuran mereka sendiri atau kelompoknya,

tanpa mengindahkan hukum yang berlaku dan mengabaikan hak-hak asasi masyarakat sebagai manusia.

Salah satu aspek HAM yang paling memprihatinkan di Indonesia adalah masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sekalipun konstitusi Indonesia menyebutkan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (UUD 1945 Pasal 29 ayat 2) dalam kenyataannya cukup banyak persoalan yang dihadapi umat beragama, terutama kelompok minoritas, dalam menjalankan hak-hak dasarnya sebagai umat beragama. Beberapa persoalan yang dapat dikemukakan antara lain: adanya agama yang diakui dan tidak diakui, intervensi negara dalam masalah intern agama, masalah Izin Mendirikan Rumah Ibadah, dan maraknya penutupan Gereja dan Rumah Ibadah Kristen

Sementara itu, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki satu kesatuan sistem hukum yang dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945, sebagai dasar negara. Di dalam sistem hukum sedemikian, tidak ada hukum yang memberikan hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Walaupun ada perbedaan, semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka persatuan dan kesatuan (Bagir Manan dalam “*keynote address*” pada satu seminar nasional di Bandar Lampung, 9 Maret 1996). Itu berarti pembentukan hukum di satu sisi harus memperhatikan kemajemukan masyarakat, namun di sisi lain harus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam kenyataannya kini, cukup banyak produk hukum yang diskriminatif di Indonesia, seperti lahirnya perda-perda bernuansa syariah Islam di beberapa daerah, bahkan juga dalam proses legislasi di tingkat nasional. Selain itu juga masih ada produk-produk hukum yang hanya mengakomodasi kepentingan para pemodal dan cenderung mengabaikan kepentingan rakyat banyak dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Hal-hal sedemikian bisa terjadi karena proses-proses politik yang melahirkan produk hukum tersebut masih sangat dikuasai oleh

infrastruktur politik yang melekat dengan kepentingan-kepentingan kelompok dan sesaat. Dalam sistem politik yang demokratis, suprastruktur dan infrastruktur politik saling mempengaruhi dalam semua proses politik sebelum melahirkan sebuah produk hukum. Dalam konteks Indonesia kini, infrastruktur politik belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain kecenderungan partai politik memakai dan memperjuangkan simbol-simbol emosional, produk hukum juga acap lahir tanpa melibatkan masyarakat dalam proses legislasi.

Sementara itu, penerapannya juga ternyata masih jauh dari harapan. Realitas masyarakat main hakim sendiri ketimbang menyelesaikan persoalan secara hukum acap terjadi dan dibiarkan oleh negara. Dalam penyelesaian hukum pun, ternyata aparat hukum juga sering terjebak dalam tekanan kepentingan-kepentingan tertentu ketimbang kepentingan hukum itu sendiri. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam berbagai kasus hukum dimana kepentingan rakyat acap dikorbankan demi kepentingan pemodal. Hal yang sama juga terjadi antara kelompok minoritas yang acap dikorbankan karena tekanan kaum mayoritas.

Dalam kondisi demikian, menjadi pertanyaan menarik untuk dibahas: di manakah posisi atau kedudukan hukum dalam negara RI?

Gomar Gultom

5b Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia

Martin Hutabarat, SH¹⁶

Indonesia adalah Negara Hukum. Pernyataan ini dengan jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dengan demikian kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan haruslah berdasar atas hukum yang telah disepakati. Salah satu perwujudan dari penegakan hukum adalah diakui dan dilindunginya Hak-hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Amandemen (Perubahan) Kedua UUD 1945 mencantumkan dengan tegas tentang Hak Asasi Manusia pada Bab XA, dari Pasal 28A s.d. 28 J. Di samping itu Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal lainnya yang menyangkut agama, pendidikan, pekerjaan, fakir miskin dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, adalah juga manifestasi dari pengakuan terhadap HAM. Demikian juga undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia dan undang-undang lainnya seperti UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah dalam rangka perlindungan terhadap HAM.

Beberapa waktu yang lalu, disetujuinya oleh DPR Rancangan Undang-undang tentang Anti Diskriminasi menjadi Undang-undang adalah bukti bahwa semangat untuk melaksanakan perlindungan HAM secara harfiah dalam perundang-undangan kita semakin meningkat.

Dibandingkan dengan masa Orde Baru, penegakan hukum dan perlindungan terhadap HAM - haruslah diakui - dalam banyak hal lebih maju. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan masa Indonesia menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950, UUD 1945 yang telah mengalami 4 kali perubahan dan yang digunakan sekarang dalam beberapa hal

¹⁶ Anggota Kelompok HAM DPR RI 1990, anggota Komisi Gereja dan Masyarakat PGI, alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

masih ketinggalan. Sebagai contoh, dapat dilihat pada aspek kebebasan beragama, di mana pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 18, berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama. Hal ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri, dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orangtua mereka.

Sejak Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia berdiri melalui Kepres no 50 tahun 1993, yang diperkuat dengan UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan keluarnya TAP MPR RI No XVII/MPR/RI 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang diikuti amandemen terhadap UUD 1945, semangat untuk melindungi HAM di Indonesia juga semakin meningkat.

Dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia, masih ada orang yang beranggapan bahwa perlindungan HAM dalam Konstitusi kita sangat dipengaruhi pola pikir individualisme atau liberalisme, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dideklarasikan tanggal 10 Desember 1948. Anggapan yang keliru ini masih sering diwacanakan, karena ada yang beranggapan bahwa nilai-nilai HAM itu tidak sesuai dengan kepribadian kita. Namun sebenarnya, apabila kita dalam, penegakan hukum dan perlindungan HAM itu justru adalah pengamalan dari ideologi Pancasila kita, khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Ketuhanan yang Maha Esa.

Pancasila sebagai ideologi nasional adalah faktor pengikat dan pemersatu kita sebagai Bangsa. Tanpa Pancasila, tidak akan terbayangkan negara kita yang begitu luas dan sangat majemuk ini dapat utuh dan bersatu sampai sekarang. Siapapun tidak dapat memungkirinya. Dengan keyakinan itu, hukum yang berlaku dan yang akan kita bangun ke depan adalah hukum yang melindungi segenap rakyat Indonesia, hukum yang memberi hak dan kewajiban yang sama pada seluruh penduduk. Hukum yang mengalir dari sumbernya yakni

Pancasila. Ini sudah menjadi komitmen atau janji luhur kita sebagai Bangsa. Sehingga sangatlah tidak benar apabila dalam pembentukan hukum ke depan, baik ketetapan MPR, Undang-undang maupun Peraturan-peraturan Hukum yang lebih rendah, seperti Peraturan-peraturan Daerah, ada aturan yang bersifat diskriminatif, yang membedakan satu warga negara dengan warga negara lain.

Peraturan Hukum yang diskriminatif ini sangat berpotensi memecah belah persatuan, tidak senafas dengan prinsip hukum yang kita anut, yang memandang setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan tak sejalan dengan perlindungan HAM yang hendak kita tegakkan.

Ke depan, di zaman globalisasi yang semakin meluas, isu tentang HAM akan semakin menguat. Tidak ada satu negara pun yang tidak akan terimbas oleh isu ini. Indonesia sebagai bagian dari kehidupan dunia juga telah menyadari itu. Beberapa peristiwa terakhir di tanah air kita, yang sebelumnya tidak diperhatikan, akhirnya menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, sesudah dunia luar ikut mengunjingkannya. Kenyataan ini menuntut kita untuk lebih serius dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan HAM kepada masyarakat.

Di sinilah saya kira peran pendidikan HAM kepada rakyat itu semakin penting dilakukan, baik melalui institusi formal maupun melalui pers, keluarga dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Disamping pendidikan, konsistensi kita dalam membangun hukum yang sesuai jati diri Bangsa yakni Pancasila, dan melaksanakan penegakan hukum yang tanpa pilih bulu adalah kunci keberhasilan kita dalam melindungi HAM di Indonesia.

5c Realitas Penegakan HAM di Indonesia

Ifdhal Kasim¹⁷

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini adalah suatu hal yang sangat tepat, karena dalam waktu yang tidak lagi masyarakat dunia akan merayakan Hari HAM berdasarkan HUT ke-60 Deklarasi Universal tentang HAM, yakni 10 Desember yang akan datang.

Kini HAM telah dijadikan sebagai suatu standar bersama, dan setiap negara yang menghormati HAM akan menyesuaikan diri dengan berbagai konvensi yang telah ada. Dengan diterimanya deklarasi universal HAM maka konsep kedaulatan negara menjadi terkikis.

Sebagai bangsa yang bermartabat, adalah penting memasukkan hak asasi dalam kehidupan bernegara. Kita terus menerus ada dalam perjuangan ini. Dari catatan historis terlihat adanya pasang-surut dan pasang-naik dalam memasukkan HAM ke dalam UUD 1945.

Sejak masa Reformasi tahun 1998 kita mencoba memperkokoh HAM ini ke dalam tataran politik dan tatanan Negara. Kita juga menyepakati agar kasus-kasus HAM di masa lalu diusut tuntas dan diselesaikan sesuai dengan hukum. Ada tekad bersama untuk menyelesaikan apa-apa yang tidak diselesaikan oleh Orde Baru, yaitu pelanggaran HAM. Sayangnya, sepanjang 10 tahun ini hanya ada dua pengadilan HAM Ad-hoc, yaitu kasus Tanjung Priok dan Timor Timur.

Ada berbagai hambatan menyangkut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM ini. Komnas HAM berbeda dengan KPK. KPK bisa menyelidik, menuntut, dan mengadili dalam satu paket. Sementara Komnas HAM sangat tergantung pada lembaga-lembaga di luar Komnas HAM. Karena itu banyak kasus masa lalu sampai sekarang mengambang dan tidak selesai. Dan ini mempengaruhi kasus-kasus lain yang saat ini terjadi. Seharusnya, ada tindakan hukum dari pemerintah untuk melakukan penegakan hukum. Tapi tidak demikian

¹⁷ Ketua Komnas HAM.

adanya. Misalnya, kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah di Parung. Ketika rumah pesantren milik mereka dirusak, tidak ada tindakan hukum yang terjadi kepada yang merusak. Karena terjadi pembiaran dan tidak ada tindakan hukum yang diambil oleh aparat pemerintah, maka penyerangan serupa dilakukan di tempat lain.

Saya kira ada salah pemahaman antara kebebasan dan hukum. Ada salah pengertian pada hal kebebasan antar hak. Ini suatu kesaksian keliru, karena kebebasan selalu disertai dengan tanggungjawab. Karena itu demokrasi tanpa penegakan hukum sangat sulit.

Organisasi yang terlibat dan terbukti melakukan tindak pidana harus dibubarkan. Kalau orang mau membentuk organisasi, itu hak mereka. Setiap orang memiliki kebebasan untuk membentuk organisasi. Tetapi kebebasan selalu diikuti dengan tanggung jawab dan dalam tanggung jawab itu ada hukum. Dalam demokrasi harus ada penegakan hukum. Jadi organisasi yang tidak taat hukum sebenarnya bisa dibubarkan. Kalau tidak ada ketegasan dari negara maka hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan akan rusak, dan ini yang harus dijaga oleh negara ini. Karena ketidakmampuan negara untuk menjaga kebebasan yang paling hakiki, yakni kebebasan beragama, kini kita mengalami suatu periode yang sangat buruk dalam bernegara, khususnya kebebasan beragama telah gagal.

Terbukanya demokrasi di Indonesia ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dan muncul organisasi tertentu yang menggunakan kewenangan di luar undang-undang. Dan banyak pula partai politik yang lebih memanfaatkan sentimen-sentimen agama dalam berpolitik. Hal ini bermula pada banyaknya kasus pelanggaran kebebasan beragama. Misalnya banyak laporan dari pihak Gereja, Protestan maupun Katolik, serta dari agama-agama lokal yang mengalami berbagai hambatan dan gangguan. Paling banyak adalah menyangkut larangan pendirian rumah ibadah, perusakan rumah ibadah, dan larangan beribadah.

Kami sudah mencoba membawa kasus ini untuk ditangani. Pendirian rumah ibadah ini berkaitan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri [nomor 9/8 tahun 2006]. Tapi sering juga terjadi, ada Gereja yang sudah mengikuti persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bersama tersebut, toh tidak bisa

mendirikan gedung gerejanya. Oleh karena itu, Komnas HAM mengatakan kepada Presiden bahwa perlu ada tindakan hukum. Sebab perusakan rumah ibadah merupakan suatu bentuk tindak pidana. Karena itu perlu ada keberanian pemerintah untuk menindak hal tersebut.

Yang terjadi ialah kurang kemauan dari pemerintah untuk menegakkan hukum dalam peristiwa-peristiwa tindak pidana seperti ini. Akibatnya, gelombang perusakan itu semakin membesar. Misalnya mengenai Ahmadiyah. Permasalahannya, kalau tidak ditindak akan menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya.

Berkaitan dengan maraknya diskriminasi

Selain masalah di atas, saat ini kita juga menghadapi permasalahan dengan maraknya diskriminasi melalui perundang-undangan, yaitu peraturan di bawah undang-undang, yaitu peraturan daerah. Banyak sekali perda-perda yang mengandung diskriminasi, seperti di Aceh dan Sulsel.

Praktik-praktik diskriminasi ini memang juga kemudian mendapat pembenaran dari partai-partai politik pendukungnya. Kontroversi di sekitar UU Pornografi dan UU Sisdiknas juga dijadikan amunisi politik oleh partai-partai. Dan ini yang sangat membahayakan kita dalam kedudukan kita sebagai warga negara. Perusakan gedung gereja oleh massa, di situ terlihat tidak ada tindakan hukum dari pemerintah. pembiaran seperti ini sebenarnya menunjukkan akibat yang mengarah pada diskriminasi. Kalau kecenderungan ini tidak diantisipasi secara tegas dan jelas, akan sangat membahayakan sendi-sendi kebangsaan kita.

6. Bidang Sosial-Ekonomi

6a

SOLUSI KRISIS DENGAN EKONOMI HOLISTIK

Prof. Dr. Roy Sembel¹⁸

Dalam perjalanan ke tempat ini tadi, saya diwawancarai salah satu Radio Surabaya tentang pendekatan bisnis apa yang cocok untuk saat ini. Kesimpulan jawaban saya adalah: tidak boleh pendekatan yang parsial, tetapi harus holistik. Seperti itu juga dalam ekonomi makro, pendekatannya harus holistik supaya handal.

Sri Adiningsih telah menyebutkan (lihat bab 2; peny.) bahwa Indonesia sedang mengalami krisis keuangan dan ekonomi yang cukup mencekam, dalam dan panjang, dengan nada yang sedikit pesimis. Krisis itu misalnya ditandai dengan nilai kurs rupiah terhadap dolar US yang sangat fluktuatif. Salah satu penyebab krisis keuangan itu adalah karena kita suka pada *hot money*, uang panas, keuangan jangka pendek yang gampang masuk juga gampang keluarnya. Padahal yang kita perlukan sebetulnya adalah uang yang membumi, yang tahan jangka panjang.

Perbandingan krisis moneter thn 1998 dengan krisis keuangan 2008: Tahun 1998 pusat krisisnya ada di Indonesia, sedangkan tahun 2008 ini pusat krisisnya ada di AS. Pertumbuhan ekonomi tahun 1998 menciut, tetapi 2008 pertumbuhannya positif (5-6%). Suku bunga 1998 tinggi, bisa mencapai 40-50%, sedangkan tahun 2008 meskipun *double digit* tetapi masih ok. Cadangan devisa (amunisi) 1998 kurang dari 20 milyar dollar AS, tahun 2008 di atas 50 milyar, jadi amunisi kita jauh lebih baik menghadapi krisis ini. Penurunan IHSG 1998 sampai pada 65,6% dalam 14 bulan, sedangkan 2008 hampir 60% dalam 10 bulan. Sektor terparah pada krisis 1998 adalah perbankan dan

¹⁸ Pejabat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Acting Dean of Business School and Graduate Program, Universitas Pelitea Harapan (UPH).

properti, sedangkan tahun 2008 adalah pertambangan dan perkebunan.

Jadi di tengah krisis sekarang ini ada kabar baik ekonomi Indonesia, a.l.: pertumbuhan ekonomi kita yang positif (6%); GDP/kapita US\$ 2.000; ekspor tahun 2008 sudah di atas US \$ 100 milyar, belum satu tahun; turunnya harga minyak dunia yang sempat mencapai US \$ 147 per barrel, sekarang sudah turun menjadi US\$ 60. Harga Pertamina saja sekarang sudah turun.

Dari gambaran itu dapat kita sebutkan bahwa ekonomi Indonesia sekarang ini ibarat kapal, di depan ada badai tetapi juga ada terang, maka tergantung nakhodanya mau mengarahkan ke mana. Saya sendiri mengusulkan supaya melakukan pendekatan holistik. Ilustrasinya seperti anak belajar naik sepeda. Pendekatannya bukan sepedanya tegak berdiri dulu baru berjalan, ini pendekatan parsial. Tetapi sambil tegak sambil berjalan, itulah pendekatan holistik. Artinya, sektor finansial dan sektor riilnya dilakukan secara bersama-sama. Amartya Sen (peraih hadiah Nobel ekonomi 1998) menyebut pendekatan holistik ini sebagai pendekatan yang terpadu, termasuk memperhatikan dimensi etis dalam diskusi tentang masalah-masalah ekonomi.

Analisis SWOT Ekonomi Indonesia

Kekuatan:

Biodiversity
Sumberdaya tambang, migas
Matahari 12 bln/tahun
Sumberdaya kelautan
Keindahan alam, seni-budaya
Jumlah penduduk (rank 4 dunia)

Peluang:

Pertumbuhan ekonomi Cina
Pemulihan ekonomi AS
Perkembangan ICT
Kerjasama intra-Asean
WTO/AFTA
Harga minyak dunia

Kelemahan:

Cryonism (KKN)
Penegakan hukum
Luka akibat krisis
Kualitas SDM rendah
Infrastruktur keras kurang memadai

Ancaman:

Krisis finansial dunia
Terorisme fisik
Terorisme ekonomi
Wabah penyakit
Gejolak harga komoditas

Distorsi pasar
Humas lemah
Politik masih dalam proses transisi

Bencana alam

- *Software*/infrastruktur lunak, seperti: *law and order, good governance*
- *Human capital*, seperti: *Basic life skills, positive mindset, entrepreneurship*, dll.
- *Market*, seperti *better market for jobs, products/services, financial assets*.

Jadi Musti Bagaimana?

- Keamanan berusaha dan kepastian hukum
- *Strong leadership* dan *sense of urgency* dari para elite politik
- Pemberantasan KKN dan penegakan hukum
- Restrukturisasi sektor riil digalakkan
- Pemberdayaan BI dan Lembaga Manajemen Aset
- Intensifikasi swastanisasi BUMN secara *prudent*
- Mengurangi distorsi ekonomi (monopoli, subsidi BBM, dll.) secara *prudent*
- Memperkuat basis investor portofolio lokal
- Meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur
- *Fair international trade*
- *Reduce excess speculation, compensate weak nations: Tobin's Tax*
- *National accounting*: memasukkan unsur *non-tradeable goods, quality of life variables*.

Dari semua ini, saya lebih menekankan pada peningkatan SDM melalui pendidikan. Lalu, perdagangan internasional tidak boleh hanya sekadar *free trade*, tetapi harus *fair trade*. Di pasar finansial, yang membuat gejolak adalah keserakahan yang tak ada koridornya. Gagasan Adam Smith, bapak ekonomi itu, dikutip tidak utuh. Padahal dia menyebut bahwa self-interest harus dalam koridor moral yang baik. Sekarang ini yang lebih banyak dibenahi hanyalah *dashboard* ekonomi makro, tidak sampai pada memperbaiki ekonomi mikro. Maka itulah perlu pendekatan holistik, baik tentang makro juga mikro ekonominya.

Framework-nya adalah: *hardware; software; leadership; marketware; brainware*. Dan *capacity building* yang diperlukan untuk ekonomi adalah:

- *Hardware*/infrastruktur keras, seperti: transportasi, energi, ICT, *biotechnology*.

Dalam hal *capacity building* ini, yang paling ditekankan adalah manusianya, sebab akar krisis ekonomi ada di pelakunya (manusianya). Maka komponen sukses ekonomi itu ada di *mindset* manusianya (80%), dan hanya 20% di teknisnya. Maka pembelajaran itu tidak cukup hanya *learning to know*, tetapi harus *learning to think, learning to do, learning to be*, dan *wisdom*. Penekanan sekarang ini, yang lebih pada IQ, harusnya yang lebih diutamakan adalah EQ dan SQ. Dengan demikian tercipta *leadership* yang dapat menjadi teladan, yaitu terdapatnya kesesuaian antara kata dan perbuatan. Karena memang manusia lebih cepat mencontoh perbuatan dari pada kata-kata. Jadi pendekatan holistik itu perlu ada *leader* yang handal.

6b
**AGAPE; GLOBALISASI ALTERNATIF
MENGUTAMAKAN RAKYAT DAN BUMI**

Margaretha M Hendriks-Ririmasse¹⁹

Pendahuluan

Ketika kita memasuki era globalisasi, ada banyak harapan yang kita miliki dan janji yang kita dengar. Salah satu janji yang membuat kita sangat berpengharapan adalah bahwa globalisasi ekonomi akan membawa banyak kesempatan bagi masyarakat dunia untuk memperoleh kehidupan social-ekonomi yang lebih bermutu dan baik.

Kenyataan yang kita hadapi sekarang justru sebaliknya. Dunia justru berhadapan dengan berbagai krisis, baik krisis keuangan, krisis pangan, krisis energi, krisis keamanan, krisis lingkungan hidup, dst. Dan seperti biasanya mereka yang menerima akibat terburuk dari berbagai krisis ini adalah rakyat banyak, khususnya mereka yang miskin. Janet Bruin dalam tulisannya berkata:

Instead of spreading wealth around, globalization and current macro economy policies in both North and South are concentrating in fewer hands. Unemployment and number of people living in poverty are increasing in many countries. Workers are being forced into low paid jobs and women are being forced into unprotected informal economy where social security and other benefits do not apply, or into prostitution. Children are forced to leave schools to work in factories, farms or in the streets to help support their families and people are forced to leave their countries in search for paid labor elsewhere, provoking an international backlash against immigrants as economic and security threats. Both migration and anti immigrants xenophobia are expected to intensify as population pressures, unemployment and economic disparities between countries become even more acute.²⁰

¹⁹ Vice Moderator WCC, Ketua PGI, dan Dekan Fakultas Teologi UKIM, Ambon.

²⁰ Janet Bruin, *Root Causes of Global Crisis*, (Manila, 1996), h.11.

Apa yang dikatakan oleh Janet Bruin merupakan sebuah kenyataan yang teralami di mana-mana di dunia, khususnya di dunia ketiga, termasuk di Indonesia. Berbagai kasus bunuh diri yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia karena masyarakat tidak mampu menanggung beban hidup adalah salah satu contoh dari parahnya penderitaan akibat berbagai krisis dimaksud. Beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan RI Indonesia dalam wawancara di Metro TV, 21 Oktober 2008, juga menggambarkan bahwa jumlah orang yang mengalami depresi dan tekanan mental sehingga memerlukan perawatan di rumah-sakit jiwa semakin meningkat. Menurut beliau hal ini disebabkan karena tekanan sosial-ekonomi yang semakin berat bagi masyarakat banyak. Masalah ini akan semakin parah apabila tidak ditangani secara serius oleh semua pihak. Prediksi dari PBB justru mengatakan bahwa jumlah orang miskin di dunia akan bertambah sebanyak 100 juta orang akibat dari berbagai krisis yang kini melanda dunia. Dalam kaitan itu pula salah satu dampak ekologis akibat dari eksploitasi hutan dan berbagai sumber daya alam secara serakah dan tanpa peduli telah mengakibatkan berbagai bencana alam di berbagai bagian dunia. Selain itu diprediksikan pula bahwa ratusan pulau-pulau kecil akan tenggelam beberapa tahun yang akan datang apabila masalah ini tidak ditangani secara serius. Kerusakan alam akan semakin memperparah keadaan rakyat banyak. Sekarang saja para nelayan dan petani telah merasakan akibat dari perubahan cuaca yang tidak menentu, baik karena hasil panen yang semakin menurun maupun hasil tangkapan yang juga menurun akibat dari musim tangkap yang juga tidak menentu.

Berbagai krisis yang disebutkan di atas akan semakin bertambah parah apabila kita mengangkat bahu dan mengatakan: itulah risiko dari proses globalisasi, dan tidak melakukan sesuatupun untuk mengatasinya. Apa yang harus disumbangkan oleh gereja untuk mengurangi dampak negatif dari globalisasi ekonomi, merupakan pertanyaan yang harus menggelisahkan kita semua, sebab gereja adalah persekutuan yang ditempatkan Allah di tengah dunia untuk menjadi pembawa kabar baik bagi dunia yang menderita dan terancam, termasuk bagi alam semesta ciptaan Tuhan yang diciptakan-Nya “baik”. Hal tersebut akan kita bahas di bawah ini.

Gereja dan Globalisasi

AGAPE (*alternative globalization addressing people and earth*), atau upaya membangun globalisasi alternatif dengan memberi perhatian pada kehidupan rakyat banyak dan bumi, merupakan pikiran yang ditawarkan oleh WCC, khususnya Tim Keadilan, Perdamaian dan Ciptaan. Pada dasarnya AGAPE merupakan pikiran WCC sebagai upaya untuk melawan sistem globalisasi ekonomi yang kini diberlakukan, dalam rangka menyelamatkan rakyat banyak dan bumi dari dampak globalisasi ekonomi yang penuh ancaman tersebut. Sama seperti analisa dan pikiran dari Janet Bruin yang disebutkan di atas dan banyak pakar lainnya, Tim WCC ini juga melihat bahwa bencana global yang selama ini melanda dunia dan membawa penderitaan bagi masyarakat banyak serta ancaman serius bagi alam semesta itu sangat banyak disebabkan oleh sistem ekonomi neoliberalisme yang digunakan dalam proses globalisasi ekonomi yang diberlakukan sekarang ini.

Globalisasi dan neoliberalismenya berorientasi pada *profit making* yang hanya menguntungkan para pemodal besar, dan karena itu kepentingan rakyat banyak khususnya mereka yang sedianya miskin sama sekali tidak mendapat perhatian (*Agape*, WCC, Geneva, 2006, hl. ..). Etos dominan dari globalisasi ekonomi adalah kompetisi untuk mengejar kepentingan diri dan untung (*profit*) di kalangan para pemodal besar saja. Dan karena itu sistem pasar bebas dikembangkan dan dipaksakan untuk diterima di seantero jagat, tetapi dengan akibat yang tidak kita harapkan seperti yang disebutkan di atas. Bukan saja rakyat kecil dan miskin yang menderita akibat dari sistem ini, tetapi para pengusaha kecil juga menderita dan banyak yang bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan para pemilik modal besar termasuk dan khususnya mereka yang berasal dari negara-negara maju. Perusahaan-perusahaan kecil yang bangkrut, pedagang kecil yang gulung tikar, rakyat banyak yang bertambah miskin, dan seterusnya, adalah pengalaman berpasas bebas sekarang ini. Ya, hal seperti itu wajar saja kalau perusahaan sebesar *Carrefour*, umpamanya, menjual semua barang mulai dari bumbu dapur sampai dengan peralatan berat termasuk mobil. Tentu saja kaum kecil di pasar tradisional lama kelamaan akan tidak mampu berkompetisi dan mengalami kebangkrutan dalam usaha-usaha mereka. Bayangkan kalau karena pasar bebas para

pemodal besar dibiarkan saja masuk dengan bebas dan melakukan aktivitas bisnisnya di berbagai bidang. Tentulah perusahaan-perusahaan kecil tidak akan mampu bertahan, lalu akan terus terpinggirkan dan mati. Bayangkan pula kalau demi keuntungan yang besar maka sumberdaya alam yang tersisa boleh dieksploitasi, dan sering secara tidak bertanggungjawab serta penuh keserakahan. Maka yang akan dan pasti terjadi adalah kematian bumi dan sekaligus kematian bagi seluruh umat manusia, karena hidup umat manusia tergantung sangat pada kehidupan bumi dan alam semesta.

Bagi WCC, struktur ekonomi global yang kini diberlakukan adalah struktur ekonomi yang penuh dosa dan kejahatan, bahkan merupakan struktur kematian. Dia harus dilawan dan ditransformasi. Di sinilah peran lembaga-lembaga agama dan suara kenabian mereka dibutuhkan agar supaya ancaman kematian dan kehancuran alam semesta bisa dicegah, dan kehidupan yang bermutu bagi semua bisa ditegakkan. Inilah panggilan Allah bagi dunia ini, bagi lembaga-lembaga agama, dan teristimewa bagi gereja.

Dalam kondisi hidup yang penuh ancaman kematian sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi dewasa ini, maka misi Gereja, termasuk misi setiap gereja di Indonesia di tengah kehidupan masyarakat bangsa yang dilanda krisis ini, harus diartikan sebagai panggilan untuk berpihak kepada rakyat banyak, khususnya mereka yang miskin dan dimiskinkan dan juga berpihak kepada bumi dan alam yang sementara mengalami pengrusakan secara sistimatis. Itulah panggilan untuk berjuang bersama mereka dalam rangka mereklamasi hak-hak hidup mereka dan hak-hak hidup bumi ini. Dan bagi saya wujud dari perjuangan itu adalah dengan memperjuangkan pemberlakuan sistem berekonomi dan berglobalisasi alternatif yang kita sebut *AGAPE*, seperti yang diusulkan oleh WCC.

AGAPE adalah suatu sistem ekonomi yang secara paradigmatis berbeda dari sistem yang sekarang. Sesuai dengan makna kata *agape* itu sendiri maka sistem ini menjadikan cinta-kasih sebagai etos dominannya, yaitu cinta-kasih kepada Allah, kepada sesama manusia dan kepada seluruh alam ciptaan. Jadi orientasi globalisasi model AGAPE menjadi berbeda, sebab di sini tujuannya bukan lagi mengejar kepentingan para pemodal, tetapi untuk menghormati Allah lewat

penghargaan kepada hak-hak hidup umat manusia secara menyeluruh dan juga penghormatan terhadap hak-hak hidup alam semesta.

Dengan kata lain, sistem ekonomi yang mau dibangun adalah suatu sistem yang bukan lagi bertujuan untuk semakin memperkaya segelintir orang bermodal saja dengan mengancam hidup masyarakat banyak dan bumi, tetapi justru untuk memperjuangkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat banyak dan bumi demi kemuliaan Allah sendiri. Dengan demikian globalisasi yang mau dikembangkan adalah globalisasi yang positif, di mana proses pemiskinan rakyat banyak dan perampasan hak-hak hidup bumi ditransformasi menjadi sistem dan struktur sosial-ekonomi yang menjamin kehidupan bermutu bagi semua. Tidak boleh ada korban lagi, tetapi kehidupan bermutu bagi semua. Tegasnya orientasi dari sistem ekonomi AGAPE adalah pro kehidupan bermutu bagi semua yang hidup.

Mengimplementasi AGAPE dalam Kehidupan Masyarakat

AGAPE tidak dimaksudkan sekedar sebagai wacana, tetapi untuk diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia. Dengan kata lain, visi global ini memerlukan aktualisasi pada tingkat lokal (ingat slogan kita, “*think globally and act locally*”). Itu berarti kita harus bertanya, bagaimana visi WCC tentang AGAPE diimplementasikan dalam kehidupan gereja-gereja kita. Dalam kaitan itu saya teringat beberapa waktu lalu ketika *Executive Committee* dari WCC bersidang di Lubeck, German. Sekelompok orang Jerman bertemu dengan saya untuk mengajukan *complain* bahwa di Indonesia ada gereja yang menggunakan tanah yang tersedia untuk maksud perkebunan dengan tanaman yang bisa membawa untung banyak bagi para investor. Mereka memang tidak menyebut nama gereja yang dimaksud, tetapi menurut mereka sebenarnya tanah itu bisa digunakan untuk pertanian bagi kepentingan rakyat di sana, karena gizi anak-anak di daerah tersebut masih termasuk buruk. Pembicaraan ini ingin saya bagi pada kesempatan ini hanya untuk mengingatkan kita semua bahwa sebagai gereja kita harus menguji secara cermat segala tawaran bisnis yang masuk, agar supaya gereja tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang pada dasarnya menambah beban hidup rakyat banyak dan menambah kerusakan lingkungan hidup.

Saya juga menonton sebuah CD tentang dampak sosial dan ekologis yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, Sumatera dan Riau. Warga masyarakat yang memberi tanahnya untuk perkebunan tersebut merasa sangat tertekan dengan keputusan mereka, sebab yang mereka alami justru kondisi ekonomi yang semakin memprihatinkan dan kondisi lingkungan hidup yang juga semakin memburuk karena limbah pestisida dan pupuk kimia yang hanyut dan mematikan kehidupan di sungai maupun di laut, serta sumber air yang terserap akibat tanaman kelapa sawit yang membutuhkan banyak air maupun rusaknya lingkungan pada umumnya. Inilah pengalaman-pengalaman yang perlu menjadi pelajaran bagi gereja-gereja untuk berhati-hati mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan sosial yang menyangkut harkat hidup masyarakat banyak.

Gereja justru harus berupaya mendampingi dan mengadvokasi umat dan masyarakat dalam berhadapan dengan para pemodal besar agar supaya kegiatan-kegiatan ekonomis di seputar kehidupan mereka tidak semakin meluluh-lantakkan kehidupan masyarakat banyak, tetapi justru mengentaskan mereka dari kemiskinan dan keterpurukan yang ada. Sesuai dengan visi AGAPE, gereja justru harus lebih banyak menolong umatnya dan masyarakat sekitar untuk mengembangkan ekonomi rakyat yang menjamin keberlanjutan kehidupan mereka dan keberlanjutan dari hidup bumi. Ada banyak badan yang bisa menolong memberdayakan warga masyarakat di daerah-daerah pedesaan untuk memanfaatkan tanah maupun laut di sekitar mereka untuk kegiatan-kegiatan yang mendatangkan hasil yang memadai dan sekaligus tetap memelihara lingkungan hidup dan alam semesta dalam rangka hidup berkelanjutan baik bagi umat manusia maupun bagi alam sendiri. Hanya alam yang sehat akan bisa menyelamatkan kehidupan umat manusia sebaliknya alam yang rusak dan mati justru akan membawa kematian yang mengerikan pul abagi umat manusia.

Dalam kaitan itu pula gereja perlu membangun kerjasama dengan komunitas agama lain, dengan LSM-LSM dan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat dan lingkungan hidup untuk bersama-sama membangun kebijakan dan merancang aksi-aksi pemberdayaan sosial-

ekonomi bagi umat dan masyarakat yang menjamin hidup berkelanjutan bagi umat manusia dan bagi alam.

Dalam kaitan itu nilai-nilai budaya setempat yang menunjang keberlanjutan hidup manusia dan alam semesta perlu dimanfaatkan juga dan tidak dilihat sekedar sebagai unsur-unsur kafir yang harus ditinggalkan. Perlu diingatkan bahwa budaya di banyak daerah di Indonesia melihat alam semesta sebagai ibu. Penghargaan ini perlu dijadikan inspirasi bagi gereja dalam mengadvokasi dan memberdayakan umat dan masyarakat secara sosial-ekonomi, agar dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi tidak melupakan hak hidup bumi yang perlu hidup, baik demi kepentingan bumi itu sendiri maupun demi keberlanjutan hidup seluruh makhluk.

Gereja juga perlu mengembangkan spiritualitas yang prohidup yang ditunjang dengan cara membaca Alkitab dengan mata baru, agar supaya ayat-ayat Alkitab tertentu tidak lagi digunakan untuk melegitimasi kekuasaan tanpa batas manusia atas alam semesta, tetapi memperlakukannya sebagai mitra manusia yang saling memberi hidup satu terhadap lainnya. Manusia harus sadar bahwa dia hidup dari alam dan karena itu dia bertanggungjawab untuk memelihara kehidupan alam semesta.

6c

MDGs: REORIENTASI PELAYANAN & KESAKSIAN GEREJA DI INDONESIA

Chris Wangkay²¹

Pendahuluan

Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) yang disepakati 189 negara anggota PBB pada September 2000 adalah upaya PBB dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia untuk mengatasi kemiskinan selama 25 tahun, terhitung sejak 1990 hingga 2015. MDGs terdiri dari 8 tujuan yaitu: (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan; (2) mewujudkan pendidikan dasar bagi semua; (3) mempromosikan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; (4) mengurangi tingkat kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lain; (7) mendukung kelestarian lingkungan hidup, dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Deklarasi Millenium merupakan monumen perjuangan pemberantasan kemiskinan yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob).

Penegakan hak-hak asasi manusia (HAM) secara universal dapat membuka jalan untuk menjadikan kemiskinan sebagai sejarah. Demikian salah satu pernyataan penting Sekjen PBB Kofi Anan pada hari HAM Internasional 10 Desember 2006. Lebih lanjut, Sekjen PBB menegaskan hak-hak yang mendasar - hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas makanan dan pelayanan kesehatan yang diperlukan, hak atas kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan yang layak, atau hak untuk bebas dari diskriminasi - merupakan hal-hal yang paling dibutuhkan oleh orang-orang paling miskin.

Namun karena status mereka yang lemah dan marjinal, mereka menjadi orang-orang yang paling tidak bisa mencapai atau

²¹ Konsultan pada Oxfam Australia dan Koordinator Gerakan Rakyat untuk Penghapusan Utang (GARPU). E-mail <chris@garpu.org>

mempertahankan hak-hak yang universal tersebut. Akibatnya, hak asasi manusia terancam bahaya, di mana pun dan kapan pun seorang laki-laki, perempuan, atau anak hidup dalam kemiskinan yang ekstrem.

Kampanye menjadikan kemiskinan sebagai sejarah bisa dinilai sebagai kampanye PBB yang ambisius. Namun, bukan berarti hal itu tidak bisa diwujudkan. Jika saja dunia lebih ber hikmat, mempertaruhkan sumber daya dan dananya untuk memerangi kemiskinan daripada mengobarkan perang dan konflik di mana-mana, tentu kampanye PBB tadi tidak akan tinggal menjadi ambisi semata. Alangkah sulitnya kampanye PBB itu diwujudkan dalam kondisi dunia seperti sekarang. Saat ini dunia secara nyata menghadapi dua perang, yaitu perang melawan kemiskinan itu sendiri dan perang terbuka bersenjata seperti di Irak, yang melahirkan kemiskinan baru yang serta-merta berdampak pada lahirnya kelompok fundamentalis berkendaraan agama.

Indonesia tentu saja tidak bisa terlepas dari kondisi keprihatinan dunia saat ini yang sedang terperangkap dalam kubangan kemiskinan. Tetapi, seiring dengan proses demokratisasi setelah tumbanganya Orde Baru tahun 1998, perbaikan pelaksanaan HAM pun mulai menunjukkan perubahan yang membaik. Paling tidak, Indonesia sudah memiliki perangkat penegakan HAM, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kemudian memunculkan lembaga Komnas HAM, Rencana Aksi Nasional-HAM Tahun 2004-2009, dan Meratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional mengenai Hak Ekosob melalui UU Nomor 11 Tahun 2005.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekosob, namun hingga kini hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki rakyat miskin semakin jauh tak terjangkau. Akibatnya, muncul fenomena yang mengikuti derita kaum miskin, seperti perdagangan manusia, eksploitasi seksual, kasus balita dan anak mengalami gizi buruk, terserang busung lapar hingga menuju kematian usia sangat muda.

Mungkinkah Indonesia Bebas dari Kemiskinan ?

Persoalan Mikro: Pangan

Kenaikan harga beras yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia beberapa waktu ini telah menciptakan kecemasan di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka menyikapi keadaan ini dengan mengalihkan konsumsi makanan pokok mereka dari beras ke tiwul, gaplek ataupun nasi aking, yang kesemuanya sebenarnya merupakan pakan ternak. Peralihan konsumsi tersebut mau tak mau harus mereka lakukan demi mempertahankan hidup, dan seperti biasa pemerintah menyikapi hal ini dengan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras yang kemudian diikuti oleh rencana impor beras.

Memang, dalam jangka pendek kebijakan operasi pasar diperlukan dalam menolong warga miskin. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini akan memberikan disinsentif terhadap petani untuk berproduksi. Akibatnya, swasembada padi yang selama ini petani idam-idamkan akan jauh dari kenyataan. Hal ini berdampak pada tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dari negara lain, yang sangat membahayakan kelangsungan hidup suatu negara.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah harus sungguh-sungguh menyadari bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sudah sangat akut. Hal ini dikarenakan peningkatan harga bahan kebutuhan pokok sedikit saja, dampaknya sangat dirasakan oleh mayoritas masyarakat.

Akutnya tingkat kemiskinan di Indonesia dibuktikan dengan data yang dilansir Biro Pusat Statistik per September 2007. Dalam data ini disebutkan bahwa angka kemiskinan Indonesia dari bulan Februari 2006 sampai dengan Maret 2007 mengalami peningkatan dari 35,10 (15,97 %) menjadi 39,05 juta (17,75 %). Padahal, garis kemiskinan (GK) - yang 70 % komponennya merupakan komponen makanan - hanya mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari Rp 129.108,- perkapita perbulan menjadi Rp. 152.847,- perkapita perbulan. Dengan penerapan garis kemiskinan tahun 2007 tersebut, jumlah penduduk hampir miskin (1 GK – 1,25 GK) menjadi 13,02 %, penduduk hampir tidak miskin (1,25 GK – 1,5 GK) menjadi 27,84 %, dan penduduk tidak miskin (> 1,5 GK) menjadi 41,39 %. (*Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1 September 2007*).

Padahal, garis kemiskinan versi BPS ini sangat jauh dari ambang batas standar internasional yaitu US\$ 1 perorang/hari atau sekitar Rp. 270.000,- perkapita/bulan dengan asumsi kurs Rp. 9.000,- per dollar atau ekuivalen dengan 1,77 GK versi BPS. Jika pemerintah menerapkan standar ini, maka jumlah masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat tajam menjadi lebih dari 110-an juta jiwa (58,61%). Hal ini dikarenakan ambang batas internasional tersebut selain meliputi seluruh penduduk miskin, juga meliputi seluruh penduduk hampir miskin dan penduduk hampir tidak miskin. Apalagi, jika standar umum garis kemiskinan internasional sebesar US\$ 2 per orang/hari ditetapkan, maka dapat dipastikan jumlah penduduk miskin di Indonesia akan sangat menakutkan.

Untuk mengatasi kemiskinan yang akut ini, hal pertama yang harus dilakukan oleh Gereja adalah harus benar-benar menyadari bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sudah demikian parah. Oleh karena itu, Gereja harus mulai mengkritisi kebijakan (*policy*) pemerintah serta standar garis kemiskinan yang selama ini digunakan pemerintah. Garis kemiskinan (*poverty line*) pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 152.847,- per kapita/bulan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan sebesar Rp. 114.619,- dan garis kemiskinan non-makan Rp. 38.228,-. Dari data ini dapat dilihat bahwa pemerintah memfokuskan upaya pencapaian kesejahteraan penduduk Indonesia hanya pada pemenuhan kebutuhan makanan pokok, sedangkan kebutuhan pokok lain sepertinya diabaikan. Padahal dalam era globalisasi ini, penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat maupun penentuan garis kemiskinan seharusnya memasukkan komponen kebutuhan pokok lainnya seperti spiritualitas, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain secara signifikan. Idealnya, kebutuhan akan makanan pokok dalam komposisi garis kemiskinan adalah di bawah persentase 50 %.

Dengan meningkatkan standar garis kemiskinan yang layak sebesar US\$ 1 perorang/hari - atau jika berani menerapkan garis kemiskinan internasional sebesar US\$ 2 - memang akan meningkatkan juga jumlah penduduk miskin Indonesia secara signifikan, yang mungkin bisa menimbulkan kecemasan dan kemarahan masyarakat Indonesia, yang selama ini percaya akan keberhasilan pemerintah menahan laju angka kemiskinan. Tapi, hal ini harus dilakukan sebagai

cambuk bagi pemerintah bahwa penghapusan kemiskinan maupun proses pemiskinan di Indonesia memang sangat jauh dari harapan. Dengan penetapan garis kemiskinan baru ini, keberhasilan pemerintah dalam penghapusan kemiskinan ke depan bukanlah sesuatu yang semu selama ini. Halnya demikian, karena sedikit guncangan dalam kenaikan harga bahan makanan pokok tidak akan berpengaruh secara signifikan bagi penurunan kesejahteraan, mengingat komponen makanan bukan lagi menjadi komponen yang sangat mutlak dalam penentuan garis kemiskinan.

Persoalan Makro: Beban Pembayaran Utang

Dewasa ini utang luar negeri pemerintah (*public foreign debt*) bisa dikatakan sudah menjadi salah satu sumber kemiskinan serta ancaman bagi keberlanjutan pembangunan. Pertambahan stok utang luar negeri pemerintah (ULNP) selama 1969-2008 adalah sebesar US\$ 66 miliar. Besarnya utang luar negeri tersebut telah berdampak pada tekanan defisit fiskal, ketimpangan distribusi sosial dalam APBN, maupun tekanan atas cadangan devisa. Setiap tahun, utang LN pemerintah yang jatuh tempo mencapai sekitar US\$ 4-5 miliar.

Sayangnya, manajemen utang Indonesia tetap tidak berubah, dan tidak ada upaya yang serius untuk mengurangi stok utang (*debt stock*). Pemerintah tetap saja mengikuti manajemen utang klasik ala Bank Dunia. Padahal sudah terbukti hal tersebut bukan hanya tidak adil, tapi juga tidak efektif mengurangi beban pembayaran utang. Ditinjau dari standar-standar kondisi ekonomi makro yang diterapkan investor internasional pun, utang luar negeri Indonesia sudah di atas ambang batas aman. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai parameter objektif yang paling sederhana sekalipun, misalnya dari indikator rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto.

Para kreditor tidak siap untuk memberikan skema penjadwalan utang yang lebih komprehensif bagi Indonesia serta mengabaikan setiap alternatif yang mengarah pada reduksi *net present value* (NPV) utang mereka. Mereka memandang masalah utang Indonesia semata sebagai masalah likuiditas, sehingga prospek pelunasan utang dalam jangka menengah tetaplah positif. Pandangan ini didukung oleh analisis kalangan lembaga keuangan internasional yang menilai bahwa

tingkat utang yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia kini secara teknis masih terkelola (*technically sustainable*). Penilaian ini sebenarnya bersandar pada proyeksi yang didasarkan pada seperangkat asumsi yang terlalu optimis dan sangat sukar untuk dicapai dalam jangka waktu yang diproyeksikan. Asumsi ini juga gagal memperhitungkan ongkos yang harus dikeluarkan untuk menanggung beban utang yang sangat besar dalam periode yang diproyeksikan tersebut.

Keberlanjutan utang (*debt sustainability*) seharusnya dikaji dari dampaknya terhadap tingkat kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia suatu negara. Kajian model ini mengajukan suatu metode alternatif untuk menilai keberlanjutan utang Indonesia melalui taksiran terhadap besarnya sumberdaya yang dibutuhkan pemerintah untuk melakukan upaya yang memadai bagi pengurangan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan sumber daya manusia. Metode alternatif ini mengasumsikan bahwa pengeluaran bagi pembangunan sumberdaya manusia adalah prioritas pertama pengeluaran pemerintah sedangkan pembayaran utang hanyalah prioritas sekunder. Berdasarkan metode ini terlihat bahwa hanya *separo dari total utang Indonesia yang* seharusnya dibayar oleh pemerintah jika pemerintah ingin mengalokasikan sumberdaya yang memadai bagi pengurangan angka kemiskinan dan pembangunan sumberdaya manusia.

Posisi stok utang luar negeri Indonesia berdasarkan Departemen Keuangan, baik utang dalam negeri maupun luar negeri sampai dengan April 2008 telah mencapai **US\$ 145 miliar** (= Rp 1334 triliun) yang terdiri atas US\$ 86 miliar utang luar negeri dan US\$ 59 miliar utang dalam negeri.

Lonjakan drastis utang luar negeri Indonesia terjadi karena dua faktor, yaitu lonjakan utang pemerintah pada saat awal krisis di tahun 1998 dan tidak terkendalinya utang luar negeri swasta selama periode 1995-1997 melalui BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Secara teori, utang swasta tersebut semestinya tidak memberikan tambahan beban fiskal kepada pemerintah. Namun lingkungan ekonomi politik Indonesia membuat teori tersebut tidak berlaku. Sejak zaman Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, “kemesraan yang berlebihan” antara penguasa dengan pengusaha tetap tidak berubah. Akibatnya, tidak jarang kesulitan finansial yang dihadapi

pengusaha justru ditalangi pemerintah. Dan yang lebih sulit diterima nurani, seringkali pembayaran kembali dari penalangan finansial tersebut dibuat sedemikian rumit, sehingga ujung-ujungnya harus menjadi tanggungan rakyat Indonesia lewat APBN.

Melihat perkembangan posisi utang Indonesia tersebut, dapat dinyatakan sudah pada kisaran yang tidak aman. Hal tersebut dikarenakan beberapa fakta yang bisa disimpulkan, antara lain: dalam jangka waktu hanya sepuluh tahun, total utang luar negeri Indonesia sudah melonjak hampir tiga kali lipat. Artinya, terdapat percepatan jumlah utang yang sangat luar biasa selama satu dekade terakhir ini. Kondisi ini membawa konsekuensi, pada saat jatuh tempo utang-utang tersebut (sekitar 15-30 tahun ke depan), beban cicilan utang akan melonjak drastis. Beban tersebut belum termasuk pembayaran bunganya, yang tidak jarang harus dibayar segera.

Peran Pelkes Gereja: Perbaikan Infrastruktur Pedesaan

Selain peningkatan standar garis kemiskinan secara signifikan, Gereja pun harus mulai memfokuskan pelayanannya di sektor pedesaan, karena 63,41% penduduk miskin tinggal di pedesaan. Untuk memberantas kemiskinan di pedesaan ada beberapa pendekatan.

Pertama, pemerintah dan warga gereja harus membangun jalan-jalan yang layak di pedesaan. Hal ini sangat penting agar mobilitas petani untuk menjual hasil usahanya dan membeli kebutuhannya tidak terhambat. Selama ini, banyak penduduk desa yang menjual komoditinya dengan harga rendah kepada tengkulak karena tidak mengetahui perkembangan harga di pasaran, atau malas menjualnya ke tempat lain dikarenakan rusaknya jalan sebagai akses penghubung dengan daerah lain sebagai pasar mereka. Di sisi lain, para petani harus membeli kebutuhan mereka lebih mahal dari seharusnya dikarenakan rusaknya jalan menciptakan biaya tinggi bagi para pedagang.

Kedua, petani harus terus didorong untuk melakukan diversifikasi pangan. Hal ini diperlukan, mengingat jika salah satu tanaman gagal panen atau harganya jatuh, para petani masih bisa mengandalkan jenis pangan lain sebagai andalan hidupnya.

Ketiga, pemerintah dan warga gereja harus melakukan reformasi agraria untuk sektor pertanian. Hal ini dikarenakan di Indonesia jumlah buruh tani dan petani gurem - yang memiliki tanah kurang dari setengah hektar - relatif sangat banyak. Keadaan tersebut jelas-jelas tidak akan mengubah keadaan mereka, mengingat dari skala ekonomi produksi pangan tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk menciptakan distribusi tanah kepada petani gurem dan buruh tani mutlak diperlukan.

Keempat, pemerintah dan warga gereja harus mendorong penelitian dan produksi pupuk alami yang murah dan ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan selama ini petani sangat tergantung pada pupuk buatan yang tidak ramah lingkungan dan harganya mahal. Akibatnya, biaya produksi nyaris menyamai pendapatan produksi. Hal ini jelas sangat merugikan petani, dan menciptakan kondisi keterkubangan petani dalam lumpur kemiskinan. Dengan terciptanya pupuk murah, keuntungan petani akan meningkat dan bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan secara layak.

Menyadari beragamnya kondisi dan potensi masyarakat di pedesaan tsb., maka pendampingan atau pelayanan masyarakat di pedesaan sangat diperlukan saat ini. Gubernur Bank Indonesia (BI), Profesor Boediono, dalam pidato pengukuhan guru besarnya menyatakan bahwa keberhasilan demokrasi ditentukan oleh keberadaan kelompok pembaharu. Kelompok inilah yang akan menjadi ujung tombak dan pengawal proses transformasi mengenai pemerataan dan keadilan.

Data dari Departemen Sosial (Depsos) RI menunjukkan bahwa sejak 2007 mereka telah melatih anggota masyarakat seperti karang taruna, petugas sosial kecamatan, dan pekerja sosial lainnya untuk menjadi pembaharu yang mendorong masyarakat miskin khususnya di pedesaan agar menjadi mandiri. Mereka membantu dengan kegiatan-kegiatan seperti merumuskan masalah, merencanakan, melaksanakan dan melestarikan program yang dijalankan. Materi pelatihan meliputi aspek pemahaman finansial, ekonomi sosial, *networking*, nasionalisme, serta religius.

Memperkuat Cadangan Devisa: Solusi Mengatasi Utang Indonesia

Untuk mengentaskan orang miskin, salah satu caranya adalah adanya peningkatan investasi di dalam negeri untuk menambah cadangan devisa. Hal ini dikarenakan tingginya *Foreign Direct Investment* (FDI) dan investasi domestik yang mengalir ke Indonesia akan mempercepat *multiplying effect* dalam perekonomian yang berujung kepada pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta adanya pemerataan. Pertumbuhan ekonomi dan spiritual yang tinggi di pedesaan akan sangat berpengaruh terhadap pengentasan orang miskin dan pelunasan utang Indonesia.

Namun sayangnya, sejak krisis moneter 1997 pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai tingkat yang tinggi seperti sebelum krisis. Pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot tajam dari sekitar 4,91 persen pada 1997 menjadi negatif 13,68 persen pada 1998. Hal ini dikarenakan, masih belum berperannya faktor investasi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, selama ini faktor konsumsilah yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Belum maksimalnya investasi dalam pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan suatu hal yang ironis, karena selama ini pemerintah telah berupaya mengundang investor asing untuk berinvestasi. Namun sampai saat ini, aliran investasi asing tidak mengalami peningkatan secara signifikan, ini dikarenakan masih belum kondusifnya iklim investasi Indonesia.

Belum kondusifnya iklim investasi tersebut diperkuat oleh laporan Bank Dunia mengenai *Doing Business 2007* yang mensurvei daya saing 175 negara. Dalam survei ini diketahui bahwa biaya memulai dan menutup usaha di Indonesia masih relatif lebih mahal dibanding Singapura, Thailand, Malaysia dan Philipina dan negara tujuan investasi lainnya. Hal ini dikarenakan masih berkembangnya paradigma di kalangan aparat pemerintah, bahwa investor merupakan sapi perahan untuk mengisi pundi-pundi keuangan mereka, tanpa memikirkan bahwa datangnya investor sangat dibutuhkan sebagai katalisator bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Jika pemerintah tidak segera membenahi iklim investasi tersebut, maka dikhawatirkan investor tidak saja enggan berinvestasi, malah mendorong investor yang sudah ada - termasuk investor domestik - untuk merelokasi usahanya ke negara lain yang menawarkan berbagai kemudahan dan insentif. Jika ini terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin mandek yang berimbas kepada semakin jauhnya keberhasilan program pemberantasan kemiskinan.

Penutup

Upaya pemberantasan kemiskinan ini akan memerlukan waktu yang relatif panjang. Namun, dengan keterlibatan pihak Gereja maka Indonesia yang bebas dari kemiskinan bukanlah suatu kemustahilan. Seperti yang direkomendasikan oleh kelompok masyarakat sipil dalam laporan tentang pencapaian MDGs 2007, perlu adanya perluasan keterlibatan berbagai pihak, seperti masyarakat sipil, akademisi, bank, pengusaha, agamawan, dll. untuk mengatasi persoalan kemiskinan tsb. Karena kemiskinan tidak hanya dikarenakan masalah ekonomi semata tetapi sektor lainnya juga. Untuk itu diperlukan reorientasi pelayanan dan kesaksian (pelkes) Gereja di masa kini. agar perubahan benar-benar tampak.

7. Bidang Pendidikan

7a *Position Paper*

Pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Sebagai sesuatu yang khas dan spesifik bagi manusia, pendidikan berperan amat signifikan dalam membekali manusia untuk menyongsong masa depan yang akan dijalani, yang diwarnai dengan berbagai tantangan dan perubahan.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tanggal 11 Juni 2003, (UU No. 20 tahun 2003) merumuskan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Rumusan ini menjadi amat penting untuk digarisbawahi, tidak hanya karena terdapat dalam sebuah ketentuan perundang-undangan yang dalam proses kelahirannya telah menimbulkan diskusi publik yang alot, tetapi lebih jauh dari itu untuk memantau sejauh mana rumusan seperti itu menjadi referensi bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan suatu kebijakan di bidang pendidikan di negeri ini.

Telah sejak awal para pendiri Negara kita menyadari benar pentingnya pendidikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam konteks itu pembukaan UUD Negara RI 1945 memberi visi tentang arah kehidupan bangsa dan Negara ke depan: “... *membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”.

Mencerdaskan kehidupan bangsa pada hakikatnya adalah hasrat untuk membangun peradaban negara-bangsa yang maju dan modern bila diukur dari persyaratan negara yang bermartabat di forum dunia.

Atas dasar itu maka pendidikan seharusnya mendapat perhatian utama dalam kehidupan bangsa kita, namun pada kenyataannya hal itu belum terwujud. Realitas yang sangat menyedihkan adalah bahwa sejak kemerdekaan sampai saat ini pendidikan belum menempati posisi sentral dan strategis dalam upaya mengisi kemerdekaan dan dalam menjawab amanat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada dasarnya pendidikan merupakan hak asasi dari setiap manusia dalam proses mempersiapkan diri menuju masa depan yang lebih baik. Hak memperoleh pendidikan sebagai warga Negara dijamin dalam UUD Negara RI 1945 (Pasal 31 ayat 1). Dan dari segi hak asasi manusia UUD Negara RI 1945 menegaskan sebagai berikut: “*Setiap manusia Indonesia berhak mendapatkan pendidikan sebagai pemenuhan salah satu kebutuhan dasarnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup*” (Pasal 28 Ayat (1) UUD Negara RI 1945).

Lembaga-lembaga keagamaan memiliki peran yang amat penting dalam pelayanan di bidang pendidikan. Kelahiran Sekolah-sekolah Kristen-Protestan sejak awal abad ke-19, sekolah-sekolah Katolik sejak akhir abad 19, sekolah-sekolah Muhammadiyah (tahun 1912), dan lembaga pendidikan Maarif (tahun 1912) adalah bukti nyata kepedulian lembaga-lembaga keagamaan terhadap bidang pendidikan. Sekolah-sekolah tersebut, yang dibangun dengan menampilkan ciri khas dan identitas masing-masing, diakui banyak orang telah memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.

Sejak diberlakukannya UU No. 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga-lembaga pendidikan swasta - khususnya Pendidikan Kristen - mengalami persoalan yang amat berat.

Undang-undang itu dan peraturan yang ada di bawahnya (PP 55 Th. 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan) mewajibkan Sekolah-sekolah Kristen mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik. Kewajiban ini bertentangan dengan hakikat pendidikan Kristen yang hadir untuk memperkenalkan nilai-nilai kekristenan melalui dunia pendidikan. Identitas dan **ciri khas** pendidikan Kristen menggariskan bahwa Sekolah-sekolah Kristen hanya memberikan Pendidikan Agama Kristen bagi seluruh peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah Kristen. Dalam

konteks itu Pasal 55 UU No. 20 Th 2003 berikut Penjelasannya memberikan jaminan hukum terhadap aktualisasi identitas dan ciri khas Pendidikan Kristen. Selain itu UU No. 20 Tahun 2003 mengamanatkan pentingnya lembaga-lembaga pendidikan memiliki standar agar kualitas pendidikan makin tinggi dan mampu menjamin terwujudnya pencerdasan kehidupan bangsa (PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Di tengah-tengah perkembangan global, dunia pendidikan juga mengalami tantangan yang tidak kecil dengan makin menguatnya liberalisasi pendidikan.

Konferensi Gereja dan Masyarakat harus memberikan pemetaan yang jelas tentang dunia pendidikan kita saat ini, posisi pendidikan Kristen di dalamnya; bagaimana lembaga-lembaga pendidikan Kristen di Indonesia agar mampu mempertahankan identitas dan ciri khasnya sambil meningkatkan kualitasnya di tengah pertarungan global.

Weinata Sairin

7b

PENDIDIKAN HOLISTIK SOLUSI MASALAH BANGSA

Prof. Dr. Jonathan Parapak, M.Eng.²²

Saya bukanlah ahli pendidikan, tetapi pelayan di bidang pendidikan. Kita sekarang sedang berpikir tentang sebuah pokok penting, yaitu: gereja dan pendidikan. Negeri kita adalah karunia Tuhan yang sangat indah, tetapi sekarang mengalami masalah multi-dimensi. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui pendidikan holistik. Tanpa pendidikan seperti ini maka tidak ada masa depan bangsa; termasuk jika gereja tidak mengembangkan pendidikan holistik maka tidak ada masa depan gereja. Penyelesaian krisis bukan di Senayan, tetapi di pendidikan. Masalah korupsi misalnya adalah masalah pendidikan.

Pendidikan holistik itu bukan di Perguruan Tinggi, tetapi sudah dimulai sejak dini, mulai dari *pre-childhood education* dalam keluarga. Dalam hal ini peranan gereja menjadi penting, yaitu: memperhatikan pendidikan anak di usia awal. Tetapi belakangan ini gereja sudah mulai tidak memperhatikan pendidikan ini. Misalnya tentang Perguruan Tinggi (PT). Dari data yang ada, jumlah PT di Indonesia ada sekitar 3.000, di antaranya ada 100 PT Negeri, dan sisanya swasta. Gereja juga turut berkiprah di PT, tetapi sekarang ini mungkin hanya 10 PT umum Kristen yang berkualitas.

Tantangan-tantangan pendidikan yang paling mendasar adalah gereja sudah kehilangan visi pendidikan; bukan lagi kualitas, tetapi pendidikan murah yang jadinya murahan. Lalu sekolah didirikan untuk mengambil duit (komersil). Maka untuk mengembangkan pendidikan, gereja harus melihat itu sebagai pelayanan, seperti di masa-masa dulu. Secara historis, misalnya, pendidikan di Toraja itu dimulai di gereja, demikian juga di Tanah Batak, dan daerah lainnya. Gereja bertumbuh melalui pendidikan, dan pendidikan berkembang

²² Rektor Universitas Pelitea Harapan.

melalui gereja. Tetapi fenomena yang tampak sekarang ini sekolah-sekolah Kristen sudah banyak yang megap-megap, seperti tergambar di bawah ini:

Fenomena Institusi Pendidikan kristiani

- Harvard University didirikan dengan komitmen Kristiani, kini menjadi salah satu pusat atheis.
- PSKD yang dulu termasuk unggulan, bagaimana kondisinya sekarang ?
- Institusi pendidikan Nommensen, dulu termasuk unggulan, bagaimana sekarang?
- Sekolah-sekolah Gereja Toraja, dulu ratusan, kini hanya beberapa ?
- Dari 34 anggota BKPTKI, mungkin kurang dari 10 yang bisa menyajikan pendidikan berkualitas.

Maka mari kembali semangat seperti dulu, supaya gereja mampu melahirkan model pendidikan yang benar di Indonesia. Sebagai sekolah Kristen, seperti UPH, selalu bertekad mengembangkan pendidikan yang berpusat pada Kristus, artinya: aspek spritualitas harus juga ditekankan. Dalam hal itu, ada dua model pendekatan, yaitu: (1) pendidikan yang sistemik; dan (2) model *umbrella*, kokoh pada Kristus tetapi terbuka untuk semua orang, seperti yang dikembangkan di UPH. Selain dari model, beberapa tantangan sekolah Kristen, a.l. adalah: sumberdaya terbatas untuk menyajikan pendidikan Kristen berkualitas; tenaga pendidik yang kurang; persaingan dari sekolah lain yang bermutu; dukungan dan hambatan birokrasi/struktur gereja.

Untuk mengembangkan pendidikan holistik diperlukan pembaruan dan perubahan paradigma, seperti:

- a. Persekolahan/schooling → belajar mandiri (learning)
- b. Penanaman ketrampilan (skill) → pengembangan kompetensi
- c. Right curriculum → flexi-learning
- d. Teacher/guru → fasilitator/mentor/coach
- e. Teacher centered → student centered learning
- f. Pola satu arah/pasif → interaktif/kreatif

g. Pola instruksi → pola konstruktif, discover

Pilar pendidikan menurut Unesco adalah *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live with others*. Tetapi mungkin perlu ditambah dengan: *learning to be creative, learning to love, dan learning to glorify*. Dengan begitu, dalam pendidikan holistik bukan hanya aspek kognitifnya saja yang ditekankan, tetapi juga aspek spiritualitas, musik, dan olahraga, dll. Ini membutuhkan transformasi pendidikan, termasuk pengelolaannya.

Peran Gereja dalam memajukan Pendidikan, a.l.:

- Sangat strategis dalam mewujudkan pendidikan transformatif yang holistik.
- Secara historis gereja sangat berperan dalam memprakarsai pendidikan berkualitas.
- Secara mendasar gereja selalu memperhatikan yang kurang mampu, tertinggal dan terkesampingkan; pendidikan untuk semua.
- Salah satu jalur penginjilan dan pemuridan adalah melalui institusi pendidikan.

Salah satu persoalan kita di Indonesia adalah aturan-aturan dan perijinan. Tidak ada cara lain mengatasinya selain dari terus berjuang dengan mempergunakan hikmat. Demikian juga tentang kurikulum, yang harus kita kembangkan adalah kurikulum berkualitas internasional, kita harus hadir dengan konsep-konsep inovatif lebih dari konsep-konsep sekolah-sekolah pemerintah dan swasta yang lain.

Apa Respons Kita?

- Menangkap visi Ilahi yang menggetarkan kita sebagai pribadi, institusi dan Gereja, bagi pendidikan holistik
- Komitmen pengelolaan profesional. (Nobel Industry).
- Selalu secara kreatif menemukan pola baru untuk meningkatkan pendidikan. Pola *competency-based learning; problem-based learning; student-centered learning; e-learning* dll.
- Mengembangkan sinergi dan kerja sama seluas mungkin, nasional dan internasional.

- Memantapkan pola integrasi yang holistik dengan terus meningkatkan kualitas.
- Membangkitkan kembali peran vital dalam pendidikan.

Kesimpulan: kalau bangsa ini mengalami berbagai krisis maka salah satu solusinya adalah pendidikan yang berkualitas. Secara historis, gereja bertumbuh melalui pendidikan, dan pendidikan bertumbuh melalui gereja. Maka ini harus kita semangat kembali dengan kerelaan berkorban baik secara materi, dan sumber daya yang diperlukan, dan kalau kita bersinergi dengan baik banyak hal yang bisa kita lakukan.

8. Bidang Kesetaraan Jender & Pemuda

8a *Position Paper*

Meski pada satu dasawarsa terakhir ini banyak sekali studi, percakapan, dan kegiatan yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran serta perempuan dalam menata kehidupan bersama di dunia ini, termasuk dalam lingkungan gereja, perlakuan yang diskriminatif dan eksploitasi terhadap perempuan di sana-sini masih terjadi. Pergeseran pemahaman dan nilai-nilai yang berhubungan dengan peran dan hakekat perempuan, entah sebagai buah dari dasawarsa perempuan yang dikampanyekan secara mondial maupun sebagai buah dari studi-studi dan kampanye secara oikumenis; rasanya masih jauh dari yang diharapkan. Walau pemahaman teologis akan kemitraan laki-laki dan perempuan telah meluas di lingkungan masyarakat dan warga gereja, namun bias jender tetap masih terasa dalam kehidupan nyata. Demikian pun halnya dengan hukum positif di Indonesia, yang tidak mengenal diskriminasi laki-laki dan perempuan, dan walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang diskriminasi kelamin; dalam kenyataan sosial kemasyarakatan kita masih tetap dihantui oleh kerentanan posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan kita.

Dalam kenyataannya, ada kesenjangan yang sangat signifikan antara pemahaman dengan kelakuan, berhubung dengan perikelamin ini. Pada kenyataannya, dalam banyak hal perempuan masih harus dikalahkan oleh lelaki, oleh karena keperempuanannya, entah itu dalam kehidupan bergereja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Lihat saja kecenderungan untuk mendiskreditkan Megawati, karena keperempuanannya, ketika mencalonkan diri menjadi Presiden RI pada tahun 1999 lalu. Contoh paling mengesankan adalah praktik penempatan pelayan perempuan yang cenderung masih bias jender, walau dalam pemahaman teologis senantiasa dikumandangkan “tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan”. Dan segudang contoh-contoh lain.

Di satu sisi, masyarakat modern seperti masyarakat kita sekarang ini memang membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarier, baik dalam rangka mengaktualisasikan dirinya maupun sebagai bagian dari tuntutan ekonomi, sama seperti lelaki. Misalnya, dewasa ini sudah sangat lazim suami dan isteri sama-sama bekerja memenuhi tuntutan ekonomi rumah tangga. Namun di lain pihak, kepada kaum perempuan tersebut tetap dituntut untuk tidak mengabaikan perannya dalam memenuhi tugas-tugas domestik, sesuatu yang masih sangat jarang dituntut dari kaum lelaki. Peran ganda yang harus dipikul oleh kaum perempuan ini, acap malah menambah beban tekanan yang berat bagi kaum perempuan. Bias jender, di sana-sini ternyata masih terasa.

Masalah laten lainnya adalah eksploitasi perempuan (dan anak-anak) dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dewasa ini. Menjadi laten karena sebagian besar masyarakat tidak merasa aneh dengan diperdagangkannya anak-anak dan perempuan, entah untuk menjadi komoditi seks, maupun menjadi perahan dalam dunia tenaga kerja. (Berapa orang yang peduli ketika TKI pulang dari Arab Saudi dalam bentuk mayat yang penyebab kematiannya tak pernah jelas; demikian juga dengan anak-anak yang dieksploitasi di jermal, atau perempuan yang selalu jadi objek dalam dunia periklanan atau eksploitasi penyanyi cilik?) Semua yang terjadi seolah wajar-wajar saja dan seharusnya demikian. Apalagi dalam kondisi perekonomian yang luluh-lantak saat ini, semuanya dianggap sebagai suatu keharusan. Ada semacam kebiasaan dalam masyarakat kita untuk menyelesaikan masalah dengan jalan pintas, dan acap kali anak-anak dan perempuanlah yang dikorbankan, ketika menghadapi berbagai permasalahan.

Masalah laten lainnya adalah budaya kekerasan yang semakin menggejala di tengah masyarakat, di mana korban yang paling banyak menderita adalah anak-anak dan perempuan, baik itu korban kerusuhan, pengungsian, maupun kekerasan domestik. Kekerasan domestik yang melanda anak-anak dan perempuan acap kali tak ditangani dengan baik, apalagi diselesaikan secara hukum. Ironisnya, di tengah-tengah keluarga para *partobonan* (pejabat gereja tertahbis) pun cukup banyak kasus kekerasan domestik ini, di mana suami memukuli isteri atau anak-anaknya, tanpa mendapat penanganan yang serius.

Kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, membutuhkan upaya menuju kesadaran kolektif yang lebih sungguh-sungguh, entah lewat kampanye atau berbagai bentuk pendidikan. Sangat ideal jika para pelayan di tingkat jemaat lokal berperan dalam hal ini, selain melakukan berbagai bentuk advokasi terhadap korban eksploitasi maupun kekerasan. Dan pemimpin gereja di berbagai aras bersama lembaga-lembaga peduli lainnya, bisa bersama-sama dalam studi, kampanye dalam rangka mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak serta perlindungan anak dan perempuan ini. Tetapi di atas semuanya itu, terlebih dahulu gereja harus membenahi seluruh perangkat dan tekadnya untuk lebih sungguh-sungguh peduli dengan masalah ini dan membebaskan diri dari bias gender.

Gomar Gultom

8a KESETARAAN JENDER

Pinky Saptandari²³

Topik ini sudah sering didengar dan dilaksanakan, namun tidak ada salahnya kita belajar untuk mengimplementasikannya di dalam Gereja dan masyarakat. Sebetulnya tema ini merupakan hal yang penting untuk dibahas, tetapi jauh lebih penting melaksanakannya.

Permasalahan gender ada di sekitar kita. Ada di dalam maupun di luar rumah. Saya ingin mencontohkan mengenai pola asuh anak laki-laki dan anak perempuan. Memang mereka berbeda, tapi tidak perlu dibeda-bedakan. Mulai dari mainan hingga perlakuan terhadapnya. Juga terlihat dalam demo-demo di masyarakat. Bulan ini merupakan hari-hari anti kekerasan, dan setiap kali diperingati selalu dilakukan dengan *me-launching* data-data kekerasan. Kemudian kita melihat bahwa masalah gender juga terkait dengan masalah ekonomi. Ibu harus merawat, mengasuh, tetapi juga bekerja.

Konstruksi sosial-budaya yang berlaku dalam masyarakat kemudian membedakan laki-laki dan perempuan. Ada peran gender laki-laki dan ada peran gender perempuan. Ketika peran berbeda, maka muncullah pembagian kerja. Ketika mencari pekerja sebagai manajer lapangan yang mensyaratkan latar belakang pendidikan insinyur, di bawahnya ditambahkan: laki-laki. Tetapi ketika mencari *sales promotion girl*, pekerja di salon, sekretaris, ada syarat: jenis kelamin perempuan, lalu di bawahnya: wajah menarik, tidak bau badan dan bau mulut.

Sebuah peran gender merupakan suatu bentuk dalam masyarakat, yang terwujud dalam perbedaan perilaku, tanggung jawab berdasarkan nilai budaya yang berlaku. Peran gender bervariasi sesuai adat istiadat, waktu, dan bersifat dinamis. Bila tidak sesuai dengan budaya yang berlaku, maka ada sanksi sosial. Misalnya, bila anak perempuan *tomboy* atau laki-laki gemulai. Itulah sanksi sosial yang diberikan masyarakat. Pada beberapa budaya, ada sanksi sosial yang amat berat yang kemudian menimbulkan goncangan jiwa, yang

²³ Staf Ahli Meneg Pemberdayaan Perempuan

sebagian tidak kuat menanggungnya dan mengakibatkan gangguan jiwa.

Implikasi Pembagian Kerja di Wilayah Jender

- Pembagian wilayah kerja: perempuan di wilayah domestik misalnya dapur, dan wilayah publik itu laki-laki.
- Perempuan lebih banyak menjalankan pekerjaan, menggantikan peran laki-laki. Mari kita menghargai apa yang sudah dilakukan di rumah tangga itu sebagai suatu hal yang bukan sepele.
- Pekerjaan lebih banyak berhubungan dengan rumah tangga dan pengasuhan anak. Perempuan selalu dikaitkan dengan fungsi pemeliharaan dan pendidikan keluarga.
- Ada pekerjaan laki-laki dan perempuan.

Sumber Nilai-nilai Budaya

1. Pepatah atau peribahasa
2. Ungkapan
3. Pitutur luhur/ajaran moral dlm kitab kuno atau lisan
4. *Folk-lore* (legenda, dongeng, cerita rakyat)
5. Permainan, pertunjukan, pantun, puisi
6. Norma & pranata adat

Nilai-Nilai Budaya tentang Perempuan

- Pepatah/peribahasa: surga di bawah telapak kaki ibu
- Tradisi: siri (Bugis); pi-il (Lampung); carok (Madura)
- Ungkapan: *aja nerak pager ayu* (Jawa); *kaya nini lan mintuna* (Jawa); *ora duwe bapak ora kajen, ora duwe ibu ora kopen* (Jawa); *limpapeh rumah nan gadang* (Minang)
- Mitos: dewi Sri (Sunda & Jawa)
- Hikayat: dewi Rengganis (Lombok); lutung kasarung (Sunda)

Fakta kekerasan dibungkus dengan mitos. Sampai hari ini data-data tentang kekerasan, baik fisik, seksual, psikis, sering demikian.

Mengangkat Nilai-nilai Responsif Jender

- Menemu-kenali permasalahan & solusi ketidak-adilan jender
- Membentuk kesadaran budaya & kesadaran jender dan mewujudkan keadilan jender
- Membangun gerakan bersama “pemberdayaan perempuan sebagai strategi masa depan bangsa & negara”.

Ideologi Jender

- Ideologi-jender: Segala aturan, nilai, mitos, stereotipe yang mengatur hubungan laki-laki & perempuan yang didahului pembentukan identitas feminin dan maskulin;
- Nilai-nilai umum dalam ideologi-jender: (a) pemingitan; (b) pengucilan; (c) femininitas;
- Dampak: subordinasi, marjinalisasi, beban rangkap, stereotipe/ pelabelan negatif, berbagai bentuk kekerasan & ketidak-adilan jender.

Ketidakadilan Jender

- Bentuk, posisi, kondisi, sifat, tugas, kegiatan & tanggung jawab yang dapat menimbulkan pola hubungan yang tidak adil atau diskriminatif berdasarkan jenis kelamin;
- Ketidak-adilan sosial yg diakibatkan oleh adanya perbedaan jenis kelamin yg menghasilkan peran jender.

12 Isu/Area Kritis yang Harus Diperjuangkan oleh Gereja

1. Perempuan & Kemiskinan
2. Pendidikan & Pelatihan Perempuan
3. Perempuan & Kesehatan
4. Tindak Kekerasan terhadap Perempuan
5. Perempuan & Konflik Bersenjata
6. Perempuan & Ekonomi
7. Perempuan dalam Kekuasaan & Pengambilan Keputusan
8. Mekanisme Kelembagaan bagi Kemajuan Perempuan
9. Hak Asasi Perempuan
10. Perempuan & Media Massa

11. Perempuan & Lingkungan Hidup
12. Anak Perempuan

Pembangunan Responsif Jender

Yang dimaksudkan adalah pembangunan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya anggaran keuangan negara tentang dana pendidikan sebesar 20%; apakah sudah bermanfaat untuk semua orang?

- Komitmen Internasional & Nasional
- Inpres No. 9/2000 tentang PUG
- Visi & Misi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan
- Peran Serta Masyarakat dalam Sosialisasi, Implementasi, Monitoring & Evaluasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Responsif Jender.

Pemerataan kesejahteraan, apakah semuanya telah merata? Apakah sudah pada tingkat untuk menyuarakan hati nurani? Misalnya masih ada yang berpendapat, perempuan tidak boleh menentukan pilihannya sendiri tetapi harus menurut petunjuk dari suaminya atau kyainya. Kalau kita sadar, artinya kita diajak untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Analisisnya bisa menggunakan analisis Feminis.

Metodenya beragam, salah satunya adalah Metode Feminis yang:

- Memperkenalkan adanya pengaruh ketimpangan jender dalam semua kegiatan sosial manusia;
- Menyingkapkan bagaimana hubungan jender yang mempengaruhi perbedaan ras, kelas sosial, etnis, umur, dst. Ada pengalaman yang berbeda antara laki-laki & perempuan antara kelas sosial, etnis, umur, dst.
- Meningkatkan & menyebarkan kesadaran jender yang diyakini dapat memperkecil/menghilangkan ketidakadilan/penindasan terhadap kaum perempuan.
- Mengubah pandangan dualisme dengan pandangan yang dialogis & partisipatif. Dialog & sikap kritis diperlukan untuk memahami perspektif, pengalaman & harapan kaum perempuan.
- Menekankan pada perlunya pemberdayaan & transformasi.

Pembangunan Responsif Jender

- Bagian dari pembangunan manusia untuk mendukung tujuan pembangunan manusia
- Tujuan pembangunan manusia:
 - a. Memperluas pilihan-pilihan
 - b. Membuat pembangunan lebih demokratis & partisipatoris
- Akses dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan
 - Sebenarnya pengalaman anak laki-laki dan perempuan antar kelas, antar sekolah, antar rumah, saling berhubungan.
 - Pemikiran hitam putih harus dihapuskan. Jadi pembangunan responsif Jender adalah pembangunan manusia untuk mendukung pembangunan Indonesia.
 - Kita harus sepakat bahwa pembangunan manusia menjadi prioritas dan dalam hal ini pembangunan responsif jender harus diperhatikan.

Pdt. Rosmalia Barus, S.Th.²⁴

Pendahuluan

KGM yang dihadiri oleh para “pemuka” agama dari seluruh bagian Indonesia, dilaksanakan masih dalam suasana “duka” atas matinya nilai-nilai demokrasi di Indonesia. KGM ini dilaksanakan tepat tujuhbelas hari sesudah pengesahan UU Pornografi oleh wakil-wakil rakyat serta didukung oleh empat kementerian negara, yang sampai saat ini masih menuai pro dan kontra dari masyarakat Indonesia, baik tentang hal-hal yang melatarbelakanginya maupun juga prosesnya.

Walaupun dalam naskah sudah banyak perubahan material, namun sejak awal pembahasannya UU Pornografi tahun 2005 - yang awalnya diberi judul RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) lalu berubah judul menjadi RUU Pornografi - ternyata substansinya tidak berubah. Sejak awal pembahasan, salah satu dari sekian kejanggalan adalah disadari bahwa yang menjadi sasaran utama adalah perempuan. Dalam konsep awal, RUU berpotensi menjadikan dan menempatkan perempuan dan anak-anak, yang sebenarnya adalah korban, menjadi pelaku pornografi dan pornoaksi (perempuan makhluk kriminal), juga melecehkan kemanusiaan laki-laki, tidak menghargai kekayaan ekspresi budaya lokal, memasung hak perempuan untuk mengontrol tubuhnya, memberi peluang kepada kelompok tertentu melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, berpeluang menciptakan disintegrasi bangsa, dan tidak memberikan perlindungan kepada anak. Wilayah moral masuk ke dalam wilayah hukum yang akan menggiring bangsa ini menjadi bangsa yang totaliter. UU tsb. juga berindikasi menggeser ideologi bangsa “Pancasila” menjadi ideologi agama tertentu.

Menguatnya fundamentalisme agama tidak saja terjadi pada tataran kultural masyarakat, tetapi bahkan sudah dengan sangat transparan memasuki ruang-ruang kebijakan publik baik di tingkat daerah maupun nasional. Melalui RUU atau Raperda yang sedang

dirancang maupun yang sudah ditetapkan, fundamentalisme agama dijadikan dasar perumusan peraturan yang secara nyata membatasi ruang gerak perempuan, mengontrol tubuh perempuan, mulai dari mengatur cara berbusana, larangan keluar malam bagi perempuan, serta memposisikan perempuan sebagai sumber kemaksiatan masyarakat.

Ketua Hizbuh Tahrir Rokhmat S. Labib menyamakan fungsi UU Pornografi dengan fungsi helm saat berkendara di jalan raya, harus dirumuskan dalam sebuah kewajiban, tidak bisa diserahkan kepada kesadaran pribadi. Tentang penutupan aurat – termasuk rambut bagi perempuan - lebih lanjut beliau berkata: “*Boleh saja mereka tidak mengenakan kerudung kalau di rumah atau di komunitas mereka. Tapi kalau di tempat umum seharusnya sama, baik Islam, Kristen, Hindu maupun Buddha, sama semuanya harus mengenakan kerudung, sehingga terhindar dari pemerkosaan*”. (Sumber: Tabloid *Reformat*, ruang Laporan Utama Edisi 92, Tahun VI, 1 – 15 Oktober 2008).

Jelas sekali posisi perempuan yang rentan mengalami kekerasan akibat perkosaan, justru dipersempit ruang gerakannya, bukan sebaliknya menghukum berat pelakunya. Pertanyaannya adalah: apakah perempuan yang memakai busana tertutup dari ujung kepala sampai mata kaki, kecuali kedua matanya, dijamin tidak akan terancam perbuatan kekerasan? Tidakkah ini suatu tindakan *excuse* atas kejahatan moral oleh sebagian laki-laki yang merendahkan perempuan? Atau secara tidak langsung pemaksaan ideologi suatu agama kepada seluruh umat yang beragam agama? Penggeseran ideologi adalah sebuah kejahatan dan pengkhianatan terhadap bangsa kita.

Proses pengesahan UUP ini benar-benar tidak mendengar serta memperhitungkan kebutuhan perempuan. Ini salah satu contoh dari sekian ratus RUU yang akan dan sedang digodok. Menurut data Komnas Perempuan, ada 30 Produk Kebijakan Diskriminatif di Indonesia dalam bentuk Perda, serta 58 Perda yang bernuansa Agama, Moralitas dll. Mengapa perempuan tidak diperhitungkan ?

Ketidak-adilan Sosial-Ekonomi Berdampak pada Perempuan

Konteks tantangan yang sangat keras yang dihadapi oleh negara-negara dunia berkembang sampai saat ini adalah tantangan

²⁴ Sekretaris Eksekutif Departemen Perempuan dan Anak PGI

globalisasi²⁵ dengan ideologi global kapitalisme²⁶-patriarkis yang membawa penderitaan pada rakyat dalam setiap bagian hidup mereka. Implementasi globalisasi dalam bentuk deregulasi, privatisasi dan liberalisasi (neo-liberalisme) menyebabkan terjadinya hegemoni pasar, kekerasan, penindasan, monopoli pasar, monopoli aturan perdagangan, hilangnya budaya atau kearifan-kearifan lokal, kerusakan alam yang luar biasa, pemaksaan pendekatan yang masif dan berorientasi pada keuntungan sekelompok kecil elite.

Ahirnya orang yang memiliki kekuasaanlah (uang, modal, teknologi, ilmu pengetahuan, senjata) yang menang, sementara yang lemah dan tidak memiliki kekuatan akan tersingkir dari pasar (kehidupan). Ideologi neo-liberalisme sama sekali tidak mepedulikan keadilan, hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat ataupun kedaulatan negara. Kompetisi penuh (pasar bebas) adalah satu-satunya cara bertahan, siapa yang dapat bertahan, dialah yang terbaik.

²⁵ **Globalisasi dan Pasar bebas** tidak memihak kepada perempuan, bahkan telah menciptakan kondisi di mana perempuan semakin tidak berdaya karena posisi subordinasi dalam budaya dan politik yang mapan, pembiaran hak-hak dasar dan eksploitasi tubuhnya sebagai alat efektif dalam memenuhi permintaan dan distribusi perdagangan. Berbagai instrumen penting dalam era pasar bebas dan globalisasi seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB) semakin memurukkan situasi perempuan, karena berbasis kapitalisme dan bukan sumber daya manusia (*human resources*).

²⁶ **Kapitalisme** sebagai salah satu ideologi era pasar bebas dan globalisasi telah memanfaatkan dan mengabadikan inferioritas perempuan dalam status, akses keterampilan hidup dan kepentingan politik. Konsekuensi logis dari kondisi ini adalah perempuan selalu menjadi objek yang dieksploitasi untuk kepentingan laki-laki secara individu (iklan berbagai media, pelayanan jasa publik dan sektor pariwisata, pelayanan kenikmatan lainnya) keluarga (pengasuh anak, pendamping suami, pencari nafkah, pendidik utama) masyarakat dan negara (TKW sebagai *human capital* untuk devisa negara, pendamping abdi negara, sarana pelampiasan kekerasan militer di wilayah konflik, alternatif penyelesaian berbagai persoalan sosial seperti krisis ekonomi dan kemiskinan).

Dalam konteks ini, perempuan dan anak adalah korban yang sangat rentan. Hal itu dapat dibuktikan dengan marjinalisasi kaum perempuan dalam bidang ekonomi, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya anak-anak yang hidup di jalan di kota-kota besar, meningkatnya perdagangan perempuan dan anak, meningkat dan meluasnya penderita HIV/AIDS, dan sebagainya. Di samping itu juga, tidak diakuinya hak-hak cipta hasil karya para petani lokal atau masyarakat adat (*indigenous people*) sehingga tidak ada perlindungan ekonomi atas ciptaan mereka.

Demikian juga di Indonesia, dalam konteks penegakan hak-hak perempuan, meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan, persoalan diskriminasi terhadap perempuan belum memperlihatkan perbaikan kualitas secara signifikan. Bahkan sebaliknya, semakin banyak muncul kebijakan yang berpotensi menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap perempuan, yang dipengaruhi oleh kompleksitas persolan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia. Belum ada aturan di Indonesia yang secara eksplisit mengakui hak-hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak perempuan. Akses perempuan terhadap fasilitas kesehatan masih menjadi masalah, khususnya bagi perempuan miskin perkotaan, perempuan pedesaan dan pedalaman. Angka kematian ibu di Indonesia mencapai 350/100.000 kelahiran (Unicef, 2004) atau 373/100.000 kelahiran hidup. Ini merupakan angka kematian ibu yang paling tinggi di ASEAN.

Menurut data BPS, perkembangan angka kemiskinan pada tahun 2005-2006 adalah: Februari 2005 35,10 juta (15,97 persen), sedangkan Maret 2006 terjadi lonjakan 3,95 juta (17,75 persen) atau penduduk miskin Maret 2006 adalah 35,10 juta. Pertambahan penduduk miskin di daerah pedesaan sedikit lebih tinggi dari pada daerah perkotaan. Selama periode Februari 2005-Maret 2006, penduduk miskin di daerah pedesaan bertambah 2,06 juta, sementara di daerah perkotaan bertambah 1,89 juta orang.

Jakarta sebagai ibukota negara sekaligus pusat pemerintahan merupakan provinsi dengan jumlah angka kemiskinan rendah. Penduduk miskin di Jakarta Utara hampir 26 persen bekerja sebagai buruh pabrik. Wilayah Jakarta Utara bagian timur sebagian besar didominasi oleh daerah industri. Penduduk miskin di wilayah itu

biasanya bertempat tinggal di gubuk-gubuk liar di bantaran sungai, di bawah jalan tol, dan di tepi rel kereta api. Nelayan yang bertempat tinggal di kampung-kampung nelayan di pinggir pantai juga dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Masih daerah persebaran kemiskinan di Jakarta, 13 % penduduk miskin di Jakarta Timur bekerja sebagai buruh pabrik. Hal ini berkaitan dengan penetapan sebagian kawasan Jakarta Timur bagian utara sebagai lokasi industri. Hampir 90 % penduduk miskin bertempat tinggal di pemukiman padat dan kumuh. Sedangkan sisanya memilih bertempat tinggal di bantaran sungai, tepi rel kereta api, dan lahan telantar seperti di bawah jalan layang. Di wilayah Jakarta lainnya, penduduk miskin yang mencapai angka 15.000 jiwa hanya ada di Kecamatan Tambora dan Cengkareng, Jakarta Barat, serta Kecamatan Kemayoran dan Senen, Jakarta Pusat. Meski sebagian besar penduduk di kecamatan tersebut mempunyai rumah sendiri, tetapi banyak yang tidak terjangkau fasilitas air bersih dan tidak mempunyai sanitasi yang memadai. Bahkan, tak jarang luasan rumah kurang dari 20 meter persegi. (M Puteri Rosalina, Litbang *Kompas*). Pada tahun 2005 data yang dikeluarkan Pemda DKI Jakarta tertanggal 22 September 2005 menunjukkan bahwa jumlah warga miskin sebanyak 105.694 rumah tangga atau 461.858 jiwa; pada Maret tahun 2006 jumlah penduduk miskin 407,1 ribu (4,57 %) mengalami penurunan pada Maret 2007 sebesar 405,7 ribu (4,48 %).

Salah satu elemen masyarakat yang merasakan dampak dari kemiskinan adalah perempuan, baik yang sudah berumah tangga, remaja, ataupun dewasa. Keterbatasan akses untuk mengembangkan diri semakin mengukung wanita dalam kemiskinan. Kekerasan terhadap perempuan masih tinggi. Dari data yang diinformasikan dari Komnas Perempuan, KDRT tahun 2007 mengalami peningkatan.

Wilayah Gereja

Dalam konteks gereja, menyangkut penegakan hak-hak perempuan, meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan, persoalan diskriminasi terhadap perempuan belum memperlihatkan perbaikan kualitas secara signifikan. Bahkan sebaliknya, masih saja muncul kebijakan yang berpotensi menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap perempuan.

Bagi sebagian besar perempuan dan anak, gereja belum bisa menjawab persoalan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Beberapa kasus yang terekam yang dilakukan oleh petugas gereja serta institusi gereja:

- Akhir-akhir ini Gereja dan masyarakat dikejutkan dengan indikasi kekerasan seksual oleh oknum Pdt berinisial M terhadap oknum vikaris berinisial R di salah satu institusi gereja. Kasus tersebut telah menjadi konsumsi umum serta mendapat tanggapan dari berbagai pihak (Kristen & non-Kristen). Kasus yang saat ini masih dalam proses pengadilan tersebut, hampir tidak mendapat respons dari gereja-gereja di sekitarnya, untuk dikaji dan untuk memberi pendampingan; bahkan ada indikasi terjadi kebisuan atas kasus tersebut. Dari penuturan si korban, ternyata baik gereja, masyarakat dan pengadilan seringkali “melecehkannya” sebagai seorang perempuan “pengganggu, pelacur” suami orang. Yang lebih mengesankan, si korban - oleh beberapa pertimbangan - pengajiannya dihentikan institusi gerejanya, sementara pihak terindikasi pelaku melenggang secara mulus di “jabatannya”. Kebijakan yang diskriminatif ini tentu melukai perasaan kemanusiaan kita.
- Terjadinya indikasi pelecehan seksual oleh Pdt U terhadap anak-anak-asuhnya di panti asuhan beberapa tahun yang lalu, tidak mendapat respons dan tanggapan samasekali. Budaya tabu dipertahankan. Kekuasaan sebagai “kepala” disalahgunakan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap anak-asuhnya.
- Perceraian sepihak yang dilanjutkan dengan pernikahan keduanya oleh oknum Pdt Y terhadap istrinya A atas dasar ketidaksetiaan istri melalui pembohongan publik serta penelantaran istri selama kurang lebih sembilan tahun. Anehnya oknum Y saat ini adalah anggota legislatif terhormat dan disegani.
- Penghentian sepihak kependetaan Pdt J karena dianggap tidak loyal terhadap atasannya. Setelah dipelajari aspek legal dari penghentian tersebut, ternyata samasekali tidak memenuhi persyaratan, jadi hanya diatur oleh kebijakan gereja tersebut.
- Masih kuatnya nilai budaya patriarki dalam komunitas agama (ajaran, teologi, etika maupun liturgi) dan masyarakat yang menyebabkan masih termarjinalnya kaum perempuan (ingat

bagaimana gereja memproses, merancang, memutuskan program, anggaran, kebijakan, dll.) dan rendahnya kepemimpinan perempuan dalam komunitas agama/gereja (keterlibatan perempuan masih sangat minim dalam kepemimpinan gereja, mereka hanya terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang kebanyakan diputuskan oleh laki-laki, yang tentu kurang mengakomodasi kebutuhan perempuan maupun masyarakat).

- Legitimasi dengan ayat-ayat tertentu untuk meneruskan kekerasan terhadap perempuan, mempertahankan perkawinan walaupun terancam kematian atas nama Alkitab (ump. ungkapan: "Hanya kematian yang memisahkan"). Pertanyaannya adalah: apakah kematian yang dimaksud adalah kematian yang diakibatkan oleh penderitaan, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan ?

Kekerasan Berbasis Jender

Banyaknya produk kebijakan yang mendiskriminasikan perempuan dalam wilayah keluarga, gereja dan masyarakat, dapat menyebabkan lambatnya pemberdayaan perempuan. Kualitas perempuan yang kurang menggembirakan merupakan akibat dari pendekatan pembangunan yang belum benar-benar mengindahkan kesetaraan dan keadilan jender. Nilai dan sistem patriarkis di sebagian besar daerah di Indonesia turut berperan melegitimasi ketidakadilan tersebut. Rendahnya kualitas perempuan dapat mempengaruhi generasi berikutnya. Perempuan tidak memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan serta tidak memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Di samping itu ketidak-tepatan pemahaman agama sering menyudutkan kedudukan dan peranan perempuan dalam masyarakat. Ketidakadilan serta diskriminasi terhadap perempuan tersebut disebut juga kekerasan berbasis jender.

Peran jender yang tidak adil sering diakibatkan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin tersebut menyebabkan wilayah-wilayah sosialnya juga berbeda dan akhirnya dicitra-bakukan. Ketika proses citra-baku tersebut melekat dalam diri seseorang, maka besar kemungkinan citra-baku tersebut akhirnya menjadi nilai-nilai yang harus ada pada perempuan atau laki-laki. Citra

baku yang mengatakan bahwa perempuan itu lemah, dapat menutup akses kepada semua perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang. Beberapa akibat dari ketidak-adilan jender tersebut adalah: stereotipe, marjinalisasi, subordinasi, kekerasan, dan *overburden*.

Kekerasan berbasis jender adalah kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan laki-laki oleh karena perbedaan jendernya. Namun karena struktur masyarakat kita adalah patriarkis, maka seringkali yang mengalami kekerasan tersebut adalah perempuan dan anak-anak (lihat data statistik tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak). Patriarkhi di sini diartikan secara luas sebagai "manifestasi dan institusionalisasi dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak di keluarga dan sebagai perpanjangan dominasi laki-laki atas perempuan dalam masyarakat secara umum" (Indriani Bone, 2004). Ini berarti bahwa laki-laki memegang kekuasaan pada semua lembaga masyarakat dan perempuan tidak mempunyai akses kepada kekuasaan itu. Ini tidak berarti bahwa kaum perempuan samasekali tidak punya kuasa atau tidak punya hak-hak, sumber-sumber, dan pengaruh" (Gerda Lerner, 1986).

Kekerasan dan Kekristenan

Menurut Indriani Bone dalam paparan beliau pada pertemuan PRWG, kekristenan adalah satu dari antara tradisi keagamaan yang patriarkal. Ajaran dan praktik-praktik keagamaannya yang androsentris (berpusat pada laki-laki) mendefinisikan perempuan sebagai inferior, subordinat, dan cenderung jatuh ke dalam dosa, perempuan adalah si penggoda. Para penulis PL adalah laki-laki yg berlatar-belakangkan budaya Israel yang patriarkal. Kekristenan berkembang dalam lingkungan budaya Yunani-Romawi yang sangat patriarkal. Karena itu, Alkitab bersifat ambigu bagi perempuan; di satu sisi ia mengandung aspek pembebasan, dan di sisi lain ia mempunyai aspek yang merendahkan perempuan. Dalam kerangka budaya patriarkal, sampai sekarang gereja lebih sering menggambarkan metafora Allah dengan adalah metafora maskulin, perkasa, tangguh, kuat dan berwibawa. Pola seperti ini akan meminggirkan metafora lain yang bernuansa feminin dan justru sangat terbuka pada terwujudnya kekerasan.

Teologi Kristen juga sering dipengaruhi konsep dan struktur

pemikiran dualistik di mana dunia dipisahkan menjadi dua bagian yang saling bertentangan: roh – tubuh; sorga – dunia; laki-laki – perempuan; akal – rasa dll. Pola ini menciptakan struktur hierarki yg menempatkan nilai superior bagi yang satu dan inferior bagi yang lain. Pola ini menekankan perempuan pada posisi inferior (bnd. murid Yesus 12 orang semuanya laki-laki).

Dewan gereja-gereja se dunia dalam Sidang Raya VIII di Harare Zimbabwe tahun 1998 menghasilkan beberapa rekomendasi teologis; salah satu adalah menyatakan dengan tegas: “kekerasan yang dilakukan pada seseorang tidak hanya merupakan persoalan hukum/kriminal tetapi juga adalah dosa.” Sidang Raya mendesak gereja-gereja untuk menyatakan hal tersebut. Orang yang melihat terjadi kekerasan namun berdiam diri, orang tersebut juga adalah pelaku kekerasan. Dengan berdiam diri gereja-gereja telah melanggar perjanjian dengan Tuhan untuk merespons kekerasan dengan keadilan dan belasas. Jika demikian gereja terperangkap menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. Kebisuan gereja bahkan menyumbang rasa malu perempuan korban. Dengan membisu, gereja telah menyangkal bahwa sebenarnya Tubuh Kristus sedang mengalami rasa sakit yang mendalam, tidak lagi menjadi tempat bagi orang tertindas mendapat kelegaan, menjadi rumah aman, tidak menjadi tempat untuk berbagi kesedihan dan kesakitan satu sama lain tentang penderitaannya dengan jujur dan terbuka (bnd. Lukas 4 : 18 – 19).

Upaya Transformatif Gereja

Sesuai dengan kesepakatan gereja dalam Sidang Raya XIV PGI (2000) untuk melakukan perubahan sesuai dengan tema “Berubahlah oleh pembaharuan budimu “(Roma 12 : 2^b) sekaligus menyongsong SR XV dengan tema “Tuhan itu baik bagi semua orang” (Mzm. 145:9^a), sudah saatnya gereja menempuh langkah-langkah “penyembuhan bagi hati yang luka dan tertindas”. Gereja kiranya menjadi komunitas yang menyembuhkan serta menjadi “kabar baik” bagi anggotanya sendiri serta bagi komunitas lainnya. Perlu dimunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis: konsep eklesiologis, sistem, kebijakan, *budgeting*, dogma, aturan-aturan yang bagaimanakah yang mau kita kembangkan ketika berhadapan dengan ketidak-adilan dan diskriminasi? Dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, ini merupakan

otokrotik bagi kita atas pertanyaan: apa arti bergereja bagi perempuan dan anak-anak yg tertindas? Siapa Yesus bagi mereka? Kepada siapa gereja telah menjadi sesama?

Beberapa usulan untuk KGM

- Membaca dan mengkaji ulang teks-teks keagamaan dengan paradigma baru melalui program Membaca Alkitab dengan Mata Baru.
- Mengembangkan semangat kehidupan (*biophilia*), bukan mencintai kematian (*necrophilia*). Yohanes 10 : 10^b, “Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.”
- Membangun komunitas yg didasarkan pada hubungan kasih (*the “golden rule”*; kaidah kencana) dan keadilan, membangun budaya dan gaya hidup yang ramah lingkungan (*eco friendly*). Bila lingkungan hidup rusak, kaum miskinlah yang merasakan dampak langsung, perempuan dan anak-anak menjadi yang termiskin dari yang miskin.
- Membangun konsep perubahan struktural gereja yang berkeadilan. Jika legislatif telah memutuskan agar setiap partai mempunyai 30% legislatif perempuan sebagai sebuah tindakan *affirmative*, sudah seharusnya gereja berani menyatakan bahwa jabatan-jabatan dalam setiap tingkatan struktural harus diisi oleh 50 % perempuan sebagai tindakan afirmatif (*affirmative action*). PRWG 2004 telah merekomendasikan hal tersebut ke Sidang Raya PGI 2004, semoga bisa terealisasi dlm Sidang Raya tahun depan di Mamasa.
- Mengembangkan teologi yang pluralistik, termasuk metafora tentang Allah yang sangat beragam.
- Rekonstruksi ajaran, dogma, kebijakan-kebijakan gereja. (a.l. konsep pernikahan, perceraian, dan prinsip pastoral yang menyatakan keberpihakan kepada korban).
- Menggali dan menumbuh-kembangkan budaya lokal sebagai upaya membangun kesetaraan.
- Mengarus-utamakan jender sebagai sebuah strategi perubahan menuju kepada kesetaraan dan keadilan jender dalam keluarga, gereja dan masyarakat dengan beberapa prinsip:

8d
TANTANGAN PEMUDA GEREJA MASA KINI

Franky Mocodompis²⁷

1. Menempatkan individu sebagai manusia seutuhnya. Prinsip ini berasal dari politik perbedaan yang melihat laki-laki dan perempuan sebagai orang yang bisa dan mampu memikul tanggungjawabnya masing-masing. Kemanusiaan lelaki dan perempuan harus mendapatkan penghargaan dan penghormatan yang sama.
2. Prinsip Demokrasi: keterlibatan semua anggota dalam proses pemerintahan. Meningkatkan peran-serta seluruh anggota dalam membangun dan merancang kebijakan yang mempengaruhi hidup mereka. Jika hal ini dilakukan di dalam gereja maka semua warga jemaat ikut berperan. Forum untuk menyuarakan aspirasi tersebut agar dimaksimalkan, tidak hanya secara *de jure* tetapi juga *de facto*.
3. Prinsip pemerataan, penegakan hukum dan kesetaraan (*fairness, justice, equality*): ini adalah yang disebut keadilan sosial.

Mengarusutamakan keadilan jender berarti membawa laki-laki dan perempuan ke dalam proses pengambilan keputusan tentang alokasi sumber daya dan manfaat pembangunan. Keterlibatan mereka sangat penting untuk memastikan semua kebutuhan dan aspirasi mereka terpenuhi.

Demikianlah beberapa catatan seputar jender dan permasalahannya, baik di masyarakat maupun di gereja; semoga bermanfaat bagi perubahan gereja ke depan.

Diskursus tentang pemuda selalu menjadi topik menarik. Hampir pada setiap pertemuan kecil ataupun besar di mana pemuda hadir di dalamnya, sering sekali terdengar ungkapan-ungkapan bombastis: Pemuda adalah penentu masa depan gereja; Pemuda adalah tulang punggung gereja; atau Pemuda adalah tiang dan tonggak sejarah gereja. Menjadi bombastis dan tampak sisi heroiknya. Padahal kalau dicermati, ungkapan-ungkapan tersebut lebih menonjolkan sisi ke-akan-an, ke-belakang-an, dan ke-lampau-annya. Seolah-olah kurang menempatkan secara proporsional sisi ke-kini-annya. Meski demikian, pelajaran dari peran masa lampau tentu saja diharapkan untuk dapat memantapkan peran ke-kini-annya.

Peran paling mengesankan sekaligus mengenaskan justru dilakoni para pemuda dalam dalam upaya penyelamatan bangsa. Potret 1908 (Budi Utomo), 1920 (Nationale Indische Partij), 1928 (Sumpah Pemuda), 1945 (Penculikan Rengasdengklok dan Kemerdekaan Indonesia), 1966 (Penumpasan G30S/PKI), 1974 (Malari), hingga peristiwa monumental Reformasi 1998 menandakan bahwa Pemuda adalah Pengawal Setia Republik Indonesia. Jika kita meretas perjalanan sejarah tersebut, menjadi sangat wajar jika pemuda berada di garda terdepan, karena cita-cita Indonesia satu, dikumandangkan dan dikawal oleh barisan pemuda Indonesia tanpa melihat suku, agama, ras, dan golongan. Menjadi mengenaskan, karena bagi para elite pada saat itu, langkah-langkah strategis pemuda/mahasiswa sering diidentikkan dengan upaya menciptakan instabilitas, 'komunis', dan dianggap sebagai perilaku 'menyimpang'.

Salah satu peran fenomenal ditunjukkan oleh Kusno Sosrodihardjo. Lahir dari hasil perkawinan sang guru Raden Soekemi Sosrodihardjo, seorang guru di Surabaya, Jawa dan istrinya Ida Ayu

²⁷ Sekretaris Dewan Pemuda GMIM.

Nyoman Rai berasal dari Buleleng, Bali, Soekarno saat berusia 19 tahun, Kusno Sosrodiharjo (nama asli Ir. Soekarno) telah berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij. Pada usia 25 tahun, ia mendirikan *Algemene Studie Club* di Bandung sebagai cikal-bakal Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927.

Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945; Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarno, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah, Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia, yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 karena saat itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan, bulan suci kaum Muslim yang diyakini merupakan tanggal turunnya wahyu pertama kaum Muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Peran-peran ini tidak saja heroik dan terkesan nasionalis dari segi empirik. Kemampuan Indonesia untuk bisa menempatkan diri sejajar dengan bangsa lain di berbagai bidang (olahraga, seni/paduan suara, ilmu pengetahuan dan teknologi) justru lebih banyak ditentukan oleh jawara-jawara berusia sangat muda, termasuk di dalamnya para tokoh gerakan oikumene.

Sebagai catatan reflektif, saya memperhadapkan kepada kita ketokohan dua figur penting yang menghias perjalanan ekumene dan nasionalisme antar bangsa: John Releigh Mott dan dr. Johannes Leimena. Peran-peran kesaksian dan kenabian mereka justru mencapai

puncak di usia yang masih sangat muda. John R. Mott, di usia yang belia, 21 tahun, ia telah menjadi ketua YMCA Cornell. Ia bekerja keras untuk menjalankan kegiatan-kegiatan gerakan oikumene di Cornell. Dari sinilah Mott belajar untuk mengumpulkan mahasiswa dari berbagai denominasi. Ia berkata: "Kita harus awas! Jangan kita menyangka bahwa gereja kita sendiri adalah satu-satunya gereja. Kita harus selalu menghormati semua cabang dari gereja yang kudus dan am."

Sementara itu Om Jo, di usianya yang ke-21 ditugaskan untuk mempersiapkan Konferensi Pemuda Kristen di Bandung. Konferensi ini adalah perwujudan pertama Organisasi Oikumene di kalangan pemuda Kristen. Setelah lulus studi kedokteran STOVIA, Leimena terus mengikuti perkembangan CSV yang didirikannya saat ia duduk di tahun ke-4 di bangku kuliah. CSV merupakan cikal-bakal berdirinya GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) tahun 1950. Om Jo bahkan hanya memerlukan waktu 7 tahun setelah lulus dari Geneeskunde Hogeschool/GHS (Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta untuk menjadi Menteri Muda Kesehatan pada Kabinet Sjahrir II.

Fenomena puncak kejayaan peran di masa muda, ternyata tidak hanya dimiliki John Mott dan Om Jo. Masih segar dalam ingatan kita peran signifikan para pemuda dalam menentukan arah perjalanan Indonesia melalui Reformasi 1998. Meskipun banyak kritik dan uraian panjang-lebar terhadap gerakan Reformasi 1998, sejarah tak akan pernah lupa bahwa Indonesia berhutang terhadap melayangnya 6 nyawa pemuda/mahasiswa yang mengiringi berakhirnya era Orde Baru bertepatan di Hari Kenaikan Yesus Kristus 21 Mei 1998. Demikian halnya dalam perspektif arak-arakan gerakan oikumene di Indonesia. Sidang Raya XIII di Palangkaraya dan Sidang Raya XIV di Wisma Kinasih Caringin-Bogor juga mencatatkan tinta emas tentang keberpihakan pemuda pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tidak tanggung-tanggung, langkah-langkah berani ditempuh meski harus keluar dari 'zona aman' sebagai Pemuda Gereja.

Realitas dinamika kepemudaan kemudian menempatkan pemuda dalam posisi marjinal. Jika kita mencermati Laporan Kepala Biro Pemuda PGI 2001-2005, Widowati, kepada Sidang Raya XIV PGI

tahun 2004, Pemuda ternyata masih menempati posisi marjinal dalam proses pengambilan keputusan gerejawi. Lebih memprihatinkan, perlakuan dan pengakuan terhadap posisi pemuda ternyata terdapat perbedaan yang sangat bertolak belakang. Jika di tingkat nasional pemuda secara proporsional telah diberi peran melalui representasi di Majelis Pekerja Harian PGI, Anggota dan Mitra Majelis Pekerja Lengkap PGI, menjadi salah satu Majelis Ketua pada persidangan PGI (Sidang Raya maupun Sidang Majelis Pekerja Lengkap), di tingkat regional seperti PGIW/SAG Sulutteng maupun di sinode gereja anggota peran-peran tersebut tidak tampak sama sekali. Bahkan di sinode gereja anggota, masih ada pemimpin pemuda yang ditunjuk oleh majelis pekerjanya. Lebih parah lagi, di beberapa sinode ternyata tidak ada komisi/biro/bidang khusus yang menangani masalah pemuda. Sangat memprihatinkan. Padahal hampir tidak ada satupun pemimpin sinode gereja anggota, MPH PGI, atau tokoh-tokoh gereja di tingkat nasional, yang tidak melewati romantisme dan dinamika kepemudaan.

Dalam konteks kenegaraan, posisi marjinal pemuda juga tidak jauh berbeda dengan perlakuan pemerintah. Lihat saja kritikan Fraksi PKS melalui Siaran Pers edisi Kamis, 26/06/2008 yang menulis dengan tegas: Pemerintah Tak Serius Tuntaskan RUU Kepemudaan. Menurut Anggota Komisi X DPR RI Yusuf Supendi, ketidak-jelasan itu tergambar pada lamanya proses keluarnya surat pengantar presiden (surpres) sebagai syarat pengajuan dan pembahasan di DPR. Padahal RUU tersebut menjadi satu dari 284 Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004-2009 dan termasuk yang diusulkan oleh pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM untuk jadi RUU yang diprioritaskan dibahas tahun 2008. Menurut Yusuf, Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai institusi yang sangat berkepentingan terhadap persoalan pemuda, telah berupaya keras menyusun naskah akademik, batang tubuh, dan penjelasan. Kementerian ini juga telah melakukan koordinasi dengan Departemen Hukum dan HAM, baik pada era Hamid Awaluddin maupun Andi Mattalata. Proses harmonisasi oleh Dephukham pun telah dilakukan. "Namun sampai sekarang, nasib RUU ini tetap saja terkatung-katung", ujarnya.

Di tengah-tengah 'ketidak-adilan' perlakuan terhadap posisi ke-kini-an, pemuda - baik dalam perspektif ekumenis maupun konteks

kenegaraan - selalu dapat tetap *survive* menghadapi tantangan dan perubahan zaman.

Jika diinventarisasi, tantangan pemuda gereja masa kini berkisar pada masalah-masalah berikut ini :

1. Kualitas SDM dalam mengelola pelayanan terkesan apa adanya. Jarang sekali gereja mendesain proses dan rekrutmen kaderisasi, agar para pemuda yang menjadi manajer dan pengelola penatalayanan adalah mereka yang berkualitas sumber dayanya. Kalaupun muncul sumber daya berkualitas, biasanya kemunculan tersebut lebih banyak disebabkan kemampuan individu.
2. Persaingan terbuka. Yang tidak berkualitas akan kalah bersaing dan terpinggirkan. Kondisi ketenaga-kerjaan dan krisis multi-dimensi ikut memperkuat proses persaingan.
3. Perubahan sosial/gaya hidup pemuda. Kecenderungan munculnya generasi instan, yang enggan melewati proses rekrutmen kader dari bawah, mengakibatkan rendahnya kemampuan mentalitas dan kemampuan beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan.
4. Kemajuan Iptek khususnya bidang Informasi.
5. Dalam kehidupan persekutuan berjemaat tampak sekali kualitas 'kehangatan' dalam peribadatan pemuda menurun, sehingga jumlah anggota pemuda yang terlibat berkurang. Sangat berbeda jika pertemuan-pertemuan peribadatan bernuansa rekreatif.
6. Mentalitas Pemuda yg cari gampang, masa bodoh, dan kurangnya semangat untuk berjuang pada setiap sektor kehidupan. Di daerah-daerah Kristen seperti Minahasa, kecenderungan pemuda meninggalkan pekerjaan-pekerjaan di sektor informal dan lebih memilih pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil menunjukkan rendahnya *fighting spirit*.
7. Terbatasnya ketersediaan dana dalam pelayanan, khususnya alokasi terhadap pengembangan generasi muda gereja.

Menghadapi tantangan demikian, seluruh *stakeholders* gereja, termasuk di dalamnya para pemimpin sinode gereja anggota PGI, kita diharapkan untuk makin siuman dengan perubahan-perubahan dalam dinamika kepemudaan. Belum terlambat sama sekali jika kita mulai mendekatkan pemuda dalam proses pengambilan keputusan. Memberi akses terhadap kemudahan belajar tentang arak-arakan ekumenis atau

menciptakan sebuah *blue print* terhadap strategi penguatan pemuda gereja di Indonesia di berbagai bidang tentu akan membuat para pemuda merasa gereja adalah rumahnya sendiri. Dengan demikian, para pemuda gereja akan menikmati tantangan sebagai sebuah peluang untuk mewartakan kabar baik sebagai surat Kristus yang terbuka bagi semua orang.

9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

9a *Position Paper*

Tak dapat dipungkiri, pemanfaatan sumber daya alam dan eksploitasi yang terus meningkat telah menyebabkan kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Berbagai kerusakan lingkungan seperti degradasi lahan/tanah, deforestasi atau penggundulan hutan, kepunahan jenis binatang dan tumbuhan, degradasi air, peracunan alam di tingkat global, perubahan atmosfer serta degradasi masyarakat dan budaya, adalah beberapa contoh yang kita alami kini. Jangan-jangan degradasi ini merupakan tanda-tanda bahwa kita telah memaksa alam melebihi batas-batas yang ditetapkan oleh Allah ketika menciptakannya. Dan tentu, yang mengalami akibat langsungnya adalah kita sendiri, seperti terjadinya berbagai bentuk bencana alam, antara lain, banjir di Jakarta, longsor di Manggarai, kebakaran hutan di Kalimantan, Sumatera, Jawa dan lain sebagainya. Disinyalir, dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pesat, tingkat kerusakan Lingkungan Hidup akan semakin parah.

Degradasi lingkungan sebagaimana disebutkan di atas juga telah mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Dan pada gilirannya perubahan iklim yang terjadi menyebabkan berbagai persoalan lingkungan, seperti perubahan pola curah hujan yang telah mengakibatkan banjir dan longsor ataupun musim kemarau berkepanjangan. Hal ini juga menyebabkan berubahnya pola musim tanam yang merugikan petani, karena sulit menentukan pembibitan, perkiraan panen serta serangan hama tak terduga. Dari segi kesehatan, habitat kehidupan yang terganggu menyebabkan meningkatnya penyakit epidemi seperti demam berdarah dan malaria. Jika tidak ada upaya pengurangan emisi, maka bumi akan semakin panas. Kondisi ini menyebabkan es di kutub mencair dan meningkatkan permukaan air laut sehingga pulau-pulau kecil menjadi tenggelam.

Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa lingkungan hidup disebut ciptaan, sebab semua yang ada di jagad raya ini adalah ciptaan Allah. Istilah ini digunakan dengan maksud pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dan menjadi milik Allah (Mzm. 24 dan 104). Manusia adalah bagian dari ciptaan, maka manusia adalah bagian dari lingkungan hidup. Tuhan menciptakan manusia bersama dan sama dengan ciptaan lainnya. Walaupun dalam hal ini manusia sama dengan ciptaan lain, namun manusia ditugaskan menjadi pemimpin atas ciptaan lain (Kej. 1:28; 2:15). Itu sebabnya manusia diciptakan sebagai citra Allah. Ia diberi mandat dan wewenang untuk memimpin dan memakai (mengolah dan memelihara) ciptaan lain. Tuhan menugaskan manusia untuk menghuni (penuhi), menguasai (taklukkan), kelola dan pelihara.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) memandang bahwa gereja memiliki tanggungjawab moral untuk dapat berpartisipasi aktif dalam program pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan ini sesuai dengan mandat Sidang Raya XIV PGI tahun 2004 sebagaimana yang tertulis dalam Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB). Ditegaskan di dalamnya: Gereja terpanggil untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk yang mengandung makna tanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan Tuhan. Tuhan memberi mandat kepada gereja untuk mengusahakan dan memelihara segala ciptaan (bnd. Kej. 2:15).

Bagaimana tugas dan kewenangan manusia terhadap lingkungan ini bisa dijalankan? Tugas dan tanggung jawab manusia, termasuk umat Kristen, pada lingkungannya tidak hanya menjadi tugas institusi tetapi tugas setiap orang. Tentu ada orang yang khusus berkecimpung di bidang lingkungan hidup, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai bidang profesi. Namun demikian, setiap orang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidupnya. Tentu tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing. Kondisi lingkungan hidup sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku setiap orang. Maka setiap orang diharapkan bersikap dan berperilaku mendukung terpeliharanya kondisi lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat. Maka orang Kristen pun mestinya menjadi orang-orang yang sadar akan perlunya menjaga dan memelihara lingkungannya agar menjadi baik, bersih, dan sehat.

Dalam kerangka itulah, Konferensi Gereja dan Masyarakat perlu membahas masalah Sumber Daya Alam dan Lingkungan ini secara mendalam dalam perspektif teologis. Pembahasan ini diharapkan menjadi momentum yang tepat bila pemimpin Gereja, akademisi, dan warga Gereja mempunyai wawasan, kesadaran dan berinisiatif dalam memecahkan berbagai masalah menyangkut pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Gomar Gultom

9b
**PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Prof. Dr. Ir. John FoEh²⁸

1. Pengertian Sumberdaya Alam dan Kategori Jenisnya

Sumberdaya alam adalah semua benda hidup maupun mati yang ada atau terdapat secara alamiah di bumi serta dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Sumberdaya alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, di laut, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumberdaya alam adalah barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi. Keberadaan dan ketersediaannya maupun penyebarannya tidak merata secara geografis. Pemanfaatannya secara efisien tergantung pada teknologi, dan jika melalui proses pengolahan, akan menghasilkan produk bernilai-tambah namun sekaligus menghasilkan limbah.

Beberapa istilah atau konsep dasar yang berkaitan dengan judul tulisan ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- *Lingkungan hidup atau lingkungan* adalah semua faktor biotik dan abiotik yang berada di sekitar makhluk hidup; dengan kata lain, lingkungan hidup adalah sistem kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan (tatanan alam) dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- *Pengelolaan lingkungan hidup* yang diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang mencakup kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian

²⁸ Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gandhi; Ketua II Majelis Sinode GPIB.

lingkungan hidup (Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

- *Ekologi* adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya.
- *Ekosistem* adalah suatu kawasan alam yang di dalamnya tercakup unsur-unsur hayati (organisme) dan unsur-unsur non hayati (zat-zat tidak hidup), serta di antara unsur-unsur tersebut terjadi hubungan timbal-balik.
- *Sistem* adalah himpunan komponen-komponen atau elemen-elemen atau bagian yang saling berkaitan dan secara bersama-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan.
- *Pencemaran lingkungan* adalah peristiwa adanya penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu sendiri.
- *Pembangunan* adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan potensi sumberdaya alam ke dalam perilaku manusia yang menjamin kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan juga untuk makhluk hidup lain seraya menjaga kualitas sumberdaya pembangunan itu secara terus-menerus (berkelanjutan).

Sumberdaya alam berdasarkan jenisnya, terdiri atas:

- sumberdaya alam hayati/biotik yakni sumberdaya yang berasal dari makhluk hidup seperti; tumbuhan, hewan, mikro organisme, dan lain-lain
- sumberdaya alam non hayati/abiotik adalah sumberdaya yang berasal dari benda mati seperti; bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain-lain.

Sumberdaya alam berdasarkan sifat pembaharuan atau dapat tidaknya diperbaharui terdiri atas:

- sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) yaitu sumberdaya yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Contohnya adalah air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan hasil hutan. Disebut demikian, karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu relatif cepat, secara reproduksi atau siklus:

- perbaruan dengan reproduksi. Hal ini terjadi pada sumberdaya alam hayati, karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak, sehingga jumlahnya selalu bertambah.
- perbaruan dengan adanya siklus. Beberapa SDA, misalnya air dan udara, terjadi dalam proses yang melingkar membentuk siklus.
- sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) ialah sumberdaya yang tidak dapat didaur-ulang atau bersifat hanya dapat digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. Contoh: bahan mineral, minyak bumi, batubara, timah, dan gas alam. SDA ini terdapat dalam jumlah relatif statis, karena tidak ada penambahan atau waktu pembentukan yang lama. Berdasarkan daya pakai dan nilai konsumtifnya, SDA ini dibagi dua, yaitu SDA yang tidak cepat habis karena nilai konsumtifnya kecil, dan SDA yang cepat habis karena nilai konsumtif barang tersebut relatif tinggi.

Menurut cara terbentuknya bahan galian dibagi menjadi: bahan galian magmatik, bahan galian pegmatite, bahan galian hasil pengendapan, bahan galian hasil pengayaan sekunder, bahan galian hasil metamorfosis kontak dan bahan galian termal.

Sedangkan kategori bahan galian menurut kepentingan bagi negara adalah: Golongan A, yakni golongan bahan galian strategis; Golongan B, yakni golongan bahan galian vital; dan Golongan C, yakni bahan galian yang tidak termasuk ke dalam golongan A atau B.

Ada sumberdaya alam yang tidak terbatas jumlahnya (*cycle/unlimited*); seperti sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain lain.

Sumberdaya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya dapat dikategorikan sebagai berikut :

- sumberdaya alam penghasil bahan baku, yakni sumberdaya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain, sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi. Contoh: hasil hutan, barang tambang, dan hasil pertanian.
- sumberdaya alam penghasil energi yang meliputi sumberdaya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi. Contoh: ombak, panas

bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara.

Berdasarkan bentuk yang dimanfaatkan maka sumberdaya alam dapat dikategorikan sebagai berikut:

- SDA Materi, yaitu bila yang dimanfaatkan adalah materi sumberdaya alam tersebut. Contoh: siderit dan limonit, yang dapat dilebur jadi besi/baja.
- SDA Hayati, yaitu SDA yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. SDA tumbuhan disebut SDA Nabati dan hewan disebut SDA Hewani.
- SDA Energi, yaitu bila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam SDA tersebut.
- SDA Ruang, yaitu ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya.
- SDA Waktu: sebagai sumberdaya alam, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terikat dengan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya.

2. Potensi Sumberdaya Alam Indonesia dan Penyebarannya

Sumberdaya alam di Indonesia adalah segala potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Sumberdaya alam ialah semua kekayaan alam, baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Proses terbentuknya sumberdaya alam di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain :

- a. Secara astronomis, Indonesia terletak di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, menyebabkan aneka ragam jenis tumbuhan dapat tumbuh subur, sehingga negara ini kaya akan berbagai jenis tumbuhan.
- b. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan jalur pergerakan lempeng tektonik dan pegunungan muda, menyebabkan terbentuknya berbagai macam sumberdaya mineral yang potensial untuk dimanfaatkan.

- c. Wilayah lautan di Indonesia mengandung berbagai macam sumberdaya nabati, hewani, dan mineral antara lain ikan laut, rumput laut, mutiara, serta tambang minyak bumi.

Jumlah dan kualitas sumberdaya alam sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah. Selain itu, kualitasnya pun sangat bagus sehingga dapat diekspor ke berbagai negara, sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Jenis sumberdaya alam yang diekspor meliputi minyak bumi, gas alam dan bahan tambang lainnya. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan hasil industri lainnya juga dapat diekspor ke luar negeri untuk berbagai kepentingan.

Sumberdaya alam hayati terdiri dari sumberdaya alam hewani dan nabati.

- Sumberdaya alam nabati. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumberdaya alam, dianugerahi tanah yang subur sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan sempurna. Wilayah flora di Indonesia meliputi Hutan Tropis, Hutan Musim, Stepa, dan Sabana.
- Sumberdaya alam hewani. Pada umumnya persebaran fauna di Indonesia dibagi tiga wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Ketiganya dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Bagian Barat lebih cenderung mengikuti ragam hewan Asia, sedangkan bagian Timur mengikuti ragam hewan Australia. Ciri-ciri khusus hewan Indonesia terdapat pada wilayah bagian tengah.

Sumberdaya sedimen tersebar di darat dan laut atau perairan. Penyebaran barang tambang di Indonesia (Suparmoko, 2005) adalah sebagai berikut:

- Minyak bumi. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk, rawa-rawa dan laut-laut dangkal. Sesudah mati, mikroplankton berjatuh dan mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan sedimen. Akibat tekanan lapisan-lapisan atas dan pengaruh panas magma, terjadilah proses destilasi hingga terjadi minyak bumi kasar. Daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia adalah sebagai berikut :
 - Pulau Jawa: Cepu, Cirebon dan Wonokromo.

- Pulau Sumatera : Palembang dan Jambi.
- Pulau Kalimantan: Pulau Tarakan, Pulau Bunyu dan Kutai.
- Pulau Irian (Papua): Sorong.
- Gas alam. Gas alam merupakan campuran beberapa hidrokarbon dengan kadar karbon kecil yang digunakan sebagai bahan bakar. Ada dua macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG (*liquefied natural gas*) dan LPG (*liquefied petroleum gas*).
- Batu bara. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang tertimbun hingga berada dalam lapisan batu-batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inkolent, yang terbagi menjadi dua, yaitu proses biokimia dan proses metamorfosis. Daerah tambang batu bara di Indonesia adalah sbagai berikut :
 - Ombilin, dekat Sawahlunto (Sumatera Barat)
 - Bukit Asam, dekat Tanjung Enin (Palembang)
 - Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Pulau Laut/Sebuku)
 - Jambi, Riau, Aceh dan Papua.
- Tanah liat. Merupakan tanah yang mengandung lempung, banyak terdapat di dataran rendah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.
- Kaolin. Terbentuk dari pelapukan batu-batuan granit. Banyak terdapat di daerah sekitar pegunungan di Pulau Sumatera.
- Gamping. Batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang binatang karang. Banyak terdapat di Pegunungan Seribu dan Pegunungan Kendeng.
- Pasir kuarsa. Merupakan pelapukan batu-batuan yang hanyut lalu mengendap di daerah sekitar sungai, pantai dan danau. Banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka, Belitung dan Bengkulu.
- Pasir besi. Merupakan batuan pasir yang banyak mengandung zat besinya. Terdapat di Pantai Cilacap, Jawa Tengah.
- Marmer atau batu pualam. Merupakan batu kapur yang telah berubah bentuk dan rupanya. Banyak terdapat di Trenggalek, Jawa Timur, dan daerah Bayat (Jawa Tengah).
- Batu akik. Merupakan batuan atau mineral yang cukup keras dan berwarna. Terdapat di daerah pegunungan dan sekitar aliran sungai.

- Bauksit. Banyak terdapat di Pulau Bintan dan Riau.
- Timah. Daerah penghasil timah di Indonesia adalah Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep.
- Nikel. Terdapat di sekitar Danau Matana, Danau Towuti, dan di Kolaka.
- Tembaga. Terdapat di Tirtomoyo, Wonogiri (Jawa Tengah), Muara Simpson (Sulawesi), dan Tembagapura (Papua).
- Emas dan perak. Merupakan logam mulia. Terdapat di Tembagapura, Batu Hijau, Tasikmalaya, Simau, Logos, Meulaboh.
- Belerang. Terdapat di kawasan Gunung Telaga Bodas (Garut) dan di kawah gunung berapi, seperti di Dieng (Jawa Tengah).
- Mangan. Terdapat di Kliripan (Yogyakarta), Pulau Doi (Halmahera), dan Karang Nunggal.
- Fosfat. Terdapat di Cirebon, Gunung Ijen, dan Banyumas.
- Besi. Besi baja adalah besi yang kandungannya atau campuran karbonnya rendah.
- Mika. Terdapat di Pulau Peleng, Kepulauan Banggai, dan Maluku.
- Tras. Terdapat di Pegunungan Muria (Jawa Tengah).
- Intan. Terdapat di Martapura (Kalimantan Selatan).

Jadi, seperti yang telah diuraikan di atas, sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan wujud dari ekosistem yang dimanfaatkan manusia untuk kehidupannya. Perhatian penting harus diberikan terhadap keberadaan sumberdaya alam yang dikelompokkan sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui.

Ciri khas sumberdaya alam dan lingkungan Indonesia adalah terdapatnya berbagai ragam ekosistem yang mampu menopang perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kekhasan dan keragaman ekosistem yang potensial untuk dipergunakan sepenuhnya bagi kebutuhan hidup manusia adalah untuk pembangunan ekonomi, industri, sosial, budaya dan kesehatan lingkungan. Bentuk dan ukuran potensial dan tingkat kelangkaan sumberdaya alam dan lingkungan didasarkan pada kuantitas dan kualitas jenis ataupun spesies dari sumberdaya alam itu sendiri.

Potensi dan kelangkaan sumberdaya alam dan lingkungan sangat tergantung pada manusia yang mengelolanya, baik potensi alam yang ada di darat maupun di dalam air. Kekhasan potensi sumberdaya alam dan lingkungan di daerah dapat dilihat pada berbagai macam bentuk komponen ekosistem yang ada seperti: di darat terdapat hutan beserta spesies satwa yang ada di dalamnya dan cadangan aneka bahan tambang, ekosistem terumbu karang dan padang lamun di laut beserta spesies satwa ikan dan lainnya. Keberadaan sumberdaya alam tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan umat manusia dengan jalan mengenali potensi dan keterbatasannya untuk dikelola dengan baik dan benar.

3. Permasalahan/Hambatan dalam Pengelolaan SDA dan LH

Telah diketahui bersama bahwa sumberdaya alam (SDA) mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional maupun daerah. Demikian pula fungsi SDA terhadap pelestarian lingkungan hidup (LH). Namun demikian, telah diketahui pula bahwa kerusakan SDA telah diikuti oleh berbagai dampak buruk, baik bagi perkembangan ekonomi itu sendiri maupun bagi pelestarian LH. Untuk memahami terjadinya fenomena dimaksud, perlu dilakukan pengungkapan berbagai sebab kerusakan, maupun belum dapat ditanganinya kerusakan dan pencemaran LH tersebut.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau, Indonesia membentangkan dua kawasan biogeografis - Asia dan Australia - dan mendukung berbagai jenis kehidupan flora dan fauna dalam hutan basah yang asli dan kawasan pesisir dan laut yang kaya. Sekitar 3.305 spesies hewan amfibi, burung, mamalia dan reptil, dan sedikitnya 29.375 spesies tumbuhan yang tersebar di pulau-pulau ini, yang diperkirakan mencapai 40 persen dari biodiversitas di kawasan Asia Pasifik. Namun, lingkungan alam yang indah dan sumberdaya yang kaya harus terus menghadapi tantangan dari fenomena alam maupun kegiatan manusia.

Tekanan yang meningkat dalam memenuhi tuntutan penduduk dan pengelolaan lingkungan yang tidak memadai merupakan tantangan yang merugikan rakyat miskin dan perekonomian di Indonesia. Misalnya, total kerugian perekonomian akibat keterbatasan akses ke air

bersih dan sanitasi yang aman setidaknya mencapai 2 % dari PDB setiap tahun, sedangkan biaya tahunan yang ditimbulkan polusi udara bagi perekonomian Indonesia telah diperhitungkan mencapai sekitar \$400 juta per tahun (Bank Dunia - DFID, 2007). Biaya-biaya ini secara tidak proporsional ditanggung oleh rakyat miskin, karena mereka kemungkinan besar harus menghadapi polusi dan sulit melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi dampaknya.

Tantangan sumberdaya alam terus terjadi dan menjadi lebih rumit setelah desentralisasi. Misalnya, sektor kehutanan telah lama memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat pedesaan dan dalam menyediakan pelayanan lingkungan; tetapi sumberdaya ini belum dikelola secara berkelanjutan atau adil. Kerangka administratif dan peraturan di Indonesia belum dapat memenuhi tuntutan akan adanya pembangunan yang berkelanjutan, meskipun adanya dukungan kebijakan dan pengembangan kapasitas dari pemerintah sendiri maupun dukungan dari donor internasional.

Kinerja yang buruk terutama disebabkan oleh dua alasan: Pertama, meskipun terdapat investasi yang besar pada kebijakan lingkungan dan sumberdaya alam serta pengembangan kepegawaian, pelaksanaan peraturan dan prosedur di lapangan masih buruk dan lambat, karena lemahnya komitmen instansi-instansi sektoral. Selain itu, pengetahuan tentang dampak negatif lingkungan yang diperkirakan akan terjadi dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mekanisme bagi *stakeholder* untuk meminta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah masih lemah. Kedua, pertimbangan-pertimbangan lingkungan masih sangat minim di tingkat perencanaan dan penyusunan program, terutama dalam proses perencanaan investasi publik dan dalam rencana tata guna lahan dan sumberdaya daerah.

Masalah-masalah yang paling serius mengancam kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia adalah dorongan yang keliru yang menghambat penggunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Sumberdaya alam memberikan kontribusi yang besar kepada PDB Indonesia dan anggaran belanja Pemerintah. Masih menurut Bank Dunia - DFID [Department for International

Development] (2007), sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan menyumbang sekitar 25% PDB Indonesia dan sekitar 30% dari seluruh penerimaan anggaran Pemerintah (pada tahun 2005, pajak penghasilan atas migas mencapai 7% dari pendapatan, dan penerimaan bukan pajak atas pendapatan sumberdaya alam mencapai 22% dari pendapatan negara). Namun, kebijakan makro ekonomi Indonesia (kebijakan pendapatan pajak dan bukan pajak serta pola perimbangan keuangan) tampaknya mendorong terjadinya pengurusan sumberdaya alam akibat penggunaan yang terus-menerus. Kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten tentang penerimaan dari sumberdaya ini ikut memperparah situasi.

Kesenjangan antara kebijakan dan praktik setelah desentralisasi cenderung memperlambat perbaikan yang signifikan pada kualitas lingkungan. Di bawah sistem desentralisasi, kini sedang diuji-coba sampai sejauh mana pemerintah daerah merasa terikat oleh garis kebijakan nasional termasuk dalam kaitan dengan pengelolaan SDA dan LH. Meskipun ada investasi yang besar pada kebijakan lingkungan dan pengembangan kepegawaian, namun pelaksanaan peraturan dan prosedur di lapangan masih buruk. Diperlukan kajian-ulang tentang mekanisme pengelolaan SDA dan LH di bawah sistem desentralisasi, untuk menemukan pendekatan yang lebih efektif. Banyak provinsi dan kabupaten membuat penafsiran-penafsiran baru mengenai peraturan yang ada, atau berupaya mencari prosedur peraturan yang seluruhnya baru. Meskipun sebagian inovasi ini memperkuat pengendalian lingkungan, namun sebagian besar malah mengendurkan pengendalian atau bahkan mengabaikan seluruh standar nasional.

Selanjutnya, kesadaran masyarakat adalah penting dalam upaya mengatasi masalah lingkungan di Indonesia, dari risiko bencana alam sampai konservasi biodiversitas. Warga masyarakat yang terinformasi dan sadar dapat mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dan dapat membentuk kelompok untuk peningkatan upaya penanganan di tingkat politik maupun pemerintah daerah. Namun, di tingkat yang lebih luas, nilai-nilai lingkungan belum tertanam dengan kuat pada masyarakat, sehingga mereka kurang menghargai sumberdaya alam dan pelayanan lingkungan. Bencana-bencana lingkungan yang baru-baru ini terjadi (banjir, lumpur, kebakaran, erosi) memang telah mendorong perhatian yang lebih

besar kepada masalah lingkungan, namun pengkajian lebih lanjut mengenai pengetahuan, sikap dan praktik masih perlu dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman ini mencapai masyarakat di pedesaan maupun terutama perkotaan. Pengkajian dimaksud juga untuk menemukan metode dan sarana yang paling cocok untuk membangun di atas kesadaran dasar ini.

Manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi, risiko dan biaya dari langkah-langkah alternatif pembangunan, kebijakan energi, praktik sektor kehutanan dan masalah perubahan iklim saling berhubungan erat. Bahan bakar fosil mendominasi konsumsi energi di Indonesia, di daerah pedesaan maupun perkotaan, dan Indonesia secara bertahap sedang meningkatkan penggunaan energi yang dihasilkan oleh batu bara (sekitar 40% pada tahun 2002). Indonesia juga merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, yang memproduksi 80% gas rumah kaca dari perubahan penggunaan lahan selain penebangan hutan dan kebakaran hutan/gambut.

Kebijakan energi nasional mendorong peningkatan pemanfaatan sumber energi yang dapat diperbaharui termasuk biomassa, panas bumi, dan tenaga air. Pada saat yang sama, pemerintah merencanakan pemanfaatan batu bara berskala besar untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Peningkatan pemanfaatan batu bara dapat menimbulkan dampak lingkungan negatif yang signifikan terkait dengan kandungan sulfur yang tinggi dan dampak potensial terhadap hutan akibat pembukaan lahan. Solusi energi alternatif diperlukan bagi daerah-daerah yang lebih terpencil dengan harga yang sesuai dan dukungan sektor publik.

Hambatan lain terkait dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di sejumlah negara berkembang jumlahnya mencapai ratusan juta jiwa dan tersebar di sebagian besar negara Amerika Latin, Afrika dan Asia Selatan. Kemiskinan absolut yang ada di dunia merupakan kemiskinan menyeluruh yang meliputi aspek: kurang pangan, buta huruf, wabah penyakit, lingkungan kumuh, gizi buruk, tingginya angka kematian bayi dan rendahnya harapan hidup. Penyebab kemiskinan adalah akibat pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, kegagalan pemerintah dalam memperbaiki sistem

perekonomian dan politik, menumpuknya hutang-hutang negara miskin.

Keadaan ini mendorong orang kelaparan dan orang-orang miskin untuk mengeksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan secara tidak terencana yang berakibat pada kemerosotan dan kehancuran lingkungan hidup. Penyebab kerusakan lingkungan hidup di negara maju disebabkan oleh persoalan pencemaran udara dan kebisingan yang bersumber dari aktivitas kendaraan bermotor, pembangkit tenaga listrik serta industri dan rumah tangga yang terlalu banyak mengkonsumsi energi.

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia pun mengalami hal-hal tersebut dan dalam kondisi yang masih menguatirkan. Masalah kemiskinan, kesehatan dan gizi buruk dari jutaan rakyat miskin masih menjadi masalah utama di samping persoalan sampah serta pencemaran udara dan air di kota-kota besar.

4. Isu-isu Strategis, serta Azas dan Paradigma Pengelolaan SDA

Kerusakan SDA dan LH semakin mengancam kelestariannya dan sekaligus mengancam keberlanjutan pembangunan. Faktor-faktor utama yang diduga atau setidaknya merupakan penyebab kerusakan dimaksud meliputi: padatnya penduduk dan kemiskinan yang mendorong perambahan perambahan SDA, krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, lemahnya upaya penegakan hukum, serta rendahnya komitmen penataan hukum, rendahnya kepedulian lingkungan, hambatan kepemilikan SDA (*common property vs private property*).

Di samping kerusakan SDA dan LH, kualitas hidup manusia Indonesia semakin menurun dengan indikator sebagai berikut: tingkat kematian bayi yang masih tinggi, persoalan gizi buruk terutama anak Balita, pudarnya budaya kearifan terhadap SDA dan LH, menurunnya kualitas kawasan konservasi/lindung serta berkembangnya wabah penyakit akibat pencemaran udara dan air.

Isu lain yang mengemuka adalah perubahan lingkungan hidup global semakin mengancam kualitas lingkungan biosfer, dengan indikator: kerusakan keanekaragaman hayati, pemanasan global/suhu

bumi meningkat, penipisan lapisan ozon dan radiasi yang ditimbulkan, perubahan pola iklim, dan sebagainya. Di samping itu, pengelolaan SDA dan LH telah berkembang menjadi isu-isu politik yang dapat mengancam sinergisme antar daerah. Konflik kepentingan itu antara lain meliputi: batas-batas sumberdaya daya lahan dan hutan, sumberdaya air baik permukaan maupun tanah, polusi udara, asap dan hujan asam, perambahan sumberdaya mineral dan bahan galian, serta terganggunya kuantitas dan kualitas distribusi.

Salah satu isu pokok yang juga penting adalah masalah pengelolaan lingkungan yang bertanggung-jawab (*good environmental governance*). Hal ini akan terkait dengan birokrasi, profesionalitas dan integritas moral. Peranan lembaga legislatif dan peradilan dalam mendukung penegakan hukum juga masih menjadi kendala. Diperlukan suatu lembaga pengontrol kualitas lingkungan yang independen dan berkeadilan serta efektif. Peranan masyarakat dalam pengelolaan partisipatif SDA dan LH belum baik, di samping penerapan desentralisasi dalam hal pengelolaan SDA dan LH kurang bertanggung jawab dan tidak efektif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tantangan pengelolaan SDA dan LH ke depan akan berhadapan dengan hal-hal seperti dinamika kependudukan, degradasi lingkungan alam, permintaan lingkungan buatan yang semakin mendesak, pencemaran udara dan air, meningkatnya sampah/limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya), degradasi lahan hutan, serta banjir dan kekeringan yang silih berganti.

Untuk itu konsep pembangunan berkelanjutan bukan sekedar perlu dipahami, tetapi harus dilaksanakan dengan baik. Proses yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat SDA & SDM melalui penyerasian aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan/daya dukung lingkungan. Untuk itu paradigma pengelolaan SDA dan LH harus merupakan suatu interaksi berkeseimbangan, optimal dan harmonis pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan kelestarian fungsi lingkungan. Unsur-unsur pokok dalam hal ini adalah keseimbangan antara azas manfaat, tanggung jawab, dan keberlanjutan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian atas dasar iman dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, pembangunan

berkelanjutan akan merupakan pembangunan masia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya.

5. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Indonesia dan Dampaknya

Menurut Bappenas, (2005) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari SDA mempunyai kontribusi terbesar. Pada tahun 2003 PNBP yang berasal dari SDA sebesar 73,9 % dari total PNBP. Selain itu SDA mampu memberikan kontribusi terhadap PDB sekitar 30 % dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 57 % dari total angkatan kerja (BPS, 2005). Ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas non-migas. Pada tahun 2000, ekspor non-migas mencapai US\$ 47,8 miliar atau sekitar 76,9% dari total ekspor nasional. Pada tahun 2004 ekspor non-migas mencapai 78,1% dari nilai total ekspor. Selanjutnya, dalam kurun waktu 2000-2004 trend ekspor non-migas naik rata-rata sebesar 4,5% per tahun. Dalam kurun waktu yang sama ekspor migas hanya meningkat sebesar 2,8% per tahun, impornya meningkat sangat besar yaitu 20,2% per tahun, sehingga surplus sudah semakin menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 15,8% per tahun (Koesnadi Hardjasoemantri, 2006).

Kondisi di atas menunjukkan bahwa SDA masih diandalkan dalam perekonomian nasional. Surplus migas sudah semakin kecil. Peran non-migas terus meningkat. Ketika pentingnya non-migas – terutama yg berasal dari SDA terbarukan (*renewable resources*) – tidak kunjung dapat diimbangi oleh upaya pelestariannya, perekonomian nasional berpotensi menghadapi krisis. Potensi terjadinya krisis tersebut ditandai oleh rusaknya SDA - khususnya yang berada di dalam kawasan lindung - telah mengakibatkan dampak negatif bagi LH. Kerusakan kawasan lindung telah menyumbang terjadinya bencana banjir dan longsor, serta di beberapa lokasi menyumbang terjadinya kekeringan dan potensi peledakan hama pertanian, sehingga telah mengurangi produktivitas hasil-hasil pertanian.

Sementara itu, sektor pertanian dalam arti luas, juga masih harus menjadi penyangga dalam penyerapan tenaga kerja nasional. Pada tahun 2001 sebanyak 39,7 juta orang bekerja pada sektor pertanian atau 43,8% dari jumlah tenaga kerja secara nasional. Jumlah itu semakin meningkat pada tahun 2003 mencapai 43,0 juta orang atau

sebesar 46,3% dari jumlah tenaga kerja secara nasional. Pada tahun 2004 penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sempat menurun menjadi 40,6 juta orang atau sebesar 43,5% dari tenaga kerja nasional tapi pada tahun 2005 naik lagi menjadi 41,8 juta orang (44,0%) (Bappenas, 2005, dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 2006).

Di satu pihak, penyerapan tenaga kerja tersebut merupakan kontribusi sektor pertanian dalam mengatasi pengangguran, tetapi di lain pihak ini merupakan indikasi bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor lain mengalami penurunan dan menyebabkan sektor pertanian menjadi “sulit”. Hal ini mengakibatkan beban sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerjanya semakin berat, apalagi dengan adanya tekanan, di satu sisi, untuk peningkatan efisiensi dan daya saing sektor pertanian menghadapi pasar global, dan di sisi lain, terjadinya kerusakan daya dukung lingkungan.

Rendahnya daya dukung lingkungan ditandai setidaknya dalam lima tahun terakhir yang setiap tahunnya telah terjadi banjir, banjir bandang, dan longsor. Dalam tahun 2003 saja, di Indonesia telah terjadi 236 kali banjir di 136 kabupaten dan 26 provinsi; di samping itu juga terjadi 111 kejadian longsor di 48 kabupaten dan 13 provinsi. Dalam tahun yang sama tercatat 78 kejadian kekeringan yang tersebar di 11 Provinsi dan 36 Kabupaten. Selama periode itu juga, 19 provinsi lahan sawahnya terendam banjir, 263.071 ha sawah terendam dan gagal panen, serta 66.838 ha sawah puso (Kantor KLH, 2006).

Kerusakan SDA telah menyebabkan, di satu sisi, menurunnya daya dukung lingkungan, dan di sisi lain, kemiskinan. Kemiskinan yang dipicu oleh berkurangnya atau bahkan hilangnya SDA sebagai tumpuan hidup masyarakat telah menumbuhkan sikap pragmatis masyarakat, seperti melakukan penjarahan dan memicu terjadinya konflik. Dengan demikian, kebijakan ekonomi dan pengelolaan SDA telah melahirkan dan menyimpan potensi konflik yang lebih besar dan luas.

Sektor LH sebagai benteng terakhir untuk menangani akibat kerusakan SDA juga belum mendapat perhatian yang cukup. Hal demikian itu dicerminkan antara lain oleh kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan SDA/LH yang hanya kurang dari 1%

dari PNBPN atau hanya berkisar 1 - 1,5 % dari total anggaran pembangunan. Kondisi tersebut juga terjadi pada tingkat pemerintah daerah. Dari data alokasi anggaran pembangunan daerah (provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur) sejak tahun 2001, 2002 dan 2003 diperoleh gambaran bahwa persentase alokasi anggaran LH rata-rata hanya berkisar antara 0.15 % - 3 % dari total anggaran pembangunan daerah.

Pelestarian fungsi LH dan pemanfaatan SDA yang bijak menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu SDA perlu dipandang sebagai satu kesatuan fungsi ekosistem, yang tidak dapat dipisahkan baik secara sektoral maupun administratif. Ekosistem di mana komoditi SDA dapat dieksploitasi memiliki keseimbangan alamiah dan daya dukung yang terbatas. SDA sebagai satu kesatuan ekosistem menjadi salah satu faktor pembatas dan menjadi variabel penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Dengan demikian harus dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan kemajuan yang sesungguhnya, tanpa mengikutsertakan perhitungan kerusakan SDA dan LH yang timbul akibat kegiatan pembangunan itu sendiri. Implikasi lain, tidak diperhitungkannya kerusakan SDA dan LH dalam ukuran pembangunan ekonomi, berpotensi melemahkan perhatian masyarakat terhadap kerusakan SDA dan LH.

6. Pembangunan Berkelanjutan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dan tindakan yang dilakukan dalam proses pembangunan untuk memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Secara sederhana pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai membangun saat ini dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang; kondisi kualitas lingkungan hari ini yang kita nikmati

harus dapat pula dinikmati oleh generasi mendatang. Pendayagunaan sumberdaya alam sebagai esensi kemakmuran rakyat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Tata ruang nasional yang berwawasan Nusantara dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif. Pembangunan ekonomi yang mengelola kekayaan bumi Indonesia, seperti kehutanan dan pertambangan, harus senantiasa memperhatikan bahwa pengelolaan sumberdaya alam, di samping untuk memberikan berbagai manfaat masa kini, juga harus menjamin kehidupan masa depan. Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui harus dikelola sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat selalu terpelihara sepanjang masa. Oleh karena itu, sumberdaya alam harus dijaga agar kemampuannya untuk memperbarui diri selalu terpelihara dengan baik.

Sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui harus digunakan sehemat mungkin dan diusahakan habisnya selama mungkin. Energi merupakan sumberdaya yang dibutuhkan oleh kehidupan dan bagi pembangunan terutama untuk mendukung proses industrialisasi. Pembangunan energi harus diarahkan untuk menjamin kemandirian dalam energi, dan untuk itu perlu ditingkatkan upaya untuk mengembangkan dan memelihara cadangan sumber energi, menganeka-ragamkan penggunaan berbagai sumber energi dan menghemat pemakaiannya, serta lebih mengembangkan penggunaan sumber energi yang terbarukan. Kegiatan di sektor yang mengelola sumberdaya alam dari bumi memiliki potensi untuk merusak lingkungan, baik air, tanah maupun udara. Oleh karena itu, harus selalu dijaga agar kegiatan pembangunan di sektor ini memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Emil Salim (2003) menyebutkan, pembangunan berwawasan lingkungan dapat dimaknai sebagai pembangunan yang kegiatan-kegiatannya selalu memperhatikan aspek lingkungan kehidupan (berbasis ekologi) yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan

generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan ekologi dalam memenuhi kebutuhan generasi masa mendatang. Apabila kita lihat sejarah perhatian masyarakat dunia terhadap persoalan lingkungan hidup, maka sejak tahun 1972, yaitu pada konferensi tentang lingkungan hidup di Stockholm, bangsa-bangsa di dunia telah mulai menggeser makna pembangunan dunia dari pembangunan ekonomi-fisik ke arah perbaikan kualitas hidup, keadilan sosial dan kesetaraan gender. Fokus pembangunan tidak lagi ke masalah pembangunan semata, akan tetapi harus mengarah kepada upaya pemberdayaan manusia.

Pemberdayaan manusia dilakukan mulai dari golongan masyarakat yang paling rentan pada strata masyarakat terendah sampai ke masyarakat yang terdusur dan digusur oleh adanya kegiatan pembangunan. Agenda 21 merupakan rencana aksi masyarakat dunia untuk menyelamatkan bumi beserta isinya yang ditempati bersama dengan lebih 7 milyar manusia. Pembangunan berkelanjutan harus dimaknai sebagai pembangunan berbasis ekologi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan generasi masa kini dengan tanpa mengorbankan kemampuan sumberdaya alam dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan generasi masa mendatang.

Pembangunan pada dasarnya memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan yang ada. Di sini, terjadi interaksi antara komponen lingkungan hidup manusia dengan sumberdaya alam. Sebagai contoh adalah pembangunan kegiatan industri dan perdagangan yang memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan. Konsumen dan produsen memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan melalui proses-proses produksi dan transaksi barang/jasa yang juga sekaligus menghasilkan limbah yang dilepas ke lingkungan. Konsekuensi logis yang terjadi adalah: di satu pihak mengambil sumberdaya dari lingkungan alam yang kemudian limbah (terutama B3) dan pencemaran dibuang ke lingkungan alam itu juga. Lama-kelamaan akan terjadi penyusutan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan sebagai akibat pengambilan sumberdaya dimaksud.

Dalam keadaan ini diperlukan pengaturan keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam dan dampak lingkungan melalui

pembelajaran tentang ekologi, agar diperoleh hasil-hasil pembangunan yang berkelanjutan dan tidak merugikan generasi mendatang sebagai pewaris sumberdaya alam dan lingkungan. Belajar dari pengalaman tentang pengelolaan lingkungan hidup, maka diperlukan adanya kesamaan pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan, mengetahui prasyarat bagi keberhasilan pembangunan berkelanjutan, dan perlunya kondisi yang kondusif bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pemahaman pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari sejarah perkembangan pembangunan lingkungan hidup dimulai dari Konferensi Stockholm ke “*Our Common Future*” hingga Deklarasi Rio dan Agenda 21. Dari hasil konferensi ini diperlukan adanya perubahan sikap dan pola hidup manusia ke arah yang lebih pro-lingkungan, serta etika pembangunan berkelanjutan yang harus dikembangkan menjadi dasarnya, dan perlunya manajemen strategis dalam melaksanakan Agenda 21 di masing-masing negara dan daerah di Indonesia.

Prasyarat pembangunan berkelanjutan di dunia termasuk Indonesia adalah diperlukannya otonomi nasional, di mana keputusan suatu negara atau daerah bebas dari campur tangan pihak luar, baik dari segi politik maupun ekonomi, dibutuhkan sikap “*good governance*” dari pihak pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. Di samping itu, dibutuhkan pula pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan guna menghilangkan kemiskinan, diperlukan stabilitas politik dan keamanan, penegakan sistem demokrasi yang baik dan benar, kesetaraan jender, serta kesempatan meningkatkan pendidikan. Kondisi global yang kondusif dalam melakukan pembangunan berkelanjutan sangat memerlukan kerjasama dan saling pengertian antar budaya bangsa, strategi koalisi global bagi pembangunan berkelanjutan, dan menerapkan prinsip tanggung jawab bersama.

7. Peranan Gereja dan Masyarakat

Aspek-aspek kunci dari pembangunan berkelanjutan meliputi pemberdayaan masyarakat (terutama lokal), swasembada dan keadilan sosial. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah menggeser paradigma berpikir dan bertindak dari pola tradisional yang didominasi pemerintah, para ahli dan sektor swasta dalam pengelolaan SDA dan

LH menuju pendekatan yang mengkombinasikan pengalaman, pengetahuan dan pemahaman berbagai kelompok dan lembaga masyarakat. Kata-kata kemitraan dan kelompok kepentingan (stakeholders) selalu digunakan untuk mencirikan sebuah pendekatan yang menyertakan baik kelompok kepentingan maupun publik secara luas dalam berbagai aktivitas pengelolaan SDA dan LH dimaksud.

Ada banyak alasan untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaan dimaksud. Melalui konsultasi dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang akan terkena kebijakan program atau proyek, dimungkinkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Merumuskan persoalan dengan lebih efektif
- Mendapatkan informasi dan pemahaman di luar jangkauan dunia ilmiah
- Merumuskan alternatif penyelesaian masalah yang secara sosial dapat diterima
- Membentuk perasaan memiliki terhadap rencana dan penyelesaian, sehingga memudahkan penerapan di lapangan.

Meskipun pendekatan partisipatif seperti ini memerlukan waktu yang lebih lama pada tahap-tahap awal perencanaan dan analisis, di dalam proses selanjutnya pendekatan ini akan mengurangi atau menghindari adanya pertentangan. Sementara itu, pendekatan ini juga tidak kalah mendapat tantangan yang cukup besar dari berbagai pihak yang secara tradisional selama ini diberikan dan/atau memiliki kewenangan untuk mengelola SDA dan LH berdasarkan konsep umum dan cetak biru yang kurang memperhatikan aspek heterogenitas dari permasalahan yang dihadapi.

Dengan berkembangnya kompleksitas, keterkaitan, dan ketidakpastian isu-isu, serta percepatan perubahan kondisi yang terjadi maka pola partisipasi atau pelibatan masyarakat dapat membantu mengatasi berbagai kendala di lapangan. Dengan model ini akan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat serta harapan dan kebutuhan mereka untuk ikut bertanggung jawab dalam melestarikan SDA dan LH. Dewasa ini sumberdaya alam dan lingkungan telah menjadi barang langka akibat tingkat ekstraksi yang berlebihan (*over-exploitation*) dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Kendati ia secara ekonomi dapat meningkatkan nilai jual, namun di sisi lain juga bisa

menimbulkan ancaman kerugian ekologi yang jauh lebih besar, seperti hilangnya lahan, langkanya air bersih, banjir, longsor, dan sebagainya. Kegagalan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ditengarai akibat adanya tiga kegagalan dasar dari komponen perangkat dan pelaku pengelolaan:

Pertama, akibat adanya kegagalan kebijakan (*lag of policy*) sebagai bagian dari kegagalan perangkat hukum yang tidak dapat menginternalisasi permasalahan lingkungan yang ada. Kegagalan dimaksud terindikasi terjadi akibat adanya kesalahan justifikasi para pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam menentukan kebijakan dengan ragam pasal-pasal yang berkaitan erat dengan keberadaan SDA dan LH. Padahal, dunia internasional saat ini selalu mengaitkan segenap aktivitas ekonomi dengan isu lingkungan hidup. Selain itu, proses penciptaan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan lingkungan ini dilakukan dengan minim sekali melibatkan partisipasi masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai komponen utama sasaran yang harus dilindungi. Contoh menarik adalah kebijakan penambangan pasir laut. Di satu sisi, kebijakan tersebut dibuat untuk membantu menciptakan peluang investasi terlebih pasarnya sudah jelas. Namun di sisi lain telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan dan sangat dirasakan langsung oleh nelayan dan pembudidaya ikan di sekitar kegiatan. Bahkan secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah lain. Misalnya terjadi gerusan (abrasi) pantai, karena karakteristik wilayah pesisir yang bersifat dinamis.

Kedua, adanya kegagalan masyarakat (*lag of community*) sebagai bagian dari kegagalan pelaku pengelolaan lokal akibat adanya beberapa persoalan mendasar yang menjadi keterbatasan masyarakat. Kegagalan ini terjadi akibat kurangnya kemampuan masyarakat untuk dapat menyelesaikan persoalan lingkungan secara sepihak, di samping kurangnya kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk memberikan 'tekanan' kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkewajiban mengelola dan melindungi lingkungan. Ketidak-berdayaan masyarakat tersebut semakin memperburuk posisi tawar mereka sebagai pengelola lokal dan pemanfaat SDA dan lingkungan. Misalnya, kegagalan masyarakat melakukan penanggulangan masalah pencemaran yang diakibatkan oleh kurang pedulinya berbagai pihak untuk melakukan

internalisasi eksternalitas dari kegiatan usahanya. Contoh konkret adalah banyaknya pabrik dan industri rumah tangga yang membuang limbah yang tidak diinternalisasi ke dalam sungai, yang kemudian akan terbuang ke laut, dsb.

Ketiga, adanya kegagalan pemerintah (*lag of government*) sebagai bagian kegagalan pelaku pengelolaan regional yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian dalam menanggapi persoalan lingkungan. Kegagalan ini terjadi akibat kurangnya tanggapan pemerintah untuk mencari alternatif pemecahan persoalan lingkungan yang dihadapi secara menyeluruh dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait. Dalam hal ini, seringkali pemerintah melakukan penanggulangan permasalahan lingkungan yang ada secara parsial dan kurang terkoordinasi. Dampaknya, proses penciptaan *co-existence* antar variabel lingkungan yang menuju keharmonisan dan keberlanjutan antar variabel menjadi terabaikan. Misalnya, solusi pembuatan tanggul penahan abrasi yang dilakukan di beberapa daerah Pantai Utara (Pantura) Jawa, secara jangka pendek mungkin dapat menanggulangi permasalahan yang ada, namun dalam jangka panjang persoalan lain yang mungkin sama atau juga mungkin lebih besar akan terjadi di daerah lain, karena karakteristik wilayah pesisir dan laut yang bersifat dinamis.

Peranan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal ini menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola lingkungan SDA dan LH. Dewasa ini, pengelolaan lingkungan secara terpadu disinyalir terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya bentuk-bentuk pengelolaan lain yang lebih aplikatif (*applicable*) dan adaptif (*acceptable*). Salah satu bentuk pengelolaan yang cukup berpeluang memberikan jaminan efektivitas dalam implementasinya adalah pengelolaan berbasis masyarakat (*community based management* = CBM).

Komunitas/masyarakat memiliki adat istiadat, nilai-nilai sosial maupun kebiasaan yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Perbedaan dalam hal-hal tersebut menyebabkan terdapatnya perbedaan pula dalam praktik-praktik pengelolaan lingkungan. Oleh

karena itu, proses pengelolaan lingkungan perlu memperhatikan masyarakat dan kebudayaannya, baik sebagai bagian dari subjek maupun objek pengelolaan tersebut. Dengan memperhatikan hal ini dan tentunya juga kondisi fisik dan alamiah dari lingkungan yang ada, proses pengelolannya diharapkan dapat menjadi lebih terpadu, lancar dan efektif, serta diterima oleh masyarakat setempat.

Proses pengelolaan lingkungan ada baiknya dilakukan dengan lebih memandang situasi dan kondisi lokal agar pendekatan pengelolannya dapat disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang akan dikelola. Pandangan ini tampaknya relevan untuk dilaksanakan di Indonesia dengan cara memperhatikan kondisi masyarakat dan kebudayaan serta unsur-unsur fisik masing-masing wilayah yang mungkin memiliki perbedaan disamping kesamaan. Dengan demikian, strategi pengelolaan pada masing-masing wilayah akan bervariasi sesuai dengan situasi setempat. Yang perlu diperhatikan adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh suatu masyarakat yang merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Konsep pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan memiliki beberapa aspek positif yaitu: (1) mampu mendorong timbulnya pemerataan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan; (2) mampu merefleksikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal yang spesifik; (3) mampu meningkatkan manfaat lokal bagi seluruh anggota masyarakat yang ada; (4) mampu meningkatkan efisiensi secara ekonomis maupun teknis; (5) responsif dan adaptif terhadap variasi kondisi sosial dan lingkungan lokal; (6) mampu menumbuhkan stabilitas dan komitmen; serta (7) masyarakat lokal termotivasi untuk mengelola secara berkelanjutan.

Setidak-tidaknya terdapat 9 kunci kesuksesan dari model *Co-Management*, (antara pemerintah atau swasta yang diberi kewenangan pengelolaan dengan masyarakat atau lembaga masyarakat yang dilibatkan), yaitu: (i) batas-batas wilayah yang jelas terdefinisi, (ii) kejelasan keanggotaan, (iii) keterikatan dalam kelompok, (iv) lebih besar manfaat dari biaya, (v) pengelolaan yang sederhana, (vi) legalisasi dari pengelolaan, (vii) kerjasama dan kepemimpinan dalam

masyarakat, (viii) desentralisasi dan pendelegasian wewenang, serta (ix) koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Dengan demikian maka upaya penanggulangan kerusakan SDA dan LH dapat menerapkan konsep partisipasi masyarakat mulai dari tahap persiapan, perencanaan, persiapan sosial, penyadaran masyarakat, analisis kebutuhan, pelatihan keterampilan dasar, hingga penyusunan rencana penanggulangan kerusakan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan. Di samping itu masih diperlukan upaya lain seperti pengembangan fasilitas sosial dan pendanaan.

Apa dan Bagaimana Gereja Berperan dalam Hal Ini?

Dalam keyakinan iman kepada Tuhan maka orang Kristen, baik selaku individu maupun dalam wujud persekutuan (Gereja) mengakui bahwa alam raya dan seluruh isinya adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk memanfaatkan dan mengelolanya secara bertanggung jawab dan lestari. Dengan demikian, segala akal budi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia tidak boleh disalah-gunakan dalam kaitan dengan pemanfaatan SDA dan LH itu sendiri. Gereja memahami tugas panggilan dan tanggung jawabnya untuk ikut berperan dalam pengelolaan dan pelestarian alam serta segala isinya yang telah disediakan Tuhan. Gereja juga memiliki tanggung jawab moral dalam rangka memperbaiki dan mencegah terjadinya kerusakan dan pengrusakan lingkungan sebagai akibat keserakahan, dsb. (baca Kejadian 1, Mazmur 104, dsb.).

Iman Kristen memahami kerusakan lingkungan hidup sebagai bagian dan wujud dari perilaku manusia yang tidak sejalan dengan tujuan Tuhan menciptakan alam semesta. Alkitab dengan jelas mengemukakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta untuk tujuan-tujuan luhur, termasuk bagi manusia. Alam semesta diciptakan baik untuk tujuan ekonomi (dipakai) maupun untuk tujuan ekumene (didiami/dihuni) oleh seluruh ciptaan secara bersama. Kedua istilah itu memang berasal dari akar kata yang sama yaitu *oikos* (rumah) yang berarti bumi atau dunia atau kosmos, tempat seluruh makhluk ciptaan Tuhan bernaung dan mendapatkan sumber hidupnya. Ketika manusia semakin banyak dan menguasai teknologi (mandat) yang didasarkan

pada Kejadian 1:28, maka manusia semakin dominan dan menekan lingkungan (ciptaan lain), sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan diakui sebagai akibat dari kesalahan dan ulah manusia (Robert P. Borrong, 2002).

Selanjutnya dikatakan bahwa bagi gereja-gereja di Indonesia, kepedulian kepada lingkungan hidup, selain dilihat sebagai misi gereja, juga dilihat sebagai peran serta gereja dalam pembangunan nasional. Jadi ada semacam usaha kontekstualisasi: “Tugas panggilan gereja-gereja berpartisipasi dalam pembangunan nasional dapat dilihat dari beberapa segi yang saling memperkuat dan saling memperkaya, antara lain dari segi tanggung jawab untuk mengelola, memelihara dan melestarikan ciptaan Allah” (Kej. 1:26-28; 2:15; Mzm. 8). Tugas itu dipahami pula sebagai salah satu cara mengamalkan Pancasila, khususnya sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang dilaksanakan dengan berusaha menghilangkan jurang antara yang kaya dan yang miskin dan melawan segala kecenderungan yang merusak lingkungan hidup.

Gereja sebagai persekutuan yang sekaligus suatu institusi mempunyai tanggung jawab untuk membebaskan umatnya dari penindasan, kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan termasuk pembebasan dari perilaku keserakahan yang merusak seluruh tatanan ciptaan Allah. Ada beberapa langkah operasional yang perlu dilakukan dalam tugas penata-layanan dalam gereja antara lain.

- Gereja harus menjadi sahabat bagi semua kalangan; mendengar dengan hati dan jiwa para penderita, korban, kaum tergesur dan mendoakan mereka; mengupayakan rasa senasib dan sepenanggungan serta keberpihakan kepada para penderita; mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membagi keprihatinan dan membangun nilai; menyediakan sarana atau kesempatan untuk temu persaudaraan yang mengatasi berbagai macam sekat sosial (*social gap*).
- Dalam kehadiran dan pelayanannya, Gereja ikut dalam pengembangan nilai-nilai budaya yang berhubungan dengan keadilan sosial bagi seluruh bangsa, solidaritas, kesejahteraan umum, cinta damai, kerelaan berkorban untuk membantu mereka yang berkesusahan karena tertimpa bencana.

- Gereja mau ikut serta dalam prakarsa-prakarsa pemberdayaan masyarakat akar rumput seperti gerakan pelestarian lingkungan, pertanian organik, pengembangan ekonomi kerakyatan misalnya melalui sistem dana bergulir, dsb.
- Gereja mendorong umat yang mampu dalam bidangnya untuk masuk ke dalam jejaring yang sudah terbangun, misalnya penggerak swadaya masyarakat, serta gerakan-gerakan masyarakat yang mencermati kinerja pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya.
- Gereja wajib memberi perhatian khusus pada pelayanan pendidikan, dalam skala yang lebih luas disertai peningkatan mutu lembaga dan peserta didiknya.
- Gereja menyadari bahwa usaha pembaharuan mesti mulai dari diri sendiri. Untuk mendukung gerakan pemberantasan KKN maupun kegiatan yang merusak SDA dan LH, Gereja harus memberi perhatian pada pembinaan administrasi dan disiplin yang bersih di dalam lembaga-lembaga gerejawi sendiri terlebih dulu.
- Sementara itu prakarsa-prakarsa lain harus ditemukan dalam pencarian bersama, sesuai dengan konteks masyarakat tempat Gereja hadir dan melayani. Usaha pencarian bersama itu bisa dilakukan dalam berbagai kategori pelayanan dan kesaksian.
- Gereja hidup dalam harapan, bagaimanapun rusaknya lingkungan hidup kita. Dengan kata lain, berharap berarti hidup berdasarkan janji Allah. Gereja hidup dalam pegangan antara janji dan pemenuhan janji.

Akhirnya, Gereja pada hakikatnya harus bisa mengantar umatnya untuk berdamai dengan alam dan lingkungannya untuk menjamin ekosistemnya berada dalam keseimbangan sebagaimana awal penciptaan terjadi. Iman Kristen yang mengakui karya penciptaan dan kerusakan yang diakibatkan oleh dosa manusia tidak boleh hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kesaksian. Gereja harus bisa membebaskan umatnya dari egoisme, materialisme, konsumerisme, dan hedonisme. Gereja harus ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan sumberdaya insani yang bertanggung jawab dan menjadi pelestari lingkungan hidup ciptaan Allah. Gereja harus

menjadi penggerak sekaligus pendamping umatnya dalam berbagai tindakan penghematan SDA dan LH dari berbagai kerusakan.

Daftar Pustaka

- Asdak, C. 2002. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Borrong, Robert P., 2002. Makalah pada sarasehan “Agama dan Konservasi”, diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), c.q. Pusat Penelitian Biologi. Bogor, 18 Desember 2002.
- DFID-World Bank, 2007. *Indonesia and Climate Change: Current Status and Policies*.
- Djadiningrat, Surna T., 2001. *Pemikiran Tantangan dan Permasalahan Lingkungan*. Penerbit Studio Tekno Ekonomi ITB-Bandung.
- Emil Salim, 2003. “Asia the Challenge of Sustainability”, paper discuss the outcome of WSSD, Johannesburg, South Africa, 2002, and its implication on Asia Development.
- Grant, W.E., E.K. Pederson, and S.I. Marin. 1997. *Ecology and Natural Resource Management. System Analysis and Simulation*. John Wiley & Sons. New York.
- Haryani, G.S. 2004. “Menuju pemanfaatan sumberdaya perairan darat berkesinambungan: permasalahan dan solusinya”, dalam *Peran Strategis Data dan Informasi Sumberdaya Perairan Darat dalam Pembangunan Nasional*. Seminar Nasional Limnologi. Bogor, 28 Juli 2004. LIPI.
- Kantor MNLH. 1997. *Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Kantor MNLH. 2006. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2005*. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri & Himawan Pambudi (ed.), 2006. *Ekologi, Manusia dan Kebudayaan*. Kumpulan Tulisan Terpilih Prof Dr. Koesnadi Hardjosoemantri, SH, ML dalam rangka 80 tahun pengabdian almarhum, FH-UGM, Kehati, STPN, HuMa, Laper, PSHK dan Kabare Magazine. Yogyakarta.
- Manik, K.E.S. 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Djambatan. Jakarta.

- Mitchel B., B. Setiawan dan D.H. Rahmi, 2007. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Gajah Mada University Press, Edisi. 3.
- Miller, G. Tyler. 2002. *Sustaining the Earth, An Integrated Approach*. 5th Edition. Brooks/Cole, Thomson Learning. Australia.
- Muhammadi, E. Aminullah, dan B. Soesilo. 2001. *Analisis Sistem Dinamis Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen*. UNJ Press. Jakarta.
- Perman, Roger *et al.* 2003. *Natural Resources and Environmental Economics*. Third Edition. Pearson Addison Wesley. New York.
- R. Reda dan Suyud, 2006. *Ekologi*. Penerbit Universitas Terbuka, 2006.
- Salam R., 2005. “Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Era Otonomi Daerah”, Makalah Kursus Penyusun AMDAL, PPSML-UI.
- Suparmoko, 2005. *Ekonomi Sumberdaya alam dan Lingkungan*. Edisi ke-5. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yuwono, A. 2005. “Kebijaksanaan Pembangunan Nasional Lingkungan Hidup”, Makalah Penataran/Kursus AMDAL di PPSML-UI.

10 Bidang Pluralisme

10a *Position Paper*

Ada tiga pengertian pokok dalam dunia agama-agama, yakni: *eksklusivisme, pluralisme, dan inklusivisme*. Eksklusivisme: Sikap eksklusif yang cenderung membagi dunia dalam oposisi biner (hitam - putih, benar - sesat, anak Allah - anak Setan). Inklusivisme: Kebenaran agama lain mulai diakui, tetapi sudah mengalami degradasi atau diturunkan derajat kebenarannya di bawah agama yang dianut seseorang. Artinya, meski agama lain benar, yang paling benar adalah agama. Pluralisme: Semua agama benar. Banyak jalan ke sorga. Pluralisme dalam definisi Rice ini identik dengan relativisme. Jadi, kebenaran pun direlatifkan.

Kini, selain eksklusivisme, rujukan Rice pun sudah mulai ditinggalkan. Definisi umum terhadap inklusivisme dan pluralisme pada masa kini adalah: Inklusivisme adalah sikap keterbukaan dan penghormatan terhadap umat beragama dan umat beragama lain tanpa berupaya menyamakan semua agama. Pluralisme adalah penghayatan terhadap keanekaragaman, diikuti dengan pertemuan aktif umat beragama yang berlainan, kesediaan membangun komunikasi yang rasional dan aktif untuk saling memahami kesamaan dan perbedaan, serta kesediaan bekerjasama dalam menangani masalah bersama seperti ketidakadilan, kemiskinan, pemanasan global, dan korupsi. Sikap ini tidak sama dengan Rice (relativisme). Definisi teranyar ini mensyaratkan adanya komitmen terhadap agamanya sendiri sekaligus dibarengi dengan penghormatan terhadap agama lain. Istilah Romo Magnis Suseno, pluralisme harus dilihat bukan sebagai gangguan terhadap iman pribadi, justru dengan pluralisme itu kita diajak untuk melihat ke dalam (sikap utuh-terbuka). Martin L. Sinaga (Dosen STT Jakarta) berkata, kita tak perlu was-was dengan isu pluralisme asal kita cukup sabar menguraikannya dan membaginya ke dalam dua wilayah hidup sehari-hari (sosial) dan wilayah iman (teologi).

Akhirnya pluralisme merupakan jalan bagi agama-agama untuk kembali pada panggilan dasarnya: memperjuangkan damai sejahtera (shalom) Allah sendiri, agar bumi ini menjadi *oikos*, yakni "tempat yang layak dihidupi bersama", inilah yang harus dijawab oleh agama-agama (gereja), demikian ditegaskan Trisno S. Sutanto (Direktur MADIA).²⁹

Problematika

Agama sebagai perekat sosial membentuk kelompok sosial yang menuntut loyalitas kelompok dalam sebuah masyarakat memunculkan persoalan tersendiri. Persoalan muncul ketika kelompok sosial itu harus hidup bersama dengan kelompok sosio-religius yang lain di dalam ikatan hidup bermasyarakat yang lebih luas, yaitu hidup berbangsa dan bernegara. Bagaimana menyelaraskan loyalitas kelompok pada suatu perangkat kebenaran yang dianggap mutlak dan berlaku universal dalam kelompok masyarakat yang lebih luas? Seberapa jauh bisa berkompromi? Apa yang bisa dikorbankan dan apa yang mutlak yang harus dipertahankan? Di dalam sebuah masyarakat majemuk, perekat kebersamaan ini merupakan tantangan dan harapan yang harus dibuat secara bersama. Dari identitas kelompok menjadi identitas bersama, tapi bukan sinkretisme. Hal inilah yang bisa diperjuangkan lewat dialog.

Namun inti persoalan yang dihadapi bukan hanya terletak pada substansi identitas tersebut. Ada persoalan lain yang dirasakan menyangkut belum tuntasnya masalah *power struggle* (pergulatan kekuasaan) antara 'negara' dan 'agama' yang dapat dikatakan telah menjadi persoalan klasik dalam sejarah manusia. Di samping itu, muncul gejala baru kolusi antara kekuatan politik dan kekuatan agama. Di situ sebuah rejim kekuasaan memanfaatkan kelompok agama untuk kepentingan politiknya; sebaliknya kelompok agama memanfaatkan kekuasaan politik untuk kepentingan kelompoknya. Dari sudut agama, gejala ini merugikan integritas agama yang bersangkutan: ia menelantarkan fungsi kritisnya yang merupakan salah satu fungsi sosialnya yang paling hakiki. Ia menyerahkan dirinya menjadi kepentingan politik. Sedangkan dari sudut pemerintahan, gejala ini

²⁹ Majalah dwi bulanan *dan* - membangun relasi & kesetaraan (tantangan pluralisme), Bandung, edisi perdana vol. 01/07), h. 16-21.

membuat ia tidak lagi mampu mengemban fungsinya yang paling utama: menjadi pemerintah yang adil bagi semua kelompok yang ada dalam masyarakat. Akibat yang lebih besar dan lebih jauh lagi ialah: ia akan membahayakan hidup bersama di dalam sebuah negara bangsa.

Berkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, ada inter-relasi antara "Tunggal" dan "Bhinneka" dalam Pancasila dan dalam Negara Pancasila, agama-agama dan multikultural masuk dalam bidang "Bhinneka". Jadi ada bagian yang perlu dilindungi dan dibantu oleh negara supaya ia bisa berkembang sesuai dengan cita-cita pemahamannya yang ia kembangkan sendiri sesuai ajaran dan ibadatnya, dalam tanggung jawab sebagai salah satu bagian di tengah masyarakat yang plural. Jika pemerintah atau negara sendiri mengurusnya maka itulah bukti atas pemahamannya yang totaliter yang mencabut hak-hak dan kebebasan kelompok-kelompok yang berada dan berinteraksi dalam masyarakat yang plural (bhinneka). Memang dari pihak agama yang senang dengan negara kesatuan, tetapi itulah mereka yang sendiri juga tonjolkan, yaitu faham negara kesatuan ala golongan fundamentalis yang tidak tahan pada kebhinnekaan.

Ketika pluralisme memasuki bidang agama, pluralisme menjadi sesuatu yang kompleks. Kita tahu dari sejarah misi dan kolonialisme bahwa Gereja telah mengalami saat-saat yang paling sulit dalam menangani pluralisme agama. Ini adalah salah satu alasan dari munculnya kembali semangat penginjilan yang berapi-api untuk memenangkan seluruh dunia bagi Kristus sebelum akhir abad ini. Apapun metode yang kita gunakan, adalah suatu kepastian bahwa dunia, terutama Asia dan Indonesia, akan tinggal tetap, plural dalam konteks agama. Gereja bukan hanya menemukan tempatnya di dalam suatu konteks yang multi-agama, melainkan juga harus mengembangkan ideologi-ideologi dan kepercayaan-kepercayaan yang baru secara radikal. Kita akan harus merekonstruksi suatu paradigma baru dari misi.

Sayangnya pergerakan oikumenis mengalami kesulitan selama bertahun-tahun untuk mencapai titik temu dengan pluralisme agama. Selama ini ada banyak terobosan, namun banyak juga kemunduran yang terjadi. Pengaruh dari pluralisme agama belum membuat suatu efek yang menentukan bagi pergerakan ekumenis dan dalam

pengertian kita akan misi. Salah satu alasan utama dari hal ini adalah keterkungkungan kita dalam rumusan teologis yang pernah berhasil dalam konteks-konteks lain, yang kemudian diaplikasikan tanpa mempertimbangkan relevansinya dengan agama-agama.

Refleksi

Dalam perjalanan ziarah kita bersama (pluralisme), masalah hidup dan mati bagi penganut semua kepercayaan sangat menentukan, namun kita tidak dapat melakukan pendekatan terhadap subjek ini dengan suatu mentalitas untuk berperang, karena hal itu akan menyebabkan konflik dan kekerasan. Hal yang perlu dilakukan adalah bahwa kita perlu membaca, berfikir, dan menulis-ulang doktrin-doktrin Kristen, Exegesis dan Misiologi Alkitabiah. Hal ini akan merupakan suatu kontribusi yang berarti bagi pergerakan oikumenis, baik intern gereja maupun di luar gereja.

Beberapa agenda yang perlu terus diupayakan: **Pertama**, mendesak terus menerus, baik melalui gerakan politik maupun penggalangan opini publik, agar pemerintah mengambil sikap tegas dalam menjamin hak-hak kebebasan berkeyakinan, pembelaan pelaksanaan pluralisme, pengembalian Negara hukum, menstabilkan demokrasi dan penegakan keadilan sosial yang merupakan hak paling asasi setiap orang. Pemerintahan SBY-Kalla harus mengeluarkan pernyataan sikap yang tegas dan arah yang jelas dalam memberi jaminan hukum bagi kebebasan berkeyakinan setiap warga negara. **Kedua**, mendesak terus menerus agar aparat keamanan mengambil tindakan tegas terhadap aksi-aksi sekelompok kalangan yang mengambil cara-cara kekerasan, baik fisik maupun simbolik, dalam menyikapi perbedaan pandangan maupun keyakinan. Tindakan-tindakan seperti itu, baik penyerbuan, pemaksaan pendapat, ancaman, teror dan intimidasi, sama sekali tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut pandang keagamaan maupun praktik kehidupan demokrasi yang beradab. **Ketiga**, mengambil hak inisiatif, mengajukan dan mendorong proses legislasi produk hukum yang mengikat untuk menjamin kebebasan berkeyakinan secara konkret, semisal RUU Kebebasan Berkeyakinan, atau RUU Anti Diskriminasi.

Erick Johnson Baru

10b

Gerakan Oikoumene dalam Dinamika Pluralisme Agama di dalam Negara Republik Indonesia

Elga J. Sarapung³⁰

A. Pengantar

Ada dua tugas panggilan Gereja yang dirumuskan dalam Kerangka Acuan KGM ini: 1) Gereja dipanggil untuk mengembangkan hubungan positif, kreatif, kritis, realistik dan transformatif dengan pemerintah dan semua pihak di dalam masyarakat; 2) Gereja dipanggil untuk mengambil bagian dalam mewujudkan perdamaian, keadilan (bagi seluruh rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia) dan keutuhan ciptaan di Indonesia.

Kedua tugas panggilan tersebut tidak bisa tidak dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia, karena selain sebagai pertanggungjawaban iman kepada Tuhan dan sesama manusia, di mana gereja-gereja hadir; juga pertanggungjawaban sosial gereja-gereja terhadap kehidupan yang berlangsung. Tanpa melakukan tugas-tugas tersebut pada dasarnya “Gereja mati”.

Tugas-tugas tersebut penting sekali untuk dilakukan gereja-gereja, karena kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia sekarang ini semakin memprihatinkan. Tidak saja berkaitan dengan soal kehidupan beragama dan berkeyakinan yang semakin tidak aman, tetapi juga kehidupan riil masyarakat yang mengalami ketidakadilan hukum, sosial, ekonomi, kekerasan, lingkungan hidup yang semakin parah, dan lain sebagainya. Kenyataan yang tidak semata-mata merupakan kesalahan dari pemerintah, tetapi juga ada andil dari Gereja sebagai salah satu bagian dari komunitas masyarakat, melalui agama-agama.

Ternyata gereja-gereja belum mampu menjalankan fungsi dengan baik dan benar (secara maksimal). Gereja-gereja belum menjadi “pembebas”, tetapi “pengikat”. Itu pun sebatas ritual dan kepentingan kelembagaan, bukan transformatif, di mana nilai-nilai kekristenan menjadi dasar dari setiap motivasi dan gerakan, aktivitas Gereja (dalam hal ini warga gereja, pemimpin, tokoh dan lembaga) untuk berkiprah di masyarakat. Pertanyaannya, bila hal itu benar, mengapa? Apa yang menyebabkan gereja-gereja dan gerakan Oikoumene di Indonesia (yang usianya sudah 58 tahun, sejak 1950) belum berhasil menjalankan fungsi “pembebas”?

Secara khusus, berkaitan dengan pluralisme agama, disinyalir bahwa gereja-gereja, melalui gerakan Oikoumene, belum berhasil mencapai titik temu dengan pluralisme agama di Indonesia. Karena itu, sikap gereja-gereja, selain ambivalen juga dalam banyak hal kaku. Kalaupun ada lebih banyak pada waktu-waktu tertentu saja, belum mencapai tingkat yang benar-benar sebagai “ciri khas” pokok pelayanan dan kesaksian Gereja atas dasar “keterpanggilan” yang disebutkan di atas. Dengan begitu, kita tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Gereja ataupun orang-orang di dalamnya sama sekali belum ada yang serius dalam memberi perhatian terhadap soal-soal berkaitan dengan hubungan antar-iman. Tentu ada. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana supaya perhatian semacam itu terimplementasikan dalam kehidupan nyata gereja-gereja, mulai dari paradigma berpikir, pemahaman tentang visi dan misi, sampai pada praktik melalui berbagai aktivitas Gereja?

B. Konteks Berubah dan Berkembang

Pada awal abad ke-21 ini muncul berbagai persoalan dalam masyarakat, baik yang dikarenakan oleh perubahan dan perkembangan yang terjadi di tingkat lokal dan nasional maupun karena perubahan dan perkembangan di tingkat global. Semuanya benar-benar meminta perhatian dan aksi nyata yang lebih sungguh-sungguh. Karena, bila dibandingkan dengan persoalan-persoalan masa lalu, yang ada sekarang ini tampil dalam bentuk dan format yang lebih besar, dengan ekspresi dan implikasi yang lebih memprihatinkan, karena menyentuh berbagai aspek kehidupan, individu dan kelompok di dalam

³⁰ Direktur Institut Dialog Antar-Iman di Indonesia (Institut DIAN/Interfidei), Yogyakarta.

masyarakat secara substansial, menyangkut hal-hal yang paling hakiki dalam kehidupan manusia, kehidupan masyarakat dan bangsa.

Ada hal-hal yang berkaitan dengan persoalan teologis, etis, moral, tetapi ada juga yang berkaitan dengan soal paling asasi, yaitu hak untuk hidup dan berkembang, dan hak untuk mendapatkan keadilan serta kebenaran.

Persoalan-persoalan di atas menuntut kita, sebagai Gereja, untuk benar-benar secara serius memikirkan pola baru dalam kehidupan bergereja, berjemaat, beroikoumene. Kita tidak bisa menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi itu dengan mengandalkan pola pikir lama, dengan cara dan bentuk lama yang samasekali tidak relevan lagi. Dan yang lebih utama adalah: bagaimana supaya pemikiran dan cara yang baru itu mampu dijalankan dengan keberanian yang tanpa pamrih, sebagai Gereja, sebagai orang Kristen, demi keadilan, kebenaran, kesejahteraan hidup manusia, dan keutuhan ciptaan?

Perjalanan Gerakan Oikoumene gereja-gereja di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Berkaitan dengan presentasi ini, saya mengkhususkan diri pada dinamika kehidupan agama-agama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Artinya, bila saya mengatakan agama-agama, maksudnya adalah "pluralisme agama"; dan itu kemudian berarti intra salah satu agama, antar agama-agama serta keyakinan, serta hubungan antara agama dan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang dapat dikatakan sebagai konteks, di mana perubahan dan perkembangan itu berwujud. Konteks, yang tepat di pusat dan di sekelilingnya gereja-gereja di Indonesia dengan Gerakan Oikoumene-nya meniti perjalanan.³¹

³¹ Th. Sumartana memberi tiga konteks : sosial-politik, hubungan antar-agama dan realitas kemiskinan yang dihadapi Gerakan Oikoumene pada masa itu. J.M. Pattiasina & Weinata Sairin (peny.), *Gerakan Oikoumene - Tegar Mekar di Bumi Pancasila*. Buku Peringatan 40 Tahun PGI (Jakarta: BPK-GM, 1990), h. 191.

Pertama, kebangkitan kelompok-kelompok aliran di dalam salah satu agama. Dalam hampir satu dekade terakhir ini, baik didalam agama Islam maupun di dalam agama Kristen (Protestan dan Katolik), bahkan di dalam lingkungan agama Hindu dan Buddha, terjadi perkembangan kelompok-kelompok aliran. Perkembangan ini belum tentu membuktikan bahwa umat di masing-masing agama yang bersangkutan bertambah, tetapi yang jelas tampil dalam bentuk "kelompok" tertentu. Ada yang "kanan", ada yang "kiri"; "liberal" dan "radikal", "fundamentalis" dan "moderat". Ada yang memiliki visi dan misi "untuk memiliki", menambah jumlah anggota (beberapa kelompok Kristen); ada yang ingin "menjadikan" perubahan pada negara menjadi "negara agama" (beberapa kelompok tertentu dalam Islam). Ada yang lebih mementingkan kehidupan spiritualitas, sekalipun dengan pendekatan berbeda (misalnya dalam agama Hindu dan Buddha).

Kedua, konteks kebangkitan 'indigenous religions' (agama atau keyakinan lokal). Di sebagian besar daerah-daerah di Indonesia, yang disebut agama-agama atau keyakinan lokal semakin muncul ke permukaan. Hal itu selama ini tidak dapat mereka lakukan karena berhadapan dengan berbagai peraturan diskriminatif dari negara, termasuk perlakuan dari lembaga-lembaga keagamaan. Sekalipun sekarang juga belum begitu bebas, namun sudah cukup memberi peluang.

Ketiga, konteks sosial-kemasyarakatan. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak rakyat miskin, ketidak-adilan hukum, ketidak-adilan politik, pelanggaran HAM, korupsi, persoalan pendidikan, HIV/AIDS, *trafficking*, dan lain sebagainya. Semuanya menyatu dalam kehidupan sehari-hari, yang dialami warga masyarakat luas di berbagai daerah di Indonesia, di mana gereja-gereja dan semua agama-agama hadir, berkomunitas, dan menjalankan aktivitasnya.

Keempat, konteks negara dan politik. Dalam satu dasawarsa terakhir ini, problem hubungan segitiga antara "agama - politik - negara" semakin mencuat. Bukan saja karena dinamika hubungan yang tidak jelas atau saling menggunakan demi kepentingan masing-masing, satu terhadap yang lain, tetapi juga dari keadaan seperti itu sudah banyak warga masyarakat yang menjadi korban. Mereka mengalami

diskriminasi politik dalam hidup beragama dan berkeyakinan; agama-agama dan umat beragama menjadi terusik kehidupannya karena diperalat untuk berkonflik. Nilai-nilai dalam agama-agama dimanfaatkan untuk melakukan tindak kekerasan. Semua ini, langsung atau tidak langsung mendapat legitimasi dari negara. Departemen Agama, Lembaga-Lembaga Keagamaan dan berbagai Lembaga Kenegaraan yang dibentuk oleh Negara untuk melegalkan berbagai kebijakan, semua itu ternyata tidak memperhitungkan dan menghargai kenyataan kebhinekaan di masyarakat.

Kelima, konteks perubahan global. Kenyataan memperlihatkan bahwa terjadi perubahan dalam dinamika pola kehidupan di masyarakat. Interaksi dan komunikasi antar-warga, antar-komunitas, antar-sukubangsa mengalami banyak perkembangan, antara lain disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan dunia media.

C. Belajar dari Masing-masing Konteks

1. *Kebangkitan Kelompok-kelompok Aliran di dalam Masing-masing Agama*

Di Indonesia ada tiga kelompok besar gereja-gereja Protestan. Pertama, yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, dengan jumlah gereja anggota 87; Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili di Indonesia (PGLII), dengan jumlah anggota mendekati 200; Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta di Indonesia (PGPI), dengan jumlah anggota gereja mendekati 100. Di samping itu ada kelompok-kelompok kecil, seperti Persekutuan Gereja-gereja Mandiri Indonesia (PGMI), Bala Keselamatan, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Baptis, Orthodox, dan lain sebagainya.

Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan global yang berlangsung di masyarakat, sebagaimana yang disinyalir oleh David Martin³², sebagai berikut: Pertobatan merupakan satu aspek dari suatu situasi multikultur yang tidak tergantung pada perencanaan apa pun dari satu denominasi, aliran atau budaya

³² David Martin, "The Global Expansion of Radical Primitive Christianity", dalam *The Princeton Seminary Bulletin*, Vol. XXVI, No. 1, 2005, h. 112.

tertentu. Semua perubahan adalah bagian dari budaya global yang plural dan penuh kompetensi, yang dicampur dengan situasi multikultural, simultan dan diaspora.

Pengaruh perubahan secara global ini, terutama datang dari Amerika.³³ Ada kecenderungan banyak orang Indonesia (dari latar belakang etnis atau agama apa pun) tertarik pada budaya Amerika. Selain faktor bahasa Inggris yang sekarang menjadi trend dalam pergaulan modern, juga faktor teknologi. Ini cukup memberikan ruang kepada warga gereja, terutama kepada kelompok-kelompok Injili dan Pentakostal untuk berkembang. Apalagi dari segi teologi, kelompok-kelompok ini cukup mampu mempertahankan tradisi protestantisme yang fundamentalis, tetapi juga warna kapitalis dan modernis dalam pola kerja dan administrasi-keuangan mereka, yang mampu mereka kembangkan sambil tetap dapat mempertahankan apa yang mereka sebut sebagai visi dan misi mereka sesuai dengan dasar teologi mereka, "mengabarkan Injil Yesus Kristus ke dalam dunia".

Secara geografis, dapat dilihat bahwa gerakan Kharismatik dan gerakan Injili lebih banyak berhasil di kota-kota besar, di daerah urban, pada kelompok masyarakat kelas menengah ke atas, di kampus-kampus. Sementara kelompok Pentakostal lebih banyak di desa-desa.

Lepas dari berbagai perbedaan teologi, aktivitas, visi dan misi masing-masing, tetapi konkretnya, semua kelompok yang disebutkan di atas anggotanya adalah warga negara Indonesia, hidup dan berkembang di Indonesia, dan menghadapi konteks sosial-kemasyarakatan serta politik yang sama.

Pertanyaannya adalah: apakah dengan berbagai perbedaan yang ada dan kesamaan Injil yang perlu diberitakan, semua kelompok Kristen Protestan dapat melakukan aksi nyata dalam membela hak-hak minoritas? Membela dan memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan? Membela hak-hak kelompok keagamaan dan keyakinan yang terdiskriminasi? Melakukan aksi nyata untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran terhadap mereka yang menjadi korban akibat

³³ Rijnardus A. van Kooij & Yam'ah Tsalatsa A., *Bermain dengan Api - Relasi antara Gereja-gereja Mainstream dan Kalangan Kharismatik-Pentakostal* (Yogyakarta, 2007), h.148.

pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara; mereka yang korban karena tindakan kekerasan yang dilegalkan atas nama agama?

2. Kebangkitan Kelompok-kelompok 'indigineous religions' (Agama atau Keyakinan Lokal)

Tak dapat disangkal bahwa dalam sejarah agama-agama di Indonesia, terutama agama Islam dan Kristen (Katolik dan Protestan) mempunyai andil yang sangat kuat dan jelas dalam pembasmian kelompok-kelompok *indigenous religions*. Di berbagai lapangan misi di zaman kolonial, hampir seluruhnya apa yang disebut agama atau keyakinan lokal ditiadakan, karena - selain dianggap kafir atau dicap sebagai anismis - juga secara "politis" merugikan perkembangan gereja. Tindakan ini kemudian dilakukan juga oleh negara, atas dasar bahwa bentuk-bentuk keyakinan seperti itu bukan tergolong pada agama, bukan pula kepercayaan, tetapi semata-mata hanya kebudayaan. Karena itu, masuk dalam kategori budaya dan berada dalam payung Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Departemen Agama. Kelompok-kelompok itu di beberapa daerah dipaksakan bergabung dengan agama-agama tertentu dari kelima agama (masa itu). Misalnya, Parmalim di Sumatera Utara dan Kaharingan di Kalimantan, harus bergabung ke dalam agama Hindu, bila tidak ingin menjadi Kristen atau Islam. Dengan risiko, bila tidak bergabung, segala urusan administrasi kependudukan akan tidak terlayani. Begitu juga komunitas Sedhulur Sikep di Jawa, dlsb.

Pertanyaannya adalah: bagaimana gereja-gereja bersama agama-agama lain menyikapi kenyataan ini? Apa tindakan oikoumenis gereja-gereja untuk melakukan pembelaan terhadap kelompok-kelompok seperti ini?

3. Konteks Sosial-Kemasyarakatan

Agama bukan agama bila tidak peduli pada soal kemanusiaan, pada soal kehidupan. Apa yang terjadi dan dialami masyarakat Indonesia sekarang ini, adalah berbagai persoalan yang sungguh-sungguh sudah menyentuh "urat nadi" masing-masing agama, yaitu kemanusiaan, yang adalah kehidupan itu sendiri. Persoalannya adalah: sampai seberapa seriuskah gereja-gereja dan semua agama-agama peduli

terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan? Seberapa seriuskah gereja-gereja dan semua agama peduli terhadap persoalan kemasyarakatan?

Persoalan kita selama ini adalah, gereja-gereja semakin terjebak pada soal-soal ritualitas-simbolistik; pada soal-soal yang lebih terkait dengan institusi, tetapi bukan pada soal-soal yang substantif, yang sensitif terhadap kenyataan sosial di masyarakat. Injil yang diberitakan dalam beberapa kasus tertentu lebih terkait dengan kepentingan kekuasaan, ketimbang bagi kepentingan rakyat. Pola berpikir menambah kuantitas masih mendominasi paradigma Gereja, bukan memperbaiki kualitas pelayanan dan kesaksian agar benar-benar relevan, bermakna dan memberi kehidupan yang adil, damai, sejahtera bagi warga masyarakat.

4. Berbagai konflik

Sejak kurang lebih lima tahun di masa akhir abad ke-20, konflik horizontal antar warga yang kemudian mengatasnamakan agama atau paling tidak membawa nama agama-agama, muncul di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai konflik ini tidak dilakukan oleh masyarakat, karena kepentingan warga masyarakat, melainkan karena kepentingan para elite politik, di tingkat lokal dan terutama pusat, dalam hal ini "Jakarta". Para elite politik ini tidak "bermain" sendirian, melainkan berkolusi dan berkoneksi dengan sejumlah aparat dan pejabat militer, penguasa ekonomi, yang kemudian untuk beberapa kasus tertentu berhasil juga menjebak sejumlah elite agama. Sehingga secara komprehensif arena konflik dan kekacauan dalam masyarakat diperankan oleh keempat kelompok elite tersebut: politik, militer, pengusaha, dan agama. Sementara warga masyarakat hanyalah sebagai "alat" yang berhasil dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan yang dimaksud. Masyarakat menjadi korban. Agama-agama terusik, selain berhasil dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan para elite tersebut di atas, juga sekaligus menjadi korban berbagai perilaku kekerasan yang menggunakan agama sebagai kekuatan legitimasi.

Pada waktu yang sama, hak-hak warga negara dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan dan dalam melakukan kegiatan keagamaan dan keyakinannya, dalam banyak kasus mengalami ketidakamanan dan ketidaknyamanan luar biasa, karena tidak ada perlindungan dan pembelaan dari negara, sebagaimana yang dijamin

oleh UUD 1945 dan berbagai peraturan negara. Politik diskriminasi terhadap kehidupan agama-agama dan berbagai keyakinan di Indonesia masih terjadi, yang memberi implikasi buruk kepada hak-hak sipil warga negara.

Selain itu, masih terjadi pembiaran terhadap tindak-tanduk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok agama tertentu terhadap kelompok lain, baik di dalam kelompoknya sendiri maupun kelompok lain atas nama salah satu agama. Secara konkret, hal ini dilakukan oleh kelompok garis keras Islam seperti FPI, HTI, dan MMI terhadap Ahmadiyah, Sapta Dharma, dan beberapa Gereja Kristen (Protestan dan Katolik), serta kelompok lainnya di berbagai daerah.

5. Konteks perubahan global

Tidak bisa dihindari bahwa perubahan global yang terjadi sangat mempengaruhi kehidupan bergereja atau berjemaat. Terutama yang diakibatkan oleh media elektronik dengan teknologi yang semakin canggih dan luar biasa. Demikian juga melalui media cetak. Bukan hanya soal "budaya" sekuler yang dipengaruhi, melainkan juga soal kehidupan "budaya beragama". Pola dan bentuk beragama yang diperoleh dari pengaruh media elektronik dan cetak cukup mampu mengubah paradigma keagamaan dan beragama, baik perorangan maupun komunitas. Karena di sana terjadi juga proses perubahan pemikiran tentang manusia dan sesama; tentang kehidupan dan etika; tentang kasih-sayang dan kesetiaan; sukses dan kegagalan; kemiskinan dan kebodohan; rakyat jelata dan menjadi kaya. Semua menyatu dalam perubahan tersebut.

Pertanyaannya adalah: sudah sampai sejauh manakah gereja-gereja mempelajari perubahan yang diakibatkan oleh proses globalisasi ini? Apa perubahan yang perlu dilakukan oleh gereja-gereja dalam hal paradigma bergereja, beroikoumene dan bermasyarakat?

D. Beberapa Usul Konkret

1. Bidang Pendidikan. Bukan saja pendidikan teologi, tetapi dalam pendidikan umum, formal dan informal, perlu dikembangkan kurikulum pendidikan yang tidak saja memperkaya peserta

menjadi orang-orang yang banyak pengetahuan, tetapi juga yang terampil dan memiliki pengalaman interaksi konkret dalam dinamika pluralisme agama dan keyakinan dengan persoalan-persoalan riil di masyarakat.

2. Model-model pendidikan motivator, dengan mempersiapkan orang-orang yang mampu menjadi inisiator serta penggerak di lapangan untuk berbagai urusan berkaitan dengan persoalan-persoalan seperti yang disebutkan di atas.
3. Solidaritas gereja-gereja, baik terhadap sesama kelompok Kristen maupun terhadap kelompok lainnya dalam masyarakat harus jelas dan dikembangkan, baik untuk urusan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa, soal diskriminasi, soal politisasi agama maupun untuk soal-soal kemanusiaan.
4. Gereja-gereja perlu mengembangkan studi-studi "Gereja dan Masyarakat", mengaktifkan kembali pusat pendidikan seperti Akademi Leimena, atau bila perlu membangun sesuatu yang baru sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai tempat.
5. Gereja-gereja tetap perlu memperjuangkan upaya-upaya yang sudah dan sedang dilakukan untuk hal-hal berkait dengan HAM, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dlsb.

Satu pertanyaan lain kepada kita semua adalah: apakah seluruh konteks persoalan yang disebutkan di atas dirasakan oleh semua Gereja di mana pun juga di Indonesia sebagai konteks persoalan bersama? Ini penting, selain untuk membangun solidaritas, juga untuk mencapai Gerakan Oikoumene yang menyeluruh dari Indonesia, di Indonesia, bagi Indonesia.

10c

Kekerasan dalam Beragama

Rm Benny Susetyo Pr

PROBLEM kehidupan beragama di Indonesia masih cukup banyak dan setiap saat muncul problem yang berbeda-beda. Untuk menjalankan kehidupan beragama secara bersama-sama antar pemeluk dengan semangat toleransi tinggi masih menghadapi tantangan yang tidak kecil. Walaupun wacana pluralisme dan toleransi antar agama ini sudah sering dikemukakan dalam berbagai wacana publik, namun praktiknya tidaklah semudah yang dipikirkan dan dibicarakan. Walaupun sudah terdapat kesadaran bahwa bangsa ini dibangun bukan atas dasar agama, melainkan oleh kekuatan bersama, namun pandangan atas 'agamaku', 'keyakinanku' justru sering menjadi dasar dari berbagai perilaku sehari-hari yang bermuatan kekerasan. Sekalipun kita menyadari pentingnya slogan Bhinneka Tunggal Ika, namun praktik di lapangan tak seindah dan semudah pengucapan slogan itu. Masih banyak persoalan keagamaan di Indonesia yang menghantui dan menghambat terwujudnya solidaritas, soliditas dan toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Kekerasan dalam Beragama

Salah satu persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia adalah kebebasan menjalankan ibadah dan keyakinan. Pada 2007 adalah saat di mana pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi sangat nampak di permukaan. Serangkaian perusakan, kekerasan, dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap "sesat" dan kelompok agama lain terjadi dan dipertontonkan kepada publik. Sepanjang Januari-November, Setara Institute mencatat 135 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan. Dari 135 peristiwa yang terjadi, tercatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori.

Jumlah terbanyak kelompok (korban) yang mengalami pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah al qiyadah al Islamiyah. Aliran ini ditimpa 68 kasus pelanggaran, kekerasan, penangkapan dan penahanan. Kelompok berikutnya adalah jemaah Kristen/Katholik yang mengalami 28 pelanggaran, disusul Ahmadiyah yang ditimpa 21 tindakan pelanggaran.

Dari pelaku 185 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah negara. Sejumlah 92 pelanggaran dilakukan oleh Negara (*commission*) dalam bentuk pembatasan, penangkapan, penahanan, dan vonis atas mereka yang dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan langsung ini adalah dukungan dan pembenaran otoritas negara atas penyesatan terhadap kelompok-kelompok keagamaan tertentu. Sedangkan 93 tindakan pelanggaran lainnya terjadi karena negara melakukan pembiaran (*ommision*) terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga atau kelompok.

Berbagai laporan yang dikeluarkan menunjukkan eskalasi kekerasan berbasis agama yang terjadi sepanjang 2007 mengandung destruksi yang sangat serius dan mengkhawatirkan.

Bentuk Kegagalan Negara

Penyerahan otoritas negara kepada organisasi keagamaan korporatis negara dalam menilai sebuah ajaran agama dan kepercayaan, merupakan bentuk ketidakmampuan negara untuk berdiri di atas hukum dan bersikap netral atas setiap agama dan keyakinan. Aparat hukum bertindak di atas dan berdasarkan pada fatwa agama tertentu dan penghakiman massa. Padahal institusi penegak hukum adalah institusi negara yang seharusnya bekerja dan bertindak berdasarkan konstitusi dan undang-undang.

Dapat dilihat di sini negara telah gagal mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara bahkan telah bertindak sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat tindakannya yang melarang aliran keagamaan dan keyakinan dan membiarkan

warga/organisasi keagamaan melakukan persekusi massal atas kelompok-kelompok keagamaan dan keyakinan.

Di sini kita melihat banyak kontradiksi-kontradiksi. Dalam konstitusi yang lebih tinggi, kebebasan umat beragama dan melakukan ibadah dijamin, tapi dalam peraturan di bawahnya terdapat kecenderungan menghambat umat untuk beribadah. Misalnya dalam konteks rumah ibadah. Yang menjadi persoalan utama bukanlah soal bagaimana suatu rumah ibadah diserbu bahkan dibakar oleh sekelompok orang. Itu sekedar eksekusi saja. Jauh lebih penting dipikirkan adalah bagaimana peran pemerintah menjadi mediator, perumus dan pelaksana kebijakan-kebijakan yang mengatur pendirian rumah ibadah. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menjadi dasar aturan itu terkesan tidak adil. Dengan demikian pelaksanaannya melahirkan dampak umat yang tidak dewasa memandang umat lain. Tidaklah seharusnya umat beragama yang serta merta dipersalahkan dalam kasus ini, melainkan ketidakmampuan pemerintah untuk melihat pluralitas dengan kacamata lebih adil dan menguntungkan bagi semua.

Negara gagal memberikan perlindungan dan kesempatan yang adil bagi semua pemeluk agama untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Jika demikian, lalu Pancasila untuk apa? Apa untuk gagah-gagahan saja? Untuk apa para *founding father* merumuskan falsafah bangsa yang demikian berharga dan terhormat itu jika dalam perilaku sehari-hari kita tidak bisa mempraktikkannya dengan sepenuh hati?

Membuka Ruang Dialog

Walaupun kehidupan sosial politik kita sudah mengalami kebebasan, nyatanya itu belum berimplikasi pada kebebasan asasi warga untuk beribadat. Beribadat, seperti kata Romo Magnis Suseno, adalah hak warga paling asasi, dan hanya rezim komunis yang melarangnya. Rezim seperti apakah kita ini ketika membiarkan kekerasan dalam beragama tanpa adanya ruang dialog untuk membicarakan ulang secara lebih manusiawi? Pemerintah berkewajiban untuk menjaga, melestarikan dan meningkatkan kesadaran dan kedewasaan umat

terutama dalam pandangannya terhadap umat dan keyakinan beragama yang dianggap "lain". Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pencerahan dan pendewasaan pemikiran umat akan toleransi dan pluralisme. Itulah yang dimaui Pancasila. Dengan begitu kebijakan yang berpeluang untuk menumbuhkan antipati terhadap saudara sebangsanya yang lain perlu didudukkan ulang untuk dibahas dan diganti dengan kebijakan yang lebih adil dan mencerahkan. Buat apa mempertahankan sesuatu yang dianggap tidak adil? Pemerintah harus mendengar dan benar-benar mendengar tuntutan seperti ini. Kekerasan telah menjadi model yang sering dibungkus dengan ornamen keagamaan dan kesukuan. Inilah yang membuat wajah kekerasan semakin hari semakin subur di bumi pertiwi ini. Meski kita seharusnya merajut nilai persaudaraan yang secara jelas mengacu pada Pancasila, tapi kian hari Pancasila tidak lagi menjadi tujuan hidup bersama. Pancasila yang seharusnya menjadi perekat kehidupan bangsa tampak semakin hari semakin terkikis oleh kefasikan keagamaan, kedaerahan dan kesukuan. Pancasila sering diucapkan tapi sama sekali tak dipahami maknanya. Pancasila tidak dijadikan pembatikan nilai kehidupan bersama untuk mewujudkan bangsa yang beradab. Peradaban bangsa yang diukur dengan komitmen warga untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan tidak pernah berhasil.

Tampak bangsa ini sangat mengagungkan formalisme keagamaan dan persatuan yang dihayati secara "fasis". Inilah yang membuat bangsa ini gagal melompat menjadi bangsa yang menekankan rasionalitas karena kekerasan melekat menjadi kultur dalam diri kita sebagai bangsa. Sampai sejauh ini dapat dilihat bahwa Komisi III DPR RI belum bersikap dan bertindak sama sekali atas setiap peristiwa kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Padahal, berbagai pernyataan, sikap, dan tindakan beberapa institusi mitra DPR itu mengandung muatan destruktif, membiarkan kekerasan, dan turut serta melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia .

Adalah fakta, bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak konstitusional warga yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, pengingkaran terhadap pemenuhan hak-hak tersebut tidak semata melanggar HAM tapi juga melanggar konstitusi.

10d

Membuka Hati dan Diri

Gus Nurul Arifin

Saya teratarik dengan bahasanya mbak Elga yang menekankan solidaritas atau saling mengasihi dalam pluralisme. Sesungguhnya kalau mengaku dalam terang tetapi tidak mengasihi, kita dalam gelap. Pluralisme bukanlah soal baju, tetapi kepedulian sosial. Mari kita telanjangi diri kita, artinya terbuka kepada semua orang. Seperti Daud dalam kitab Mazmur yang menelanjangi dirinya di hadapan Tuhan. Intisarinya adalah keikhlasan. Jangan sampai muncul roh-roh diri sendiri. Dan juga jangan hanya teori, tetapi yang perlu adalah praktik.

Tentang Israel, yang tadi sempat disinggung dalam Penelaahan Alkitab oleh Pdt. Eben, perlu disikapi hati-hati. Ada konsepsi besar, yang kami menyebutnya bukan Israel, tetapi Yahudi, masuk menghancurkan negeri-negeri yang disebut *goyim-goyim*. Di Indonesia saya ingatkan, bahwa lidah tak bertulang. Karena memahami ini sulit. Kita mewarisi konflik seperti dikatakan dalam Alkitab.

Tetapi menurut saya, jihad yang paling jihad bukanlah terhadap agama lain, melainkan memperingatkan pemimpin yang sesat, dan menghapuskan kemiskinan. Sebab, kemiskinan adalah pintu gerbang kekafiran. Di tengah bangsa yang miskin, orang sulit mencari makan. Kemiskinan ini yang perlu kita perangi. Seorang Islam dianggap tidak beriman jika ia tidak baik kepada sesama.

Pekerjaan kita yang utama bukanlah membangun masjid besar atau gereja besar. Tugas kita yang utama adalah memanggul misi salib, yaitu tanggung jawab sosial kita sebagai penganut agama untuk terlibat dalam soal-soal kemanusiaan dan kemasyarakatan. Itu yang penting. Misalnya menyikapi Undang-Undang Pornografi dan peraturan-peraturan lain yang diberlakukan dengan pengecualian.

Untuk semua hal yang membuat Indonesia rusak, kita harus melakukan gerakan revolusi nurani. Tidak perlu harus membicarakan

kesalahan orang lain. Tetapi seperti dikatakan dalam kitab Mazmur, semua orang pernah salah, seperti Daud, tetapi yang penting adalah bagaimana kita membuka hati dan diri kita.

10e

Saras Dewi

Saya setuju dengan Gus Nuril, bahwa pluralisme bukan semata-mata diskursus, tetapi penerapan, yaitu supaya ada harmoni, sebab setiap agama ada untuk kebaikan umat manusia. Memang ada perbedaan, tapi itu sebagai rahmat. Setiap agama juga punya masa tergelap, tidak hanya eksternal, tetapi juga internal. Oleh karenanya, kesengsaraan itu adalah milik kita bersama, dan karena itu kita harus berusaha bersama mengatasi kesengsaraan.

Pluralisme dapat diterapkan ketika kita terbuka dan ada kesediaan menerima perbedaan. Dasar perbedaan adalah keniscayaan, dan mengakui keragaman adalah fondasi/pilar. Agama Hindu misalnya, bisa bernafas dari pluralisme ini. Sebab pada praktiknya, Hindu menjadi milik banyak orang. Di Bali, saya bisa melihat pura berdampingan dengan mesjid dan gereja, yang jaraknya hanya beberapa meter saja. Dan saya merasakan kenyamanan, sekaligus percaya bahwa pluralisme bisa diterapkan, yaitu ketika kita mampu menerima perbedaan.

Banyaknya aliran-aliran agama, memiliki efek baik dan buruk. Tetapi di Hindu terdapat ajaran yang menyebut bahwa ada 3003 perwujudan Allah, yang bisa diperkecil menjadi 303, 33, 3 dan akhirnya menjadi 1 (tunggal). Itu berarti bahwa Allah bisa menampakkan wujudnya dalam diri semua makhluk, seperti perkataan yang menyebut: "Siapa yang melihat makhluk dalam dirinya, dan melihat dirinya dalam semua makhluk, maka ia telah melihat Aku".

Ketika ingin membangun dan mempersatukan nusantara, dirumuskanlah *Bhinneka Tunggal Ika*. Dan sebetulnya hal ini sudah berjalan baik di masyarakat kita selama ini. Di Bali, misalnya, terdapat sebuah perkampungan muslim tertua. Saya melihat, di sana tidak ada masalah setiap kali diadakan upacara Ngaben. Orang muslim datang membawa babi kepada mereka yang berduka. Contoh lain adalah

ketika terjadi demonstrasi menolak RUU Pornografi, semua penganut agama terlibat seperti Hindu, Islam, dan Kristen. Artinya walau kita berbeda agama, tetapi ternyata kita bisa hidup bersama dan berjuang bersama. Tergantung bagaimana kita memainkan peran kita dengan baik. Dalam perjuangan politis misalnya, saya mendahulukan posisi saya sebagai warga negara Indonesia dan Hindu menjadi identitas partikuler saya. Itu berarti bahwa pluralisme itu bukan janji, tetapi sesuatu yang bisa kita realisasikan. Sama seperti tema: "Tuhan itu baik kepada semua orang" (Mzm.145:9a).

11 Masalah Papua

11a *Position Paper*

Persoalan Papua Tidak Mudah

Bukan saja tidak mudah, tetapi juga sensitif. Sejak terintegrasi ke dalam Indonesia (1963), relasinya dengan Indonesia tidak pernah “mulus”. Berbagai ketidakpuasan muncul, yang memang mesti diperhatikan dengan saksama oleh Pemerintah Indonesia. Tidak perlu mendaftarkan dan merincinya lagi di sini, karena sudah menjadi pengetahuan umum. *Act of Free Choice* (1969), yang mestinya menuntaskan integrasi Papua ke dalam Indonesia, ditafsirkan berbeda. Bagi [Pemerintah] Indonesia masalah sudah selesai, tetapi bagi [beberapa unsur di] Papua, belum. *Act of Free Choice* penuh dengan trik dan tipuan. Perbedaan tafsiran ini juga muncul dalam berbagai aksi seperti timbulnya OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. Pemerintah Indonesia memang prihatin dengan itu. Maka UU Otonomi Khusus (OTSUS) dihasilkan. Sayang, UU OTSUS ini tidak (belum?) seratus persen direalisasikan. Ini juga menimbulkan kekecewaan banyak orang Papua.

Hal-hal yang Membutuhkan Perhatian

Menyangkut masalah Papua, ada sejumlah hal yang dianggap krusial dan membutuhkan perhatian:

a. Pergumulan Papua adalah Pergumulan Kemanusiaan

Pertama-tama harus ditegaskan bahwa pergumulan Papua adalah pergumulan kemanusiaan. Mengapa? Karena berbagai peristiwa yang terjadi sejak dulu sampai sekarang mengungkapkan ketidak-adilan sosial dan pelecehan terhadap HAM. Di sini dicuplik berbagai peristiwa-peristiwa sebagaimana dikatakan oleh orang Papua sendiri:

1. Kekerasan terjadi di Papua dalam kurun waktu 1961-2007, kekerasan oleh militer. Berbagai operasi militer mempunyai *modus*

operandi yang sama: pembunuhan kilat, penyiksaan, perkosaan, pembumi-hangusan perumahan penduduk termasuk gedung-gedung gereja, pembinasaaan harta-benda, dan seterusnya. Ini membuktikan, demikian dikatakan, bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan berbagai upaya pekerja HAM di Tanah Papua. Sebagaimana diketahui, selama ini juga berbagai organisasi-organisasi pejuang HAM giat di sana.

2. Diskriminasi rasial. Apa yang pernah diucapkan Ali Murtopo pada waktu lalu masih sangat membekas di hati orang Papua. Ali Murtopo berkata: “*Jakarta tidak perlu dengan orang Papua, yang diperlukan Jakarta adalah tanah dan kekayaan alamnya.*” Hal itu, demikian dikatakan, terbukti pada saat ini, ketika orang-orang Papua dikucilkan dari tanah mereka sendiri.
3. Daerah Operasi Militer (DOM) yang diterapkan pada waktu lalu masih sangat membekas. Bagi orang Papua DOM baru berakhir pada 1998. Dalam kaitan ini, disinyalir adanya rekayasa-rekayasa politik yang diciptakan oleh kalangan-kalangan tertentu. Maka pemekaran wilayah dicurigai sebagai bagian dari rekayasa politik itu, guna melemahkan orang Papua.
4. Disinyalir juga bahwa integrasi Papua ke dalam wilayah Indonesia terjadi karena adanya desakan internasional. Karel Erari misalnya melihat peristiwa New Delhi 1961 (ketika Pdt Romainum bersatu dengan delegasi Indonesia dalam Sidang Raya WCC) sebagai peristiwa politik yang penting. Menurut Erari, orang Kristen Papua telah memberi kontribusi dalam perjuangan dan keputusan politik untuk menjadi bagian dari Indonesia, semata-mata karena kehadiran gereja-gereja di Indonesia.

Berdasarkan sejumlah catatan pendek di atas, kita lebih lanjut mencatat hal-hal berikut: *Pertama*, berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua dilihat sebagai *crime against humanity*. *Kedua*, ada kegelisahan di kalangan saudara-saudara Papua bahwa yang terjadi sekarang adalah proses depopulasi. Bahkan istilah *genocide* dipakai untuk menegaskan kekuatiran bahwa pada suatu saat ras Papua akan hilang dari sejarah. *Ketiga*, berbagai peristiwa-peristiwa diskriminasi sekarang ini difahami sebagai upaya memperkecil peranan mereka di tanah mereka sendiri. *Keempat*, ada kegelisahan terhadap perusakan lingkungan dengan penebangan hutan-hutan secara tidak

bertanggungjawab. *Kelima*, dicatat adanya distorsi sejarah di mana *Act of Free Choice* (1969) dilihat sebagai tidak demokratis dan cacat hukum. *Keenam*, sebagai akibatnya, maka perjuangan untuk merdeka dianggap sebagai sesuatu yang sah.

b. Sikap PGI dan Gereja-gereja di Indonesia

1. Kita harus tetap menegaskan bahwa kalau Papua ingin dipertahankan sebagai bagian sah dari NKRI, maka ketidakadilan, ketidak-sejahteraan, ras diskriminasi, dan sebagainya harus dihilangkan. Sebaliknya ciptakanlah keadilan dan kesejahteraan.
2. Orang-orang Papua sendiri mesti diberi peranan di tanahnya sendiri. Ini berarti UU OTSUS harus diimplementasikan sepenuhnya mungkin. Barnabas Suebu pernah berkata bahwa UU itu adalah sesuatu yang mungkin dicapai guna mempertahankan kesatuan NKRI di mana Papua termasuk di dalamnya. Orang Papua sendiri mengatakan, bahwa UU OTSUS adalah “mas kawin”. Kalau mas kawin dikembalikan, berarti perkawinan bubar.
3. Adanya sinyalemen bahwa ras Papua akan hilang, perlu mendapat perhatian serius. Mungkin saja ini ketakutan berlebih-lebihan, tetapi gerakan transmigrasi harus dikendalikan agar jangan sampai “kaum pendatang” melebihi jumlah orang Papua asli. Demikian juga dengan kecenderungan masuknya penyakit-penyakit seperti HIV/AIDS sangat menguatirkan. Ini harus dikendalikan.
4. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengubah pendekatan keamanan dengan pendekatan kesejahteraan.

Demikianlah beberapa pokok-pokok pemikiran sebagai perangsang berdiskusi dan untuk dikembangkan lebih jauh dalam KGM ini.

A.A. Yewangoe

11b

PEMBANGUNAN PAPUA DEWASA INI

Barnabas Suebu, SH³⁴

Otonomi khusus adalah satu solusi bagi Papua. Adalah fakta bahwa sebagian besar rakyat Papua ingin melepaskan diri dari NKRI pada satu sisi. Tetapi pada sisi lain adalah fakta sejarah bahwa Papua sudah menjadi bagian integral dari NKRI. Ketika dua hal itu berhadapan maka yang terjadi adalah konflik, dan korban yang akan jatuh tentu di pihak rakyat. Oleh karena itu, dicarilah jalan penyelesaian secara damai, yaitu usul tentang otonomi khusus untuk Papua.

Kerangka ini diusulkan oleh putra-putri Papua, termasuk saya. Kerangka di dalam *Wide Weight Autonomy*. Semua kekuasaan diserahkan ke Papua, kecuali **militer, peradilan, moneter, masalah luar negeri** dan **soal-soal keagamaan**. Lebih dari itu semua diserahkan untuk diatur oleh Papua sendiri.

Waktu itu saya ingat, sudah beberapa tahun lalu, hampir seluruh rakyat tidak mau otonomi karena yang dikehendaki adalah merdeka. Ada kelompok ekstrem, Kongres Papua. Sementara di pihak lain, ketika dibicarakan di tingkat pusat, kita menghadapi persoalan yang sulit karena banyak yang curiga terhadap otonomi khusus ini. Otonomi khusus ini dicurigai sebagai akal-akalan, sehingga menjadi perdebatan yang panjang ketika dibahas di DPR. Dan Pak Sabam Sirait sangat berpihak untuk berjuang bagi rakyat Papua.

Akhirnya UU Otonomi Khusus disahkan pada akhir 2001. Namun ketika kita masuk pada masa implementasinya, dia menjadi masalah. Otonomi khusus yang tadinya merupakan solusi berubah menjadi masalah. Tidak menjadi solusi terhadap masalah, sehingga masalah tak pernah selesai, karena masalah tidak bisa menyelesaikan masalah. Mengapa?

³⁴ Gubernur Provinsi Papua.

Pertama, pemahaman yang keliru, setengah-setengah, bahkan sama sekali salah. Mulai dari tingkat menteri hingga di rakyat Papua. Juga di lingkungan pemerintahan Papua, pada tingkat provinsi, kabupaten, dan lain-lain terjadi kekeliruan. Persepsi berbeda-beda karena masing-masing punya interpretasi, sehingga dalam pelaksanaannya sangat menghambat.

Kedua, masalah kemauan politik. Kesungguhan dan keikhlasan pemerintah pusat untuk melaksanakan atau mengimplementasikan UU ini secara utuh, konsekuen dan konsisten perlu dipertanyakan. Contoh: banyak kewenangan deparlemen yang mestinya menjadi kewenangan untuk Papua, tetapi dalam pelaksanaannya nol, seperti Departemen Kehutanan. Sampai hari ini Menteri Kehutanan belum menyerahkan kewenangannya itu. Ada masalah *hand over*. Kita mau terima amanat UU, mau *take over*. Hal ini menimbulkan banyak persoalan. Misalnya dalam hal kayu, *illegal logging* dan HPH. Saya sendiri mencabut izin *log*, tidak boleh keluar Papua. Tetapi kita berhadapan dengan Menteri Kehutanan.

Ketiga, masalah *good governance*. Masih ada masalah tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel, dan yang menangani proyek dengan sebaik-baiknya. Semua hal itu belum siap, baik *leadership*, *management*, *controlling* maupun *accountability system*. Akibatnya adalah, ketika sudah mengalir trilyunan rupiah maka timbullah korupsi.

Keadaan ini diperparah dengan hadirnya INPRES Nomor 1 yang dilahirkan oleh Presiden Megawati, yang melahirkan Provinsi Papua Barat. Ini didukung oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan konsitusi RI dan UU Otonomi Khusus itu sendiri.

Jadi hal-hal inilah yang membuat implementasi UU Otsus tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU itu sendiri. Semua masalah tersebut tadi bermuara pada dua hal, yaitu tercipta dua dunia. Satu dunia birokrasi yang berpesta pora dengan uang otsus trilyunan rupiah, tidak ada kontrol dan tidak transparan, sehingga terbuka korupsi. Dunia yang satu lagi adalah dunia rakyat kecil di kampung. Di Papua ada 4000 kampung. Di daerah saya saja ada 3000 kampung. Tapi sangat menyedihkan karena mereka hidup dalam kemiskinan,

kebodohan bahkan kemiskinan absolut. Penyakit, menjadikan suasana yang sangat buruk. *Human Development Index*nya lebih buruk dari Somalia dan Bangladesh. Kita di Indonesia pada umumnya yang terendah 60, tapi di Papua mencapai angka sangat rendah, yaitu 40. Keadaan ini menimbulkan konflik baru.

Rakyat mulai tidak percaya kepada Republik dan Otsus. Mereka berdemo terus-menerus. Otsus bukan solusi. Dan konflik ada yang alamiah, tapi ada yang direayasa sebagai proyek/bisnis. Situasi seperti ini berlangsung antara tahun 2002-2006. Pada Nopember 2001, UU disahkan. Pada pertengahan 2006, saya dengan Alex terpilih untuk memimpin Papua. Kami hadir sebagai pemimpin yang baru dalam situasi seperti itu. Kami masuk dalam situasi penuh konflik dan paradoks. Artinya, pada satu sisi Papua kaya, dana Otsus trilyunan, tetapi rakyatnya menderita miskin di atas kekayaannya sendiri. Sekaligus Papua berada pada persimpangan jalan. Jalan yang satu ketika suasana konflik terus berlangsung, maka ke depan kita akan celaka.

Rancangan kecelakaan ini mungkin diciptakan oleh setan-setan. Sekarang ada penyakit korupsi, HIV dan AIDS, rakyat frustrasi lalu mabuk, *free-sex*, dan lain-lain. Kemarin saya tidak sempat ke sini, karena ada rapat akbar untuk berperang lawan korupsi dan HIV dan AIDS, karena di hadapan mata kita semua rakyat akan mati kalau perang tidak dimulai pada soal-soal seperti ini.

Ketika di persimpangan jalan, kita melihat Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang menuntun masa depan Papua yang penuh rancangan damai sejahtera yang disediakan Allah bagi umat-Nya. Dalam pidato saya sampaikan: Dengan keadaan sekarang tidak ada jalan untuk Papua, yang lebih baik, yang membawa damai dan sejahtera. Itu berarti butuh perubahan besar, yang tidak akan jatuh dari langit. Perlu pemimpin visioner, *power*, sistem, organisasi, manajemen; perlu sumber daya manusia. Perlu inovasi dan terobosan baru.

Kekuasaan dan kepemimpinan, segenap yang tersedia, dilakukan untuk melakukan perubahan besar dengan inovasi dan terobosan baru. Dalam hubungan ini, sejak 2006 ada agenda-agenda pembangunan baru. Ada kebijakan dasar pembangunan, di mana manusia harus menjadi titik sentral pembangunan itu sendiri. Karena pembangunan

adalah dialog antara Tuhan, alam dan manusia. Pembangunan bermula untuk manusia dan berakhir untuk manusia.

Karena konsep dasar ini maka **strategi pertama** adalah perlu ada pertumbuhan, investasi, kekayaan alam diolah, kapasitas fiskal naik, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan Papua harus bertumbuh. Khususnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena Papua punya alam. **Strategi kedua** adalah pembangunan yang berfokus pada manusia. **Ketiga** harus menjaga stabilitas, sustainabilitas dan kontinuitas pembangunan.

Pendeta Kijne, seorang rasul Papua, menulis dalam bahasa Belanda: "Pembangunan peradaban manusia ibarat maju dan naik, maju lalu naik kembali". Dengan kebijakan itu saya canangkan empat agenda penting:

1. **Menata kembali tata-kelola pemerintahan pada segenap jajaran dan tingkatan.** Hal ini dilakukan melalui reformasi birokrasi dan reformasi anggaran, di mana selama ini yang tampak adalah seperti piramida terbalik. Yang semakin kecil adalah rakyat. Kita lakukan pembangunan struktur, cegah pemborosan 700 milyar rupiah. Jadi mutlak, Papua harus keluar dari persoalan ini, pemerintah harus baik. Apalagi Papua adalah daerah Kristen, harus menjadi contoh yang baik untuk negeri ini. Dan banyak sekali yang kita lakukan. Dari sisi manajemen pemerintahan tidak perlu detail. Tetapi hasil pemeriksaan akuntan: *Disclaimer*, naik lagi: wajar tanpa pengecualian. Artinya, korupsi berkurang, semua uang harus dipertanggungjawabkan. Semua yang korup dibawa ke pengadilan. Baru saja ketua KPK saya undang ke Papua dan kita bicara lagi. Kita harap upaya pembenahan akan secepatnya kita lakukan pada provinsi, kabupaten, kota dan kampung.
2. **Fokus kepada manusia di kampung** yang sudah mulai, yaitu rencana Strategis Pembangunan Kampung bekerjasama dengan PMP Mandiri. Disediakan bantuan dana antara Rp. 200-400 juta per kampung, jadi secara keseluruhan lebih dari 1 trilyun turun. Langsung kita siapkan pendamping. Camat (kepala distrik) diperkuat, APB kampung, kebijakan fiskal, seluruh rakyat harus kumpul, diajar dan setiap satu sen harus dipertanggungjawabkan. Dan pendekatan ini disebut inisiatif masyarakat dari bawah. Secara

menyeluruh dan besar-besaran. Total dana di kampung 1, 5 milyar rupiah untuk perbaikan gizi, kesehatan, mutu Pendidikan Dasar, rumah sehat, air bersih, dan ekonomi ditingkatkan sungguh-sungguh. Tidak melalui proyek pemerintah. Kita didik rakyat agar kerja sendiri, pertanggungjawabkan sendiri. Saya juga harus keliling lihat kampung demi kampung, karena kita baru mulai. Semua harus disiapkan dulu. Kita melatih pelatih untuk melatih mereka. Biaya besar dan sekarang 2008 baru mulai dengan *People Driven Development Strategy*. Dan 5-10 tahun ke depan dana untuk mereka kelola sendiri bisa mencapai 15 trilyun.

3. **Menjaga masyarakat Papua** yang penuh konflik agar menjadi satu tanah yang damai. Rakyatnya harus tertib, disiplin dan menghormati HAM dan nilai-nilai kemanusiaan. Supaya tidak ada perang suku dan konflik, tetapi yang terjadi penegakan hukum (*Law and Order*).
4. **Infrastruktur.** Papua seperti sekarang belum sama seperti ketika Daendels membangun Jawa [pada awal abad ke-19]. Di Papua semua orang harus naik pesawat terbang karena 70% transportasi Papua bergantung pada udara. Ini mengakibatkan *high cost economy*. Karena itu dibangun infrastruktur: jalan darat dan udara dipadukan dalam *way intergrated transportation*. Kita masih kekurangan dana. Infrastruktur penting membuka akses ekonomi masyarakat, supaya terbuka dari isolasi fisik dan informasi. Karena itu, energi kita bangun dari tenaga minyak. Mudah-mudahan suatu hari energi listrik di Papua bersumber dari air, angin, matahari terbangun. Air bersih kita tangani semua, untuk pertumbuhan. Seperti raksasa yang tidur, kekayaan alam ini harus dikelola supaya jangan ia bunuh rakyat karena yang ambil orang dari luar. Inilah agenda yang saya kerjakan dua tahun ini.

Sebelum saya akhiri, saya ingin buka sedikit tentang hubungan kemitraan gereja, pemerintah dan masyarakat.

Pertama, Sejarah Papua mencatat bahwa dasar-dasar untuk membangun peradaban Papua diletakkan sejak Injil masuk 150 tahun lalu di Mansinam. Papua dibangun oleh para misionaris dan bukan oleh pemerintah. Tidak ada satu tempat pun di Papua yang dibuka oleh pemerintah. Semuanya dibuka oleh gereja. Mereka yang

meletakkan dasar-dasar Papua. Pendidikan 100% milik gereja, tidak ada pemerintah. Oleh karena itu, kuasa Injil yang meletakkan dasar ini sebagai benang merah harus terus dipertahankan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, peran ini hendaknya dipertahankan. Sangat disayangkan, gereja kini lebih banyak berdemo daripada berbuat yang berarti. Karena itu saya kumpulkan semua, termasuk Katolik. Sudah dua kali dan sedang direncanakan untuk ketiga kalinya.

Kedua, misi kenabian gereja untuk menegur pemerintah yang salah hendaknya dilakukan dengan benar dan alkitabiah. Gereja hendaknya melihat perubahan zaman dan menjaga benang merah. Yang tadi saya bilang, Papua sedang berada di persimpangan jalan. Terancam semua bisa mati atau misi penantian ini membawa kita kepada gereja untuk membawa umatnya di tanah Papua. Tapi karena saya juga dari gereja, mari kita urus bersama pembangunan di Papua ini. Kadang-kadang saya berbicara seperti pendeta, dan mereka berbicara seperti politisi. Tapi yang sangat penting adalah misi pengabdian ini.

Ketiga, ketika manusia menjadi titik sentral dari pembangunan, maka nilai kemanusiaan, etika moral dan rohani hendaknya menjadi pupuk untuk memberikan bentuk, warna, arah dan kekuatan bagi perubahan yang sedang terjadi di Papua. Sejarah bangsa-bangsa di dunia membuktikan bahwa satu bangsa kuat, adil dan sejahtera kalau dibangun di atas nilai rohani, kemanusiaan, etika dan moral. Karena itu, Papua yang mayoritas penduduknya Kristen harus memaknai nilai-nilai ini.

Keempat, pendekatan baru yang bersifat komprehensif dalam pekabaran Injil, memandang berita anugerah tidak saja rohani, tetapi juga dalam arti jasmani. Pada Markus 8, Yesus memberi makan orang banyak yang telah tiga hari menahan lapar. “Apakah kalian sudah kenyang?” 150 tahun sudah rakyat Papua mendengar berita itu. Mereka bukan saja tiga hari menahan lapar, tetapi 150 tahun. Dan Yesus, Dia juga bertanya kepada mereka: *Dorang* sudah dengar khotbah? Ada orang pulang dari gereja, orang Yahukimo, mati lapar dan kebetulan gunung tempat ia meninggal adalah gunung emas. Jadi apa artinya pendekatan tentang kesejahteraan jasmani yang dilakukan

oleh pemerintah? Tugas saya sebagai gubernur bukanlah berkhotbah, saya mengurus ekonomi, kesejahteraan. Saya tahu peradaban Papua ada karena gereja. Karena itu, kita beri bantuan bagi gereja, rumah sakit dan sekolah. Itu yang dikerjakan oleh Belanda. Guru pergi mengajar di sekolah dan hari Minggu pun mengajar jemaat. Gajinya dibayar oleh gereja (Belanda) dan itu juga yang akan kita lakukan kini.

Ketika rohani jemaat membaik, tidak usah sepuluh persen, dua persen saja masuk, uang sudah cukup. Masalahnya: ketika punya uang, rohaninya kurang baik. Atau rohaninya baik, tapi miskin. Kasih yang ada padanya itulah yang terbesar. Dengan begitu keuangan gereja bertumbuh dari pendapatan yang naik. Itu berarti gereja hidup dari hasil imannya sendiri.

Hal-hal seperti tadi akan kita lakukan. Saya ada dalam posisi tidak boleh hanya teori, harus laksanakan sungguh-sungguh lewat program dengan semua gereja di Papua. Sehingga apa yang disebut nilai-nilai Kekristenan menjadi jelas. Untuk itu perlu dibangun komunikasi intensif dengan pimpinan gereja dan semua pelayan dalam gereja.

Akhirnya saya ingin katakan: kami menanam, kami menyiram dan Tuhan yang menumbuhkan. Kita hanya bisa menanam, kita hanya bisa menyiram, tapi kita tidak boleh lupa bahwa hanya kuasa Tuhan yang menumbuhkan. Buah akan kita lihat pada jangka pendek dan jangka panjang, karena Dia adalah pemilik dari ladang ini.

12 Bidang Gereja dan Teologi

12a *Position Paper*

Sejak awal berdirinya, sebagaimana juga dicatat dalam Perjanjian Baru (PB), Gereja selalu terlibat dalam kehidupan masyarakat dan bangsa di mana ia hadir. Inspirasi dan motivasi keterlibatannya juga digali dari Perjanjian Lama (PL), di mana dikemukakan amanat dan penugasan dari Tuhan Allah kepada umat-Nya untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa-bernegara sesuai dengan firman-Nya. Karena itulah di dalam seluruh Alkitab, baik PL maupun PB, kita menemukan berbagai peristiwa dan permasalahan yang dihadapi umat Allah (baik Israel di masa PL maupun Gereja Kristen sebagai "Israel baru" di dalam PB), serta jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi umat-Nya. Hal-hal yang terdapat di dalam Alkitab itu menjadi pedoman serta pemberi inspirasi dan motivasi bagi Gereja untuk berkiprah dan berteologi di dalam dunia ini, kendati tidak mesti memahami dan menafsirkannya secara harfiah. Dari situ sekaligus terlihat bahwa berteologi (*doing theology*) bukan sekadar berpikir atau berwacana secara verbal, melainkan juga berbuat konkret di tengah realitas kehidupan. Berteologi berdasarkan Alkitab, dengan meneladani Allah, berarti berpihak kepada rakyat.

Ketika Gereja hadir di bumi Nusantara, terutama sejak awal abad ke-16, Gereja juga terlibat dalam kehidupan masyarakat. Tetapi Gereja tidak selalu berpihak kepada rakyat, melainkan sangat sering berpihak pada penguasa; kepada para penguasa penjajah (Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, bahkan Jepang) pada masa penjajahan, dan berpihak pada penguasa bangsa sendiri sejak Indonesia merdeka. Ini menimbulkan pertanyaan: kenapa demikian? Apakah karena Gereja (atau lebih tepat: gereja-gereja) di Indonesia memahami bahwa ia ada di negeri ini karena jasa penguasa kolonialis-imperialis yang membawanya dari dunia Barat? Atau, mengacu pada PL, gereja-gereja di Indonesia melihat bahwa persekutuan umat yang beriman kepada Kristus itu identik dengan persekutuan sosial-politik yang dipimpin

penguasa? Seandainya pun mengacu pada PL, mestinya gereja-gereja memahami bahwa pemerintah adalah hamba Allah yang – kalau tidak becus menjalankan amanat yang diembannya – dapat dengan cepat dilengserkan oleh Allah, diganti dengan penguasa lain.

Ketika Indonesia merdeka, harapan rakyat untuk menikmati kemakmuran dan kesejahteraan di segala bidang itu sangat besar. Apalagi hal itu dicanangkan pada awal kemerdekaan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, setelah lebih dari 60 tahun, harapan itu masih sangat cukup jauh dari kenyataan. Tak dapat disangkal, ada sejumlah warga negara ini yang telah menikmati kemakmuran dan kesejahteraan, baik jajaran birokrasi pemerintahan, pengusaha, kaum profesional, sejumlah pekerja kelas menengah ke atas, dan juga sejumlah petualang di berbagai bidang; katakanlah jumlah mereka sekitar 20 % dari penduduk negeri ini yang kini sekitar 240 juta. Tetapi sekitar 80 % lagi – berarti mendekati 200 juta – masih cukup jauh dari kemakmuran dan kesejahteraan, walaupun dalam statistik resmi warga masyarakat Indonesia yang betul-betul miskin kurang dari 40 juta. Padahal "Tuhan telah mendesain negeri ini sebagai surga, tetapi yang menikmati surga itu hanya segelintir", begitu kata beberapa tokoh Komite Penyelamat Kekayaan Nasional (KPK-N) dalam deklarasi mereka tanggal 28 Juli 2008 yang lalu.

Lalu apa yang salah di negeri ini, dan apakah Gereja masih layak berkata-kata atau berbuat sesuatu? Apalagi kalau diingat bahwa yang terlibat dalam berbagai keadaan buruk ini termasuk juga sejumlah tokoh dan warga gereja. Ketika dikatakan bahwa penyebab utamanya adalah korupsi yang sudah menjadi budaya bangsa ini, dan ketika di sana-sini mulai diungkapkan nama para pelaku dan *modus operandi* mereka, di dalamnya terdapat juga nama sejumlah orang Kristen. Bahkan di antara 324 organisasi gereja yang sudah terdaftar di pemerintahan melalui Departemen Agama, tidak sedikit yang juga dilanda oleh mental maupun tindakan korupsi. Gereja di negeri ini termasuk dalam jajaran lembaga yang paling rawan dan rentan terhadap korupsi. Berbagai organisasi politik yang mengaku sebagai pengemban dan penyalur aspirasi politik umat Kristen di negeri ini juga sangat tidak bebas dari perilaku kotor yang juga termasuk dalam kategori korupsi itu.

Mengingat semua itu memang gereja-gereja, baik yang tergabung di dalam PGI maupun yang berada di luarnya, menyadari bahwa lidahnya telah menjadi semakin kelu. Mereka ternyata tidak lebih baik dari siapa pun yang ada di negeri ini. Tetapi mengandalkan firman Tuhan, maupun kasih, pemeliharaan, kemurahan dan pengampunan-Nya, yang membuat Dia selalu memberi kesempatan, *kairos*, kepada Gereja-Nya, maka gereja-gereja di Indonesia kembali memberanikan diri untuk mengatakan dan mengerjakan sesuatu bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang Tuhan cintai ini. Gereja – di dalam segala cacad-celanya – tetap terpenggil untuk mewartakan firman, kebenaran, dan kehendak Tuhan, baik yang ia gali dari Kitab Sucinya (Alkitab), dari sejarahnya, maupun yang ia tangkap melalui dengar-dengaran kepada Tuhan yang terus berfirman dan berkarya, serta dari pengamatan atas 'tanda-tanda zaman' yang Tuhan perlihatkan dari hari ke hari.

Di dalam KGM VIII-2008 ini gereja-gereja di Indonesia akan berstudi dan bergumul bersama mengenai banyak bidang kehidupan: politik dan ideologi, sosial-ekonomi, pendidikan (termasuk iptek), kebudayaan, pluralisme (kemajemukan, terutama dalam hal agama), sumber daya alam dan lingkungan hidup, kesetaraan jender, dan juga masalah Papua yang belum kunjung tuntas pemecahannya. Berbagai isu dan masalah itu tentu perlu dikaji dari sudut pandang ilmu yang berkait, dan karena itu KGM ini akan menghadirkan juga sejumlah pakar dari berbagai bidang ilmu terkait. Tetapi semua itu tidak cukup; semua itu harus dirangkum melalui refleksi teologis yang komprehensif. Gereja memahami bahwa iman (dan teologi sebagai upaya membahasakan dan menjelaskan iman) tidak terpisah dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di satu sisi iptek menolong gereja untuk mampu memahami realitas di alam semesta ciptaan Tuhan yang kompleks ini, serta membahasakan iman di tengah semua perkembangan yang ada. Di sisi lain gereja dengan teologinya diharap mampu menolong para ilmuwan, para politikus dan pemegang kekuasaan, para pelaku ekonomi, para pendidik serta para pengambil kebijakan di bidang itu, para budayawan, para pejuang kesetaraan jender, dan para pengupaya pemecahan masalah Papua untuk melihat apa firman dan kehendak Tuhan di tengah semua itu.

Gereja memiliki berbagai warisan rohani yang sudah ada sejak zaman PL, antara lain pemahaman tentang perjanjian (*covenant*), berkat (*blessing*), dan kasih-karunia (*grace*). Di dalam sejarahnya Gereja juga pernah memelopori reformasi di berbagai bidang kehidupan. Berbekal berbagai kekayaan dan warisan rohani ini, mestinya gereja-gereja di Indonesia dapat berbuat sesuatu yang nyata, tidak berhenti pada berkata-kata. KGM kali ini, yang diadakan di tengah-tengah suasana kampanye menuju Pemilu 2009, juga diharapkan memperdengarkan suara dan panggilan Tuhan, tidak hanya kepada warga gereja atau umat Kristiani di negeri ini, melainkan juga bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

Jan S. Aritonang

12b
MENGHIDUPI REALISME HARAPAN
KRISTEN DALAM MASYARAKAT
INDONESIA
(Berteologi dan Bergereja bersama “Semua Orang”)

Pdt. Martin Lukito Sinaga D.Theol.³⁵

Pengantar

Ada baiknya pertama-tama dicatat dulu duduk perkaranya, sehingga teologi diperlukan dalam Konferensi Gereja dan Masyarakat ini. Tampaknya untuk itu baik kalau dimulai dari cerita T.B. Simatupang, yang diundang oleh Paul Abrecht menyiapkan dan memimpin salah satu sesi dalam *World Conference on Church and Society* (1966). Ketika Abrecht bertanya apa kerja pak Sim, dijawabnya, “saya membaca tiga Karl, yaitu Marx, von Clausewitz, dan Barth”. Bagi saya urutan ini penting, dan memang dalam “Percakapan dengan Dr. T.B. Simatupang” (peny. Victor Matondang/1989) tampaklah perlahan mengapa teologi itu perlu dalam biografi dan bacaan pak Sim; yang juga dibutuhkan dalam ihwal kita umat Kristen bermasyarakat saat ini.

Dan pak Sim tidak mulai dari soal-soal yang rohani, tetapi mulai dari kesadaran “kelas” kaum terjajah pribumi yang bangkit menolak kolonialisme Belanda. Sejak SMP ia sudah ikut dalam ikhtiar merdeka tersebut. Lalu memang pada akhirnya ilmu militer modern perlu baginya selaku pendobrak “*apartheid*” kolonial kala itu di Indonesia, dan selaku Kepala Staf Angkatan Perang RI ia pun bergerak dalam logika kekuasaan frontal. Barulah setelah itu semua, ia mendapat dan membutuhkan perspektif teologis, yang dalam pengakuannya memberinya kerangka yang lebih mendalam. Karena teologilah ia bahkan mampu melangkahi pandangan Marx soal keadilan, yang membuatnya “lebih realistik tapi juga sekaligus lebih berpengharapan”. Sebab dengan teologi selalu ada *reserve* –demikian kata pak Sim-, baik

³⁵ Dosen STT Jakarta, Anggota Komisi Teologi PGI.

di tengah “perang, revolusi, dan pembangunan” (dan juga krisis reformasi masa kini kita).

Jadi dapatlah kita tegaskan lagi dalam konferensi ini, bahwa *teologi perlu karena ia dapat memberi kita perspektif yang lebih mendalam, dan sekaligus realistik serta berpengharapan*. Maka jangan kita terjebak pada sloganisme teologis, atau sinisme akut, tetapi marilah mulai meletakkan percakapan ini dengan lebih sederhana walau penuh rasa, sambil mencoba mengurutkan apa-apa yang dapat memberi harapan di tengah realisme sosial di seputar tahun 2008 ini.

Teologi untuk Gereja yang Menghadapai Krisis Bangsa (1998)

Sepuluh tahun yang lalu telah pula diadakan KGM VII di Caringin, dan kala itu kita hendak menemukan jawaban teologis atas pengalaman krisis yang mendalam yang dihadapi bangsa Indonesia. Kita perlu melanjutkan perspektif teologis yang diurai di situ (sebab dengan begitulah dipertaruhkan apakah memang iman membantu kita melihat perkara konkret). Kala itu titik tolak teologisnya ialah bahwa mencari Tuhan perlu dijadikan pijakan awal dalam gereja mencari langkah konkret di Indonesia. Jadi di situ dipertaruhkan apakah konsekuensi aksi Kristen kalau arahnya pertama-tama ialah “pertobatan”!

Ditegaskan juga selanjutnya bahwa dari pertobatan akan lahir hidup yang *berlimpah* (dan menjadi berkat bagi orang lain), dan harta yang dianugerahkan itu ada *dalam bejana tanah liat* (2 Kor. 4:7), yang dengannya kita dapat sintas (*survive*, “hidup yang berkelanjutan”).

Dalam terang iman itulah kita menyoroti krisis bangsa di era 1998 itu, sambil memberi perspektif atas berbagai bidang-bidang kajian (Ekonomi, Hukum, Kebudayaan, Pendidikan, Ideologi). Telah banyak yang dikatakan atas bidang hidup yang kompleks itu, dan iman pun dicoba dihidupi di dalamnya. Jelaslah bahwa kekristenan tetap sintas dan berlanjut (juga masyarakat Indonesia ini), dan telah pula harta dalam bejana tanah liat itu kita coba nikmati; terkadang ia jadi retak di tangan kita (karena hendak direbut oleh “para perampok”), walau juga masih bisa dipelihara dengan setengah mati oleh kita. Bahkan telah pula kemartiran muncul sebagai cara kita untuk sintas dan bertahan, walaupun kita tetap berjuang dan mendorong agar para sahabat

“sekular” kita tetap kuat dalam menciptakan mekanisme rasional dan bermartabat dalam mengelola negara Indonesia ini. Sebagian suara KGM kala itu ialah suara modern dan demokratis, yang kita percaya sebagai cara terbaik menghadapi proses pemulihan sosial yang majemuk ini (teologi sosial kita tampaknya bercorak Niebuhrian, “demokrasi itu *perlu* karena manusia cenderung jahat, namun demokrasi itu *mungkin* karena manusia bisa mulia”).

Jadi ada dua matra dalam teologi yang kita kembangkan 10 tahun lalu, sebetuk teologi yang dicoba dihidupi *oleh* gereja (“*carilah Tuhan maka kamu akan hidup ... berlimpah dan sintas*”), dan yang dicoba dikaitkan *dalam* proses-proses reformasi sosial politik di negeri kita ini. Tentu teologi itu (*why we need theology?* Jawabnya: *for the faithful of the church!*) tidak lantas basi, sebab kita tengah mencoba “*to be a faithful church*” di Indonesia.

Sehingga, kita teruskan dan hidupi bersamalah iman sedemikian itu - yaitu bahwa kita harus mulai dengan bertobat, dan menerima kemurahan Tuhan yang memelihara hidup yang tidak mudah ini -, sambil menyiangi ihwal kemasyarakatan yang kompleks di Indonesia. Walau tentu kini (10 tahun kemudian, di tahun 2008 ini), iman tadi hendak direntang lagi, sebab *kemurahan (kebaikan) Tuhan tadi hendak kita hidupi “(bersama)/ kepada semua orang”* (Mzm. 145:9^a).

Berteologi Lebih Inklusif

Jadi, sebetuk sikap non-eksklusif kini perlu lebih tegas lagi kita jadikan modus teologi gereja kita sehari-hari. Sebab tampaknya ada yang sedemikian eksklusif hidup dalam percakapan iman kita, yang mungkin kita terima dari para misionaris sejak dulu kala. Makanya baik kalau dikutipkan di sini dokumen *Gereja Katolik* hasil Konsili Vatikan II (*Nostra Aetate*) – sekadar mengungkapkan bahwa proses inklusif tengah tumbuh dalam iman gereja umumnya:

Gereja menghargai perilaku hidup, tabiat, dan moral ajaran agama-agama, yang walaupun banyak berbeda dari ajaran gereja, bagaimanapun semua itu seringkali mencerminkan kebenaran yang telah pula mencerahkan kemanusiaan kita.

Jadi, posisi inklusivisme adalah posisi yang amat mungkin juga kita ambil. Sebab jelas memang bahwa agama-agama lain itu menghayati sebetuk spiritualitas, yang dapat juga dikatakan menjadi *locus* (tempat berdiam dan kehadiran) Sang ilahi. Pengalaman itu seperti yang dialami Petrus, “...aku telah mengerti, *bahwa Allah tidak membedakan orang*”. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya” (Kis. 10:34-35). Bahkan kita bisa katakan bahwa kasih karunia bekerja di setiap kehidupan dan menyokong peri kehidupan dunia ini. Tidak ada yang bisa membatasi kemurahan Allah, dan *Kristus menjadi jaminan* akan kasih ilahi yang universal itu. Kristus memang jalan keselamatan bagi manusia, dan keselamatan dari Kristus bekerja tanpa batas; oleh Kristus kita hanya tahu satu hal, bahwa kini Allah Bapa datang dengan kasih yang terulur, juga kepada ‘anak yang hilang’ sekalipun.

Bahkan dalam *konferensi misi* (Dewan Gereja-gereja se-Dunia) di San Antonio, 1990 (lihat F.R. Wilson, *The San Antonio Report*, hl 31-33), pergulatan inklusif ini ditegaskan dengan mengatakan:

Kami tidak dapat menunjuk jalan keselamatan lain kecuali Yesus Kristus; pada saat yang sama kami tidak dapat mendirikan batas bagi kuasa penyelamatan Allah.”

Dalam dokumen Dewan Gereja-gereja se-Dunia yang menyoroti kemajemukan (*Religious Plurality and Christian Self-Understanding – A Document by the networks of Faith and Order, Conference on World Mission and Evangelism, Office on Interreligious Relations and Dialogue, Geneva, 2004*) ditegaskan juga bahwa kepada tetangga dan sesama kiranya kita mengembangkan sikap *hospitality*; “*jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat*” (Ibr. 13:2).

Pendek kata kita bisa secara perlahan merentang percakapan iman kita dalam gereja; apalagi - dalam semangat teologi para Reformator pendahulu kita - selalu ada sikap tak layak dalam kita menerima “*the Gift of Grace*” dari Allah itu. Makanya tak perlu mendaku, apalagi menganggap iman orang lain *tak laku*.

Di bawah ini sekadar skema, yang mungkin membantu kita melanjutkan percakapan (baca: berteologi) di dalam gereja masa kini:

Percakapan Eksklusif

Kristus adalah Juruselamat, yang berada di luar komunitas Kristen tidak selamat.

Allah datang sebagai Hakim yang menghukum orang yang tak percaya.

Gereja adalah persekutuan orang benar, yang dipisahkan dari dunia yang gelap. Gereja bekerja untuk mentobatkan orang lain.

Umat Kristen percaya pada ajaran keselamatan yang sungguh benar dan pasti, **umat lain** terkecoh dan tersesat di dalam agama/ keyakinannya.

Selanjutnya: Karya yang Inklusif “...kepada Semua Orang”

Amat menggembirakan rasanya - di era serba survei politik di negeri ini - bahwa telah pula survei atas “Potret Gereja Mainstream Indonesia” diadakan. Buku karya Rijnardus A. Van Kooij, et al., *Menguak Fakta, Menata Karya Nyata: Sumbangan Teologi Praktis dalam Pencarian Model Pembangunan Jemaat Kontekstual* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007) memberitahu kita sebetulnya kekristenan apa yang secara empirik dihidupi oleh jemaat-jemaat di Nusantara ini. Yang lebih menggembirakan lagi ialah bahwa menyangkut sikap inklusif tadi ternyata telah mulai tumbuh menjadi isu nyata jemaat-jemaat di negeri ini. Saya kutipkan terlebih dulu analisis data buku ini atas isu kemajemukan agama (h. 58):

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan menyebarkan agama berhubungan sangat signifikan dengan peran dan

Percakapan Inklusif

Kristus adalah Juruselamat, Ia bekerja *melampaui* batas-batas.

Allah datang dengan kasih -dalam Yesus Kristus - yang *mengundang* dan menawarkan rahmat-Nya.

Gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil untuk *memberitakan* “tuhun kelimpahan Tuhan sudah datang”. Gereja bekerja realistik, dan berbagi harapan di tengah masyarakat Indonesia.

Umat Kristen percaya pada Kristus yang menganugerahkan kehidupan, **umat lain** menjalani imannya juga di dalam pemeliharaan kasih Allah (yang dijamin oleh Kristus karena kasih-Nya merangkul, bukan memisahkan).

kegiatan gereja. Apakah ini berarti peran dan kegiatan gereja-gereja Indonesia memiliki muatan misioner, atau dengan kata lain bahwa dalam peran dan kegiatan gereja terdapat motivasi menyebarkan agama? Jika benar demikian, apakah dengan demikian peran dan kegiatan gereja mainstream cukup kontekstual di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki pluralitas agama?

Diam-diam ada tanya bahkan syak dalam tulisan ini, yaitu bahwa orang Kristen hanya mau memakai konteks majemuk itu untuk kepentingan misionernya (75% responden memiliki motivasi besar dalam penginjilan untuk memenangkan jiwa-jiwa baru, lihat hl. 84), sehingga sesungguhnya kemajemukan belum mengundang gereja untuk mengembangkan teologi inklusif. Syak ini diperkuat oleh temuan bahwa gereja cenderung bersikap “introvert” dalam aktivitasnya, malah katanya “stagnan dalam ihwal spiritualitasnya” (h. 75), lalu eksklusif dalam klaim imannya (70% tidak setuju kalau orang yang tidak percaya Yesus juga masuk surga, lihat h. 152).

Lantas, *tertutupkah jalan* bagi sikap inklusif, percakapan yang tidak eksklusif, yang bisa menjadi dasar dalam *karya iman* di tengah masyarakat? Ternyata tidak tertutup sama sekali; dari data yang diperoleh, jemaat-jemaat kita di Indonesia ini menyadari dan sepakat bahwa **dalam dimensi praktik** (di tengah masyarakat) **gereja itu inklusif** (80% responden setuju bahwa gereja hadir untuk membangun masyarakat agar lebih baik, juga gereja akan tetap melayani warga masyarakat luas tanpa memaksa orang masuk Kristen, dan 70% warga sering mengucapkan selamat kepada penganut agama lain di Hari Raya-nya).

Maka, soalnya kini ialah: apakah kelanjutan *praktik iman inklusif* yang kita bisa hayati sekarang ini, kalau kita memang akan tetap mencari Allah (bertobat), lalu menerima kemurahan-Nya yang melimpah, yang telah menyintaskan hidup kita selama ini dari percobaan, namun yang kini kita mau bagi-bagikan bersama semua orang (sebab “...Tuhan itu Baik kepada *semua orang*”)?

Praktik/Karya Iman Inklusif dalam Masyarakat Indonesia

Ada 3 “buah-buah roh” inklusif yang bisa dipraktikkan gereja (dan juga umat Kristen di ranah sekularnya) - yang menjadi ihwal penting

demi *doing theology*, sebagaimana dicatat Aritonang dalam *Position Paper* untuk Bidang Gereja dan Teologi di KGM ini - yaitu *penyuburan saling percaya dalam masyarakat (social trust), aksi-aksi solidaritas, dan kesediaan mengambil tanggungjawab*^{*}. Melalui 3 praktik inilah kiranya realisme harapan Kristen itu mewujudkan dalam masyarakat kontemporer Indonesia.

1. *Social Trust*

Soal ini tentu sudah banyak dibahas para ahli sosial, bahkan dicatat bahwa pertumbuhan dan gerakan masyarakat (*civil society*) amat berhutang pada pembentukan unsur ini. Juga, dalam konteks yang lebih besar, soal kita di Indonesia ini ialah apakah ada saling percaya bahwa kita bisa hidup bersama dan menempuh pergolakan reformasi ini selaku saudara sebangsa.

Dari pemikiran sosial Locke, yang amat bercorak Calvinistik itu, ditegaskan bahwa setiap orang dapat diharapkan sebagai pribadi yang terpercaya, karena ia hidup dalam pemeliharaan dan pengawasan karunia Tuhan. Ini dasar bahwa seseorang adalah individu yang dapat diandalkan, khususnya ketika ia membangun sebetuk ruang sosial bersama sesamanya yang lain.

Hal ini sungguh penting, mengingat tingkat kerentanan hidup sedemikian tinggi di Indonesia ini, makanya orang-orang memilih korupsi tak tanggung-tanggung (sebagai jaminan ekonomisnya), atau orang memilih modus beragama fundamentalistik menghadapi *anomie* yang dihadapinya dalam pergaulan sosial (dan merasa menemukan keamanan dalam keyakinannya). Manusia saat ini begitu mudah “diambil” oleh industri budaya yang selalu menghasilkan objek-objek konsumsi baru untuk memenuhi hasrat manusia modern tadi. Objek-objek tersebut seolah memberi pengakuan kepada manusia, dan itu membutuhkan uang (makanya korupsi), dan kalau menolak budaya tadi, maka ia menjadi radikal dan militan.

* Ketiga praktik iman ini terinspirasi dari hasil pergulatan teologi sosial Dewan Gereja-gereja se-Dunia, yang refleksinya ada dalam buku suntingan Julio de Santa Ana et al. (eds.), *Beyond Idealism, A Way Ahead for Ecumenical Social Ethics* (Grand Rapids-Michigan, 2006).

Di sini kita memang bicara soal pengaruh globalisasi. Semakin tidak pasti perkembangan dunia tadi, semakin manusia mencari identitas yang kuat - yang ia anggap akan mengakuinya - yang rupanya kini dijaga oleh pasar hiburan, media modern dan agama fundamentalistis.

Globalisasi tadi secara mendasar terkait dengan pasar ekonomis yang terbuka namun terintegrasi. Pasar kecil menjadi bergantung pada pasar dunia. Jika terjadi krisis moneter, maka penyelenggaraan ‘kecil’ hidup kita sehari-hari pun menjadi krisis. Hidup menjadi rentan, dan sehari-hari nasib kita begitu telanjang (*brute-luck*), dan labil.

Perkenankan saya menceritakan kisah konkret dari sejarah Indonesia, yang membantu menegaskan betapa *trust* amat perlu bagi masyarakat kita. Adalah September 1965 tatkala drama global “perang melawan komunisme” mendekati masa traumatisnya di Indonesia. Berjuta-juta orang terserak dalam keputus-asaan, curiga satu dengan yang lain, lalu mencari tempat berteduh yang bebas dari kekerasan yang terus-menerus dan meluas dalam negara ini. Diperkirakan sekitar 500.000 orang Indonesia tewas dalam peristiwa tragis itu.

Akan tetapi, di bagian Timur pulau Jawa, dekat Gunung Bromo di Tengger, seratus orang meminta seorang pendeta Jawa membaptis mereka agar sungguh menjadi Kristen. Hal ini tentu saja bukanlah keputusan yang mudah.³

Tengger dikenal dengan ikatan kekerabatan dan kepercayaannya terhadap agama tradisional yang sering dinamai animisme itu. Tetapi agama tersebut bersifat kompleks, karena akar sejarahnya terpengaruh oleh Hinduisme yang telah menetap dan tumbuh dalam ritual kehidupan komunitas-komunitas ini. Ada juga sebuah komunitas Muslim yang kuat, yang berlokasi dekat Tengger dan memegang teguh sebetuk Islam puritan. Komunitas-komunitas yang berbeda itu

³ Untuk sebuah catatan yang lebih lengkap atas peristiwa ini, lihat Robert Hefner, “Of Faith and Commitment: Christian Conversion in Muslim Java”, dalam Robert Hefner (ed.), *Conversion to Christianity: Historical and Anthropological Perspectives on a Great Transformation* (Berkeley: University of California Press, 1993).

sebelumnya hidup dalam suasana harmonis bertetangga seperti biasanya, sesuai dengan prinsip budaya Jawa. Namun, ketegangan-ketegangan politik telah muncul dalam komunitas perkampungan di pegunungan ini, dan menempatkan mereka dalam keadaan bahaya.

Orang-orang Tengger yang telah masuk Partai Komunis dianiaya dan bahkan dibunuh. Meskipun kebanyakan dari orang-orang Tengger bukan partisan partai tersebut, mereka juga dicurigai sebagai anggota Partai Komunis lantaran agama tradisional yang mereka praktikkan tidak diakui oleh Negara. Dalam situasi ini, mereka juga merasakan tekanan dari komunitas Islam yang memuncak dalam permintaan kepada mereka untuk beralih menjadi Islam.

Pada saat yang sama, seratus orang tadi sedang mengambil bagian dalam perenungan atas teks-teks Alkitab dengan sungguh-sungguh dan mendalam. Dan pendeta Kristen itu mengatakan bahwa agama lama tidak sesuai dengan kepelikan hidup yang mereka sedang alami sekarang. Orang-orang Tengger berada dalam dilema, karena mereka diperhadapkan dengan kekerasan, dan karena mereka juga dicap sebagai anggota Partai Komunis. Mereka tak dipercaya, makanya mereka tidak dapat bekerja sebagai pegawai sipil atau guru, mereka telah menjadi sampah masyarakat.

Tetapi, ketika mereka berkumpul dan bersekutu, mereka dibawa ke dalam sebuah ruang kemungkinan-kemungkinan. Injil memperlihatkan kepada mereka kehidupan yang lain, suatu penerimaan atas diri mereka, sebetulnya *trust* yang terbangun melalui hadirnya “sebuah ruang bebas yang otonom dari tatanan sosial yang menekan, tanpa menyajikannya sebagai sebuah tantangan politik yang mengancam”.*

Tak kurang serba syak dan curiga dalam hidup masyarakat kita kini di Indonesia, dan kemampuan merangkul (inklusif) dan memperkenalkan *social trust* melalui persekutuan Kristiani akan membantu bangsa ini bertumbuh dan sintas bersama.

2. Aksi-aksi solidaritas

* *Ibid.*, h. 117.

Berkait dengan endemi *distrust* tadi, maka komunalisme merebak, dan cara berpikir pun menjadi partisan. Seolah sulit sekali menemukan bahasa bersama (di sini “bahasa Pancasila” seolah terancam) lintas kelompok, bahkan juga lintas-agama di negeri ini. Politik pun seolah adalah suatu medan sendiri yang eksklusif, yang tak pernah sungguh-sungguh mewakili konstituennya.

Gambar sosial yang berat dan terfragmentaris ini bisa kita lanjutkan lagi di sini, seperti Slamet tukang gorengan yang bunuh diri karena tak ada yang peduli padanya saat kedelai dan tempe menjadi mahal, yang mengakibatkan gorengannya terlalu mahal, dan ia pun “nombok”, dan akhirnya menumpuklah hutang yang tak tertalangnya. Dan ia tak tahu jalan lain, selain menyudahi segala-galanya.

Ini soal yang teologis, dan mendalam. Baik kalau ikhtiar teologisnya mulai dengan mencatat perjalanan hidup seorang praktisi teologi, Henri Nouwen, yang secara metaforis akan menunjuk sebetulnya aksi-aksi solidaritas tersebut[‡],

Tampak dalam kehidupan seorang seperti Henri Nouwen yang, dalam banyak bukunya, memetakan peziarahannya sendiri, yaitu dari seorang yang sebetulnya berfokus pada *pengetahuan* (sebagai seorang profesor di Harvard), berpindah kepada *pendiri komunitas* (sebagai seorang pembimbing spiritual), lalu berakhir pada sebuah karya dalam ‘*keragaan*’nya yang bersahaja – yang dikerjakannya melalui memberi makan, memandikan, dan membantu berpakaian seorang anak cacat mental yang bernama Adam, pada sebuah panti asuhan tempat ia melayani sebagai rohaniwan. Melalui Adam, Nouwen menemukan yang Ilahi dalam orang biasa, rentan dan yang menderita (penekanan oleh penulis, *mls*).

Sesuatu yang sederhana seperti Nouwen akan mengawali ihwal aksi-aksi solidaritas tersebut (sekali lagi ini bermula dari mencari Tuhan - bertobat - di hadapan sesama, “sebab Ia baik kepada semua

[‡] Lihat Vinoth Ramachandra, “The Posthuman: Technology as Salvation”, Ceramah pada Pertemuan CSCA Trinity Theological Seminary, Singapura, 2007 (tidak diterbitkan), h. 10.

orang”). Dan, kalau komunitas Kristen terbiasa dan dikenal sebagai umat yang selalu punya jalinan solidaritas di berbagai level kehidupan, maka ia akan memiliki posisi dan *claim* moral yang dihormati (gereja bekerja dengan *otoritas*, bukan dengan *power*). Dan tampaknya di situlah pula konteks pergumulan yang disebut sebagai “kontrak moral” gereja dengan negara melalui apa yang disebut sebagai *good governance* tersebut. Apakah dasar kristiani (atau dasar gereja) sehingga kita bisa masuk ke dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ini? Tak bisa lagi keikutsertaan kita semata-mata karena “perimbangan kekuasaan” (yang dulu - atau malah sampai sekarang - dipraktikkan secara menyedihkan dengan prinsip “minoritas tahu diri” itu). Namun kita bisa masuk ke dalam proses politik dan “*governance*” karena kita memiliki posisi moral. Jadi kita bisa masuk kepada isu legitimasi sebuah politik (ataupun pemerintahan) dengan mempertanyakan moralitasnya (dalam arti mempertanyakan kemampuannya memberi kesejahteraan, akuntabilitasnya ataupun keadilannya); sambil tentu menunjukkan bahwa dalam diri kita (umat Kristen) hal-ihwal moral politik tadi dapat terwujud. Dengan demikian upaya kooptasi negara atas gereja (seperti model “Cina” yang menuntut gereja nasionalistis), ataupun upaya kooptasi “gereja/agama” atas negara (seperti model Katolisisme Abad Pertengahan dulu) tidak akan menghasilkan apapun yang berkualitas moral.

3. Mengambil Tanggungjawab

Dalam menjalani hidup yang berkelimpahan sebagai akibat mencari Tuhan (dan bertobat), ternyata rentangan teologis yang terbuka darinya ialah bahwa yang melimpah itu (*the Gift*) adalah berkat yang harus sampai ke segala orang. Kalau kita mencoba melihat berkat itu sebagai suatu makna janji kepada Abraham (Kej. 12), maka dimensi berkat itu ialah tanggungjawab. Artinya berkat yang melimpah itu sungguh berarti kalau dengannya bangsa-bangsa lain pun terberkati dan hidup dalam kecukupan, dan perwujudannya menjadi tanggungjawab kita!

Pusat iman Kristen ialah Kristus, yang oleh Nama-Nya kita memahami apa yang sedang terjadi dalam sejarah ini. Kalau Nama Yesus menyimbolkan kasih dan pemeliharaan Allah yang tak terperikan, maka setiap nama akan juga menikmati kemungkinan-

kemungkinan berkat yang tak terperikan dalam kehidupan mereka. Di situ kita terkait dengan setiap nama, *dus* terkait dengan nasib dan kesulitan hidupnya: berarti bertanggungjawab padanya.

Di tahun 1968, Karl Barth ditanyai tentang pertumbuhan gerakan Pekabaran Injil di Jerman. Barth menjawab dengan mempertanyakan reaksi gerakan tersebut terhadap Perang Vietnam. Jawaban yang diterima Barth, “Vietnam itu tidak penting, yang penting adalah Nama Kristus”. Barth membalas, “Jika kita percaya kepada Nama Kristus, kita juga harus menamai apa yang sedang terjadi di Vietnam. Nama Kristus akan selalu memaksa kita untuk menamai setiap pribadi dan setiap tempat, khususnya mereka yang menderita”. Di sini oleh Nama Kristus, kita bertanggungjawab di hadapan setiap nama manusia yang menderita.

Tetapi di Indonesia betapa mudahnya orang menolak bertanggung jawab; apalagi atas peristiwa yang menciptakan bencana dan penderitaan rakyat. Kasus Lumpur Lapindo adalah saksi keadaan itu. Belum lagi atas peristiwa bencana alam yang tampak menetap dalam hari-hari di negeri kita ini. Tak bisa tidak, mesti ada yang mau bertanggungjawab; dan dari situ ia baru bisa menunjukkan langkah bersama memperbaikinya.

Tampaknya gereja perlu memasuki wilayah ini; bukan terutama karena gereja bersalah makanya ia *bertanggungjawab*, melainkan karena gereja ingin ikut *menjawab* keadaan yang berat di masyarakat dengan menunjukkan keikutsertaannya. Dan gereja harus menyertai keadaan berat itu, sebab kepadanya diberikan berkat yang melimpah untuk dibagi-bagikan; di sini gereja - kita semua - bertanggungjawab.

Bagian Kedua:
REKOMENDASI KGM

1. BIDANG POLITIK DAN IDEOLOGI

1. Kehidupan Bangsa Indonesia di bidang Politik dan Ideologi sedang mengalami krisis dan bahaya besar. Hal ini dapat dilihat dari adanya pengingkaran terhadap Pancasila dan terjadinya Pembusukan Politik (*political decay*) dalam UU, Praktik Hukum dan Praktik Ketatanegaraan. Ada upaya untuk menggantikan Pancasila dengan Ideologi lain. Gereja harus melawan upaya seperti itu. Pancasila harus tetap dipertahankan sebagai Dasar dan Ideologi Negara Republik Indonesia.
2. Pemimpin Negara/Pemerintahan saat ini dalam menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan masih jauh dari harapan masyarakat. Indikatornya adalah masih banyak rakyat yang miskin (\pm 40 juta orang), pengangguran, penegakan hukum yang masih tebang pilih, perlindungan terhadap rakyat yang belum memadai (TKI, TKW, dll), penanganan korban bencana alam yang tidak tuntas dan lain-lain. Gereja harus tetap mengingatkan pemerintah tentang hal itu.
3. Pemimpin dan Negarawan yang sejati yang patut dipilih dalam Pemilu 2009 adalah: berjiwa Pancasila, peduli pada rakyat, berani mengambil keputusan dengan tegas dan menegakkan hukum yang berkeadilan.
4. Demokrasi bukan semata-mata urusan Dominasi Mayoritas dan Tirani Minoritas, serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Demokrasi harus membawa keadilan, kesejahteraan, menghargai perbedaan/pluralitas/kebhinekaan, serta menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan penegakan hukum.
5. Saat ini di tengah masyarakat yang sedang membangun untuk meningkatkan kesejahteraannya dirasakan terjadi Fragmentasi Sosial Politik yang mengarah pada perpecahan bangsa dan negara. Jika Perjanjian Luhur saat mendirikan negara ini tidak berjalan dengan baik, maka Negara Federasi atau Otonomi Khusus akan menjadi tuntutan alternatif. Perlu ditegaskan, berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 telah dibayar dengan mahal oleh seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu setiap penyimpangan dan reduksi atas

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bentuk apapun adalah rongrongan atas keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu.

6. Sebagai konsekuensi Demokrasi, maka bermunculanlah partai-partai politik. Namun semua itu belum mencerminkan kebutuhan untuk menjawab kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Yang dirasakan hingga sekarang adalah bahwa partai-partai politik yang ada hanya menggunakan suara rakyat untuk kepentingan pribadi/partai yang bersangkutan. Gereja perlu kritis terhadap partai-partai yang mengatas-namakan agama.
7. Gereja perlu mendorong warga masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu 2009, sambil menggaris-bawahi seruan PGI & KWI tentang Pemilu yang menyatakan: *pertama*, perlu disadari bahwa melalui peristiwa Pemilu hak-hak asasi setiap warga negara di bidang politik diwujudkan. Oleh karena itu, setiap warga negara patut menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara hati nuraninya. Bagi rakyat, Pemilu pada hakikatnya adalah sebuah proses kontrak politik dengan mereka yang bakal terpilih. Tercakup di dalamnya kewajiban mereka yang terpilih untuk melayani rakyat, dan sekaligus kesediaan untuk dikoreksi oleh rakyat. Keinginan dan cita-cita bagi adanya perubahan serta perbaikan kehidupan bangsa dan negara dapat ditempuh antara lain dengan memperbaharui dan mengubah susunan para penyelenggara negara. Sistem Pemilu yang baru ini membuka peluang untuk mewujudkan cita-cita perubahan dan perbaikan itu, dengan memilih orang-orang yang paling tepat. Alkitab menyatakan : “. . . pilihlah dari antara mereka orang-orang yang cakap, setia, dan takut akan Tuhan, dipercayai dan benci pada pengejaran suap . . .” (bnd. Kel. 18:21). *Kedua*, masyarakat perlu didorong untuk terus menerus mengontrol mekanisme demokrasi supaya aspirasi rakyat benar-benar mendapat tempat. Sistem perwakilan yang menjadi tatacara pengambilan keputusan ternyata sering meninggalkan aspirasi warga negara yang diwakili. Hal ini terjadi karena para politisi wakil rakyat itu dalam pengalaman empirik ternyata tidak mampu secara optimal mewujudkan keinginan rakyat, bahkan mengingkari janji dan komitmen mereka.

Tindakan mereka tidak dapat dipantau sepenuhnya oleh rakyat. Tidak sedikit dari mereka yang terpilih beranggapan bahwa dengan jabatan itu mereka akan memperoleh keuntungan. *Ketiga*, hasil-hasil pemilihan umum harus benar-benar menjamin bahwa Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 tetap dipertahankan sebagai Dasar Negara dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum seharusnya memberikan jaminan bagi kelestarian negara kesatuan Republik Indonesia, jaminan pelaksanaan kebebasan beragama, terwujudnya pemerintahan yang adil, bersih dan berwibawa. Hasil-hasil pemilihan umum harus menjamin terwujudnya kehidupan politik yang semakin demokratis, pembangunan yang menyejahterakan rakyat, serta adanya kepastian hukum dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

8. Beberapa Rekomendasi:
 - a. Jangan menggunakan tempat ibadah untuk sosialisasi Parpol.
 - b. Usahakan mengadakan *lobby-lobby* kepada semua pihak, terlebih yang terlibat dengan para pengambil keputusan dalam masyarakat, baik di pusat maupun daerah, untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran, agar semua keputusan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (perlu dibentuk *Desk Lobby* gereja-gereja di Jakarta dibawah koordinasi PGI).
 - c. Menolak UU yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, seperti UU Pornografi.
 - d. Kepada seluruh elemen bangsa Indonesia diminta untuk mempertimbangkan kembali konsep bernegara NKRI yang secara sistematis melalui berbagai UU sedang memberangus Kontrak Politik UUD RI yang disepakati bersama pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menghormati keberagaman budaya dan agama di Indonesia, dan tidak didominasi dan dideterminasi kekuatan golongan tertentu. Sehingga, sudah saatnya konsep negara yang *unitarian* ini ditransformasi secara mendasar, sehingga terdapat jaminan hukum negara yang permanen untuk memberi tempat bagi berkembangnya adat istiadat, budaya-budaya, seni tradisi dan kepercayaan yang berbeda-beda disetiap daerah di negara Republik Indonesia.

2. BIDANG HUKUM DAN HAM

Pendahuluan

1. Sistem Hukum

Indonesia adalah Negara Hukum. Pernyataan ini dengan jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dengan demikian kehidupan ketatanegaraan, kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan haruslah berdasar atas hukum yang telah disepakati. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki satu kesatuan sistem hukum yang dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi Pancasila dan UUD 1945, sebagai dasar negara. Di dalam sistem hukum sedemikian, tidak ada hukum yang memberikan hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Itu berarti pembentukan hukum di satu sisi harus memperhatikan kemajemukan masyarakat, namun di sisi lain harus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Penegakan Hukum dan HAM

Dibandingkan dengan masa Orde Baru, penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia saat ini, haruslah diakui, dalam banyak hal lebih maju. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan masa Indonesia menggunakan Konstitusi RIS dan UUDS, UUD 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan dan yang digunakan sekarang dalam beberapa hal masih ketinggalan. Sebagai contoh dapat dilihat pada aspek kebebasan beragama, di mana Konstitusi RIS, Pasal 18, berbunyi; “setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama, hal ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka.”

Implementasi penegakan HAM di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Dalam konteks Indonesia yang tengah bertransisi ke dalam negara yang lebih demokratis selama sepuluh

tahun terakhir, timbul euphoria dari arus kebebasan yang lahir dari gerakan reformasi. Kenyataannya, arus kebebasan yang semestinya menjadi kekuatan konstruktif pembangunan bangsa malah menjadi persoalan baru. Sebagian masyarakat merasa berhak melakukan apa saja atas nama kebebasan, bahkan melalui cara-cara kekerasan dengan dalih memerangi ketidak-benaran menurut ukuran mereka sendiri atau kelompoknya dan memerangi kelompok lain yang tidak sepaham, tanpa mengindahkan hukum yang berlaku dan mengabaikan hak-hak asasi masyarakat sebagai manusia.

3. Posisi Negara

Peraturan Hukum yang diskriminatif ini sangat berpotensi memecah-belah persatuan, tidak senafas dengan prinsip hukum yang kita anut, yang memandang setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan tak sejalan dengan perlindungan HAM yang hendak kita tegakkan. Sangat disayangkan, negara lalai dalam tugasnya untuk meninjau-ulang seluruh produk hukum yang diskriminatif sedemikian. Dalam kondisi demikian, terkesan bahwa Negara tidak memposisikan dirinya untuk melindungi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

Posisi yang demikian semakin jelas terlihat dalam sikap pemerintah yang membiarkan terjadinya aksi-aksi anarkis oleh sekelompok masyarakat yang memaksakan kehendaknya untuk menutup rumah-rumah ibadah.

Pancasila sebagai Prinsip Dasar

Dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia, masih ada orang yang beranggapan bahwa perlindungan HAM dalam Konstitusi kita sangat dipengaruhi pola pikir individualisme atau liberalisme, seperti yang tertuang dalam Deklarasi Umum mengenai Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Anggapan yang keliru ini masih sering diwacanakan, karena ada anggapan bahwa nilai-nilai HAM itu tidak sesuai dengan kepribadian kita.

Namun sebenarnya, apabila kita dalami, penegakan hukum dan perlindungan HAM itu justru adalah pengamalan dari ideologi

Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila Ketuhanan yang Maha Esa.

Pancasila sebagai ideologi nasional adalah faktor pengikat dan pemersatu kita sebagai Bangsa. Tanpa Pancasila, tidak akan terbayangkan Negara kita yang begitu luas dan sangat majemuk dapat utuh dan bersatu sampai sekarang.

Realita dan Analisa

Dalam kenyataannya kini, cukup banyak produk-produk hukum yang diskriminatif di Indonesia, seperti lahirnya perda-perda syariah di beberapa daerah, bahkan juga dalam proses legislasi di tingkat nasional. Selain itu juga, masih ada produk-produk hukum yang hanya mengakomodasi kepentingan-kepentingan pemodal dan cenderung mengabaikan kepentingan rakyat banyak dan pemeliharaan lingkungan.

Hal-hal sedemikian bisa terjadi karena proses-proses politik yang melahirkan produk hukum tersebut masih sangat dikuasai oleh infrastruktur politik yang lekat dengan kepentingan-kepentingan kelompok dan sesaat. Dalam sistem politik yang demokratis, suprastruktur politik dan infrastruktur politik saling mempengaruhi dalam semua proses politik sebelum melahirkan sebuah produk hukum. Dalam konteks Indonesia kini, infrastruktur politik belum berjalan sebagaimana mestinya. Selain kecenderungan Partai Politik menggunakan dan memperjuangkan simbol-simbol emosional, produk hukum juga acap lahir tanpa melibatkan masyarakat dalam proses legislasi.

Sementara itu, dalam penerapannya juga ternyata masih jauh dari harapan. Dalam realitasnya masyarakat main hakim sendiri ketimbang menyelesaikan persoalan secara hukum; hal ini acap terjadi dan dibiarkan oleh negara. Dalam penyelesaian hukum pun, ternyata aparat hukum sering juga terjebak dalam tekanan kepentingan-kepentingan tertentu ketimbang kepentingan hukum itu sendiri. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam berbagai kasus hukum di mana kepentingan rakyat acap kali dikorbankan demi kepentingan pemodal. Hal yang sama juga terjadi antara kelompok minoritas yang acap kali dikorbankan karena tekanan kaum mayoritas.

Hal-hal sedemikian terbukti dengan lahirnya sejumlah undang-undang dan peraturan, seperti:

- UU nomor 1/1974 tentang Perkawinan
- UU nomor 7/1992 jo UU nomor 10/1998 dan UU nomor 23/1999 tentang Sistem Perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syariah
- UU nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah
- UU nomor 19/2008 Surat Berharga Syariah Negara
- UU Pornografi
- dan puluhan PERDA bernuansa agama di berbagai daerah.

Dari contoh-contoh ini terlihat adanya strategi melalui proses legislasi yang merupakan *grand design* untuk mengganti Dasar Negara Pancasila menjadi dasar negara Islam.

Rekomendasi

- a. Pancasila tetap dijadikan azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan diperjuangkan sebagai satu-satunya sumber hukum di negara Indonesia yang berlaku secara nasional.
- b. Pemerintah agar lebih tegas dalam menindak pihak-pihak yang melanggar hukum dan HAM tanpa memandang bulu, termasuk mereka yang melakukan tindak anarkhis atas nama agama.
- c. Pemerintah agar lebih lagi menjamin kebebasan beragama di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan Undang-undang.
- d. Memberi kewenangan yang lebih besar kepada Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan pembentukan serta pelaksanaan Pengadilan Adhoc HAM yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pelaksanaan

1. PGI memfasilitasi pertemuan dengan calon anggota legislatif lintas partai sebelum Pemilu dalam rangka pembekalan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan dari perspektif iman Kristen.
2. PGI memfasilitasi pertemuan dengan para anggota legislatif lintas partai terpilih setelah Pemilu, dan bila dianggap perlu mendorong pembentukan kaukus Kristiani.

3. PGI memfasilitasi pertemuan para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara) dalam rangka pembekalan nilai-nilai Kristiani pada pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.
4. Pembentukan Komisi Hukum dan HAM di setiap Sinode Gereja yang terlibat langsung dalam proses legislasi di tingkat Nasional (DPR) maupun lokal (DPRD) serta memberikan penyuluhan hukum kepada jemaat-jemaat lokal.
5. Gereja-gereja meningkatkan dan mengembangkan jaringan dan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat lintas iman dalam rangka mengadvokasi kasus-kasus HAM dan mengawal proses legislasi.
6. Guna mempercepat komunikasi dalam proses legislasi, maka gereja-gereja hendaknya memiliki sarana komunikasi modern (Website, E-mail) dan media komunikasi lainnya.
7. Membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat Pancasila (semacam *Pancasila Watch*), yang bertugas:
 - Mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pancasila dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - Mengawasi penegakan HAM di Indonesia.

Kesimpulan dan Penutup

Demi kelestarian dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pancasila sebagai Dasar Negara harus tetap dipertahankan dan tidak dapat ditawar lagi. Sehingga konsistensi dalam membangun hukum yang sesuai jatidiri Bangsa yakni Pancasila, dan melaksanakan penegakan hukum yang tanpa pilih bulu, adalah kunci keberhasilan dalam melindungi Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia.

3. BIDANG SOSIAL-EKONOMI

1. Pembangunan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pro pasar (liberal), yang dilaksanakan selama ini, telah menghasilkan multikrisis yang berkepanjangan, di antaranya: kemiskinan yang tetap tinggi (sekitar 37 juta orang versi BPS atau 111 juta orang versi World Bank); juga jumlah pengangguran yang masih banyak, termasuk pengangguran intelektual. Di samping itu, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah mengandalkan pinjaman modal dari dalam dan luar negeri, sehingga hutang pemerintah terus meningkat hingga mencapai Rp. 1.334 triliun meliputi hutang luar negeri US\$ 86 Milyar dan US\$ 59 milyar hutang dalam negeri.
2. Kebijakan ekonomi pro-pertumbuhan ini terbukti tidak mempunyai daya tahan terhadap pengaruh krisis finansial dan ekonomi global. Seperti sekarang ini, krisis keuangan global yang berawal dari AS telah membawa dampak yang cukup serius bagi perekonomian Indonesia, yang ditandai dengan tingginya tingkat inflasi (12% pada Oktober 2008), kurs Rupiah terhadap dollar AS yang sudah mencapai Rp. 12.200 per November 2008, bertambahnya perusahaan dan pabrik yang bangkrut dan tutup, kecenderungan meningkatnya impor hasil pertanian, ketimpangan pembangunan, dan ketimpangan struktural ekonomi.
3. Dengan demikian, sistem ekonomi yang mengejar pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dan secepat-cepatnya hanyalah menciptakan ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan pendapatan. Janji globalisasi ekonomi yang mengatakan bahwa dunia akan makin sejahtera dengan liberalisme juga tidak terwujud. Yang muncul justru adalah krisis, seperti krisis keuangan, pangan, energi, keamanan, lingkungan hidup, dll. Dan yang paling banyak menerima akibat terburuk dari berbagai krisis ini adalah rakyat banyak, khususnya orang miskin.
4. Gereja-gereja di Indonesia berpendapat bahwa krisis ekonomi ini muncul sebagai akibat paradigma *profit making* yang lebih mengarah pada kelompok dominan atau pemilik modal. Etos dominan dari globalisasi ekonomi adalah kompetisi untuk

mengejar kepentingan diri dan untung di kalangan pemodal besar saja. Paradigma ekonomi global seperti ini penuh dosa dan kejahatan yang membawa pada kehancuran dan kematian. Oleh karena itu, harus ditolak dan diganti dengan sebuah paradigma ekonomi yang pro-rakyat banyak, khususnya mereka yang miskin.

5. Paradigma ekonomi yang pro-rakyat itu adalah AGAPE, yaitu: sebuah sistem ekonomi global yang dijalankan di atas prinsip cinta-kasih yang berorientasi kepada Allah, manusia dan alam semesta. Etos dominannya bukanlah pencarian untung semata, tetapi cinta-kasih, di mana pembangunan ekonomi harus mengutamakan keadilan, damai sejahtera, dan sukacita bersama, dari semua untuk semua.
6. Atas dasar itu, KGM ini merekomendasikan hal-hal berikut:
 - 6.1. Supaya pemerintah:
 - Mengkaji-ulang kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi selama ini. Dalam hal ini, ada dua strategi yang dalam implementasinya dapat dikombinasikan, yakni: **Pertama**, revitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) atau pembangunan ekonomi berbasis masyarakat (*community based economic development*). Mendorong kesungguhan perusahaan (BUMN dan BUMS) untuk merealisasikan CSR ke arah penguatan ekonomi. **Kedua**, reaktualisasi pembangunan sosial seiring pembangunan ekonomi. Diharapkan melalui kedua strategi tersebut, akan tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai pemerataan yang berkeadilan sosial bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
 - Meninjau ulang seluruh perjanjian kontrak (renegosiasi) dalam kerjasama ekonomi antar negara.
 - Mengembangkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pendekatan *Holistic Learning* (IQ, EQ, SQ dan PQ).
 - 6.2. Supaya Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI):
 - menyampaikan suara kenabian yang menolak sistem ekonomi yang tidak adil dan menawarkan solusi alternatif

bagi penciptaan ekonomi yang membawa keadilan dan kesejahteraan bagi semua manusia.

- membuka dan memperluas jejaring ke pihak swasta dan pemerintah, dan lembaga-lembaga sosial ekonomi lainnya.
- membuat *contingency plan* untuk merespons krisis keuangan global yang berdampak terhadap ekonomi Indonesia.

6.3. Supaya gereja-gereja dan lembaga-lembaga pelayanan Kristen:

- Mengembangkan kewirausahaan di kalangan jemaat;
- Membangun kemitraan antar jemaat di tingkat lokal, nasional dan internasional;
- Memperkuat pelayanan kategorial yang Oikoumenis dan Diakonia Transformatif;
- Mengembangkan SDM melalui layanan pendidikan dan kesehatan.

4. BIDANG PENDIDIKAN

I. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi dari setiap manusia dalam proses mempersiapkan diri menuju masa depan yang lebih baik. Dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa “setiap manusia Indonesia berhak mendapatkan pendidikan sebagai pemenuhan salah satu kebutuhan dasarnya dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup”. Dengan demikian pendidikan memiliki makna yang amat strategis dalam meningkatkan SDM yang berkualitas demi mencapai kesejahteraan hidup.

Namun pada kenyataannya, pendidikan belum mendapat perhatian utama dalam kehidupan bangsa kita. Realitas yang sangat menyedihkan adalah, sejak kemerdekaan sampai saat ini pendidikan belum menempati posisi sentral dan strategis dalam upaya mengisi kemerdekaan dan dalam menjawab amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu akibatnya adalah rendahnya kualitas SDM Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan kita masih di bawah Vietnam.

Gereja yang diutus Tuhan di tengah dunia memang tidak bisa tidak harus menjadi gereja yang *concern* (peduli) terhadap pergumulan dunia sekitarnya, bahkan juga terhadap pergumulan masyarakat dan bangsanya. Tanpa memiliki sikap seperti itu, gereja tidak lebih dari sekedar persekutuan yang eksklusif, introvert, yang hanya menjadi pemantau dan pengamat di tengah sejarah.

Gereja wajib memberi perhatian khusus kepada pelayanan pendidikan dalam skala yang lebih luas, disertai peningkatan mutu lembaga dan semua peserta didiknya. Berbicara mengenai pendidikan maka hal ini adalah salah satu aspek yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia.

Sejak Yesus bekerja di dunia, Ia telah menunjukkan pentingnya pengajaran dan pendidikan kepada murid-murid-Nya dan manusia sekelilingnya. Tujuannya adalah agar manusia mengenal Kerajaan Allah dan berkat anugerah yang Dia bawa. Di dalam hal itu Yesus

yang terus bekerja memberikan contoh kehidupan yang bertanggung jawab kepada pengikut-pengikut-Nya. Setelah Yesus menyelesaikan pekerjaan-Nya di dunia ini, salah satu tugas utama yang diamanatkan kepada para murid/pengikut-pengikut-Nya adalah mengajar dan melayani, memberitakan firman, membaptiskan (Mat. 28:19). Yang menjadi sumber dan acuan utama tugas dan muatan pendidikan dan pengajaran bagi jemaat mula-mula adalah Kitab Suci (2 Tim. 3:16-17).

Jadi sejak semula umat Allah dan Gereja dalam Perjanjian Baru telah mengemban dan melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran ini, baik dalam arti pewarisan iman, nilai dan pengetahuan, maupun dalam rangka pembentukan watak yang bertolak dari iman dan jati diri kristiani, yang semuanya bertujuan menghasilkan perubahan dan peningkatan dalam diri manusia, sebagai pribadi maupun persekutuan/masyarakat. Tugas itu telah diemban dengan setia selama 20 abad, walau harus diakui bahwa di sana sini dan kadang-kadang gereja lalai mengemban tugas itu.

KGM VIII telah bergumul dengan isu nasional mengenai pendidikan. Pikiran-pikiran pokok berikut adalah hasil pergumulan itu.

II. Gereja dan Pendidikan

- Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) 2004-2009, Bab V-C, butir 6, mengatakan bahwa sejak zaman Zending gereja-gereja telah menjalankan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan. Usaha-usaha itu tidak hanya dijalankan oleh gereja-gereja sendiri, tetapi oleh lembaga-lembaga yang secara khusus didirikan untuk melaksanakan pelayanan di bidang tertentu, dengan memperjuangkan hal-hal berikut:
 - Mengupayakan berbagai jenis pendidikan yang mendorong terciptanya lapangan kerja
 - Memajukan pendidikan nasional yang mencakup: pendidikan nilai (pembinaan spiritual, moral, etik) dan pembinaan keterampilan dan profesional yang berbasis kewilayahan.
 - Dalam rangka *civil society*, diupayakan memberikan *civic education* dan pendidikan multicultural.

- Membangun dan memperluas jejaring lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan gereja untuk saling menopang dan meningkatkan kualitas pendidikan.

- Mendorong dan mendesak gereja-gereja untuk merevitalisasi kembali peran dan fungsi gereja.
- Mendorong gereja-gereja untuk tetap memperhatikan sekolah-sekolah Kristen, walaupun gereja-gereja tersebut tidak memiliki sekolah.
- Mendorong gereja-gereja untuk mengalokasikan dana khusus untuk pendidikan.
- Meningkatkan kemandirian peserta didik, pembinaan sikap berdisiplin, sikap berprakarsa dan kreativitas sangat perlu diusahakan baik di rumah (dalam keluarga) maupun di sekolah.
- MPH PGI diharapkan mendorong gereja-gereja untuk memperhatikan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan guru-guru, dosen yang beragama Kristen di semua jenjang pendidikan, baik formal maupun informal, serta membantu peningkatan pendidikan dan kompetensi guru-guru.
- MPH PGI diharapkan mendorong gereja-gereja untuk meningkatkan hubungan kerja sama secara sinergis antara lembaga kristen dalam rangka pengadaan guru-guru yang kompeten; kerja sama dengan mitra-mitra dan lembaga donor baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas SDM guru/dosen.
- MPH PGI diharapkan dapat mendukung program MPK dalam meningkatkan kualitas kinerja (manajemen) kepala sekolah dan kompetensi guru-guru Sekolah Kristen melalui **Program Anak Asuh** yang menjadi program prioritas bagi MPK dalam beberapa tahun mendatang. **Program Anak Asuh** tersebut merupakan program "eksperimentasi" di mana "sekolah yang terbaik" di suatu daerah (di dalam suatu MPK Wilayah) menjadi tempat belajar/magang kepala sekolah dan guru-guru yang masih lemah dan memerlukan pembinaan/supervisi. Hal-hal yang memerlukan *expertise* yang lebih tinggi atau yang belum ada di daerah tersebut, dapat dibantu oleh MPK Pusat. Setiap tahun, kalau perkembangan sekolah-sekolah yang dibina mendapat

kemajuan, sekolah lainnya akan mendapat giliran sebagai "sekolah yang diasuh".

- MPH PGI diharapkan mendorong dan "memfasilitasi" gereja-gereja untuk menyelesaikan konflik-konflik internal gereja (dalam hubungan dengan lembaga pendidikan: sekolah-sekolah Kristen, perguruan tinggi/sekolah teologi), yang menghambat proses pendidikan.

III. Gereja & UU Sistem Pendidikan Nasional

Mendorong dan mendesak MPH PGI dan gereja-gereja untuk melakukan kajian kritis terus-menerus terhadap berbagai produk perundang-undangan yang berhubungan dengan pendidikan, sehingga tidak mereduksi ciri dan identitas pendidikan Kristen.

- Meninjau kembali fungsi STAKN (Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri) yang juga menyelenggarakan pendidikan kependetaan [lihat PP 55 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan], dengan pertimbangan bahwa mendirikan sekolah teologi adalah tugas gereja bukan pemerintah.

IV. Pendidikan Teologi

- Mendorong sekolah-sekolah teologi secara berkala meninjau kurikulum yang ada sesuai perkembangan pendidikan yang menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat.
- Peningkatan hubungan kerja sama antara lembaga pendidikan dan dunia usaha, terutama dalam rangka pelatihan/pemberdayaan, dan kaderisasi.

V. Hubungan dengan Pemerintah

- Pemerintah harus memberi perhatian khusus terhadap sarana dan prasarana pendidikan di desa dan di daerah terpencil.
- Kesejahteraan pendidik di pedesaan dan daerah-daerah terpencil harus mendapat perhatian serius dalam rangka pemerataan pendidikan.

5. BIDANG KEADILAN JENDER DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA

1. Meski telah banyak hal dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia untuk mengatasi masalah ketidak-adilan jender dan marjinalisasi pemuda, namun fakta mengatakan bahwa masih terjadi banyak praktik kekerasan dan diskriminasi terhadap kedua kelompok itu. Praktik kekerasan dan diskriminasi tersebut bersumber pada struktur sosial dan budaya patriarkis, yang cenderung hirarkis, memusatkan kekuasaan, eksklusif dan elitis. Akibatnya, hanya sekelompok orang tertentu saja yang dianggap memiliki otoritas sebagai penentu dan pengambil keputusan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat; sehingga menciptakan peluang terhadap terjadinya subordinasi dan dominasi kelompok berkuasa atas yang lain.
2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan pemaknaan kembali panggilan dan pengutusan Gereja sebagai rumah tangga Allah (*God's household*), yang aman dan memulihkan bagi semua, sekaligus menjadi alat karya penyelamatan Allah bagi dunia. Dalam hal ini, gereja-gereja mengakui bahwa masih terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan pemuda gereja. Oleh karena itu, gereja-gereja perlu melakukan pembaruan pemikiran teologis dan praksis berteologi yang membebaskan demi keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan.
3. KGM merekomendasikan hal-hal berikut:
 - a. **Keadilan Jender:**
 1. Mengarus-utamakan keadilan jender dalam seluruh pemikiran dan program gereja/jemaat.
 2. Memakai metode Membaca Alkitab dengan Mata Baru sebagai alat melakukan analisa dan tafsir yang adil jender dan membebaskan perempuan dan laki-laki dari patriarki dalam gereja.
 3. Mengembangkan kurikulum/bahan ajar pembinaan gereja (katekisasi, PWG, pembinaan kategorial, bahan khotbah, buku renungan, jurnal gereja, dll.), dengan muatan materi tentang keadilan jender, penguatan kesadaran tentang identitas perempuan dan laki-laki (sebagai *imago Dei*),

- pendidikan seksualitas, hak kesehatan reproduksi perempuan, info dasar HIV-AIDS, dan *trafficking*.
4. Menindak-lanjuti hasil pemikiran dan riset lembaga gereja dan lembaga pendidikan teologi mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk program konkret, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka mengatasi kekerasan terhadap perempuan.
 5. Menjadikan mata kuliah Teologi Feminis sebagai mata kuliah wajib dalam lembaga pendidikan tinggi teologi milik gereja atau yang didukung oleh gereja.
 6. Melakukan pendampingan dan advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, KDRT, kekerasan struktural/pemiskinan, marginalisasi sosial-politik, kekerasan dalam gereja, dll., agar mereka memiliki akses dan menikmati haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.
 7. Membangun dan mengembangkan *Women Crisis Centre/Women Shelter* (sebagian gereja menyebutnya Rumah Aman, Rumah Pendamaian).
 8. Mengembangkan pemikiran dan program yang sistematis dan berkelanjutan untuk pembekalan dan pendidikan kewargaan (HAM, hukum, politik, dll.) bagi perempuan, agar siap berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan bangsa, khususnya dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
 9. Melaksanakan pelayanan yang menjangkau kelompok yang paling termarjinalkan dalam gereja dan masyarakat, yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK), Lesbian, Gay, Bisexual & Transjender (LGBT), Orang yang Hidup dengan HIV-AIDS (ODHA/OHIDA), perempuan penyandang cacat, dll.
 10. Gereja-gereja di 5 Provinsi (Bali, Sulut, Papua, Jogya, NTT) mendukung/mendesak pemerintah Provinsi untuk tidak memberlakukan UU Pornografi di daerahnya.

b. Pemuda

1. Membangun kesadaran pemuda akan identitasnya sebagai pemuda gereja dan anak bangsa yang berkualitas, memiliki visi dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, lingkungan hidup, dan Iptek.
2. Mengembangkan pelayanan terpadu untuk pertumbuhan spiritualitas dan intelektualitas pemuda gereja. Ibadah yang diselenggarakan harus menghidupi hati dan pengalaman kehidupan warga jemaat supaya dapat pergi dan hidup seperti Kristus.
3. Meningkatkan peranan pemuda dalam sistem dan proses pengambilan keputusan lembaga/komunitas gereja, termasuk menentukan program dan anggaran gereja.
4. Membangun advokasi dan pendampingan bersama secara konkret dan berkesinambungan bagi pemulihan pemuda korban kekerasan, NAPZA, HIV-AIDS, keluarga yang retak (*broken home*), *trafficking* dll. Membuka akses alternatif bagi pemuda pengangguran menuju kesempatan kerja.
5. Mendukung proses regenerasi dan kepemimpinan pemuda yang dilakukan oleh lembaga kepemudaan berbasis gereja, seperti: GMKI, GAMKI, YMCA, YWCA, dll.
6. Memberi perhatian pelayanan pada pemuda gereja yang adalah mahasiswa Perguruan Tinggi agar terjadi keseimbangan pendidikan dan pertumbuhan kesalehan pribadi yang seiring dengan kesalehan sosialnya.
7. Melakukan pembinaan yang sistematis dan intensif dalam rangka kaderisasi pemuda gereja yang bertumbuh dengan visi untuk menjadi pemimpin masa depan.
8. Pemuda diharapkan menjadi dinamisator bagi terciptanya dialog-dialog transformatif dalam bentuk verbal dan karya dengan penganut agama lain yang menyentuh bagian akar rumput, bukan hanya pada level elite gereja.

6. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

1. Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya-raya. Tetapi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan eksploitasi yang terus meningkat telah menyebabkan kualitas lingkungan hidup semakin menurun. Berbagai kerusakan lingkungan seperti degradasi air dan lahan/tanah, deforestasi hutan, kepunahan jenis binatang dan tumbuhan, perubahan atmosfer, serta degradasi masyarakat dan budaya (kearifan lokal), adalah beberapa contoh yang terjadi kini, yang mengakibatkan perubahan iklim yang tak menentu, bencana banjir dan longsor, meningkatnya penyakit epidemi seperti demam berdarah dan malaria, pemanasan global, dll., yang semuanya itu dapat mengancam manusia dan alam semesta.
2. Penyebab-penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan hidup a.l. adalah: eksploitasi SDA untuk kepentingan devisa, tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan; pembukaan lahan hutan (hutan cadangan dan areal penggunaan lain), seperti ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit atau jenis lain, yang menggantikan kawasan hutan tersebut; intensifikasi pertanian yang berlebihan dengan ketergantungan terhadap *input* pupuk an-organik dan bahan-bahan beracun, seperti: pestisida, insektisida, herbisida; lemahnya penegakan hukum dan pengawasan pemerintah yang kurang optimal terhadap dunia usaha dalam mengolah dan mengelola SDA; rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat.
3. Alkitab mengajarkan bahwa alam semesta adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia untuk diusahakan. Itu berarti Allah memberi mandat bagi manusia untuk mengambil manfaat dari kekayaan alam. Tetapi berbarengan dengan itu Allah juga menugaskan manusia untuk memelihara alam (Kej. 1:28; 2:15). Maka tugas mengusahakan dan memelihara itu harus dilaksanakan manusia secara seimbang sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah pemilik alam semesta ini, dan demi kelestarian alam dan lingkungan hidup untuk diwariskan bagi generasi mendatang.

4. Tugas dan tanggung jawab memelihara SDA dan lingkungan hidup bukanlah hanya tugas pemerintah, tetapi tugas setiap orang sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing. Pemerintah misalnya, selama ini telah melakukan ragam upaya pelestarian alam dan lingkungan, seperti: reboisasi, penghijauan, konservasi satwa liar, pembangunan kawasan hijau kota, dll. Namun itu belum cukup mampu mengimbangi proses perusakan lingkungan yang terjadi. Karena kondisi lingkungan hidup sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku setiap orang, maka setiap orang haruslah berperan aktif mendukung terpeliharanya lingkungan hidup yang baik, bersih dan sehat.
5. Gereja-gereja Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa ini, juga memiliki tanggung jawab moral dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Hal ini sudah tertuang dalam Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) 2004 yang menegaskan: "Gereja terpanggil untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, yang mengandung makna tanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan Tuhan. Tuhan memberi mandat kepada gereja untuk mengusahakan dan memelihara seluruh ciptaan." Maka umat Kristen pun mestinya menjadi hamba-hamba Allah yang sadar lingkungan dan berperan aktif dalam memelihara kelestariannya.
6. Dengan pentingnya pemanfaatan SDA bagi kesejahteraan umat manusia, maka upaya pelestarian alam dan memelihara lingkungan hidup itu menjadi keharusan demi terciptanya hidup yang berdamai-sejahtera dan berkeutuhan-ciptaan secara sinambung. Oleh karena itu, KGM merekomendasikan kepada:
 - a. **Pemerintah:**
 - 1) Melakukan penghentian sementara (*moratorium*) penebangan hutan untuk tujuan komersial dan berkonsentrasi pada rehabilitasi dan reboisasi hutan secara intensif dan ekstensif, dalam jangka waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.
 - 2) Selama kemampuan teknologi yang aman dan ramah lingkungan belum tersedia, serta sumber daya manusia

belum memadai, tidak diperkenankan penambangan di bawah hutan lindung.

- 3) Membuat batasan luas bagi perkebunan sawit dan tanaman lainnya (perwilayahan komoditas), sehingga ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit atau jenis lain yang mengubah kawasan hutan cadangan atau areal penggunaan lain harus dihentikan.
- 4) Tindakan pengawasan dan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) harus dilakukan kepada siapapun, tanpa kecuali.
- 5) Mengawasi pembuatan AMDAL supaya dilakukan secara benar dan jujur dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.
- 6) Melaksanakan dengan tegas undang-undang dan peraturan lainnya dalam hubungan dengan polusi dan pengrusakan lingkungan.
- 7) Bertanggung jawab dalam pembinaan Sumber Daya Manusia, melalui pendidikan formal, informal dan non-formal.

b. Swasta, Dunia Bisnis yang mengelola Sumber Daya

- 1) Bertanggung jawab penuh terhadap kelestarian sumber daya alam di lokasi perusahaan dan sekitarnya.
- 2) Memberdayakan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga setempat.
- 3) Memfasilitasi dan mendukung upaya-upaya pemeliharaan alam dan lingkungan yang dilakukan masyarakat atau lembaga-lembaga lokal.

c. Masyarakat

- 1) Menggali dan menghidupkan kembali budaya/kearifan lokal dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam.
- 2) Berperan aktif dalam upaya pengamanan sumber daya alam dan lingkungan di wilayahnya.
- 3) Mengembangkan pertanian selaras alam, seperti: memanfaatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, pemakaian pupuk organik sebanyak-banyaknya dan minimalisir konsumsi bahan-bahan yang bersifat an-organik, termasuk penggunaan pupuk buatan.

- 4) Mempertahankan keanekaragaman hayati dalam budidaya pertanian di wilayahnya.

d. Gereja

- 1) Membangun jejaring untuk bekerjasama dalam pelestarian dan pengembangan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Khusus kemitraan dengan pemerintah Gereja perlu bijak dan berhati-hati dalam pemanfaatan bantuan anggaran untuk tujuan politis.
- 2) Menyusun kurikulum Pembinaan Warga Gereja (termasuk Sekolah Minggu hingga Katekisasi), lembaga pendidikan teologi dan lembaga pendidikan lainnya, tentang pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam.
- 3) Membina warganya untuk melakukan penghematan sumber daya alam sekaligus berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

7. BIDANG PLURALISME

1. Pluralisme Agama adalah penghayatan terhadap keanekaragaman, diikuti dengan pertemuan aktif intra-antar umat beragama yang berlainan, kesediaan membangun komunikasi yang rasional dan aktif untuk saling memahami kesamaan dan perbedaan, dan kesediaan bekerjasama dalam menangani masalah bersama seperti ketidak-adilan, kemiskinan, korupsi, dan sebagainya. Pluralisme harus dilihat bukan sebagai gangguan terhadap iman pribadi; justru dengan pluralisme itu semua unsur diajak untuk berintrospeksi dalam konteks relasi dengan umat beragama lain. Pluralisme merupakan jalan bagi agama-agama untuk kembali pada panggilan dasarnya: memperjuangkan damai sejahtera (*shalom*) Allah sendiri, agar bumi ini menjadi *oikos*, yakni "tempat yang layak dihidupi bersama".
2. Problem Pluralisme intra-agama: meskipun banyak hal-hal positif dalam relasi internal, tetapi banyak juga persoalan yang dihadapi dalam konteks pluralisme, antara lain: perbedaan teologi, egoisme gereja, tertutup, tidak saling mengakui, menganggap diri paling benar (*triumphalisme*), gereja lebih dipahami sebagai doktrin dari pada sebagai sebuah relasi (eksklusif), dan apatisisme.
3. Problem Pluralisme antar-agama: Persoalan teologi (*eksklusivisme*, *triumphalisme*), sosio-psikologis (kompleks mayoritas-minoritas, elitis, *prejudices*, dan ketidak-percayaan sosial antar agama), juga persoalan politis (UU dan Perda-Perda yang diskriminatif), dan ketidak-siapan berdialog.
4. Sikap gereja terhadap Pluralisme:
Dalam terang tema KGM-PGI VIII tahun 2008, "Tuhan itu baik kepada semua orang" (Mzm. 145:9a), dan ajakan Rasul Paulus dalam Galatia 6:10b: "marilah kita berbuat baik kepada semua orang", maka gereja memahami pluralisme sebagai anugerah dan kesempatan menjalin kerjasama untuk kebaikan bersama dan persaudaraan, sambil tetap menghargai keunikan masing-masing.
5. Usul dan rekomendasi kepada:
 - a. Pemerintah:

- mendesak terus-menerus, baik melalui gerakan politik maupun penggalangan opini publik, agar pemerintah mengambil sikap tegas dalam menjamin hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang merupakan hak asasi setiap warga negara, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
 - mendesak terus menerus agar aparat keamanan mengambil tindakan tegas terhadap aksi-aksi sekelompok kalangan yang memakai cara-cara kekerasan, baik fisik maupun simbolik, dalam menyikapi perbedaan pandangan maupun keyakinan.
 - mendesak pemerintah untuk berinisiatif mengajukan dan mendorong proses legislasi produk hukum yang mengikat untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan beribadah secara konkret. (Dalam konteks ini jaminan ditujukan bukan hanya kepada enam agama "resmi", melainkan juga terhadap agama-agama "tidak resmi".)
 - mendesak pemerintah untuk tidak mengeluarkan UU dan Perda yang diskriminatif (contohnya: UU pornografi).
 - mempertahankan Pancasila sebagai ideologi nasional yang menjamin pluralisme dan persatuan nasional.
- b. Gereja:
- membangun teologi yang *inklusif-pluralis* yang terbuka dan mempertimbangkan pluralisme agama sebagai konteks berteologi.
 - terus menerus mengkritisi produk perundang-undangan yang diskriminatif.
 - membangun relasi melalui dialog intra- dan antar-umat beragama yang intensif untuk menghasilkan sesuatu untuk kepentingan bangsa dan memecahkan masalah kemanusiaan.
 - melakukan advokasi terhadap korban-korban (gereja dan umat beragama lain) akibat ketidakadilan oleh kekerasan atas nama agama.
6. Dalam konteks Globalisasi, gereja mendukung perjuangan Antidiskriminasi dan penghapusan kemiskinan.

7. MASALAH PAPUA

I. Dasar Pemikiran

1. Peranan gereja-gereja melalui zending di masa lalu sesungguhnya telah mengubah peradaban sehingga menjadi lebih baik dalam pendidikan dan kesehatan. Misi ini perlu dikembangkan saat ini juga oleh gereja-gereja.
2. Kondisi masyarakat Papua yang masih memprihatinkan, walaupun telah 45 tahun mereka merdeka, baik dalam bidang sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
3. Kondisi SDA yang kaya raya bertolak-belakang dengan kondisi masyarakat yang terkebelakang dan miskin.
4. Adanya ketakutan masyarakat Papua karena pengalaman termarginalisasi selama ini lewat kegiatan-kegiatan Pemerintah Pusat yang berorientasi pada pendekatan keamanan.

II. Rekomendasi

1. KGM menuntut Pemerintah Pusat agar UU Otsus Papua sungguh-sungguh dilaksanakan secara utuh, konsekuen dan konsisten.
2. KGM menuntut Pemerintah untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pemda Papua dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua yang berorientasi pada masyarakat dan berbasis kampung.
3. Mendesak Pemerintah Pusat untuk menghentikan pendekatan keamanan dan menggantikannya dengan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan.
4. KGM mendukung upaya untuk melindungi kelangsungan hidup penduduk asli dan budaya lokal Papua dari usaha-usaha *genocide*.
5. KGM menghimbau dan mendorong gereja-gereja di Indonesia untuk terus menerus menunjukkan keberpihakan

kepada perjuangan rakyat Papua dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di tanah Papua.

6. Secara khusus KGM mengajak gereja-gereja di tanah Papua untuk lebih mendukung usaha-usaha Pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

9. BIDANG GEREJA DAN TEOLOGI

I. Pendahuluan

a. *Potret Situasi*

- Realitas kondisi Indonesia saat ini masih memprihatinkan. Krisis kebangsaan yang muncul seiring dengan pola pikir yang eksklusif masih terjadi dan mengakibatkan terancamnya keutuhan dan kesatuan bangsa. Dalam skala yang lebih kecil hal ini ditunjukkan dengan krisis nilai yang mengakibatkan banyaknya tabrakan-tabrakan kepentingan di tengah masyarakat Indonesia.
- Nilai ekonomi sangat mendominasi, sehingga muncul korupsi yang luar biasa; di satu pihak ini memperkaya koruptor, namun di sisi lain ekonomi rakyat diterlantarkan. Demikian pula dengan nilai-nilai agama, ada kecenderungan semakin bergeser ke arah fundamentalisme yang memunculkan fanatisme dan yang bisa berujung pada kekerasan atas nama agama. Pandangan manusia terhadap alam juga semakin berubah. Alam bukan lagi dilihat sebagai anugerah yang harus dikelola dan dipelihara, melainkan justru dieksploitasi secara berlebihan.
- Melemahnya relasi bukan saja dengan alam, tetapi juga dengan sesama manusia, termasuk lelaki dan perempuan, serta antar kelompok. Relasi antar kelompok semakin memburuk karena dilanggarnya kesepakatan yang telah disetujui bersama. Di aras atas sudah ada kesepakatan bersama, tetapi tidak diimplementasikan secara konsisten, sehingga konsolidasi antar kelompok sulit dilakukan. Akibatnya muncul rasa curiga antar kelompok dan inilah yang memperlemah ikatan sosial dalam masyarakat. Tampaknya, politik Indonesia juga dijalankan dengan kerangka seperti itu, sehingga kita semakin terpecah-pecah.
- Dalam ranah pendidikan pun, kita sulit mengharapkan munculnya generasi yang terbuka akibat sistem pendidikan dijalankan berdasarkan semangat sektarianisme. Pendidikan

juga semakin mahal, karena diperlakukan sebagai lahan bisnis, sehingga masyarakat pada umumnya sulit mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

- Kita juga masih menyaksikan adanya ketidak-adilan dalam hukum dan masih terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pembuatan produk hukum dan pemberlakuannya masih memperlihatkan adanya unsur-unsur yang diskriminatif. Dalam persoalan Papua, masih dijumpainya ketidak-adilan, baik terhadap masalah hukum, pendidikan, ekonomi, budaya, dan adat.
- Walaupun demikian, kita juga melihat adanya hal-hal positif, antara lain: Demokrasi berjalan semakin baik, upaya pemberantasan korupsi sudah memperlihatkan kemajuan, kesadaran akan pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup juga semakin tumbuh, dan kesadaran kebangsaan mulai tumbuh lagi. Kemajuan teknologi, transportasi dan informasi teknologi juga semakin dirasakan manfaatnya. Penetapan anggaran negara untuk pendidikan 20 % dalam UUD juga menjanjikan pendidikan yang lebih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

b. *Kesadaran tentang Panggilan dan Tanggung Jawab Gereja*

Dalam sepuluh tahun terakhir ini Gereja telah banyak berperan dalam melayani orang-orang yang membutuhkan, mengatasi konflik, dan peduli terhadap masalah di sekitarnya. Namun demikian, gereja harus lebih lanjut menggali lagi jati dirinya dalam merespons secara positif dinamika yang berkembang. Penggalan jati diri tersebut dimulai dengan mengembangkan pemahaman tentang **Koinonia**. Koinonia yang selama ini diartikan eksklusif, yang hanya menyangkut keesaan gereja dan persekutuan sesama warga gereja, perlu dikembangkan ke koinonia yang inklusif, yang melampaui batas-batas denominasi maupun agama. Dengan demikian gereja-gereja di Indonesia dapat mempraktikkan ketiga buah-buah Roh inklusif yaitu: *social trust*, nilai-nilai solidaritas dan mengemban tanggung jawab, sambil disemangati oleh

pengosongan diri dan kesediaan bersinergi dengan pihak-pihak lain yang berkehendak baik.

Perlu kesadaran bersama agar gereja lebih meningkatkan peran dalam kehidupan berbangsa dengan bentuk dan cara yang lebih jitu dan mengena. Gereja harus lebih berani menyampaikan suara kenabian. Para pemimpin gereja harus independen dalam mengedepankan panggilan dan pengutusan gereja, dengan mengayomi seluruh anggota gereja. Independensi ini hanya dimungkinkan bila para pemimpin dan pelayan gereja tidak terjun ke politik praktis.

II. Sikap dan Tanggung Jawab Teologis Gereja

Dengan memahami teologi sebagai pertanggungjawaban iman dan pengharapan untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik berdasarkan kasih, maka - sejalan dengan rumusan kelompok-kelompok yang secara khusus membahas pokok-pokok berikut - gereja perlu merumuskan sikap teologisnya terhadap bidang-bidang berikut:

1. Sosial Ekonomi

- a. Sesuai dengan akar katanya, Gereja memahami ekonomi sebagai urusan rumah tangga Allah. Sebagaimana dikemukakan dalam dokumen AGAPE (*Alternative Globalization Addressing People and Earth*) yang diterbitkan WCC, AGAPE adalah suatu sistem ekonomi yang menjadikan cinta-kasih sebagai etos dominannya, yaitu cinta-kasih kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada alam.
- b. Sejalan dengan koinonia yang inklusif, Gereja perlu mengembangkan kewirausahaan di kalangan jemaat maupun masyarakat luas.
- c. Gereja perlu lebih lanjut membangun kemitraan antar jemaat di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- d. Gereja terpanggil memperkuat pelayanan kategorial yang oikumenis dan diakonia transformatif.
- e. Gereja perlu semakin mengembangkan kualitas SDM melalui layanan pendidikan dan kesehatan.

2. Politik & Ideologi

- a. Gereja harus mendorong warga masyarakat untuk terlibat secara positif dalam Pemilu 2009 dan jangan menjadi golput. Jangan mengarahkan warganya untuk mendukung Partai Politik tertentu, tetapi mendorong mereka untuk memilih Partai Politik yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.
- b. Menyerukan kepada semua pihak untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai tempat sosialisasi dan kampanye Partai Politik tertentu.
- c. Gereja perlu mengadakan *lobby-lobby* kepada semua pihak, terlebih yang terlibat dengan para pengambilan keputusan dalam masyarakat, baik di pusat maupun daerah, bukan untuk mencari keuntungan sesaat, melainkan dalam rangka memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

3. Pendidikan

- a. Pendidikan diarahkan kepada upaya pencerdasan bangsa dan pemberian kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati pendidikan, sehingga tidak hanya berkonsentrasi pada model pendidikan unggulan.
- b. Gereja-gereja didorong untuk lebih memperhatikan peningkatan kualitas dan kuantitas Guru Agama Kristen, termasuk menyediakan Guru Agama Kristen di sekolah-sekolah yang belum memilikinya.
- c. Gereja-gereja perlu melakukan kajian terus menerus terhadap berbagai produk perundang-undangan yang berhubungan dengan pendidikan, sehingga tidak menghambat tugas dan pelayanan pendidikan Kristen.
- d. Kurikulum pendidikan teologi perlu dievaluasi dan ditingkatkan terus menerus dengan mengadakan peninjauan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan gereja dan lapangan kerja.

4. Jender & Tantangan Pemuda

1. Gereja perlu meningkatkan advokasi terhadap korban kekerasan (laki-laki dan perempuan), termasuk korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan dalam

perburuhan, kekerasan oleh struktur, dll. sebagai pelayanan Gereja yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

2. Perlu mendirikan *Crisis Centre* ataupun *Women Shelter* pada setiap gereja sebagai upaya nyata pengadaan “rumah aman” bagi program pemberdayaan korban.
3. Perlu mengembangkan kurikulum katekisasi dari Sekolah Minggu sampai kelompok Lansia, yang bermuatan keadilan dan kesetaraan jender, informasi tentang *trafficking*, informasi tentang HIV/AIDS dan KDRT, dll.

5. Pluralisme

1. Membangun teologi yang inklusif-pluralis yang terbuka dan mempertimbangkan pluralisme agama sebagai konteks berteologi.
2. Mengkritisi produk perundang-undangan yang diskriminatif.
3. Membangun relasi melalui dialog intra- dan antar-umat beragama.
4. Melakukan advokasi terhadap korban-korban (gereja dan umat beragama lain) akibat ketidak-adilan oleh kekerasan atas nama agama.

6. SDA dan Lingkungan

- a. Melakukan upaya penyadaran kepada warga Jemaat bahwa kita bertanggung jawab terhadap kerusakan alam.
- b. Melakukan penghematan terhadap penggunaan sumber daya alam.
- c. Membangun kerja sama dengan pemerintah atau lembaga tertentu untuk mendapatkan bibit yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan penghijauan dan reboisasi.
- d. Menghidupkan kembali pelatihan motivator bagi para warga jemaat.

7. Hukum dan HAM

- a. Gereja harus bersikap proaktif untuk memperjuangkan kepentingan bersama dengan golongan agama lain.
- b. Bersikap tegas untuk memperkuat Pancasila. Konkretnya: berusaha mencabut undang-undang yang bertentangan

dengan Pancasila; melakukan perlawanan, yakni dengan mengajukan keberatan hukum secara tegas melalui surat atau jalur hukum yang benar.

Penutup

Demikianlah rekaman potret realitas negeri ini dari perspektif teologis, ungkapan kesadaran teologis Gereja dalam melaksanakan panggilan dan tanggungjawabnya di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Sejumlah rekomendasi ini disampaikan (bekerjasama dengan kelompok-kelompok lain) kepada pemerintah, masyarakat dan gereja. Semua ini diharapkan tidak hanya tinggal di atas kertas, melainkan dilaksanakan oleh semua gereja dan lembaga Kristen, terutama gereja-gereja anggota PGI dan organisasi-organisasi Kristen yang ambil bagian dalam KGM ini.

Bagian Ketiga:
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

Laporan Pelaksanaan KGM VIII

Cipayung, 17-21 November 2008

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) telah melaksanakan Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) VIII, 17-21 November 2008, di Grand Jaya Raya Resort, Cipayung, Jawa Barat. KGM ini diikuti oleh 160 peserta yang terdiri dari pemimpin sinode gereja-gereja anggota PGI, PGIW/SAG, maupun gereja-gereja atau perhimpunan gereja-gereja yang belum menjadi anggota PGI, seperti Bala Keselamatan, perguruan-perguruan tinggi Kristen (teologi maupun umum), organisasi-organisasi Kristen, anggota Komisi-komisi yang ada di lingkungan PGI (Komisi Hukum & HAM, Komisi Gereja & Masyarakat, dan Komisi Teologi), serta beberapa tokoh Kristen yang berkiprah di berbagai bidang kehidupan.

Konferensi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian gereja-gereja di Indonesia atas pergumulan yang dihadapi masyarakat. Sejak KGM I (1962) hingga VII (1998), telah banyak hasil-hasil yang disampaikan, baik bagi internal gereja-gereja itu sendiri maupun bagi kemaslahatan masyarakat umum, terutama melalui penyampaian pokok-pokok pikiran berupa suara nabiah yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang telah, sedang dan akan ditempuh oleh pemerintah.

Konferensi telah mendalami dan menggumuli situasi terkini dan kecenderungan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, di bawah terang tema “Tuhan Itu Baik kepada Semua Orang” dan sub-tema ”Bersama-sama seluruh Komponen Bangsa, Mewujudkan Masyarakat Majemuk Indonesia yang Berkeadaban, Inklusif, Adil, Damai dan Demokratis”.

Studi bersama dimulai dengan paparan tema yang dibawakan oleh Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe, Ketua Umum PGI. Dalam paparannya Pdt. Yewangoe mengatakan bahwa “Tuhan itu baik kepada semua orang” adalah akar guna memahami bahwa gereja ada bagi orang lain, yakni bagi siapa saja yang hidup dan bertetangga dengan kita, yang mencakupi semua bidang kehidupan. Namun

demikian, Pdt. Yewangoe juga menyebutkan kecenderungan dunia sekarang ini, termasuk gereja-gereja di Indonesia, yang saling mengklaim Allah sebagai Allahnya sendiri, yang mengantarkan masyarakat kepada sikap-sikap fanatisme yang tidak perlu. Oleh karenanya, ditekankan pentingnya gereja dan orang-orang Kristen menempatkan dalam kerangka imannya akan anugerah Allah yang disampaikan kepada semua orang, sebagaimana “Allah menerbitkan matahari-Nya, baik bagi orang baik, maupun bagi orang fasik”.

Untuk pembahasan sub-tema, Konferensi difasilitasi oleh Dr. Sri Adiningsih yang meninjaunya dari perspektif ekonomi. Dr. Adiningsih berangkat dari krisis ekonomi global yang menurutnya semakin memburuk, luas, dalam, dan lama. Krisis ini dengan cepat menyebar dan masuk ke Indonesia, yang sudah lebih dari satu dekade reformasi ekonomi, namun secara umum ekonomi belum bangkit. Karenanya krisis global ini berpotensi meningkatkan kemiskinan dan pengangguran, lebih dari krisis sepuluh tahun lalu. Dan kualitas SDM Indonesia yang sebagian besar rendah dan terbelakang membuat kemampuan menahan dampak krisis semakin tidak mudah, dan akibatnya kehidupan akan semakin berat, khususnya untuk kawasan Indonesia Timur yang merupakan kantong-kantong kemiskinan. Oleh karena itu Dr. Adiningsih menekankan pentingnya peran Gereja dan umat Kristiani di tengah masyarakat yang semakin berat kehidupannya dengan ikut memerangi keterbelakangan dan kemiskinan.

Berangkat dari pemahaman tema tersebut, Konferensi menggumuli 9 bidang, yakni: Sosial-Ekonomi, Politik & Ideologi, Pendidikan, Kesetaraan Jender & Tantangan Pemuda, Pluralisme, Sumber Daya Alam & Lingkungan, Masalah Papua, Hukum dan HAM, serta Gereja & Teologi. Untuk memperkaya pergumulan atas kesembilan bidang tersebut, Konferensi juga menggumuli Dokumen AGAPE (*Alternative Globalization Addressing People and Earth*), yang merupakan rumusan dari Sidang Raya Dewan Gereja-gereja se-Dunia ke dalam konteks Indonesia. Demikian pun halnya dengan realitas pencapaian Indonesia atas *Millenium Development Goals*, yang merupakan kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia melalui PBB.

Untuk membantu peserta menggumuli berbagai isu di kesembilan bidang tersebut, beberapa pakar telah diundang dan hadir

memfasilitasi KGM ini, yakni: Prof. Dr. Hotman Siahaan, Drs. Jacob Tobing MPA, Prof. Dr. John FoEh, Barnabas Suebu SH, Ifdhal Kasim, Martin Hutabarat SH, Prof. Dr. Roy Sembel, Prof. Dr. Jonathan Parapak M.Sc.Eng., Pinky Saptandari, Pdt. Rosmalia Barus, Frangky Mokodompis, Pdt. Dr. Margaretha Hendriks, Pdt. Dr. Martin Lukito Sinaga, Chris Wangkay, Elga Sarapung MTh, Romo Benny Susetyo, Saras Dewi dan Gus Nuril Arifin.

Setelah mendengar dan mendiskusikan paparan para narasumber, Konferensi membagi diri atas sembilan kelompok sesuai dengan jumlah bidang yang dibahas. Lewat studi yang lebih mendalam di kelompok tersebut, Konferensi tiba pada beberapa pemahaman bersama atas berbagai bidang tersebut. Lewat pemahaman-pemahaman tersebut, Konferensi tiba pada sejumlah rekomendasi.

Panitia menyiapkan diri untuk menyambut 250 peserta; diharapkan 220 peserta merupakan utusan gereja atau lembaga gerejawi dan 30 lainnya terdiri atas panitia dan petugas. Untuk itu telah disebar undangan kepada 300 calon peserta. Hingga hari menjelang pelaksanaan KGM ini, telah mendaftar ke panitia sebanyak 218 orang. Dan panitia pun menyediakan akomodasi, konsumsi dan *seminar keit* untuk 250 orang. Kenyataannya, peserta yang mengikuti KGM ini hanya 160 orang, sementara 58 orang sisanya tidak jadi datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Akibatnya banyak fasilitas yang terbuang percuma.

Konferensi ini terselenggara atas kerjasama antara PGI dan Gereja Protestan di Indonesia (GPI) yang menjadi tuan dan nyonya rumah KGM ini. MPH PGI mengangkat seperangkat kepanitiaan dari warga GPIB, yang merupakan salah satu anggota GPI, di bawah kepemimpinan Ibu Ny. Cornelia Vega-Moningka sebagai Ketua Umum. Panitia ini mengorganisir hal-hal teknis pengorganisasian guna mendukung terlaksananya KGM ini, sementara berkaitan dengan materi atau substansi KGM ditanggung-jawabi oleh MPH PGI melalui sebuah Tim Kerja bentukan MPH PGI, yakni Pdt. Dr. Jan S. Aritonang, Pdt. Lies Tamuntuan-Makisanti MSi, Pnt. Ir. Royke Roring MSi, Febry C. Tetelepta S.Ag., Pdt. Gomar Gultom MTh, dan Susan Prasetyo.

Lampiran 2:

Kerangka Acuan Konferensi Gereja dan Masyarakat VIII Tahun 2008

Latar Belakang

Gereja ada di tengah dunia ini sebagai arak-arakan umat Allah, yang terus bergerak menuju ke kepenuhan hidup di dalam Kerajaan Allah. Ia dituntut untuk selalu terbuka kepada dunia ini, agar dunia ini terbuka kepada undangan Allah untuk turut serta di dalam arak-arakan orang percaya menuju pemenuhan janji Allah akan Kerajaan-Nya di dalam Yesus Kristus. Gereja dipanggil untuk mengembangkan hubungan yang positif, kreatif, kritis, realistis, dan transformatif dengan pemerintah dan semua pihak di dalam masyarakat untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi semua orang, dalam rangka mewujudkan dan mendirikan tanda-tanda Kerajaan Allah menuju kesempurnaannya di dalam Yesus Kristus.

Kehadiran gereja-gereja di Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tanda pengutusan Tuhan sendiri agar gereja-gereja secara aktif mengambil bagian dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan di Indonesia. Di samping itu gereja terpanggil secara aktif dan kreatif mengambil bagian dalam usaha mencegah segala hal yang merongrong dan merendahkan harkat dan martabat manusia Indonesia serta segala hal yang merusak lingkungan alam Indonesia. Tugas panggilan itu dilaksanakan melalui berbagai upaya pencegahan sekaligus upaya pembelaan dan penegakan hukum/keadilan bagi seluruh rakyat dan tanah air Indonesia.

Akhir-akhir ini kita merasakan keprihatinan akan situasi masyarakat, bangsa dan negara di tengah upaya menyongsong harapan akan hari esok yang lebih baik. Berbagai bentuk bencana, konflik antar kelompok masyarakat, korupsi, supremasi hukum yang makin jauh dari harapan, kerusakan lingkungan hidup yang semakin parah, produk hukum yang carut marut dan sebagainya, mewarnai perjalanan bangsa. Kehidupan harmonis dan saling menghargai, yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sedikit banyak terusik dengan semakin

mengentalnya semangat sektarianisme dan penggunaan simbol-simbol kelompok dalam penataan kehidupan bersama. Hal ini, misalnya, terlihat dengan semakin menguatnya kecenderungan memperjuangkan aspirasi lewat partai-partai sektarian dan primordial, munculnya produk-produk hukum yang hanya mementingkan nilai-nilai kelompok tertentu dan berbagai kecenderungan memperhatikan lainnya.

Indonesia kini tak ubahnya negeri tanpa nurani. Di saat masyarakat lapis bawah berjuang hidup dan mati demi sesuap nasi, para elite, baik politisi, intelektual, dan bahkan rohaniwan, banyak yang sibuk hanya membual sambil tebar pesona. Di saat bangsa ini butuh teladan, yang hadir justru spekulasi. Di saat kita butuh pelopor, yang kerap datang justru provokator. Di saat bangsa ini butuh aksi *emergency*, yang datang justru aksi bernafas sensasi.

Tentu saja negeri yang kacau dan tanpa nurani bukanlah sebuah potret yang berdiri sendiri. Potret buram itu tidak berdiri di kanvas yang hampa. Negara yang tak berdaya adalah juga cermin dari masyarakat yang gagal. Dan masyarakat yang gagal adalah hasil dari kegagalan agama-agama (baca: Gereja) menjalankan misinya untuk menyelamatkan kehidupan. Kegagalan negara meretas kemakmuran dan kesejahteraan bukanlah kesalahan pemerintah semata. Kegagalan tersebut adalah juga gambaran dari agama (baca: Gereja) yang mengalami *disfungsi*. Memang kasat mata Gereja masih tampak ada. Ada ritual keagamaan yang mengharu-birukan. Dan ada warga jemaat yang masih setia menghadiri ritual dan memberikan perpuluhan. Namun kalau kita telusuri lebih jauh, aktivitas itu hanyalah fungsi minimalis Gereja. Sebaliknya fungsi transformatif Gereja yang historis untuk membebaskan dan memberi keselamatan masih tetap menjadi retorika. Dengan kata lain, respons Gereja masih sekedar pada kulit dan daun, belum sampai ke akar masalah masyarakat. Atau jangan-jangan gereja kini telah berada dalam suasana tidur lelap.

Di sisi lain dinamika dan realitas politik kini telah berubah dan mengalami perubahan yang begitu cepat dan masif. Kini politik bukan hanya berjalan tanpa publik, politik juga semakin gelap-mata merusak kehidupan. Karenanya respons Gereja terhadap politik yang gelap- mata tentunya tidak cukup lagi dengan hanya pendekatan

parsial dan sporadis yang berciri moralis dan etis. Kini, Gereja dipanggil untuk melakukan rekoneksi gerakan moral dengan gerakan sosial politik (masyarakat) yang lebih membumi. Sebuah gerakan lain yang bisa mempertemukan ‘Syalom Allah’ dengan penderitaan umat-Nya. Tentu formula gerakan ini tak semudah yang dibayangkan. Namun bila desain gerakan ini tidak diupayakan secara bersama, jangan heran Gerakan Gereja akan menjadi Gerakan yang persis sama dengan Partai Politik yang ada di negeri ini, yang berciri eksploitatif dan mobilitatif.

Berangkat dari asumsi di atas, menjadi penting dan mendesak untuk menyediakan ruang bagi pelayan Gereja untuk bercerita tentang pengalaman empiriknya dan di saat yang sama mencari dan merumuskan Gerakan Gereja yang lebih konkret di masa transisi. Kekayaan empirik itu *niscaya* merupakan modal utama pembelajaran bagi semua pelaku agama untuk menjawab tantangan besar: memberi respons terhadap problem masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian kita punya respons yang tidak melulu didasarkan teks dogmatis yang kaku (reaktif) tetapi lebih berbasis kepada pengalaman yang dialami secara langsung (*locus theologicus*), atau sering disebut Agama yang Responsif.

Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu senantiasa menggumuli bentuk-bentuk kehadirannya di tengah pergumulan masyarakat agar dapat secara sungguh-sungguh mewujudkan peran-sertanya dalam membangun masyarakat tempat dia Tuhan tempatkan. Dalam kerangka itulah, gereja-gereja di Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Gereja dan Masyarakat, yang merupakan bagian dari forum gereja-gereja di Indonesia dalam mengupayakan tercapainya perubahan-perubahan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara ataupun bermasyarakat. Konferensi Gereja dan Masyarakat telah memiliki tempat yang tersendiri dalam perjalanan gereja-gereja di Indonesia. Untuk tingkat mondial, Konferensi Gereja dan Masyarakat untuk pertama sekali diselenggarakan oleh Dewan Gereja-gereja se Dunia. Lewat KGM yang dihadiri oleh peserta yang mewakili jaringan profesi yang luas (dari berbagai disiplin ilmu: epoleksosbud), teolog, etikus, pemuda dan wanita, dan dari berbagai belahan dunia ini, gereja-gereja melakukan suatu peninjauan-ulang atas masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi masyarakat dunia dan

bagaimana gereja mewujudkan peran dan tanggung-jawabnya dalam permasalahan tersebut. Sebagai gaung dari KGM yang diselenggarakan DGD ini, gereja-gereja di Indonesia juga menyelenggarakan Konferensi Nasional Gereja dan Masyarakat pada 1962, yang coba meletakkan landasan berpijak untuk menjalankan Diakonia Pembangunan sebagai perwujudan Damai Sejahtera di Indonesia. Kemudian hari, KGM ini diselenggarakan secara rutin hingga terakhir tahun 1998. Melalui KGM kali ini, akan dikaji pengalaman berharga apa yang dapat diambil dari penyelenggaraan KGM selama ini, terutama pemahaman dan implementasinya oleh gereja-gereja.

Tema dan Sub-Tema

- Tema: "Tuhan itu baik kepada semua orang" (Mzm. 145:9^a)
- Sub-Tema: "Bersama-sama seluruh Komponen Bangsa Mewujudkan Masyarakat Majemuk Indonesia yang Berkeadaban, Inklusif, Adil, Damai, dan Demokratis"

Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan diselenggarakannya Konferensi Gereja dan Masyarakat ini adalah dalam rangka menghimpun pendapat dari para peserta untuk membantu perumusan sikap gereja-gereja di Indonesia bagi berbagai isu yang berkembang dan juga persoalan-persoalan yang muncul di Indonesia, khususnya sikap gereja berhubungan dengan Pemilu yang akan datang.

Untuk maksud ini, Konferensi ini akan

1. Menyediakan ruang dan kesempatan konsultasi dan refleksi bagi pelaku agama untuk berdialog tentang pengalaman pelayanan di masa transisi politik.
2. Memahami perkembangan Sosial Politik terkini, dalam aras internasional, nasional, dan lokal.
3. Memetakan masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya koneksi gerakan moral dan gerakan sosial politik.
4. Merumuskan pilihan pelayan gereja dan upaya rekoneksi gerakan moral dengan gerakan sosial politik.

Hasil Rumusan dari Konsultasi ini diharapkan akan menjadi masukan bagi gereja-gereja di Indonesia dalam menggemulai Pokok-pokok Panggilan Tugas Bersama (PTPB) pada Sidang Raya XV/2009 di Mamasa.

Materi Acara

1. Pembahasan Tema: "Tuhan itu baik kepada semua orang" (Mazmur 145:9^a)
2. Pembahasan Sub-Tema: "Bersama-sama Seluruh Komponen Bangsa Mewujudkan Masyarakat Majemuk Indonesia yang Berkeadaban, Inklusif, Adil, Damai, dan Demokratis"
3. Pemahaman Alkitab dengan pokok-pokok bahasan di sekitar Gereja dan Masyarakat
4. *Sharing* Pengalaman gereja-gereja
5. *Study meeting* atas berbagai isu yang meliputi bidang-bidang: Sosial-Ekonomi, Politik dan Ideologi, Hukum dan HAM, Pendidikan, Kesetaraan Jender, Pluralisme, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Masalah Papua, serta Gereja dan Teologi
6. Lokakarya: Pendalaman dan Perumusan Pemahaman Bersama atas berbagai bidang dan isu tersebut, serta Rencana Aksi.

Pengorganisasian

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Penyelenggara: | PGI dan GPI |
| 2. <i>Steering Committee</i> : | MPH PGI |
| 3. Peserta: | 250 peserta, terdiri dari Pemimpin Gereja-gereja di Indonesia, Pemimpin Ormas-ormas Kristen, Pemimpin Organisasi-organisasi Sosial Kemasyarakatan Kristen, dan Tokoh-tokoh Kristiani. |
| 4. Waktu Pelaksanaan: | 17-21 November 2008 |
| 5. Tempat Pelaksanaan: | Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel, Cipayung, Bogor, Jawa Barat |

Lampiran 3:

Jadwal Acara KGM VIII Tahun 2008

Senin, 17 November 2008

- 11.15 Berangkat dari GPIB Immanuel
14.30 Registrasi
16.30 - 18.30: Pembukaan, Orientasi & Kajian Tema
Pdt. Dr. Jan S. Aritonang
Pdt. Dr. A.A. Yewangoe
18.30 - 19.30: Makan Malam
19.30 - 21.15: Pembahasan Subtema (Dr. Sri Adiningsih)
21.15 - 21.30: Doa Malam

Selasa, 18 November 2008

- 07.00 - 07.30: Sarapan Pagi
07.30 - 09.00: Ibadan Pagi dan Penelaahan Alkitab
09.00 - 10.45: Sesi I: Bidang Sosial-Ekonomi + Agape
Prof. Dr. Roy Sembe
Dr. Margaretha Hendriks-Ririmasse
10.45 - 11.15: Istirahat
11.15 - 13.00: Sesi II: Bidang Politik & Ideologi
Prof. Dr. Hotman Siahaan
Drs. Jacob Tobing, MPA
13.00 - 14.30: Makan Siang dan Istirahat
14.30 - 16.15: Sesi III: Bidang Pendidikan
Prof. Dr. Jonathan Parapak, M.Sc.Eng.
16.15 - 16.45: Istirahat
16.45 - 18.30: Sesi IV: Bidang Kesetaraan Jender & Pemuda
Pinky Saptandari
Pdt. Rosmalia Barus
Franky Mokodompis
18.30 - 19.30: Makan Malam
19.30 - 21.15: Sesi V: Bidang MDGs (Chris Wangkay)
21.15 - 21.30: Doa Malam

Rabu, 19 November 2008

- 07.00 - 07.30: Sarapan Pagi
07.30 - 09.00: Ibadan Pagi dan Penelaahan Alkitab
09.00 - 10.45: Sesi VI: Bidang Pluralisme
Elga Sarapung MTh + tokoh-tokoh agama
10.45 - 11.15: Istirahat
11.15 - 13.00: Sesi VII: Bidang SDA & Lingkungan
Prof. Dr. John FoEh
13.00 - 14.30: Makan Siang dan Istirahat
14.30 - 16.15: Sesi VIII: Bidang Gereja & Teologi
Pdt. Dr. Martin Lukito Sinaga
16.15 - 16.45: Istirahat
16.45 - 18.30: Lokakarya
18.30 - 19.30: Makan Malam
19.30 - 21.15: Lokakarya
21.15 - 21.30: Doa Malam

Kamis, 20 November

- 07.00 - 07.30: Sarapan Pagi
07.30 - 09.00: Ibadan Pagi dan Penelaahan Alkitab
09.00 - 10.45: Lokakarya
10.45 - 11.15: Istirahat
11.15 - 13.00: Lokakarya
13.00 - 14.30: Makan Siang dan Istirahat
14.30 - 16.15: Lokakarya
16.15 - 16.45: Istirahat
16.45 - 18.30: Lokakarya
18.30 - 19.30: Makan Malam
19.30 - 21.15: Pembangunan Papua Dewasa Ini (Bas Suebu, SH)
21.15 - 21.30: Doa Malam

Jumat, 21 November

- 07.00 - 07.30: Sarapan Pagi
07.30 - 08.00: Ibadan Pagi
08.00 - 12.00: Pleno untuk Perumusan Akhir
12.00 - 13.00: Penutupan

Lampiran 4:**DAFTAR PESERTA KGM VIII TAHUN 2008**

No.	Nama	Gereja/Lembaga
1.	Pdt. T.S. Daeli, STh	BNKP
2.	Pdt. Kristopher Siagian	GMI
3.	Pdt. Petrus Jacob, STh	GKE
4.	Jan Sadiaman Saragih	GKE
5.	Pdt. Gunedi	GKE
6.	Pdt. Abrita I. Salendah	GMIST
7.	Pdt. Decky Lolowang	GMIM
8.	Pdt. Roy Lengkong, STh	GMIM
9.	Pdt. Ny Evie Pua	GMIM
10.	Pnt. Ir. Martinus Baroleh, MSi	GMIM
11.	Jane Kaunang-Scipio, SPd	GMIM
12.	Pdt. Krisye Rotty-Gosal, STh	GMIM
13.	Franky Mocodompis, SSos	GMIM
14.	Pnt. Selvie Gonie	GMIM
15.	Pdt. P.W. Kamasaan, STh	GMIBM
16.	Pdt. Anton Piga	GMIH
17.	Pdt. Donald V. Ruy	GMIH
18.	Pdt. Fien Sopamena	GKSS
19.	Pdt. Dr. Eben Nuban Timo	GMIT
20.	Pdt. I Ketut Philipus Aryawijaya	GKPB
21.	Pdt. Nengah Ripa	GKPB
22.	Pdt. Dr. Ketut Siaga Waspada	GKPB
23.	Pdt. Simon Filantropa	GKI
24.	Pdt. Tri Agus Fajar Winantio	GKJ
25.	Pdt. Edward Tureay, STh	GKP
26.	Pdt. Diogenes Takalapeta	Gereja Kristus
27.	Pdt. Samuel Th. Kaihatu, MTh	GPIB
28.	Pnt. Johan Tumanduk, SE	GPIB
29.	Pdt. Dr. Samuel Hakh	GPI
30.	Pnt. L. Dantje Abast	GPI
31.	Pdt. Hallie Jonathans, STh	GPI
32.	Pnt. Meiske Suyadi	GPI
33.	Pdt. Martinus Duryadi, MSi	GIA
34.	Pdt. Timotius Adhi Darma	GKMI
35.	Pdt. Jan Janner Sinaga	GKPS
36.	Pdt. Jeftha Bartho	GKPI Tarakan
37.	Pdt. Frans Boas Sugiarto	GBIS
38.	Pdt. Yohanes Setiyawan	GBIS
39.	Pdt. R. Simanjuntak, BD	HKI
40.	Pdt. Yunus Labotano	GKLB
41.	Pdt. Daniel Sukendra	GGP
42.	Drs. Sumardjono Margono	GKI Sumut
43.	Pdt. Yuprieli Hulu, MTh	AMIN
44.	Pdt. Adrianus H.	GKKA
45.	Pdt. Henny Katuuk, STh	GPKB
46.	Pdt. Sukamto Prakoso, SH, MH	GBI
47.	Pdt. Sandio Yonathan, STh, MA	GKII
48.	Pdt. Donny Elisa	GEKESIA
49.	Pdt. Willy Paat	GKSI
50.	Pdt. J. Sihombing	GTDI
51.	Pdt. E.J. Solin	GKPPD
52.	Pdt. Yuliati Longgo	GEKINDO
53.	Pdt. R.Y. Telleng	GMPU
54.	Pdt. Hermanus LaElu, STh	GKO
55.	Pdt. S. Taariwuan, STh	GERMITA
56.	Pdt. Marthin Oppier	GKPII
57.	Pdt. Sandimo Yonathan, STh, MA	GKII
58.	Pdt. B.D.F. Sidabutar, STh	PGIW DKI Jakarta
59.	Pdt. J.A.B. Peluppesy	PGIW DKI Jakarta
60.	Pdt. R.H.L. Tobing, STh	PGIW Jabar
61.	Pdt. Eka Lasa Purwibawo	PGIW Jateng
62.	Dkn. Syeni Andris	PGIW Jatim
63.	Pdt. Dr. Langsung Sitorus	PGIW Sumut
64.	Pdt. Jan R. Sumakul, MTh	SAG Sulutteng
65.	Gbl. Boyke A. Suak, MTh	SAG Sulutteng
66.	Pdt. Hermanus Kawuwuwng	SAG Sulutteng
67.	dr. Bert A. Supit	SAG Sulutteng
68.	Pdt. Wayan Sudira Husada	PGIW Bali

69.	Pdt. Dr. Rugas Binti	PGIW Kalteng	107.	Ir. Ferry J. Mailangkay	UKIT
70.	Pdt. Edi Liverda	PGIW Kalteng	108.	Prof. Dr. Ir. Septo Ratno Siregar	UK Maranatha Bandung
71.	Pdt. Franedi	PGIW Kalteng	109.	Bpk. Bedjo	UK Petra Surabaya
72.	Pdt. Gudmar Untung	PGIW Kalteng	110.	Pdt. Parel Panjaitan, MTh, DTh	UHN Medan
73.	Pdt. Yulianus Ginting	PGIW Riau	111.	dr. Merphin Panjaitan, MSi	UKI Jakarta
74.	Pdt. Victor Hutaaruk, MMin	PGIW Banten	112.	Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing	STT HKBP P. Siantar
75.	Meiran Panggabean, SE, MSi	PGIW Kalbar	113.	Pdt. Eden Ramses Siahaan	SGH HKBP, Tarutung
76.	Vesna Sagala	Dana Pensiun PGI	114.	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	STT Cipanas
77.	Amir L. Sirait, SH	Yay. RS PGI Cikini	115.	Pdt. Agus Jetron Saragih	STT Abdi Sabda
78.	Dr. Arief Gosita, SH	YPKS	116.	Agustien Kapahang Kaunang, MTh	Fak.Theol. UKIT
79.	Johanes Tomasowa, SE	YBO-PGI	117.	Pdt. Marhaeny Mawuntu	Fak. Theol. UKIT
80.	Irawaty Manullang	PELKESI	118.	Pdt. Dr. I.W.J. Hendriks	UKIM-Ambon
81.	Gabarel Sinaga	JK-LPK	119.	Martin Hutabarat, SH	Kom. Ger. Mas. PGI
82.	Dr. Ireine Setiadi	LAI	120.	Pdt. Dr S.A.E. Nababan	Kom. Teologi PGI
83.	Erna Yulinawati	LAI	121.	Pdt. Drs. Theol. Sylvana Apituley	Kom. Teologi PGI
84.	Bernard Ndawu	PP GMKI	122.	Pdt. Dr. Martin Lukito Sinaga	Kom. Teologi PGI
85.	Ir. Sujud Swastoko, MSM	SINAR Group	123.	Pdt. Dr. Albertus Patty	Kom. Teologi PGI
86.	Mr. Michael Königer	CWS	124.	Pdt. Dr. Andreas Yewangoe	MPH-PGI
87.	Ibu Stien Djalil	CWS	125.	Pdt. Dr. Margaretha Hendriks	MPH-PGI
88.	Ibu Haryati Khristianto	WVI	126.	Pdt. Dr. Jan S. Aritonang	MPH-PGI
89.	Charles S. Sinaga	WVI	127.	Pnt. Ir. Royke O. Roring, MSi	MPH-PGI
90.	Gustaf Dupe, SH	POKJA PLP	128.	Pdt. Dr. Richard Daulay	MPH-PGI
91.	Ir. Alex Paath	PP PIKI	129.	Pdt. Weinata Sairin, MTh	MPH-PGI
92.	Theopilus Bella	PP PIKI	130.	Pdt. Kumala Setiabrata, MTh	MPH-PGI
93.	Ibu S.A.L. Tobing Silitonga, SE	PWKI	131.	Pdt. Lies Tamuntuan, MSi	MPH-PGI
94.	Prof. Dr. Wesley Simanjuntak	MPK	132.	Ir. Frieda Helena Manaloe	MPH-PGI
95.	Herry Metty	Interfidei	133.	Febry C. Tetelepta, SAg	MPH-PGI
96.	Baltasar Tarigan	BKS PGI-GMKI	134.	Drs. Inget Sembiring	MP-PGI
97.	Pdt. Josef P. Widyaatmaja, MTh	YBKS CDC	135.	St. John R.P. Hutabarat, SE, MM	BPP-PGI
98.	Mayor Henoch Noreh	Bala Keselamatan	136.	Pdt. Gomar Gultom, MTh	Sek.Bid. Diaconia PGI
99.	Kapten Kriston Harinei	Bala Keselamatan	137.	Pdt. Rosmalia Barus, STh	Sek.Dep. Perempuan & Anak PGI
100.	Ibu Onnie Markadi-Tambuwun	Mitra MPL-PGI	138.	Pdt. Dr. Eric Johnson Barus	Sek.Bid. Marturia PGI
101.	Ibu Yulia Weken	Dewan Wanita GPIB	139.	Yudiet Tompah	Sek.Bid. Koinonia PGI
102.	Pdt. Ephetus Tarigan, MTh	Pemuda/GBKP	140.	Dra Adri Supriyati	Ka Biro Litkom PGI
103.	Pdt. Retno Ngapon, SSi.(Teol.)	Pemuda/GKP	141.	Novel Matindas	Asiseten Sekum PGI
104.	Drs. Tonny Waworuntu	Profesional	142.	Pdt. Dr. Eckhard Zemmrich	Co-worker Litkom PGI
105.	Drs. Titus Kurniadi	Profesional	143.	Susan Prasetyo	Sekretariat
106.	Pdt. Dr. Aristarchus Sukarto, BA	UKRIDA			

144.	Endang Trihastuti	Sekretariat
145.	Eric	Notulis
146.	Pdt. Daniel Munthe, MTh	Notulis
147.	Suhanda	Sekretariat
148.	Constant Teisen	Pengemudi
149.	Prof. Dr. Roy Sembel	Pembicara
150.	Drs. Jacob Tobing, MPA	Pembicara
151.	Prof. Dr. Hotman Siahaan	Pembicara
152.	Prof. Dr Jonathan Parapak, MScEng	Pembicara
153.	Dr. Sri Adiningsih	Pembicara
154.	Ibu Pinky Saptandari	Pembicara
155.	Chris Wangkay	Pembicara
156.	Elga Sarapung, MTh	Pembicara
157.	Romo Benny Susetyo	Pembicara
158.	Saras Dewi	Pembicara
159.	Gus Nuril Arifin	Pembicara
160.	Prof. Dr. Ir. John E.H.J. FoEh	Pembicara
161.	Barnabas Suebu, SH	Pembicara
162.	Ifdhal Kasim	Pembicara
(--)	Martin Hutabarat, SH	Pembicara
(--)	Pdt. Dr. Martin Lukito Sinaga	Pembicara
(--)	Pdt. Dr. Andreas Yewangoe	Pembicara
(--)	Pdt. Dr. Margaretha Hendriks	Pembicara
(--)	Pdt. Rosmalia Barus, STh	Pembicara
(--)	Franky Mocodompis, Ssos	Pembicara
163.	Markus Saragih	<i>Berita Oikoumene</i>
164.	Paul Mokoguru	Tabloid <i>Reformat</i>
165.	Heru	Harian <i>Sinar Harapan</i>
166.	Novi	Tabloid <i>Mitra Indonesia</i>
167.	Erwin Lobo	Harian <i>Suara Pembaruan</i>

Lampiran 5:

PANITIA PELAKSANA KGM VIII - 2008

Penanggung jawab	: MPH PGI
Pengarah	: BPH Sinode Am GPI
Penasihat	: 1. Pdt. Samuel Th, Kaihatu, MTh 2. Pnt. Ny. Susmiati Theo Syafei 3. Ny. Telly Kasenda-Sumolang
Ketua Umum	: Ny. Cornelia Vega-Moningka
Ketua I	: Pnt. Prof. Dr. Ir. John E.H.J. FoEh
Ketua II	: Pnt. Ir. Johnny E. Manengkei
Ketua III	: Bpk. Olly Dondokambey, SE
Sekretaris Umum	: Pdt. M.E Raintung, S.Si, MM
Sekretaris I	: Pnt. Ny. Clara Leander-Sumendap
Sekretaris II	: Pdt. Roos J.H. Lumi, MTh
Bendahara Umum	: Pnt. Tommy Masinambow
Bendahara I	: Dkn. Ny. Nora Damarjaja-Sinjal
Bendahara II	: Pnt. Ny. Yvonne Syahrial-Kansil
Pembantu Umum	: Pdt. Charles J.V. Timbuleng, STh Pdt. Agustinus Manalu, MSi Pdt. Ny. Meiske C. Kolanus, MMin Pdt. Ny. Ria Antameng-Jacobs, MSi Pdt. W.T.C Melatunan, STh Pdt. Slamet Iskandar, MSi Pdt. Martinus Tetelepta, STh
Bidang Sekretariat	: Pdt. J. Tamuntuan, MTh Bpk. Roy Salaki Pnt. Julius Mandagi Pnt. Marcelino Palit, SH Pnt. Ny. Mary Sondakh-Piri Ibu Moudy Parengkuan

Bidang Acara & Ibadah:

Pdt. Treis Liow-Mambo, STh (Koord.)
Pdt. Merdy Girot, STh
Bpk. Ishak Ronny Tomasouw
Bpk. Mercy Mandagi
Bpk. George Liman
Ny. Novi Suzanna Ndoen
Ny. Karema Harefa-Rumambi
Pnt. Joan Henuhili-Raturandang
Ny. Terry R. Sumual
Sdri. Fitri Manalu

Bidang Publikasi/Dokumentasi:

Ny. Vonny Sumampow-Pangemanan (Koord.)
Bpk. Max Tuerah

Bidang Dana:

Pnt. Ny. Doortje Mochtar-Lewu (Koord.)
Ny. Evie Thanos
Ny. Ema Widarto
Ny. Ellen Ngantung
Ny. Linda Wullur-Gonggalang
Pnt. Ny. Meike Rorimpandey
Ny. Helly Kusno-Wenas
Ibu Jossy Mekel-Kambey
Ibu Jeane Tumilaar
Ny. Cathrien Worang
Ny. Mira Harefa Amarhoseya
Ny. Pinky Tatonos
Ny. Leony Lolong
Ny. Otje Ticoalu-Tasiam
Ny. Ansye Eman
Ny. Wulan Sanggelorang-Palenkahu
Ny. Kelly Mailoor

Bidang Akomodasi:

Dkn. Merialdus Lalopua (Koor)
Pnt. Ny. Betty Kumontoy
Pnt. Barnabas Rame
Pnt. Eli Manuhutu

Bidang Transportasi:

Pnt. Boyke Mangundap (Koor)
Pnt. Awonatu F. Pangau
Bpk. Piet Rumagit
Bpk. Willem Ticoalu

Bidang Konsumsi:

Ny. Erny Rawung (Koor)
Ny. Truitje Rotty-Ngantung
Pnt. Ny. Pauline Nurman-Rotinsulu
Ny. Mona Lukiman-Singal

Penerima Tamu:

Semua Anggota Bidang Dana

Lampiran 6:

TATA IBADAH PEMBUKAAN KGM VIII Cipayung, 17 November 2008

Persiapan Diri

- Saat Teduh & Doa Pribadi
- Doa Konsistori

P e m b u k a a n

Pujian “KHARISMA REJOICE CHOIR”

MENGHADAP TUHAN

Panggilan Beribadah

P1 Terpujilah Tuhan yang Yang Maha Kasih karena kasih setia dan perlindungan-Nya bagi kita senantiasa. Kita telah berada di tempat ini untuk bersama-sama masuk dalam proses pergumulan terhadap kehidupan bergereja di tengah-tengah bangsa dan Negara Indonesia.

Marilah kita masuk dalam hadirat Tuhan Yesus selaku Kepala Gereja untuk menyerahkan Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tahun 2008 ini ke dalam pimpinan dan penyertaan-Nya.

Dalam pujian bagi-Nya, bersama kita berdiri menghadap Tuhan, yang kehadiran-Nya dinyatakan melalui Firman Tuhan yang akan diberitakan.

□ “Bila Kulihat Bintang Gemerlapan” (KJ 64 : 1 & 2)

Semua

Bila kulihat bintang gemerlapan, dan bunyi guruh riuh kudengar,
Ya Tuhan ku tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar

Maka jiwakupun memuji-Mu: “Sungguh besar Kau, Allahku!”

Maka jiwakupun memuji-Mu: “Sungguh besar Kau, Allahku!”

Perempuan

Ya Tuhanku, apabila kurenungkan pemberian-Mu dalam Penebus,
‘ku tertegun: bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus.

Semua

Maka jiwakupun memuji-Mu: “Sungguh besar Kau, Allahku!”

Laki - Laki

Pabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar,
Kar’na terkabullah yang kurindukan: melihat Dikau, Tuhanku akbar.

Semua :

Maka jiwakupun memuji-Mu: “Sungguh besar Kau, Allahku!”

Votum

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.

Jemaat 1 . □ 1 . □
A - min

Nas Pembimbing

PF Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. (2 Tim. 2 : 21)

Salam

PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. (I Timotius 1: 2)

Jemaat 1 . 7 □ 1 . □
A - - - - min

□ “INGINKAH KAU IKUT TUHAN” (KJ 372 : 1, 2)

1. Inginkan kau ikut Tuhan? Pikul Salib!
Jangan bimbang, jangan sungkan: ikut Tabib!
Refr. Pikullah salibmu saja, ikut terus;
Lihatlah mahkota Raja agung kudus!
2. Harulah kausangkal diri: pikul salib!
Di godaan dunia ini ikut Tabib! Refr. :

(duduk)

Doa Pengakuan Dosa

P2 Marilah saudara-saudara sekalian dengan sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa:

Ya Bapa yang Kudus, penuh pengasihannya, kami mengaku kepada-Mu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik, **saat hening sejenak**

Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepada-Mu.

Jemaat TUHAN KASIHANILAH KAMI

P2 Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan keputaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepada-Mu.

Jemaat KRISTUS KASIHANILAH KAMI

P2 Segala kekurangan kami sebagai Gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami, kami mengaku kepada-Mu.

Jemaat TUHAN KASIHANILAH KAMI!

P2 Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, bebaskanlah kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juruselamat dunia.

Jemaat AMIN!

Berita Pengampunan

PF Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiu. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau. (Yes. 44 : 22)

- **“Dalam Lautan yang Kelam” NKB 19 : 1 & 2**
Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku.
Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku,
Tapi Tuhan berkenan dengan seruanku,

Laluku dis'lamatkan Mukhalisku.

Refr. Kasih Kudus! Kasih Kudus!
Yang t'lah mengangkatku Kasih Kudus.
Kasih Kudus! Kasih Kudus!
Yang t'lah mengangkatku Kasih Kudus.

Kasih-Nya Kudus, besar, patut kubalastah;
Kar'na itu kugemar Agungkan nama-Nya.
Kuserahkan hidupku bulat kepada-Nya.
Melayani Tuhanku selamanya. **Refr.**

Amanat Hidup Baru

PF Saudara-saudara, marilah kita **berdiri** dan bersama mendengarkan Amanat Hidup Baru, sebagaimana tertulis dalam **Yohanes 15 : 9 – 17 :**

.....

Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan diseluruh dunia.

□ **“KEMULIAAN BAGI BAPA” KJ. 48**

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus
dan kekal selama-lamanya. Amin.

(duduk)

Pujian PS PK. LANJUT USIA MUPEL GPIB Jakarta Selatan

PELAYANAN FIRMAN

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus

PF Kita berdoa: Ya Allah diamkanlah semua suara dalam hati kami, agar kami dapat mendengar suaraMu. Ajarlah kami juga agar dapat melaksanakan kebenaran Firman-Mu di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Pembacaan Alkitab

P2 Pembacaan Alkitab dalam Ibadah ini adalah dari :

.....
Demikianlah Firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya.

Jemaat Haleluya, Haleluya, Haleluya!

K H O T B A H

□ “Jika Padaku Ditanyakan” (KJ 432 : 1)

Jika padaku ditanyakan apa akan kub’ritakan
pada dunia yang penuh penderitaan,
‘kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin,
pembebasan bagi orang yang ditawan,
yang buta dapat penglihatan,
yang tertindas dibebaskan;
sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba.
K’rajaan Allah penuh kurnia,
itu berita bagi isi dunia.

Pengakuan Iman

PF Jemaat Tuhan, marilah kita **berdiri** dan mengucapkan dan mengikrarkan Pengakuan Iman dengan hati dan mulut kita dan masing-masing berkata :
AKU PERCAYA....dst.

(duduk)

Doa Syafaat

Pujian PS PK. LANJUT USIA MUPEL GPIB Jakarta Selatan

PENGUCAPAN SYUKUR

Ajakan Persembahan

Dkn Marilah kita menyatakan syukur kepada TUHAN di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan Gereja dengan mengingat Nas Alkitab: “Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan

hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.” (Ulangan 16 : 16^b-17)

□ “Kudengar Berkatmu Turun” (KJ 235 : 1-3)

Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat,
menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat.
Aku pun, aku pun, ya, berkatimu aku pun!

Mampirlah, ya Jurus’lamat, Kau dambaan hatiku;
aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu.
Aku pun, aku pun, Yesus panggil aku pun!

Doa Persembahan

Diaken Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini?

Jemaat Sebab daripada-Mulah segala-galanya dan dari tanganMu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin.

Pujian “KHARISMA REJOICE CHOIR”

P E N G U T U S A N

Amanat Pengutusan

PF Marilah kita pulang untuk menjadi saksi bagi-Nya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah Firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat, bangsa dan negara.

□ “Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan” (NKB 100 : 1 & 2)

Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu?
Mintalah kepada Bapamu yang janji-Nya teguh menyertai langkahmu.

Ref : Roh Kudus terus meluap di hatimu,

kar'na Tuhan berpesan: “Bawalah bejanamu.
“Roh Kudus terus meluap di hatimu,
pun dengan kuasa-Nya.

Berkat

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya:
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera!

Jemaat A – min, A--- min , A-----min. (**KJ 478^a**)

Saat Teduh

Lampiran 7:

TATA IBADAH PENUTUPAN
Cipayung, 21 November 2008

Persiapan Diri

- Saat Teduh & Doa Pribadi
- Doa Konsistori

P e m b u k a a n

Pujian PADUAN SUARA/SOLIST/VOCALGROUP

MENGHADAP TUHAN

Panggilan Beribadah

P1 Konferensi Gereja dan Masyarakat PGI 2008 telah usai. Segala pergumulan serta harapan telah disampaikan dalam kerangka menyongsong masa depan Gereja di tengah-tengah bangsa dan negara. Dan kita semua terpanggil untuk terus menerus menyuarakan suara kenabian bagi bangsa Indonesia agar nyatalah bahwa kehadiran Gereja adalah untuk mewujudkan damai sejahtera bersama seluruh masyarakat. Bagaimanapun juga seluruh hasil KGM ini mencerminkan komitmen iman kita dalam berperan serta untuk memperjuangkan keadilan dan pembaruan untuk kebaikan bangsa Indonesia.

Karena itu dengan segala kerendahan hati kita datang menghadap Allah Bapa untuk memohon berkat-Nya, hikmat serta kekuatan-Nya atas karya yang sudah dihasilkan dalam KGM ini. Tuhan akan memberi kemampuan bagi kita untuk mengerjakan apa yang telah dipercayakannya bagi kita.

Jemaat bersama kita **berdiri** menghadap Tuhan, yang hadir dalam persekutuan kita ini.

□ **“TERPUJILAH ALLAH” NKB 3 : 1 & 2**

1. *Terpujilah Allah hikmat-Nya besar; begitu kasih-Nya 'tuk dunia cemar. Sehingga dib'rilah Putra-Nya Kudus mengangkat manusia serta menebus.*

Refr. *Pujilah, pujilah! Buatlah dunia - bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, b'ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya.*

2. *Dan darah Anak-Nyalah yang menebus mereka yang yakin 'kan janji kudus; dosanya betapapun juga keji, dibapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Refr.*

Votum

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.

Jem 1 . □ 1 . □
A - min

Nas Pembimbing

PF Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. (2 Kor. 1:12)

Salam

PF Kasih karunia kepadamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus.

Jemaat Dalam Roh Kita Bersatu

□ **“KIDUNG YANG MERDU DI HATIKU”**
NKB. 164 : 1 & 4 do= 3 ketuk

1. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya “Jangan takut, 'Ku bersamamu dalam kancah dunia”.
Refr. Yesus, nama Yesus indah dan merdu
Memberikan kidung yang mengisi hidupku
4. Bila 'ku dirundung kemelut, percobaan yang berat hatiku tak takut dan kecut kar'na Tuhanku dekat. Refr.
(duduk)

Doa Pengakuan Dosa

P2 Marilah saudara-saudara sekalian dengan sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa:

Bapa yang Pengasih, di hadapan kekudusan-Mu kami hanya debu. Semua kebanggaan kami seperti daun kering yang ditiup angin. Kami sibuk dengan diri kami dan mengabaikan sesama. Kami bahagia ketika kami melukai sesama dengan perkataan. Kami membungkus kejahatan dengan dalih iman. Sementara Engkau tahu dan kami tidak mau tahu.

Jemaat (menyanyi KJ. 467)

Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku; dan kehendak 'ku jadi panduku . ampunilah.

P2 Kami bicara tentang kasih sambil berpaling diri ketika orang berkeluh. Kami bicara rejeki tapi tidak mau berjerih. Kami bicara tentang kesetiaan sambil menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring. Sementara kami mengira bahwa kami berharga, namun sesama tahu bahwa perilaku adalah khotbah yang tidak terbantah.

Jemaat (menyanyi KJ. 467)

Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah; Pikiran dan tuturku bercela: ampunilah.

P2 Patahkan kami bila kami dirasuk roh keangkuhan. Cegat kami kalau kami berada di jalan iri dan dengki. Hancurkan kami kalau kami mengorbankan sesama demi keuntungan diri. Hanya jangan tinggalkan kami ya Bapa, Pengasih. Janganlah murka-Mu terus menyala atas kami. Kalau kami patah, biarlah kami patah dalam tangan-Mu.

Kalau kami retak, biarlah kami retak dalam gengaman-Mu. Sebab lebih baik kami menderita dalam tangan-Mu katimbang gagah dan pongah di tangan kuasa kegelapan dan menjadi alat kebinasaan.

Jemaat (menyanyi KJ. 467)

Dan hari ini aku bersembah serta pada-Mu Bapa berserah Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin – amin.

Berita Pengampunan

PF Beginilah firman Tuhan :
 Sekalipun dosamu seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhanlah yang menebus hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhanlah yang memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung rajawali.
 Berdasarkan kebenaran Firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.

□ **“KAR’NA KASIHNYA PADA KU” KJ 178 do=a 6 ketuk**

Kar’na kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia
 Ia t’lah memb’ri hidupMya gantiku yang bercela.
 Refr.: O betapa mulia dan ajaib kuasaNya
 Kasih Jurus’lamat dunia menebus manusia.

Amanat Hidup Baru

PF Saudara-saudara, marilah kita **berdiri** dan bersama mendengarkan Amanat Hidup Baru, sebagaimana tertulis dalam **Galatia 5 : 13 – 14 :**

.....

Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan diseluruh dunia.

□ **“KEMULIAAN BAGI BAPA” KJ. 48**

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin.

(duduk)

Pujian PS / VOCAL GROUP / SOLIST

PELAYANAN FIRMAN

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus

PF Kita berdoa: Ya Allah, diamkanlah semua suara dalam hati kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu. Ajarlah kami juga agar dapat melaksanakan kebenaran Firman-Mu di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Pembacaan Alkitab

P2 Pembacaan Alkitab dalam Ibadah ini adalah dari :
 Demikianlah Firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus.
 Haleluya.

Jemaat Haleluya, Haleluya, Haleluya!

K H O T B A H

□ **“DATANGLAH, YA SUMBER RAHMAT”**

KJ 240 A : 1 do = es 3 ketuk

Datanglah, ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku
 Menyanyikan Kasih S’lamat yang tak kunjung berhenti.
 Ajar aku madah indah, gita balai sorga-Mu.
 Aku puji gunung kokoh, gunung pengasih-Mu.

Pengakuan Iman

PF Jemaat Tuhan, marilah kita **berdiri** dan mengucapkan dan mengikrarkan Pengakuan Iman dengan hati dan mulut kita dan masing-masing berkata :
AKU PERCAYA....dst.

(duduk)

Doa Syafaat

Pujian PS / VOCAL GROUP / SOLIST

PENGUCAPAN SYUKUR

Ajakan Persembahan

Dkn Marilah kita menyatakan syukur kepada TUHAN di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan Gereja dengan mengingat Nas Alkitab:

“Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.” (Ulangan 16:16^b-17)

♪ “**Di Jalan Hidup yang Lebar, Sempit**“ (KMM 97 : 1, 2)

Di jalan hidup yang lebar, sempit orang sedih mengerang
Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang
Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu
Buatlah aku saluran berkat, bagi siapa yang risau penat.
Seperti Tuhan memb’ri padamu dan mengasihi dikau
b’ri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau.

Refr.

Doa Persembahan

Dkn Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini?

Jemaat SEBAB DARIPADAMULAH SEGALA-GALANYA DAN DARI TANGANMU SENDIRILAH PERSEMBAHAN YANG KAMI BERIKAN KEPADAMU. AMIN.

Pujian PS / VOCAL GROUP / SOLIST

P E N G U T U S A N

Amanat Pengutusan

PF Marilah kita pulang untuk menjadi saksi bagi-Nya di tempat kita berada. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah Firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat, bangsa dan negara.

□ “**TIAP LANGKAHKU**“ (NKB. 188 : 1)

Tiap langkahku di atur oleh Tuhan
dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Di tengah badai dunia menakutkan

hatiku tetap tenang teduh.
Tiap langkahku ‘ku tahu yang Tuhan pimpin
ke tempat tinggi ku dihantarNya,
hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa sorga yang Bapa

Berkat

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya:
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera!

Jem A – min, A--- min , A-----min. (KJ 478a)

Saat Teduh

Lampiran 8:

MENJADI GEREJA BAGI ORANG LAIN DI KANCAH KRISIS GLOBAL

Catatan reflektif menyambut KGM VIII 2008

Weinata Sairin³⁶

Tutur Pembuka

Pada tanggal 17-21 November 2008 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyelenggarakan Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM) VIII, di Cipayung-Jawa Barat. Dengan pelaksanaan KGM VIII ini maka selama rentang waktu 1962-2008 konferensi semacam ini telah 8 kali dilaksanakan oleh DGI/GI.

Pertama, **Konsultasi Gereja dan Masyarakat**, tanggal 14-18 November 1962 di Sukabumi dengan Pokok Bahasan Utama “Pelayanan Kristen dan Revolusi”. Kedua, **Konferensi Nasional Gereja dan Masyarakat**, tanggal 19-29 Juni 1967 di Salatiga dengan Tema “Panggilan Kristen dalam Pembaharuan Masyarakat”. Ketiga, **Konferensi Gereja dan Masyarakat**, tanggal 15-21 Maret 1976 di Klender, Jakarta dengan Tema “Melihat Tanda-tanda Zaman” dan perhatian pokok “Pengamalan Pancasila dalam Membangun Masa Depan”. Keempat, **Konferensi Nasional Gereja, Masyarakat dan Negara**, tanggal 20-25 Agustus 1984, di Dhyana Pura - Denpasar, dengan Tema “Harapan dan Keprihatinan Bangsa dan Gereja memasuki akhir abad ke-20” dan Sub-Tema “Panggilan Kita dalam Pembangunan sebagai Pengamalan Pancasila”, Kelima, **Konferensi Nasional Gereja dan Masyarakat**, tanggal 18-20 April 1989, di Wisma Kinasih, Caringin-Bogor, dengan Tema “Roh Kudus Memberi Kuasa Menjadi Saksi” dan Sub-Tema “Mempersiapkan Diri Memasuki Dasawarsa Terakhir Abad ke-20 dan Milenium ke-3”. Keenam, **Konferensi Gereja dan Masyarakat**, tanggal 4-8 Agustus 1993 di Wisma Kinasih, dengan Tema “Ya Roh Kudus Baharuilah dan

³⁶ Wakil Sekum PGI 1989 – 2000 dan 2004 – 2009.

Persatukanlah Kami” dan Sub-Tema “Membangun Masyarakat Pancasila yang Bersatu, Berdaulat dan Beradab”, Ketujuh, Konferensi Gereja dan Masyarakat di Wisma Kinasih tanggal 29 September - 3 Oktober 1998 dengan Tema “Carilah Tuhan maka kamu akan hidup” (Amos 5:6^a) dan Sub-Tema: “Panggilan kita untuk bersama-sama mengatasi krisis masyarakat dan bangsa”.

Concern terhadap Pergumulan Bangsa

Gereja yang tengah diutus Tuhan di tengah dunia, memang tidak bisa tidak harus menjadi Gereja yang *concern* dan peduli terhadap pergumulan dunia sekitarnya, terhadap pergumulan masyarakat dan bangsanya. Tanpa memiliki sikap seperti itu, Gereja tak lebih dari sekadar persekutuan yang eksklusif, introvert, yang hanya menjadi pemantau dan pengamat di tengah sejarah. Secara teologis dipahami bahwa Gereja disuruh masuk ke dalam dunia, menghidupi dunia, tanpa harus luluh serta menjadi serupa dengan dunia. Dunia yang terus berubah harus dengan cermat diamati oleh Gereja; tapi tugas suruhan Gereja tidak pernah berubah, walaupun dunia dan zaman berubah. Tugas itu adalah memberitakan Injil kepada segala makhluk, menampakkan keesaan seperti keesaan Tubuh Kristus serta menjalankan pelayanan dalam kasih dan menegakkan keadilan. Berangkat dari pemahaman teologis seperti ini, maka DGI/PGI yang didirikan pada bulan Mei 1950 memiliki *concern* yang amat besar terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Secara tekstual dan formal *concern* itu tercermin melalui tema dan sub-tema Sidang Raya DGI/PGI yang kemudian dituangkan dalam berbagai program di lingkup PGI, PGI Wilayah, Persekutuan Oikoumene dan gereja-gereja.

Simon Marantika, Sekum DGI 1954-1967, dalam bukunya *Ekumene dalam Pembangunan Bangsa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1983) mencatat dengan amat jelas bagaimana perhatian DGI terhadap masalah-masalah kemasyarakatan yang hadir dalam perjalanan sejarahnya. Diungkapkan dalam buku itu, misalnya, tentang seruan DGI kepada gereja-gereja anggotanya untuk menaikkan doa syafaat berkenaan dengan Pemilu 1955, Konferensi Asia Afrika 1955, demikian juga penerbitan Surat Edaran DGI dalam kaitan dengan masalah “Konfrontasi dengan Malaysia” tahun 1964, perjuangan

pengembalian Irian Barat tahun 1964, Peristiwa G-30-S dan lain-lain. Itu semua menunjukkan bahwa DGI/PGI amat memperhatikan masalah sosial-politik-kemasyarakatan yang terjadi di sekitar dirinya sekaligus menunjukkan *concern* serta kepekaan DGI/PGI terhadap perkembangan aktual yang hadir di tengah zaman. Dalam kaitan itu menarik untuk disimak kembali resolusi tentang korupsi yang dihasilkan Sidang Lengkap V DGI (istilah Sidang Lengkap kemudian diubah menjadi Sidang Raya) tanggal 3-14 Mei 1964 di Jakarta, sebagai mana dikutip Marantika dalam bukunya itu. Sidang menganjurkan kepada umat Kristen di Indonesia supaya memelihara cara hidup yang sederhana dalam keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini, dan menyerukan kepada pemerintah Republik Indonesia, kepada seluruh masyarakat dan badan-badan yang berwenang agar mempergiat perlawanan dan peperangan melawan korupsi dan di mana perlu memberikan hukuman yang sewajarnya bagi mereka yang terbukti telah menjalankan korupsi (Marantika, h. 114). Didasarkan pada komitmen yang kukuh terhadap perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, PGI senantiasa menyampaikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah serta lembaga legislatif, misalnya dalam rangka Pemilihan Umum, penyusunan GBHN, pembahasan berbagai RUU, serta dalam menanggapi berbagai isu nasional bahkan internasional.

Isu Sentral KGM

Concern PGI terhadap pergumulan yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia tercermin melalui KGM yang dilaksanakan DGI/PGI sejak tahun 1962. Hasil-hasil KGM itu telah memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berarti bagi gereja-gereja di tengah pelayanan yang mereka jalankan, bahkan bagi bangsa dan negara yang sedang melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi 45. KGM tahun 1962 yang dilaksanakan di tengah-tengah slogan revolusi yang menggebu-gebu waktu itu telah menghasilkan pegangan yang menyatakan bahwa “Pelayanan Kristen tidak bersumber pada revolusi, melainkan berdasarkan kepada pelayanan Yesus Kristus sendiri, dan ditujukan kepada kebutuhan manusia sebagai makhluk jasmaniah dan rohaniah sebagai suatu

totalitas, baik secara perseorangan maupun secara kolektif” (Dr. SAE Nababan, *Panggilan Kristen dalam Pembaharuan Masyarakat*. Jakarta: BPK, 1968, h. 3). Pada saat itu terminologi **revolusi** memang sedang *ngetrend* dan menjadi slogan utama di mana-mana.

Konferensi Nasional Gereja dan Masyarakat tahun 1967 dilaksanakan sesudah tragedi nasional yang sangat memilukan bangsa, yaitu Peristiwa G-30-S pada akhir September 1965. Jenderal Soeharto selaku Pejabat Presiden dalam amanat tertulis pada pembukaan KGM 19 Juni 1967 mengharapkan agar konferensi ini dapat menghasilkan sumbangan pikiran dan program-program kerja yang konkret, yang bermanfaat bagi kemajuan gereja dan umat Kristen di Indonesia khususnya, serta seluruh rakyat, bangsa dan negara Indonesia pada umumnya. Dalam kesempatan itu ia juga menegaskan bahwa “Pancasila yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa yang menghendaki bangsa Indonesia ber-Tuhan, yang menghendaki setiap warga negara bebas melakukan ibadah agama menurut keyakinan masing-masing; berarti dan mengharuskan kita kita melakukan teloransi agama; sebab agama bertolak dari keyakinan, agama tidak dapat dipaksakan” (SAE Nababan, h. 5-6) KGM 1967 yang berlangsung di kompleks Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dalam pesannya antara lain menyatakan pentingnya peranan agama dalam proses modernisasi yang dihadapi Indonesia. Agama-agama dapat memberikan pegangan bagi penganut-penganutnya dengan mengembangkan pemikiran baru bertolak dari kebenaran hakiki yang menjadi dasar bagi agama-agama masing-masing. Percakapan dan kerjasama di antara golongan agama di Indonesia dalam sikap hormat-menghormati terhadap integritas keyakinan masing-masing akan sangat bermanfaat diwujudkan di masa datang.

Hasil yang monumental dari KGM III tahun 1976 di Wisma Samadi Klender Jakarta Timur adalah pemahaman bahwa **pembangunan merupakan pengalaman Pancasila**. Berangkat dari pemahaman yang sangat penting ini maka pelaksanaan pembangunan harus dijiwai oleh pengalaman Pancasila sehingga tujuan pembangunan, yaitu masyarakat adil dan makmur bisa terwujud. Itu juga berarti bahwa cara pelaksanaan pembangunan harus dijiwai semua sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh agar dalam mencapai tujuan pembangunan itu, cara-caranya tetap didasari serta

diwarnai oleh ke-5 sila tersebut. Rumusan **Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila** yang dihasilkan KGM tahun 1976 ini kemudian menjadi rumus baku dalam GBHN 1983, dan GBHN-GBHN berikutnya.

KGM 1984 yang dilangsungkan tanggal 20-25 Agustus 1984 di Denpasar - Bali memiliki arti khusus dihubungkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sedang terjadi di tengah sejarah. Oleh karena itu dalam pesannya, KGM 1984 ini menegaskan perlunya dasar-dasar etika dan moral yang kuat serta pembentukan dan pembinaan spiritual selain pembinaan di bidang iptek dan ketrampilan, dalam rangka penguasaan dan cita-cita perjuangan bangsa. Inti pesan KGM 1984 menjadi sangat relevan untuk dicermati kembali ketika bangsa kita ingin memberi peran yang lebih dominan bagi iptek, tanpa harus menjadikan iptek itu di atas segala-segalanya sehingga bebas dari kontrol agama moral dan etik.

KGM 1989 di Kinasih - Bogor telah merumuskan pokok-pokok pikiran Pembangunan Jangka Panjang II yang kemudian menjadi materi dasar penyusunan Pokok-pokok Pikiran PGI bagi GBHN 1993-1998 yang telah disampaikan kepada Pemimpin MPR RI.

Gereja yang Siuman

KGM VI di Kinasih - Bogor 1993 dilaksanakan dalam terang Tema **“Ya Roh Kudus Baharuilah dan Persatukanlah Kami”** dan Sub-Tema **“Membangun masyarakat Pancasila yang bersatu, adil berdaulat dan beradab.”**

Melalui tema dan sub-tema ini telah dibahas pergumulan masyarakat, bangsa dan negara dalam memasuki PJP II melalui ibadah, pemahaman Alkitab/refleksi teologis serta diskusi panel. Bertolak dari tema dan sub-tema itu gereja-gereja diingatkan untuk senantiasa siuman dan waspada di tengah zaman yang senantiasa berubah, sekaligus juga mendorong gereja-gereja agar sedia dikuasai Roh Kudus demi terwujudnya persatuan dan keesaan. Gereja harus menjadi pionir dalam mewujudkan pembaruan dan persatuan sehingga gereja bersama seluruh lapisan masyarakat dimampukan meneruskan perjuangan membangun masyarakat Pancasila yang bersatu, adil, berdaulat, dan beradab.

Patut digarisbawahi, analisis yang disampaikan Menteri Agama dr. Tarmizi Taher dalam pada pidato sambutan KGM VI di Kinasih. Dengan merujuk pada pandangan para ahli, Menteri Agama menyatakan bahwa krisis nilai yang dialami oleh pribadi dan kelompok dalam masyarakat modern disebabkan oleh 4 kausa fundamental, yaitu revolusi perubahan, kerancuan pandangan tentang etik dan moral, tidak seutuhnya wujud pandangan terhadap manusia, dan turunnya peran lembaga agama dan budaya. Konflik dan krisis nilai sebagai dampak modernisasi membawa pribadi dan kelompok masyarakat berbuat yang asosial, bahkan ajaran sesat yang merugikan umat, masyarakat dan bangsa, dapat saja lahir akibat krisis dan konflik nilai itu. Sebab itu menurut Menteri, nilai agama harus direaktualisasi dalam menghadapi perubahan sehingga agama bisa menjadi pegangan bagi umat yang tengah menghadapi banjirnya perubahan.

KGM VII yang bertema **“Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup”** (Amos 5:6^a) dan Sub-Tema **“Panggilan Kita untuk Bersama-sama Mengatasi Krisis Masyarakat dan bangsa”** mengkaji isu-isu makro yang dihadapi Gereja dan Masyarakat di penghujung abad XX, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang tengah diterpa badai krisis. Pendalaman pembahasan dilakukan dalam 6 seksi: Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Pendidikan, Kebudayaan dan Agama, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politik, Ideologi dan Umum. Kajian isu-isu tersebut diperkaya oleh pemikiran sejumlah pakar, a.l.: Marzuki Darusman, Payaman Simanjuntak, H.A.R. Tilaar, Fadjaul Falaakh, Dorothy Marx, Theo Kobong, dan Eka Darmaputera. KGM VII, yang diselenggarakan di tengah-tengah suasana bangsa yang sedang terpuruk di bidang ekonomi dan moneter serta konflik antar kepentingan yang amat membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong KGM VII merumuskan-ulang visi dan strategi Gereja yang baru, bahkan memberi kontribusi yang konkret bagi perjalanan kehidupan bangsa memasuki gerbang milenium ketiga. Pengalaman-pengalaman empirik yang dialami oleh gereja-gereja dan masyarakat selama kurun waktu 30 tahun terakhir dan telah memposisikan gereja dan rakyat sebagai legitimator kekuasaan, membuat rakyat jelata mengalami azab dan sengsara di sepanjang sejarahnya. Untuk membawa keluar masyarakat dan bangsa dari krisis diperlukan sikap yang arif, serta keluasan dan kejernihan

berpikir yang mempertimbangkan berbagai aspek. Dalam Pesan KGM VII ditegaskan perlunya dibangun kebudayaan dan agama agar menjadi sumber etik moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gereja dan umat kristiani diingatkan untuk melakukan pertobatan dan memohon kepada Tuhan agar hidup kita diarahkan untuk selalu mencari Tuhan.

KGM VIII dilaksanakan dengan Tema “Tuhan itu baik kepada semua orang (Mzm. 145:9)”, Sub-Tema “Bersama-sama seluruh komponen bangsa mewujudkan masyarakat majemuk Indonesia yang berkeadaban, inklusif, adil, damai, dan sejahtera”. Tema dan Sub-Tema ini didalami melalui pengkajian Bidang-bidang Gereja dan Teologi, Papua, Pendidikan, Pluralisme, Kesetaraan Jender, Sumber Daya Alam & Lingkungan, Politik dan Ideologi, Hukum dan HAM, dengan menampilkan pembicara a.l.: Prof. Dr. Roy Sembel, Prof. Dr. Hotman Siahaan, Prof. Dr. J Parapak, Dr. M. Hendriks, Prof. Dr. John FoEh, Bas Suebu SH, dan Drs. Jacob Tobing MPA. Maraknya partai-partai sebagai jawaban atas berbagai perkembangan baru di Indonesia memerlukan kajian yang mendalam dari KGM VIII. Pada satu sisi aktualisasi politik warga negara memang perlu mendapat ruang yang jelas, namun pada sisi lain keragaman wahana berpolitik dari warganegara tidak boleh memicu potensi-potensi disintegratif dalam kehidupan gereja-gereja dan masyarakat.

Hal yang amat mendesak untuk warga gereja adalah adanya satu kejelasan agar gereja-gereja sebagai institusi tidak ikut mengambil bagian dalam kegiatan politik praktis, sehingga pelayanan gereja benar-benar terjamin objektivitas dan inklusivitasnya. Dalam hal ini Seruan Bersama PGI-KWI dalam rangka Pemilu 2009 amat tegas melarang pemimpin gereja merangkap menjadi pengurus partai politik. Posisi lembaga pendidikan swasta (pendidikan berbasis keagamaan) tetap dilindungi oleh undang-undang dan bagaimana upaya mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar diberi perhatian serius oleh pemerintah dalam kerjasama dengan masyarakat. Pembahasan RUU, a.l RUU KUHP, Undang-undang keormasan, dan Perda-perda bernuansa agama, perlu mendapat perhatian, agar sebagai bangsa kita tetap konsisten bahwa negara RI benar-benar negara berdasarkan Pancasila dan bukan negara agama yang didalamnya hukum agama secara sistematis diubah menjadi hukum positif.

Catatan Penutup

Sejak awal kehadirannya di Indonesia, DGI/PGI bersama-sama gereja-gereja menunjukkan *concern* yang sangat mendalam terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Dalam menyikapi pembangunan dengan berbagai dampaknya bagi kehidupan bangsa maka PGI merumuskan ciri yaitu: positif, kreatif, kritis, realistik, dan transformatif. Dengan panca ciri itu gereja-gereja di Indonesia melibatkan diri serta mengambil bagian aktif dalam derap pembangunan bangsa; dengan tetap bertumpu pada visi teologis yang dimilikinya. Sadar bahwa nilai-nilai Pancasila harus dibebaskan dari slogan dan semboyan sehingga benar-benar memandu pembangunan bangsa pada aras praksis, maka PGI bersama gereja-gereja merumuskan pemahaman bahwa pembangunan nasional adalah pengamalan semua sila dari Pancasila. KGM VIII tak bisa tidak harus merumuskan pemikiran-pemikiran yang padat, cerdas, bernas, visioner, dan konseptual dalam rangka tanggungjawabnya kepada bangsa dan negara dan dalam kesetiaannya kepada Allah, Penentu Sejarah. Tindak lanjut dari KGM VIII adalah bagaimana mengintegrasikan hasil-hasil KGM VIII itu pada seluruh materi SR XV PGI 2009 untuk mendapat legitimasi konstitusional teologis, dan dari situ secara bersama-sama dan konsisten menjabarkan hasil-hasil KGM VIII pada tataran operasional. Tanpa hal itu maka baik KGM VIII maupun Gereja itu sendiri akan kehilangan makna profetisnya, yang justru merupakan hakikat kediriannya yang paling mendasar.

Dengan cara itu pula KGM VIII menyadarkan kita semua untuk secara konsisten mewujudkan **Gereja bagi orang lain**, dan memandu umat serta masyarakat untuk membebaskan diri dari krisis global yang kini tengah membelenggu sejarah umat manusia.

Lampiran 9:

Globalisasi Alternatif yang Mengutamakan Rakyat & Bumi *(Alternative Globalization Addressing People and Earth - AGAPE)*

Panggilan untuk mengasihi dan bersaksi

Pengantar

Kami, para wakil gereja yang berkumpul pada Sidang Raya Dewan Gereja-gereja se-Dunia (DGD) ke-9, menegaskan bahwa dunia tanpa kemiskinan bukan saja mungkin, tetapi juga selaras dengan rahmat Allah bagi dunia. Keyakinan ini berdasar pada kayanya tradisi pemikiran dan aksi sosial ekumenis, yang berpusat pada keberpihakan Allah pada kaum miskin sebagai perintah iman kami. Di dalamnya diringkas hasil proses studi global selama tujuh tahun tentang tanggapan gereja atas globalisasi ekonomi dengan kontribusi dari semua wilayah dunia dan keterlibatan sejumlah persekutuan Kristen dunia, khususnya melalui Sidang Raya Federasi Lutheran Sedunia (LWF) 2003 dan Sidang Raya Aliansi Gereja-gereja Reform Sedunia (WARC) 2004.

Proses ini mempelajari proyek globalisasi ekonomi yang dipimpin oleh ideologi kekuatan pasar tak terkekang dan yang melayani kepentingan ekonomi dan politik yang dominan. Lembaga keuangan internasional dan organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mempromosikan globalisasi ekonomi di kalangan lembaga sejenis. Para peserta dalam proses AGAPE saling berbagi keprihatinan atas meningkatnya ketidaksetaraan, konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang dan pengrusakan bumi - semuanya semakin memperparah skandal kemiskinan di belahan dunia Selatan dan terus meningkat di belahan dunia Utara. Dalam tahun-tahun belakangan ini

· Terjemahan Boni Sagi dan Nina Hutagalung, dalam Einar Sitompul dan Hetty Siregar (ed.): *Globalisasi Alternatif Mengutamakan Rakyat dan Bumi; Sebuah Dokumen Latar Belakang*, (Jakarta: PMK HKBP-Jakarta, 2008), h. 87-94.

peran kekuasaan politik dan militer yang semakin besar benar-benar naik ke permukaan. Manusia di seluruh dunia mengalami dampak dari bentuk kekuasaan imperial terhadap komunitas mereka.

Bertemu di Porto Alegre, Brasil, kampung halaman Forum Sosial Dunia (WSF), kami dikuatkan oleh pesan konstruktif dan positif dari gerakan gerakan yang berkumpul di WSF, bahwasanya alternatif-alternatif merupakan sesuatu yang mungkin. Kami menegaskan bahwa kami dapat dan harus melakukan perubahan dengan menjadi komunitas-komunitas transformatif yang mempedulikan manusia dan bumi.

Kami mengakui bahwa dunia sedang terbagi-bagi di antara kami. Karena kami telah dipanggil untuk menjadi satu di dalam Kristus, maka kami dipanggil untuk diubah oleh rahmat Allah demi kepentingan segala bentuk kehidupan di bumi, mengatasi terbagi-baginya dunia. Ditantang untuk memantau dan mentransformasi globalisasi ekonomi, kami memutuskan untuk mengambil tindakan sebagai gereja yang bahu membahu bersama rakyat dan komunitas-komunitas iman dan gerakan-gerakan.

PANGGILAN AGAPE- untuk cinta kasih dan aksi

Allah, Pencipta, berkatilah ciptaan-Mu dengan keutuhan dan berkatilah manusia dengan martabat.

Allah, Penebus dan Pembebas, yang membebaskan kami dari perbudakan dan kematian;

Allah, Roh Kudus, yang mengubah dan memberi kami kekuatan.

Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarkanlah kami bersaksi tentang kasih-Mu, hidup dan rahmat-Mu yang mengubah.

Semua : Allah, dalam rahmat-Mu, ubahlah dunia.

Kami telah bersikap tidak acuh terhadap penderitaan dan ketidakadilan. Di antara kami ada banyak yang menanggung derita akibat globalisasi ekonomi; perempuan-perempuan diperlakukan dengan keji, namun tetap memelihara kehidupan; anak-anak yang haknya diingkari, kaum muda yang hidup dalam ketidak-pastian ekonomi dan pengangguran; mereka yang bekerja dalam kondisi eksploitasi; banyak orang yang terperangkap dalam hubungan perdagangan yang tidak adil dan perbudakan utang. Para penyandang cacat dan orang yang hidup

tersisih dari masyarakat orang-orang kulit berwarna sering kali menjadi yang pertama yang terparah dihantam kemiskinan, mereka yang dikesampingkan dan diasingkan dari tanah, dan bumi – digempur, dihabisi dan dieksploitasi. Dengan diingkarinya kebutuhan pangan mereka untuk bertahan hidup, mereka kerap menjadi yang paling rapuh terhadap sakit penyakit seperti HIV/AIDS. Kami mengakui bahwa banyak dari kami lalai menanggapi hal-hal ini dalam solidaritas.

Semua : Allah, dalam rahmat-Mu, ubahlah dunia.

Kami tergoda untuk dikalahkan oleh kenyamanan dan janji-janji yang kosong ketika seharusnya kami memilih jalan pemuridan yang mahal dan perubahan. Kami dipaksa untuk menerima penindasan dan penderitaan sebagai sesuatu yang harus terjadi, pada saat kami seharusnya tetap berpegang pada pengharapan kami dan mengadvokasi keadilan dan pembebasan.

Kami mengakui bahwa banyak di antara kami telah gagal menyatakan kedudukan kami di dalam iman dan bertindak melawan ketidak-adilan ekonomi dan konsekuensi-konsekuensinya yang merusak manusia dan bumi. Kami tergoda untuk menyerah pada materialisme dan kekuasaan uang. Kami berbuat mengikuti aturan ketamakan dan menyesuaikan diri dengan kekuasaan politik dan militer ketika semestinya kami bersekutu dengan kaum miskin dan orang-orang yang tersingkirkan.

Semua : Allah dalam rahmat-Mu, ubahlah dunia.

Allah, kami memohon pengampunan-Mu.

Semua : Allah dalam rahmat-Mu, ubahlah dunia.

Allah, biarlah struktur ekonomi kami diilhami oleh aturan rumah tangga kehidupan milik-Mu, diperintah oleh cinta kasih, keadilan dan rahmat.

Jangan biarkan kami takut akan perubahan atau takut untuk mencari alternatif,

Biarlah kami mengupayakan keadilan dengan melawan struktur ekonomi yang destruktif.

Dalam pengharapan, proklamirkan tahun Yobel milik Tuhan, pembatalan utang, pembebasan para tawanan dan masa istirahat bagi tanah, biarlah kami mengupayakan ekonomi agape solidaritas.

Semua : Allah dalam rahmat-Mu, ubahlah dunia

Allah, Engkau mengutus kami,

Untuk memelihara bumi dan saling berbagi segala sesuatu yang perlu untuk hidup dalam komunitas.;

untuk melawan dan mencela segala hal yang mengingkari kehidupan, untuk mengasihi sesama dan melakukan apa yang adil, sehingga di mana pernah ada kematian, di situ akan ada kehidupan.

Kami saling menyerukan

untuk menanggapi kasih-Mu bagi setiap insan dan bumi

dalam tingkah laku kami pribadi dan dalam kesaksian dan pelayanan gereja-gereja kami;

untuk mengupayakan pemberantasan kemiskinan dan pembatalan utang tanpa syarat;

untuk memelihara tanah, air dan udara – seluruh jaring kehidupan;

untuk membangun hubungan-hubungan yang adil dan berkelanjutan dengan bumi.

Dalam dunia perburuhan, perdagangan dan keuangan, untuk mempelajari dan menggunakan kekuasaan dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, dengan mengingat semua kekuasaan harus dipertanggung-jawabkan kepada-Mu, Allah. Allah, dalam rahmat-Mu, tolonglah kami untuk menjadi alat-Mu untuk perubahan dan untuk mendengar panggilan-Mu untuk bertindak dengan berani.

Semua : Allah Pencipta, kiranya kuasa rahmat-Mu mengubah kami,

Kristus, berilah kami keberanian dan pengharapan untuk saling berbagi hidup satu sama lain dan dengan dunia,

Roh Kudus, mampukanlah kami untuk bekerja demi keadilan, demi rakyat dan bumi.

Allah, dalam rahma-Mu, ubahlah dunia. Amin.

Dalam semangat doa yang mempersatukan ini, kami menantang diri kami sendiri untuk memiliki keberanian bertindak. Panggilan AGAPE mengajak kami untuk bertindak bersama-sama bagi transformasi

ketidakadilan ekonomi dan untuk terus menerus menganalisis dan berefleksi atas tantangan globalisasi ekonomi dan hubungan antar kekayaan dan kemiskinan.

1. Pemberantasan kemiskinan

Kami mengulang komitmen kami memberantas kemiskinan dan ketidaksetaraan melalui pembangunan ekonomi solidaritas dan komunitas yang berkelanjutan. Kami membuat pemerintahan kami dan lembaga internasional bertanggung jawab mengimplementasikan komitmen mereka dalam pemberantasan kemiskinan yang berkelanjutan.

2. Perdagangan

Kami mengulang komitmen kami bekerja untuk keadilan dalam hubungan perdagangan internasional melalui analisis kritis perdagangan bebas dan negosiasi perdagangan, dan berkolaborasi secara erat dengan gerakan sosial dalam menjadikan perjanjian tersebut adil, layak dan demokratis.

3. Keuangan

Kami mengulang komitmen kami mengkampanyekan pemberian pinjaman yang bertanggung jawab; pembatalan utang tanpa syarat, serta kontrol dan regulasi pasar keuangan global. Investasi harus dialihkan kepada usaha yang menghargai keadilan sosial dan keadilan ekologis, atau kepada bank dan lembaga yang tidak terlibat dalam spekulasi dan penggelapan pajak.

4. Penggunaan lahan dan sumber daya alam yang berkelanjutan

Kami mengulang komitmen kami melibatkan diri dalam aksi pro pola yang adil dan berkelanjutan untuk pengedukan dan penggunaan sumber daya alam, dalam kesetiakawanan dengan penduduk asli yang berusaha melindungi tanah mereka, air dan komunitas mereka.

Kami mengulang komitmen kami menentang konsumsi berlebihan masyarakat makmur kearah pengendalian diri dan kesederhanaan gaya hidup.

5. Barang dan jasa publik

Kami mengulang komitmen kami bergabung dengan perjuangan global melawan privatisasi barang dan jasa publik yang dipaksakan;

dan secara aktif mempertahankan hak negara dan bangsa menentukan dan mengatur rakyatnya sendiri.

Kami mengulang komitmen kami mendukung gerakan, kelompok dan inisiatif internasional melindungi unsur vital kehidupan seperti keragaman hayati, air dan atmosfer.

6. Pertanian yang memberi kehidupan

Kami mengulang komitmen kami bekerja untuk pembaharuan agrarian dalam solidaritas dengan buruh-buruh tani tak bertanah dan para pemilik usaha tani kecil; dengan berbagai cara mengadvokasi kebebasan menentukan sendiri persoalan pangan. Menentang produksi organisme yang dimodifikasi secara genetik (GMOs) maupun liberalisasi perdagangan sebagai satu-satunya petunjuk. Kami berkomitmen memajukan praktik pertanian organik dan tetap solider dengan komunitas petani.

7. Pekerjaan yang layak, pekerjaan yang teremansipasi, dan mata pencarian rakyat

Kami berkomitmen membangun aliansi dengan gerakan sosial dan serikat pekerja yang mengadvokasi pekerjaan yang layak dan upah yang adil. Kami berkomitmen melakukan advokasi bagi para pekerja dan para buruh yang terbelunggu dan bekerja dalam kondisi kerja yang eksploitatif dan haknya untuk membentuk serikat-serikat buruh dirampas.

8. Gereja dan kekuasaan imperium

Kami mengulang komitmen kami berefleksi atas persoalan kekuasaan dan imperium dari sudut pandang alkitabiah dan teologis, mengambil pendirian iman yang tegas melawan kekuasaan hegemonis sebab segala kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.

Kami mengakui bahwa proses transformasi menuntut kami sebagai gereja membuat diri kami sendiri akuntabel terhadap korban proyek globalisasi ekonomi. Suara dan pengalaman mereka harus menentukan cara kami menganalisis dan menilai proyek, sesuai dengan Injil. Hal ini mengimplikasikan bahwa kami sebagai gereja dari wilayah yang berbeda-beda membuat kami dapat saling mempertanggungjawabkan satu sama lain, dan siapa di antara kami yang lebih dekat pada pusat kekuasaan maka harus setia pertama-tama terhadap

saudara-saudara kami yang mengalami dampak negatif ketidakadilan ekonomi global setiap hari.

Panggilan AGAPE merupakan doa permohonan kekuatan mengubah struktur ekonomi yang tidak adil. Panggilan ini memandu refleksi dan tindakan di fase selanjutnya dari perjalanan ekumenis ini. Keterlibatan kami berdasar pada temuan, usulan dan rekomendasi kepada gereja-gereja dari proses AGAPE sebagaimana diuraikan dalam dokumen latar belakang AGAPE.

(Teks ini dipresentasikan pada Sidang Raya dewan Gereja-gereja se-Dunia ke-9 di Porto Alegre, Brazil, pada 14-23 Februari 2006, dan untuk didiskusikan di dalam gereja, khususnya bagian yang berkaitan dengan aksi.)

Lampiran 10:

Suara2 'Nabi' dari Konferensi Gereja & Masyarakat PGI di Cipayung
SELAMATKAN GARUDA PANCASILA
BHINNEKA TUNGGAL IKA
Dr. Bert Adriaan Supit³⁷

Mencermati keadaan Indonesia selama 63 tahun merdeka, dengan bertemakan 'Tuhan itu baik bagi semua orang' (Mazmur 145:9^a), Tim Kerja KGM-PGI dalam Kerangka Acuannya mengawali KGM dengan mengutarakan bahwa baik Negara, Masyarakat, dan Agama-agama, termasuk Gereja di Indonesia, telah gagal membawa bangsa dan negara Indonesia ke arah cita-cita '*founding fathers*' Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, yakni kesejahteraan bagi semua Daerah dan Rakyat Indonesia. Analisa Tim Kerja KGM yang cukup tajam sedemikian tentu mengundang reaksi dan mendapat tanggapan yang seirama dari berbagai pihak penceramah dan peserta, termasuk saya dalam mencari argumentasi yang lebih mendasar, apa sebab terjadi kegagalan selama 63 tahun Indonesia merdeka.

Sebaliknya, pada saat yang hampir bersamaan, Presiden SBY di Washington sebelum menghadiri Pertemuan G20 mengutarakan dengan bangga bahwa tidak kurang dari *10 keberhasilan* sedang berlangsung di Indonesia di bawah pemerintahannya yakni : Indonesia sekarang tergolong *negara demokrasi terbesar dan terbebat ke tiga di dunia* sesudah India & AS; ekonominya adalah *yang terbesar di ASEAN*; bahwa *penduduk Islamnya terbesar didunia*; bahwa hutan tropisnya adalah *terbesar di dunia*, yang dapat menangkal proses global warming; bahwa anggaran pendidikannya sekarang *sudah 20%*; bahwa keadaan *politikanya paling stabil*; bahwa tercapai *perdamaian paling besar di Aceh*; bahwa kampanye anti teroris dan anti korupsi *paling berhasil*; dan bahwa di

³⁷ Ketua Majelis Pertimbangan Sinode Am Gereja-gereja Suluttenggo dan Ketua Presidium Majelis Adat Minahasa.

Indonesia sedang berlangsung *pengembangan yang paling pesat di antara demokrasi, Islam dan modernisasi.*

Dengan demikian timbul kontroversi yang cukup lebar antara persepsi pemimpin negara RI di satu pihak dan KGM PGI di lain pihak, yakni antara keberhasilan dan kegagalan Indonesia.

Pertama dan terutama adalah realitas kegagalan ideologi dan politik Pancasila versus ideologi dan politik Islam yang sampai sekarang tetap mengambang dan menyelimuti asumsi keberhasilan SBY dengan kecenderungan ideologi agama Islam lambat laun akan mendominasi Republik ini. Sejak 63 tahun Republik Indonesia terbentuk, pertarungan tersebut sudah mulai berlangsung ketika terjadi konfrontasi antara kedua ideologi tersebut dalam Panitia 9, kemudian dalam sidang BPUPKI, dan sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, hari pertama di mana suara delegasi Indonesia Timur akhirnya didengar dengan disetujuinya Kontrak Politik Bangsa dan Negara Indonesia yakni Pancasila dan UUD Republik Indonesia demi penyelamatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Generasi yang sedang berkuasa sekarang samasekali tidak menghiraukan sejarah terbentuknya 'bangsa' dan 'negara' Indonesia di tahun 1945 tsb. dengan falsafah ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Distorsi sejarah Gerakan 'Boedi Oetomo' di tahun 1908 pada dasarnya adalah suatu gerakan pendidikan untuk bangsa Jawa dan bukan suatu gerakan nasionalisme yang mewakili bangsa-bangsa Aceh, Batak, Minangkabau, Sunda, Minahasa, Bali, Timor, Maluku, Dayak, Papua dll. di seluruh kepulauan Indonesia. Hal ini harus diluruskan generasi Indonesia sekarang. Seperti di Minahasa pada tahun 1909, melalui organisasi 'Perserikatan Minahasa' sudah muncul benih nasionalisme bangsa Minahasa yang di tahun 1918 menuntut suatu '*zelfbestuur*' (otonomi sempurna/merdeka) dari Belanda. Dan setahun kemudian di tahun 1919, akhirnya 'Minahasa Raad' (Dewan Minahasa) terbentuk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih rakyat *pertama* di seluruh kepulauan Indonesia. Kesadaran sebagai satu bangsa Indonesia yang senasib yang bersatu dari berbagai latar belakang bangsa-bangsa di kepulauan Nusantara baru muncul di tahun 1928 oleh pemuda/i Indonesia yang disatukan di pulau Jawa oleh

dorongan mencari pendidikan dan kehidupan yang lebih baik (tanpa Bali, Dayak, Papua, Toraja dll.) yang dikenal sebagai 'Sumpah Pemuda'. Kulminasi dari 'Soempah Pemuda' 1928 adalah Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17/08/1945 yang disahkan sebagai suatu *Kontrak Politik pada tanggal 17 dan 18/08/1945 oleh PPKI. Dalam Kontrak Politik 1945 tsb. yang didasarkan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika semua golongan di Indonesia dipandang sama tinggi dan sama rendah dan tidak ada golongan yang dilindungi maupun yang melindungi golongan yang lain. Semua WNI kedudukannya sama di hadapan hukum negara. Tidak ada Hukum Islam dan Hukum Non Islam dalam Hukum Dasar Republik Indonesia. Dari aspek ideologis dan filosofis, dasar Negara RI tidak mengenal mayoritas dan minoritas secara demokratis. Dan sebenarnya hal ini sudah final sejak tgl 18 Agustus 1945.*

Namun tragedi dan ironi ideologi Bangsa dan Negara Indonesia berlanjut pada sidang Konstituante RI tahun 1959 yang menghasilkan 'deadlock' antara golongan Islam yang menuntut ideologi/negara Islam dan golongan kebangsaan yang tetap mempertahankan ideologi negara Pancasila, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan 'Dekrit' (tidak demokratis) pada tanggal 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945 namun *menyimpang* dari roh Kontrak Politik 18 Agustus 1945 yang disepakati bersama para founding fathers Republik Indonesia. Dari penyimpangan Dekrit Soekarno inilah maka golongan Islam mulai membangun ideologinya sendiri yang ingin diberlakukan juga di seluruh negara hukum Republik Indonesia. Sejak 63 tahun Indonesia merdeka pertarungan ideologis ternyata sudah menelan jutaan korban manusia, baik di pihak Islam maupun di pihak Kristen. Dan sampai sekarang sudah ada tidak kurang dari 1 PP dan 9 UU termasuk UU Pornografi yang diberlakukan di seluruh Negara Hukum Indonesia. Bahkan majalah *Gatra* sudah berani memprediksi di tahun 2006 y.l. bahwa selangkah lagi Negeri Syariah Indonesia sudah akan terwujud. Apakah keadaan Indonesia sekarang secara ideologis sudah 'deadlock' lagi, atukah umat non Islam sudah berada dalam pihak yang tidak berdaya lagi dalam mempertahankan kemurnian kesepakatan Kontrak Idiologis Politik tahun 1945?

Dari aspek Hak Asasi Manusia yang menjunjung tinggi suatu kesepakatan historis para pendiri Republik Indonesia, maka menurut KGM Cipayung pertarungan ideologis negara sekarang ini tidak etis

dan bermoral lagi, karena kehilangan roh dan dasar-dasar kesepakatan bersama yang secara historis merupakan batu penjuror bahkan batu mutiara yang sangat berharga dalam membangun suatu bangsa dan negara yang sangat plural dalam satu daerah maritim yang luas di tahun 1945. Bila keadaan sudah sedemikian parah, demi Hak-Hak Asasi Manusia maka bangsa Indonesia harus berani bertanya: apakah kontrak politik tahun 1945 sudah waktunya diakhiri saja, atau dibuat yang baru demi menyelamatkan Proklamasi RI 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika?

Masalah besar kedua yang mengakibatkan kontroversi yang lebar dan dalam selama 63 tahun Indonesia merdeka yang dicatat KGM Cipayung adalah mengenai struktur negara dan pemerintahan Indonesia, yakni apakah negara kesatuan dengan kekuasaan sentralnya yang terpusat di Jakarta dapat menjawab keberagaman tradisi dan budaya masyarakat Indonesia dari Aceh sampai ke Papua? Dalam kenyataannya selama 63 thn NKRI, Timor Timur tidak dapat bertahan lama dan lepas sebagai negara merdeka, Aceh dst. dapat ditahan dalam RI dengan status Otonomi Khusus sedangkan Papua diberikan juga otonomi khusus yang 'amburadul'; sedangkan daerah lain dihadiahi otonomi daerah yang menimbulkan banyak persoalan kontroversial atas kewenangan pusat dan daerah serta mentalitas ketergantungan dan korupsi yang massal di daerah maupun korupsi di pusat. Pembangunan yang tetap berorientasi kontinental dan mengabaikan realitas maritim dari kepulauan Nusantara yang sangat luas ternyata telah menghasilkan kesenjangan sosial dan kesenjangan spasial yang lebar selama bertahun-tahun. Dominasi pemikiran kekuasaan sentralistis di antara para elite politik 'nasionalis', birokrat, konglomerat sentralis kakap, serta kekakuan TNI AD, tetap tidak dapat merangsang mentalitas kreatif, etos kerja dan tanggung jawab daerah. Lebih parah dan celaka lagi, pada tahun 2004 dengan amendemen ke-4 UUD 1945 telah ditetapkan pasal 37 ayat 5 bahwa negara kesatuan tidak dapat diubah lagi, keputusan mana merupakan suatu keputusan yang tidak logis karena bertentangan dengan esensi penyelenggaraan suatu negara demokratis yang terbuka. Penyelenggaraan suatu negara bukanlah suatu dogma atau ideologi, namun adalah suatu sistem yang tidak dapat dibakukan. Sistem adalah sesuatu yang dapat berubah sesuai dengan keadaan tertentu. Hal ini

sangat memalukan bangsa Indonesia di mata dunia yang diwakili para pemimpinnya, karena menyangkut kepekaan intelektualitas mereka. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, amendemen perubahan pasal 1 UUD harus tetap diusahakan di kemudian hari.

Sebagai suatu alternatif perubahan sistem penyelenggaraan pemerintah dan negara Indonesia ke arah negara persatuan sejak perdebatan tentang hal ini dalam Sidang-sidang BPUPKI di tahun 1945, sudah diusulkan supaya Indonesia menganut sistem Bond Staat atau negara federal/negara persatuan yang lebih cocok untuk suatu negara yang maritim dengan masyarakat yang sangat plural dengan tradisi, budaya dan hukum adat yang bervariasi luas. Namun tokoh-tokoh federal seperti Moh. Hatta, Sam Ratulangi dan Mr. Latuharhari mengalah terhadap argumentasi Soekarno, Soepomo dan Moh. Yamin yang mempertahankan negara kesatuan, karena menurut mereka semua kekuatan SDM hanya berada di Jawa (?). Bahkan Moh. Hatta menyatakan penyesalannya di tahun 1950 bahwa ia akhirnya sebagai PM harus membubarkan RIS atas manuver-manuver pihak Soekarno (Kahin: *Rebellion to Integration*, 1999).

Namun visi demokratis Moh. Hatta tidak berhenti di tahun 1950. Karena Visi Moh Hatta yang diungkapkan di tahun 1932, yakni '*Kita akan menyusun Persatuan Indonesia dan menolak per-sate-an, untuk menjadi peletak dasar inspirasi utama gagasan Republik Indonesia yang berbentuk federal khas Indonesia Abad ke - 21*', sekarang ini mendapat gaung positif yang luas di antara para tokoh-tokoh akademisi dan intelektual nasional serta daerah luar pulau Jawa. Bahkan KGM Cipayung dalam salah satu rekomendasi untuk perubahan yang mendasar bagi Republik Indonesia mengatakan: 'Kepada seluruh elemen bangsa Indonesia [diserukan] untuk mempertimbangkan kembali konsep bernegara NKRI yang secara sistematis melalui berbagai UU sedang memberangus Kontrak Politik UUD RI yang disepakati bersama pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menghormati keberagaman Budaya dan Agama di Indonesia, dan tidak didominasi dan determinasi kekuatan golongan tertentu. Sehingga, sudah saatnya [terhadap] konsep negara yang unitarian ini diadakan transformasi secara mendasar, sehingga terdapat jaminan hukum negara untuk memberi tempat bagi berkembangnya kepelbagaian adat istiadat, budayanya

budaya, keadilan sosial yang merata, seni tradisi, dan kepercayaan yang berbeda-beda di setiap daerah di Negara Republik Indonesia’.

Masalah besar ketiga yang menyelimuti Indonesia selama bertahun-tahun adalah masalah ekonomi dan keuangan. Menurut kedua ahli ekonomi Indonesia, Dr. Sri Adiningsih dan Prof. Dr. Roy Sembel, dengan pembandingan seorang theolog Pdt. Dr. Margaretha Hendriks, dalam pemaparan mereka menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia selama ini sudah salah kaprah; a.l. bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia terlalu liberal dan sangat kapitalistis, mengikuti langgam globalisasi (pasar) yang dikuasai dosa, keserakahan dan kejahatan, sehingga mengakibatkan multi krisis dan menyimpang dari cita-cita Pancasila dan UUD yakni suatu pembangunan ekonomi demi kesejahteraan seluruh rakyat; di mana jurang antara kaya dan miskin di Indonesia bertambah lebar dan dalam setelah 63 tahun merdeka. Sebab itu, Indonesia perlu mengkaji ulang kebijakan dan strategi untuk melakukan pembangunan ekonomi yang lebih ’holistik’ dengan berpegang a.l. kepada pola berpikir ’small is beautiful’. Menyimpulkan semuanya ini secara iman kristiani, KGM menyampaikan pesan untuk melaksanakan suatu pembangunan ekonomi di Indonesia yang berpola kepada *Agape*, yakni menjadikan Cinta Kasih sebagai ethos dominannya yakni Cinta Kasih kepada Allah Pencipta, kepada sesama manusia dan kepada seluruh alam ciptaan. Jadi sistem ekonomi Indonesia yang harus dibangun bukan lagi untuk kepentingan segelintir orang yang bermodal besar saja, dengan mengancam hidup masyarakat banyak dan bumi Indonesia, tetapi sebaliknya pembangunan ekonomi harus berorientasi kepada kesejahteraan seluruh rakyat dan bumi ciptaan demi kemuliaan Allah. Itu berarti pula bahwa pola sistem perimbangan keuangan melalui APBN ke daerah-daerah dalam bentuk DAU dan DAK harus diubah dari *pola ketergantungan daerah* kepada pusat di Jakarta, yang berpotensi merusak mentalitas orang daerah menjadi ’pengemis’ dan ’koruptor massal’ dengan hanya sibuk menghabiskan APBD tanpa berorientasi kepada kebutuhan rakyat dan rasa tanggung jawab, sambil berusaha memperoleh DAU dan DAK tahun berikutnya yang lebih besar dengan segala macam praktik lobi yang menyesatkan. Sistem perimbangan keuangan yang sentralistis demikian berpotensi *membunuh*

kegiatan daerah yang menghargai etos kerja keras yang adalah warisan suci dari adat & budaya daerah-daerah yang resourcesnya berlimpah.

Dari ketiga pokok-pokok pikiran di atas maka sebagai kesimpulan akhir, Indonesia sebenarnya secara *struktur politik ideologis*, secara *bentuk/sistem kenegaraan* dan secara *struktur sosial ekonomis* sudah gagal, dan tidak dapat bertahan lama lagi dengan keadaan sekarang. Pendek kata, bumi Indonesia masih diselimuti oleh awan kelabu mental/karakter manusia Indonesia yang kehilangan semangat idealisme dan arah hidup. Hal ini tercermin dari sikap para elite pemimpin bangsa Indonesia yang kehilangan visi kenegaraan dan visi kebangsaan yang *terbuka* untuk membawa bangsa dan negara Indonesia yang lebih berorientasi kepada pembangunan seluruh daerah dan rakyat Indonesia ketimbang hanya berputar-putar saja kepada kepentingan sesaat para elite politik, birokrat, tentara, kelompok-kelompok bisnis dan partai-partai nasional saja.

Akhirnya, saya ingin angkat satu pepatah kuno sebagai peringatan di mana Indonesia dengan para elite pemimpinnya dapat bercermin untuk melakukan perubahan yang mendasar demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia: *’Budaya Falsafah Jatidiri suatu Bangsa, Ibarat Akar Utama Pohon Besar Yang memberi hidup kepada seluruh Pohon itu; Sekuat atau sebesar apapun Pohon itu, Bila Akar Utamanya membusuk, Pohon itu akan mati dan tumbang. Demikian juga suatu Bangsa, sekalipun Bangsa itu sangat modern dan kaya, Bila Bangsa itu tidak menjaga warisan Budaya Jatidirinya (Falsafah Luhur), maka Bangsa itu akan kolaps dan lenyap’.*

Semoga dasar ideologi negara, sistem pemerintahan dan sistem ekonomi Indonesia belum sampai membusuk, sehingga falsafah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika masih dapat diselamatkan!!

10 Desember 2008

Hari HAM Sedunia